



THOMAS EPPE SAFANPO, ST, M, Si **YOEL MANGGAPROU, S.Th**
BUPATI ASMAT **WAKIL BUPATI ASMAT**

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029





**BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASMAT
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2025**



- SALINAN -

BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASMAT
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan/4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asmat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2012 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ASMAT
dan
BUPATI ASMAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asmat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan daerah Kabupaten Asmat yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Asmat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Asmat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Asmat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Asmat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
10. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Asmat untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Anggaran/7

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah Asmat dan DPRK yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan dan Sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
19. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
20. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

(2) RPJMD/8

- (2) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB V PENUTUP

- (2) Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Teknis pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT

ttd

ABSALOM AMIYARAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASMAT, PROVINSI PAPUA
SELATAN: 4-6/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISMAIL, S.H.

PEMBINA

NIP. 19781209 201104 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASMAT
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Kabupaten Asmat terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Asmat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua. Hingga tahun 2025, Kabupaten Asmat telah 24 tahun menjadi Daerah Otonom, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Asmat dalam pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan adat istiadat dan potensi yang dimiliki sehingga penyelesaian permasalahan pembangunan dapat ditanggulangi secara lebih kontekstual untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asmat. Namun sampai saat ini, belum secara optimal dapat menyentuh permasalahan pembangunan secara substantif untuk mengurangi ketertinggalan dan ketimpangan pembangunan antar daerah. Untuk itu, diperlukan perencanaan guna melaksanakan langkah peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, sehingga dapat lebih terfokus pada upaya pengurangan ketimpangan (*inequity*) pembangunan dengan memperkuat aspek kemandirian orang asli Papua dalam kapasitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan berbasis kearifan lokal (*local wisdom*).

RPJMD Kabupaten Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 akan menjadi salah satu instrumen yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Asmat dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah, agar Pemerintah Kabupaten Asmat dapat eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat di lingkungan regional, nasional maupun global.

Dalam tataran teknis, Dokumen RPJMD ini selanjutnya juga dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Asmat tahun 2025-2029 ini, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASMAT NOMOR 4

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, kekuatan dan karunia-Nya sehingga RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2025 - 2029 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dokumen RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, holistik dan *top down* yang berpedoman pada dokumen RPJMN, RPJMD Provinsi Papua Selatan, RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025 – 2045 dan RIPPP Tahun 2021 – 2041.

RPJMD Kabupaten Asmat 2025-2029 juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Lingkup RPJMD Kabupaten Asmat meliputi kondisi umum daerah wilayah, capaian indikator periode RPJMD sebelumnya dan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Asmat 2025-2029 ini merupakan kerjasama tim penyusun dan masukan dari berbagai pihak dan *stakeholder* yang terlibat dalam penyusunannya. Kami mengucapkan apresiasi dan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Asmat 2025-2029.

Agats, 22 September 2025

BUPATI ASMAT,



THOMAS EPPE SAFANPO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	5
1.4. Maksud dan Tujuan... ..	9
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	11
2.1. Aspek Geografis Dan Demografi.....	11
2.1.1. Posisi dan Peran Strategi Daerah.....	11
2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam	28
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	31
2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	34
2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas.....	37
2.1.6. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	37
2.1.7. Demografi.....	38
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	50
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	50
2.2.2. Kesehatan Untuk Semua	60
2.2.3. Pendidikan Berkualitas Yang Merata.....	65
2.2.4. Perlindungan Sosial Yang Adaptif.....	68
2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	71
2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	88
2.3. Aspek Daya Saing Daerah	89
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia	89
2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.....	91
2.3.3. Tranformasi Digital.....	93
2.3.4. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	93
2.3.5. Stabilitas Ekonomi Makro.....	97
2.4. Aspek Pelayanan Umum	98
2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.....	98
2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansia	100
2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	102
2.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah	103
2.5. Evaluasi RPJMD Periode Sebelumnya	140
2.6. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal	141
2.7. Gambaran Keuangan Daerah.....	143
2.7.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	143
2.7.2. Pendapatan Asli Daerah	147
2.7.3. Pendapatan Transfer	148
2.7.4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	149
2.7.5. Kinerja Masa Lalu Belanja Daerah	150
2.7.6. Belanja Operasi	151

2.7.7.	Belanja Modal.....	152
2.7.8.	Belanja Tidak Terduga.....	152
2.7.9.	Belanja Transfer.....	153
2.7.10.	Kinerja Masa Lalu Pembiayaan Daerah	154
2.7.11.	Neraca Daerah.....	155
2.7.12.	Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan	159
2.8.	Permasalahan dan Isu Strategis.....	164
2.8.1.	Permasalahan Pokok Pembangunan.....	164
2.8.2.	Permasalahan Pembangunan Daerah Menurut Urusan.....	169
2.8.3.	Isu Strategis Daerah	190
2.8.4.	Isu Strategis Internasional	190
2.8.5.	Isu-Isu Strategi Pembangunan Asmat.....	197
2.8.6.	Kesimpulan Isu Strategis Daerah	202
2.9.	Telaah Dokumen Perencanaan terkait	204
2.9.1.	Penelaahan terhadap Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045	204
2.9.2.	Penelaahan terhadap RPJMN Periode 2025-2029	206
2.9.3.	Penelaahan Terhadap RIPP dan RAPP Dalam Kerangka Otonomi Khusus	207
2.9.4.	Penelaahan RPJPD Provinsi Papua Selatan 2025-2045 (Tahapan I Tahun 2025-2029)	213
2.9.5.	Penelaahan terhadap RPJMN Provisi Papua Selatan	215
2.9.6.	Penelaahan RPJPD Daerah Kabupaten Asmat 2025-2045	216
2.9.7.	Penelaahan RTRW Kabupaten Asmat	217
2.9.8.	Penelaahan KLHS RPJMD Kabupaten Asmat 2025-2029.....	219
BAB III	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	221
3.1.	Visi.....	221
3.2.	Misi	222
3.3.	Tujuan Dan Sasaran.....	223
3.4.	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	231
3.4.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029	231
3.4.2.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Asmat 2026-2030.....	232
3.4.3.	Arah Kebijakan Kewilayahan.....	235
3.4.4.	Program Prioritas Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029	249
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	313
4.1.	Program Perangkat Daerah	313
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Asmat 2025-2029	396
BAB V	P E N U T U P	419
5.1.	Hasil Reviu APIP Terhadap RPJMD Tahun 2025-2029	419
5.2.	Kaidah Pelaksanaan.....	419
5.3.	Pedoman Transisi.....	420
5.4.	Penutup	420

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah Kabupaten Asmat Berdasarkan Distrik (km ²), 2024	11
Tabel 2. 2	Nama dan Karakteristik Sungai di Kabupaten Asmat	16
Tabel 2. 3	Luasan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Asmat	17
Tabel 2. 4	Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Asmat	19
Tabel 2. 5	Kelas Tutupan Lahan di Kabupaten Asmat	20
Tabel 2. 6	Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Asmat	26
Tabel 2. 7	Korban Bencana Alam Kabupaten Asmat 2020-2022	27
Tabel 2. 8	Jumlah Penduduk Menurut Distrik Tahun 2019-2024	39
Tabel 2. 9	Tingkat Kepadatan Pendudukan Kab. Asmat Tahun 2020-2024	41
Tabel 2. 10	Jumlah Penduduk Kab. Asmat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2024	42
Tabel 2. 11	Gambaran Pengelompokan Penduduk Menurut Generasi	43
Tabel 2. 12	Wilayah Adat Rumpun dan Suku dalam Administrasi Distrik di Kabupaten Asmat	44
Tabel 2. 13	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Asmat Tahun 2020-2024	51
Tabel 2. 14	Gambaran Ketenagakerjaan di Kabupaten Asmat Tahun 2020-2024	58
Tabel 2. 15	IPM Kabupaten Asmat, Tahun 2021-2024	59
Tabel 2. 16	IPM Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2024	60
Tabel 2. 17	Angka Kematian Ibu, Kunjungan K1 dan K2 Kabupaten Asmat Tahun 2024 ..	62
Tabel 2. 18	Prevalensi Stunting Tahun 2023-2024 di Kabupaten Asmat	63
Tabel 2. 19	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Asmat	68
Tabel 2. 20	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Asmat, 2016-2024	68
Tabel 2. 21	Data Kemiskinan Kabupaten Asmat, 2020 –2024	69
Tabel 2. 22	Gambaran Ketimpangan Pendapatan (Menurut Bank Dunia)	71
Tabel 2. 23	Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Distrik, 2024	72
Tabel 2. 24	Perkembangan Indikator Seni dan Budaya di Kabupaten Asmat, 2020-2023 ..	74
Tabel 2. 25	Jenis Pahatan dan Ukiran di Kabupaten Asmat	75
Tabel 2. 26	Beberapa Bentuk Nilai Kearifan Lokal Suku Asmat	81
Tabel 2. 27	Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat Tahun 2019 – 2023	93
Tabel 2. 28	Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Asmat, 2016-2024	94
Tabel 2. 29	Pembangunan Jalan di Kabupaten Asmat, 2016-2024	94
Tabel 2. 30	Persentase Jalan Menurut Kondisi Jalan, 2024	95
Tabel 2. 31	Perluasan Air Bersih, 2020-2024	96
Tabel 2. 32	Capaian Indikator Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2019 – 2023	99
Tabel 2. 33	Angka Kriminalitas dan Jumlah Parkara Pidana di Kabupaten Asmat	100
Tabel 2. 34	Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Asmat Tahun 2019 – 2023	101
Tabel 2. 35	Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan dan Distrik, 2024	106
Tabel 2. 36	Jumlah Sekolah Berdasarkan Status Negeri / Swasta Menurut Tingkat Pendidikan dan Distrik, 2024	107
Tabel 2. 37	Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan Menurut Distrik, 2021- 2025	110
Tabel 2. 38	Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan Menurut Distrik, 2024	111
Tabel 2. 39	Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Menurut Distrik, 2024	112
Tabel 2. 40	Gambaran Umum Pendataan Statistik dan Persandian	114
Tabel 2. 41	Jumlah Klinik KB di Kabupaten Asmat, 2024	115
Tabel 2. 42	Perkembangan Jumlah Akseptor Aktif di Kabupaten Asmat, 2024	115

Tabel 2. 43	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penderita Cacat 2023 ...	118
Tabel 2. 44	Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Distrik	119
Tabel 2. 45	Data Komunitas Adat Terpencil (KAT) dari Dinas Sosial Kabupaten Asmat Tahun 2023	120
Tabel 2. 46	Banyaknya Panti Asuhan/Asrama, Kapasitas Asuh Menurut Distrik	121
Tabel 2. 47	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lanjut Usia (LANSIA) Menurut Distrik	122
Tabel 2. 48	Korban Penyalahgunaan Narkotik Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)	123
Tabel 2. 49	Bantuan Perumahan Untuk Masyarakat KAT yang Sudah Terlayani	123
Tabel 2. 50	Tenaga Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).....	124
Tabel 2. 51	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna, Tagana dan Kampung Siaga Bencana).....	125
Tabel 2. 52	Perkembangan Jumlah dan Anggota Koperasi, 2019-2020.....	127
Tabel 2. 53	Jumlah dan Anggota Koperasi Menurut Jenis, 2024	127
Tabel 2. 54	Luas Panen, Luas Tanam Produksi, dan Produktivitas Padi di Kabupaten Asmat, 2020-2024.....	128
Tabel 2. 55	Luas Panen, Luas Tanam, dan Produksi Tanaman Palawija di Kabupaten Asmat, 2024.....	128
Tabel 2. 56	Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Sayuran di Kabupaten Asmat Tahun 2024	129
Tabel 2. 57	Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Buah di Kabupaten Asmat.....	130
Tabel 2. 58	Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Asmat	130
Tabel 2. 59	Perkembangan Jumlah Ternak di Kabupaten Asmat, 2019- 2024	131
Tabel 2. 60	Perkembangan Jumlah Ternak Unggas di Kabupaten Asmat, 2020-2024....	131
Tabel 2. 61	Luas Kawasan Hutan Menurut Paduserasi di Kabupaten Asmat, 2021	132
Tabel 2. 62	Produksi dan Nilai Produksi Sektor Perikanan Kabupaten Asmat Tahun 2024	133
Tabel 2. 63	Perkembangan Jumlah Armada Penangkapan Ikan (Unit) Tahun 2024	133
Tabel 2. 64	Perkembangan Alat Tangkap Ikan.....	134
Tabel 2. 65	Perkembangan Pemasaran Antar Pulau Komoditi Olahan dan Ikan Beku (Ton)	134
Tabel 2. 66	Perkembangan Petani Ikan/Nelayan Di Kabupaten Asmat (Orang)	135
Tabel 2. 67	Lokasi Objek Wisata dan Jenis Wisata.....	136
Tabel 2. 68	Jumlah Pengguna Jasa Transportasi Laut dan Pengguna Jasa Transportasi Udara Tahun 2018-2024	137
Tabel 2. 69	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Asmat, 2020-2024	137
Tabel 2. 70	Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan di Kabupaten Asmat Desember 2022 – Desember 2024	139
Tabel 2. 71	Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan	140
Tabel 2. 72	Evaluasi RPJMD Periode Sebelumnya	140
Tabel 2. 73	Realisasi APBD	145
Tabel 2. 74	Neraca Daerah.....	156
Tabel 2. 75	Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas 2019—2023	159
Tabel 2. 76	Proyeksi Kerangka Pendanaan	163
Tabel 2. 77	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan.....	169
Tabel 2. 78	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan.....	169
Tabel 2. 79	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan	

	Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	170
Tabel 2. 80	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	171
Tabel 2. 81	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	171
Tabel 2. 82	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial	172
Tabel 2. 83	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja	173
Tabel 2. 84	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	173
Tabel 2. 85	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan	174
Tabel 2. 86	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup	174
Tabel 2. 87	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	175
Tabel 2. 88	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	176
Tabel 2. 89	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	176
Tabel 2. 90	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan	177
Tabel 2. 91	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika	177
Tabel 2. 92	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	178
Tabel 2. 93	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	178
Tabel 2. 94	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga	179
Tabel 2. 95	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Statistik	179
Tabel 2. 96	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Persandian.....	180
Tabel 2. 97	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan.....	181
Tabel 2. 98	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan.....	181
Tabel 2. 99	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan.....	182
Tabel 2. 100	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata	182
Tabel 2. 101	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian	183
Tabel 2. 102	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan	183
Tabel 2. 103	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian	184
Tabel 2. 104	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan	

	Daerah Sekretariat Daerah	185
Tabel 2. 105	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Sekretariat DPRD.....	185
Tabel 2. 106	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan.....	186
Tabel 2. 107	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penelitian, dan Pengembangan	186
Tabel 2. 108	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keuangan	187
Tabel 2. 109	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan	188
Tabel 2. 110	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Inspektorat Daerah	188
Tabel 2. 111	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Distrik	189
Tabel 2. 112	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Distrik	189
Tabel 2. 113	Isu Strategis	203
Tabel 2. 114	Telaah RTRW Kabupaten Asmat Tahun 2021-2041	217
Tabel 3. 1	Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029	223
Tabel 3. 2	Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Asmat 2025-2029	225
Tabel 3. 3	Penahapan Pembangunan RPJMD.....	234
Tabel 3. 4	Telaah RTRW Kabupaten Asmat Tahun 2021-2041	236
Tabel 3. 5	Integrasi Program Pasangan Kepala Daerah Terpilih dengan Astacita serta Permendagri 90 Tahun 2019	239
Tabel 3. 6	Penyelarasan Program Dan Kegiatan Prioritas RPJMD Periode 2025 – 2029	241
Tabel 3. 7	Integrasi Program Pasangan kepala Daerah Terpilih dalam RPJMD Asmat Periode 2025-2029.....	244
Tabel 3. 8	Program Prioritas Kabupaten Asmat 2025-2029	250
Tabel 3. 9	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Asmat 2025-2029.....	292
Tabel 3. 10	Sandingan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Astacita, 17 Program Prioritas Nasional	296
Tabel 4. 1	Program Perangkat Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025-2030	314
Tabel 4. 2	Indikator Makro Pembangunan.....	396
Tabel 4. 3	Indikator Kinerja Utama	396
Tabel 4. 4	Indikator Kinerja Daerah Dan Indikator Kinerja Kunci.....	398

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
Gambar 2. 1	Wilayah Administratif Kabupaten Asmat	11
Gambar 2. 2	Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Asmat	14
Gambar 2. 3	Peta Bentang Lahan Kabupaten Asmat	15
Gambar 2. 4	Peta Aliran Sungai Kabupaten Asmat.....	18
Gambar 2. 5	Kawasan Hutan Kabupaten Asmat	19
Gambar 2. 6	Penutupan Lahan Kabupaten Asmat.....	21
Gambar 2. 7	Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Asmat, 2021	22
Gambar 2. 8	Peta Indeks Daya Dukung Penyediaan Pangan Kabupaten.....	22
Gambar 2. 9	Peta Pembagian Wilayah Pembangunan Kabupaten Asmat	24
Gambar 2. 10	Indeks Risiko.....	26
Gambar 2. 11	Potensi Kebencanaan Multirisk Kabupaten Asmat Tahun 2023	28
Gambar 2. 12	Peta Pembagian Wilayah Pembangunan Kabupaten Asmat	29
Gambar 2. 13	Daya Dukung Pangan Kabupaten Asmat Tahun 2023	33
Gambar 2. 14	Daya Tampung Pemukiman di Kabupaten Asmat.....	34
Gambar 2. 15	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Asmat Tahun 2020- 2024.....	35
Gambar 2. 16	Prefalensi Ketidacupan Konsumsi Pangan diKabupaten Asmat.....	36
Gambar 2. 17	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak dan Aman Tahun 2016-2020	36
Gambar 2. 18	Indeks Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2018-2023	37
Gambar 2. 19	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Asmat Tahun 2017-2024.....	38
Gambar 2. 20	Trendline Presentase Pertumbuhan Penduduk Menurut Distrik di Kabupaten Asmat Tahun 2024	40
Gambar 2. 21	Grafik Perbandingan Perkembangan Jumlah Penduduk 2020-2024	41
Gambar 2. 22	Peta Suku dan Rumpun Suku Kab. Asmat.....	43
Gambar 2. 23	Grafik Perkembangan Cakupan Pendataan OAP dan Non-OAP di Asmat Dalam SIO Papua (Update: 18 April 2023)	46
Gambar 2. 24	Komposisi OAP di Kabupaten Asmat	46
Gambar 2. 25	Tradisi Membangun Rumah Jew.....	48
Gambar 2. 26	Model Rumah Tysem dan Rumah Pohon Korowai.....	49
Gambar 2. 27	Sektor-Sektor yang berkontribusi dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Asmat.....	53
Gambar 2. 28	Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi antara Nasional, Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Asmat	54
Gambar 2. 29	Grafik Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Asmat Tahun 2015-2024	57
Gambar 2. 30	Trendline Perkembangan AHH Kabupaten Asmat (tahun), 2020-2024	61
Gambar 2. 31	Angka Kelahiran Hidup, Kematian Ibu dan Kunjungan K1 dan K2 Kabupaten Asmat tahun 2024	62
Gambar 2. 32	Prefalensi Stunting di Kab. Asmat Tahun 2021-2024.....	65
Gambar 2. 33	Trendline Angka Melek Huruf dan Angka Buta Huruf.....	66
Gambar 2. 34	Grafik Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Asmat, Tahun 2022-2024	67
Gambar 2. 35	Gini Ratio Kabupaten Asmat dan Provinsi Papua Selatan	70
Gambar 2. 36	Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2018-2022.....	73
Gambar 2. 37	Peta Tempat penting suku Asmat.....	83
Gambar 2. 38	Piramida Penduduk Kabupaten Asmat Tahun 2024	90
Gambar 2. 39	Perbandingan antara Usia Produktif dan Non Produktif Penduduk Kabupaten	

	Asmat Tahun 2024	91
Gambar 2. 40	Kontribusi Sektor PDRB ADHB Tahun 2020-2024	92
Gambar 2. 41	Grafik Perkembangan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Asmat 2019-2024.....	97
Gambar 2. 42	Indeks Demokrasi Nasional Tahun 2020-2023	102
Gambar 2. 43	Nilai Masing-Masing Faktor/Pilar dalam Indeks Daya Saing daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021	103
Gambar 2. 44	Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS)	105
Gambar 2. 45	Rasio Penduduk yang telah Memiliki Dokumen Kependudukan Secara Lengkap, 2020-2024	114
Gambar 2. 46	Jumlah Aktif Menurut Pemakaian Alat Kontrasepsi, 2024	117
Gambar 2. 47	Persentase Cakupan KAT dan PMKS yang telah Terlayani, 2016-2021	118
Gambar 2. 48	Komposisi Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Status Kelahiran, Sensus Penduduk 2020	138
Gambar 2. 49	Contoh Evaluasi Kinerja On Time dan On Track	141
Gambar 2. 50	Trend Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2020 - 2024	144
Gambar 2. 51	Trend Proporsi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Total pendapatan daerah.....	146
Gambar 2. 52.	Trend Realisasi PAD Tahun 2020 sampai dengan 2024	147
Gambar 2. 53.	Trend Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2020 sampai dengan 2024	148
Gambar 2. 54	Trend Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah Tahun 2019 sampai dengan 2023.....	149
Gambar 2. 55	Trend Proporsi Belanja Daerah Tahun 2020 sampai dengan 2024	150
Gambar 2. 56	Trend Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 sampai dengan 2024	151
Gambar 2. 57	Trend Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 sampai dengan 2024	152
Gambar 2. 58	Trend Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 sampai dengan 2024	152
Gambar 2. 59	Trend Realisasi Belanja Transfer Tahun 2020 sampai dengan 2024.....	153
Gambar 2. 60	Trend Realisasi Pembiayaan Tahun 2020 sampai dengan 2024	154
Gambar 2. 61	Trend Proporsi Aset Tahun 2020 sd 2024.....	157
Gambar 2. 62	Trend Proporsi Kewajiban Tahun 2020 sd 2024.....	158
Gambar 2. 63	Megatren Global 2045.....	192
Gambar 2. 64	Tahapan Percepatan Pembangunan Papua.....	208
Gambar 2. 65	Visi Misi Dan Sasaran Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041.....	210
Gambar 2. 66	Kondisi Perlu Dalam Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041.....	211
Gambar 2. 67	Tahapan Pembangunan Dalam RPJPD Papua Selatan 2025-2045	215
Gambar 3. 1	Konsep RPJMD	230
Gambar 3. 2	Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD	230
Gambar 3. 3	Visi 2025-2029 “Menuju Asmat yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”	232
Gambar 3. 4	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Adat Anim Ha	235



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa pemerintah daerah yang telah memiliki kepala daerah hasil pemilihan langsung wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

Kabupaten Asmat merupakan kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Papua Selatan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan dimana pembentukan Kabupaten Asmat ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wandama di Provinsi Papua. Pemekaran Kabupaten Asmat sudah cukup lama, namun, capaian pembangunan Kabupaten Asmat belum berjalan sesuai yang diharapkan. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, menetapkan Kabupaten Asmat sebagai salah satu daerah tertinggal di Provinsi Papua. Persoalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi perekonomian daerah, kualitas sumber daya manusia, persoalan sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas serta karakteristik daerah.

Perjalanan Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Asmat kurun waktu Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dari masa Periodesasi RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045 (Tahapan I). Dasar perencanaan periode 5 tahun pertama dipengaruhi oleh kebijakan daerah maupun kebijakan nasional seperti terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Agast. Berbagai faktor tersebut berimplikasi langsung terhadap perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah Kabupaten Asmat.



1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Asmat 2025-2029 mengacu pada beberapa regulasi, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 11) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6813);
 - 12) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 - 22) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - 23) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan



- Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 - 25) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 - 26) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - 27) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 - 28) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 29) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
 - 30) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 - 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 459);
 - 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 - 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan

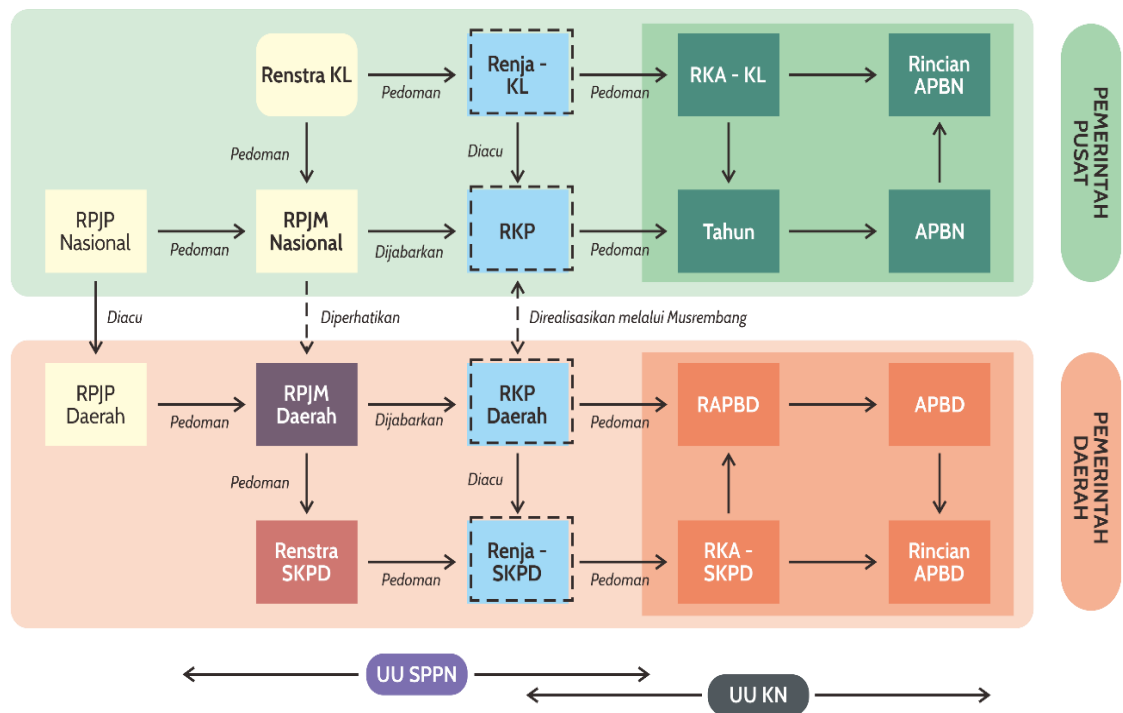


- Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
- 38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 845);
 - 39) Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Peranakan Daerah Tahun 2025-2029;
 - 40) Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025 – 2045;
 - 41) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033;
 - 42) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, yang selanjutnya mengalami perubahan kedua kali melalui Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
 - 43) Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asmat Tahun 2012-2032;
 - 44) Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Asmat Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Agats;
 - 45) Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 4);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus berpedoman pada Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMD merupakan bagian dari keseluruhan sistem perencanaan nasional yang diharapkan mampu mendukung terwujudnya koordinasi antar daerah, antar urusan pemerintahan, dan antar periode perencanaan baik dengan perencanaan di daerah lain maupun dengan perencanaan di level nasional. Selain itu, penyusunan dokumen RPJMD juga harus mampu memastikan keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Asmat 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029 sebagai landasan dalam menyusun arah kebijakan dan program pembangunan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 1. 1 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Adapun keterkaitan RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029, dengan dokumen perencanaan lain sebagai berikut:

- 1) **RPJMD Kabupaten Asmat dengan RPJPD Kabupaten Asmat; Dokumen RPJMD berpedoman pada dokumen RPJPD.**

RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 merupakan salah satu pelaksanaan Tahapn I dari perencanaan pembangunan jangka panjang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Asmat 2025-2045. Dokumen RPJPD Kabupaten Asmat telah memberikan pedoman yang sangat jelas dalam menentukan berbagai elemen perencanaan mulai dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan selama 20 tahun. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan pada bab IV tentang tinjauan RPJPD Kabupaten Asmat.

- 2) **Hubungan RPJMD Kabupaten Asmat dengan Renstra Perangkat Daerah.**

Efektivitas pembangunan daerah perlu didukung oleh keterkaitan antara dokumen perencanaan daerah yang mampu dilaksanakan secara sinergis oleh perangkat daerah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah harus berpedoman pada visi dan misi kepala daerah, kemudian dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah juga dalam rangka pencapaian indikator kinerja kepala daerah yang ditopang dengan pencapaian indikator kinerja kepala perangkat daerah serta struktur di bawahnya, terutama yang bertanggungjawab pada pencapaian indikator program dan kegiatan.



3) **Hubungan RPJMD Kabupaten Asmat dengan RPJMD Provinsi Papua Selatan.**

Dimana Dokumen RPJMD Kabupaten Asmat memperhatikan Gambaran Umum Kondisi daerah, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan pada RPJMD Provinsi Papua Selatan.

4) **Hubungan RPJMD Kabupaten Asmat dengan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten Asmat.**

Dokumen RPJMD Kabupaten Asmat 2025-2029 juga memiliki kaitan erat dengan dokumen RKPD Provinsi Papua Selatan karena RPJMD Kabupaten Asmat harus berpedoman fokus kebijakan dan tema pembangunan jangka menengah Provinsi. RKPD Provinsi terbagi ke dalam lima periode tahunan. Keterkaitan dokumen RPJMD Kabupaten Asmat dengan RKPD Kabupaten Asmat juga harus terjaga untuk menjamin sinergitas fokus dan tema kebijakan per tahun dalam perencanaan jangka menengah.

RPJMD selama lima tahun dijalankan dan dijabarkan setiap tahunnya oleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Asmat. Penjabaran RKPD berpedoman padatema pembangunan RPJMD setiap tahunnya. Selain sebagai penjabaran RPJMD, RKPD juga memadukan perencanaan partisipatif yang dibahas mulai dari tingkat kampung, distrik, hingga kabupaten. RKPD kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD dalam hal ini memiliki peran penting sebagai penghubung sinergi antara perencanaan dengan penganggaran.

5) **Hubungan RPJMD Kabupaten Asmat dengan RPJMN dan RPJPN.**

Perencanaan di tingkat daerah yang tertulis dalam dokumen RPJMD merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan perencanaan tingkat nasional yang terangkum dalam dokumen Rencana RPJMN. Perumusan RPJMD Kabupaten Asmat banyak mengacu pada RPJMN 2025-2029. Meskipun demikian, penyusunan RPJMD Kabupaten Asmat masih tetap ada pada koridor perencanaan pembangunan jangka panjang nasional yaitu RPJPN 2025-2045.

6) **Hubungan RPJMD Kabupaten Asmat dengan RTRW.**

Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang tentang Penataan Ruang mengamankan integrasi antar-dokumen, yaitu agar dokumen rencana tata ruang yang disusun selaras dengan dokumen rencana pembangunan. Dimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.



Penyusunan RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 memerhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asmat Tahun 2012-2032. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Asmat dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

7) Hubungan RPJMD Kabupaten Asmat dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Asmat.

Salah satu dokumen penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Ayat (1); “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program”, dan Ayat (2) yaitu KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi: a. Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional, dan RPJM Daerah; dan b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup.

8) Hubungan RPJMD Kabupaten Asmat dengan RDTR Kawasan Perkotaan Agats.

Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang tentang Penataan Ruang mengamantkan integrasi antar-dokumen, yaitu agar dokumen rencana tata ruang yang disusun selaras dengan dokumen rencana pembangunan. Dimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Penyusunan Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 memerhatikan Peraturan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Agats. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Asmat dengan kebijakan pengembangan Kawasan strategis Wilayah Kawasan Perkotaan Agats.



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud : Penyusunan RPJMD Kabupaten Asmat 2025-2029 merupakan langkah awal penyusunan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Asmat 5 (lima) tahun ke depan yang holistik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD Penyesuaian kerangka ekonomi daerah serta Penyesuaian beberapa kebijakan daerah yang krusial.

Tujuan : Penyusunan RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 adalah: 1). Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; 2). Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD; 3). Menetapkan pedoman untuk penyusunan RPJMD dan RKPD Kabupaten Asmat; dan 4). Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten yang berbatasan.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat 2025-2029, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antara Dokumen
- 1.4. Maksud Dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM

- 2.1. Aspek Geografi Dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.4. Aspek Pelayanan Umum
- 2.5. Evaluasi Hasil RPJMD Periode Sebelumnya
- 2.6. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal
- 2.7. Gambaran Keuangan Daerah
- 2.8. Permasalahan Dan Isu Strategis
- 2.9. Telaah Dokumen Perencanaan Terkait

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi
- 3.3. Tujuan dan Sasaran
- 3.4. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
 - a. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah



- b. Prioritas Pembangunan Kabupaten Asmat 2025-2030
- c. Arah Kebijakan Kewilayahan
- d. Program Prioritas Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH

- 4.1. Program Perangkat Daerah
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Asmat 2025-2029

BAB V PENUTUP

- 5.1 Hasil Revisi APIP terhadap RPJMD Tahun 2025-2029
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Pedoman Transisi
- 5.4 Penutup



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis Dan Demografi

2.1.1. Posisi dan Peran Strategi Daerah

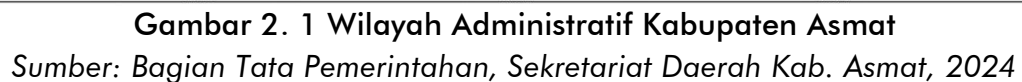
2.1.1.1. Letak Geografis, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Asmat merupakan kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Asmat beserta 13 kabupaten baru lainnya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sebelum dimekarkan, Kabupaten Asmat termasuk dalam wilayah Kabupaten Merauke. Kabupaten Asmat terletak di bagian selatan Provinsi Papua Selatan dengan ibukota kabupaten berada di Distrik Agats. Secara geografis, Kabupaten Asmat terletak pada posisi 40- 70 Lintang Selatan dan 1370 – 1400 Bujur Timur, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (137 Tahun 2017) Nomor 56 Tahun 2015 “Tentang kode dan data wilayah administrasi Pemerintahan” Kabupaten Asmat dengan luas wilayah 31.983,43 Km², kemudian pada Tahun 2022 (berdasarkan kepmendagri 100.1 1-6117) luas wilayah Asmat menjadi 25.015,306 Km².

Undang-Undang 14 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan dimana cakupan wilayahnya merupakan sebagian berasal dari Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. Sebagai akibat dari lahirnya Undang-Undang 14 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, maka terdapat beberapa pengaturan terkait peta wilayah pada pulau dan titik koordinat, yaitu :

- Pulau Binar : 050 12'30.66 LS 1370 31'00.95'BT
- Ulu Fumirpits : 050 12'43.07 LS 1370 31'18.41'BT
- Pulau Laag : 050 20'41.94 LS 1370 44'15.83'BT
- Pulau Somerwoo : 050 11'07.00 LS 1370 30'18.00'BT

Merujuk pada sumber-sumber di atas maka secara administrasi Kabupaten Asmat ditampilkan dalam peta berikut:



Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kabupaten Asmat Berdasarkan Distrik (km²), 2024

"Menuju Asmat Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera"



No	Nama Distrik	Luas Wilayah (Km ²)	Rasio Terhadap Luas %	Ibu Kota Distrik	Jumlah Kampung	Jarak Tempuh (Km)
9	Fayit	450.3	1.80	Basim	13	103,40
10	Jetsy	739.7	2.96	Warse	8	53,62
11	Joerat	949.92	3.80	Yamas	6	59,00
12	Joutu	557.43	2.23	Daikot	7	115,00
13	Kolf Brasa	1172.42	4.69	Binamzain	9	263,00
14	Kopay	737.23	2.95	Kawem	10	152,00
15	Koroway Buluanop	505.64	2.02	Mabul	8	295,00
16	Pantai Kasuari	301.94	1.21	Kamur	9	157,00
17	Pulau Tiga	3102.01	12.40	Nakai	11	132,94
18	Safan	663.93	2.65	Pirimapun	12	116,00
19	Sawa Erma	2456.44	9.82	Sauti	10	83,00
20	Siret	1355.89	5.42	Yaosakor	8	96,40
21	Sor Ep	3045.06	12.17	Beco	6	92,43
22	Suator	2001.02	8.00	Binam	14	203,00
23	Suru Suru	166.11	0.66	Suru-Suru	18	289,00
24	Tomor Birip	1620.65	6.48	Tomor	8	150,24
25	Unir Sirau	498.96	1.99	Komor	6	62,75
Jumlah		25,015.31	100.00		224	

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Kab. Asmat 2024

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Kabupaten Asmat memiliki luas wilayah 25.015,31 kilometer persegi. Secara administrasi terdiri dari 25 Distrik dan 224 Kampung. Distrik yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Asmat adalah Distrik Pulau Tiga yaitu: seluas 3.102,01 Km² (12,40 persen), sementara Distrik yang memiliki wilayah terkecil adalah Distrik Akat seluas 95,58 Km² (0,38 persen). Distrik yang memiliki jumlah kampung terbanyak adalah Distrik Suru-suru dengan jumlah sebanyak 18 kampung, sedangkan distrik yang memiliki jumlah kampung paling sedikit adalah Distrik Akat yaitu: sebanyak 5 kampung. Jika ditinjau dari jarak antara ibukota distrik dengan Ibukota Kabupaten, Distrik Koroway Buluanop memiliki jarak terjauh dari Distrik Agats (Ibukota Kabupaten) yaitu sejauh 295 km, diikuti Distrik Suru-Suru sejauh 289 km, dan Distrik Kolf Brasa, 263 km. Sementara itu, Distrik Akat memiliki jarak yang paling dekat dengan Ibukota Kabupaten berjarak 37,55 km.

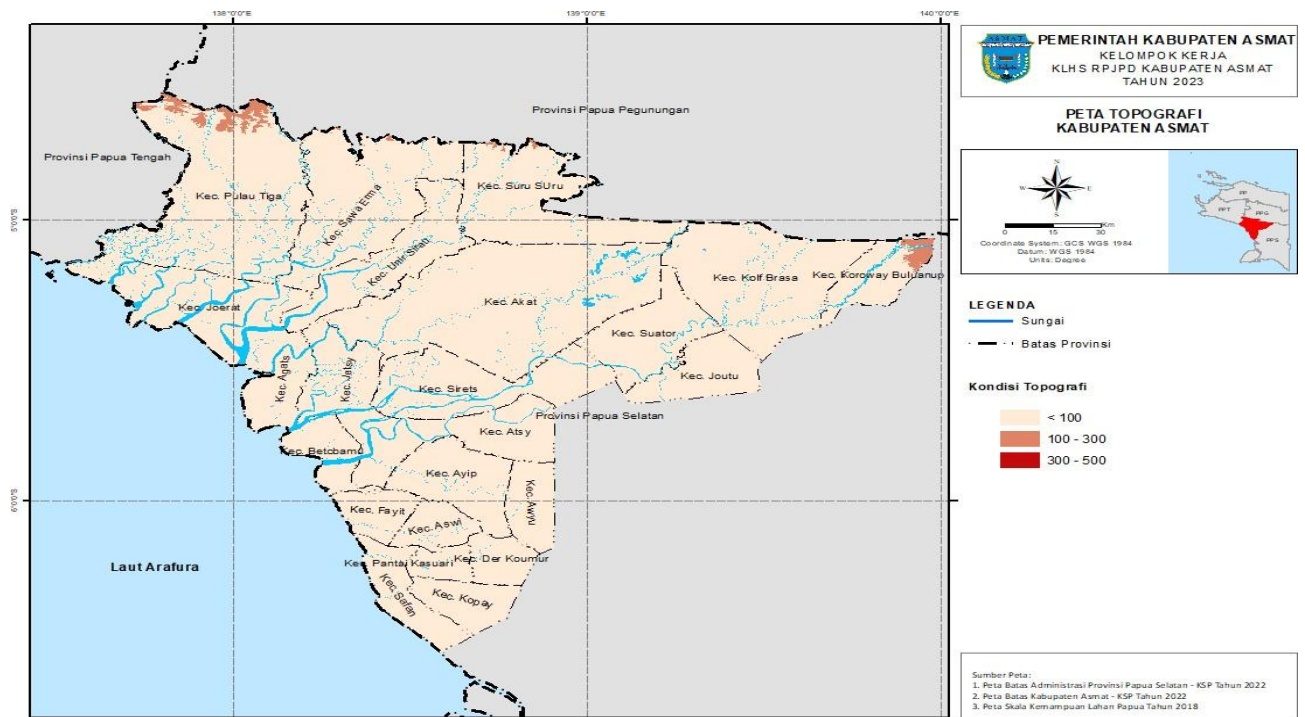
Luas Wilayah Indikatif Penetapan Batas Wilayah (PBW) sesuai Surat Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial Nomor: B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022, tanggal 3 Oktober 2022. Batas wilayah administrasi Kabupaten Asmat adalah sebagai berikut:



- Sebelah utara : Kabupaten Nduga dan Kabupaten Yahukimo;
- Sebelah selatan : Kabupaten Mappi dan Laut Arafura;
- Sebelah barat : Kabupaten Mimika dan Laut Arafura; dan
- Sebelah timur : Kabupaten Boven Digoel.

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Asmat serta memiliki ketinggian antara 0 – 100 meter di atas permukaan laut. Bentang alamnya didominasi dataran rendah, memiliki kemiringan 0-8 persen. Terdiri atas pesisir, pantai berawa dan tergenang air. Wilayah bagian utara dan timur agak tinggi. Ketinggian air saat pasang surut berkisar 5 – 7 meter, air laut saat pasang masuk sampai sejauh 50 – 60 kilometer, menyebabkan beberapa tempat terintrusi air asin/air laut. Daerah bergelombang dan berbukit berada di wilayah Distrik Sawaerma, Suru Suru sampai ke Distrik Suator. Di daerah dataran rendah dan berawa dialiri oleh sungai- sungai besar seperti Sungai Wedelman, Siretz, Asuwetz, Lorenz dan Bets. Sungai-sungai tersebut memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat sebagai sarana transportasi, sumber air irigasi, tenaga listrik, air minum serta memiliki potensi perikanan dan pariwisata yang besar. Kabupaten Asmat beriklim tropis dengan musim kemarau dan penghujan nampak terpisah. Curah hujan dalam setahun rata-rata 3.000 milimeter hingga 5.000 milimeter dengan potensi hari hujan sekitar 200 hari setahun. Suhu udara rata rata pada siang hari 26° C dan pada malam hari 17° C. Curah hujan tertinggi terjadi di wilayah pedalaman, sedangkan curah hujan terendah terjadi di pesisir pantai selatan, tepatnya di Pantai Kasuari. Tingkat kelembaban udara cukup tinggi karena dipengaruhi oleh iklim tropis basah. Kelembabannya berkisar antara 78 persen hingga 81 persen. Suhu udara rata - rata disiang hari 26 ° C hingga 29 ° C dan pada malam hari 17 derajat selsius 20 ° C.



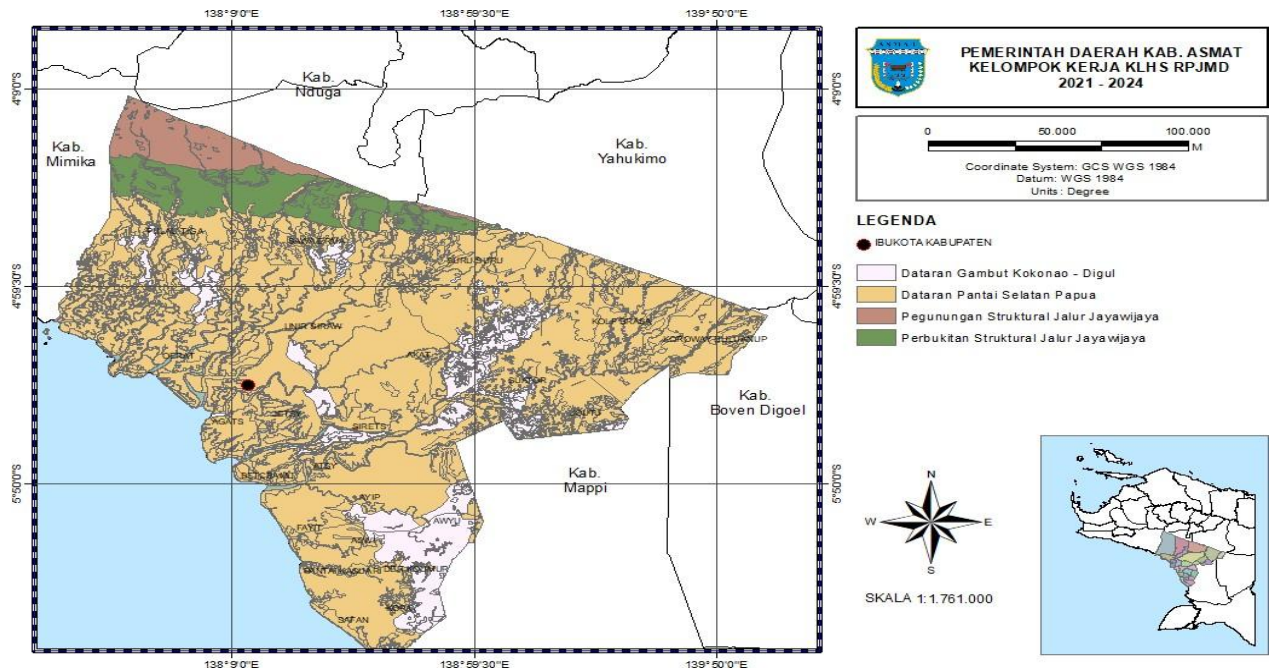
Gambar 2. 2 Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Asmat

Sumber: RPJPD Kab. Asmat, 2025-2045

Wilayah Kabupaten Asmat berada di atas daratan yang lembek karena dilalui sungai besar. Karena letaknya di dataran rendah dan tepian sungai maka sepanjang tahun selalu ada genangan air. Setiap hari juga terjadi pasang surut karena letaknya dekat dengan muara sungai yang berhubungan dengan laut lepas. Seluruh wilayah Kabupaten Asmat berada pada ketinggian antara 0-100 meter di atas permukaan laut. Ketinggian air pada saat keadaan pasang dan surut berkisar antara 5-7 meter dimana pada saat air pasang dari laut masuk hingga sejauh 50-60 kilometer wilayah daratan dan beberapa tempat di wilayah pesisir telah mengalami intrusi air asin/air laut. Daerah bergelombang dan berbukit di Kabupaten Asmat berada di Distrik Sawa Erma hingga Distrik Suator. Pada daerah dataran rendah yang berawa, banyak wilayah yang dialiri oleh sungai-sungai besar seperti Sungai Wedelman, Siretz, Asuwetz, Lorenz, dan Betz. Sungai-sungai tersebut memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat sebagai sarana transportasi, sumber irigasi, tenaga listrik, air minum serta memiliki potensi perikanan dan pariwisata yang besar.

2.1.1.3. Kondisi Geologi

Secara umum jenis tanah dapat digolongkan menjadi dua yaitu tanah mineral dan tanah organik. Tanah mineral adalah tanah yang dihasilkan dari proses pelapukan batuan diantaranya adalah tanah latosol (merah) dan tanah andosol (hitam kelam), sedangkan tanah dari hasil pematangan sisa-sisa tanaman akan membentuk tanah organik seperti tanah gambut. Keadaan fisiografi, bentuk wilayah dan sifat-sifat tanah menggambarkan karakteristik yang membedakan satuan lahan. Kualitas lahan sangat dipengaruhi oleh kualitas jenis tanahnya yang juga sangat tergantung pada kondisi geologis, iklim, maupun topografinya.



Gambar 2. 3 Peta Bentang Lahan Kabupaten Asmat

Sumber: Perda RPJPD Kab. Asmat, 2025-2045

Kabupaten Asmat secara umum memiliki 5 (lima) kelompok satuan lahan fisiografi, yaitu: Marin (M), Fluvian Marin (B), Gambut (G), Aluvian (A) dan Tektonik/Struktural (T). Sebagian besar lahan di Kabupaten Asmat adalah lahan Aluvian (65,95 persen) Kelompok Marin terletak di sepanjang pantai dengan lebar bervariasi. Kelompok ini merupakan hasil proses sedimentasi dan secara jelas terlihat dengan adanya pelebaran pantai yang terjadi karena penambahan bahan endapan dan proses pengangkatan. Satuan lahan pada kelompok tersebut dapat dibedakan antara lain: beting pasir, dataran pasang surut, rawa belakang pantai, dan endapan delta. Kelompok Fluvian Marin berkaitan erat dengan aktivitas sungai dan air permukaan yang berupa pengikisan, pengangkutan, dan jenis buangan pada daerah dataran rendah seperti lembah, ledok, dan dataran alluvial. Proses penimbunan bersifat meratakan pada daerah-daerah ledok, sehingga umumnya bentuk lahan asal fluvial mempunyai relief yang rata atau datar.

Kelompok Kubah Gambut terbentuk dari endapan organik yang berasal dari endapan permukaan muda dan tua. Secara umum ketebalan gambut akan meningkat semakin jauh dari sungai. Dengan pengendalian tata air yang baik, daerah ini sebenarnya memiliki potensi untuk perkebunan. Namun, miskinnya kandungan hara dapat menjadi penghambat utama. Kelompok Alluvial terbentuk dari endapan alluvial sungai dan terletak di sepanjang jalur-jalur aliran sungai. Pada umumnya daerah tersebut cukup potensial untuk lahan persawahan, tentunya dengan memperhatikan jalur hijau yang harus dipertahankan. Kelompok Tektonik/Struktural terjadi karena adanya proses pembentukan lahan yang disebabkan oleh adanya proses endogen seperti proses pengangkatan, penurunan dan pelipatan kerak bumi. Contoh dari bentuk lahan asal struktural adalah pegunungan lipatan, pegunungan patahan, dan pegunungan kubah.



2.1.1.4. Kondisi Hidrologi

Pada umumnya keadaan hidrologi di Kabupaten Asmat ditentukan oleh perbedaan topografi terutama antara perbukitan, dataran maupun perairan. Kabupaten Asmat memiliki banyak sungai baik yang termasuk sungai-sungai kecil maupun besar. Sungai-sungai tersebut memiliki peranan yang penting bagi penduduk di Kabupaten Asmat diantaranya sebagai prasarana transportasi dan sumber penyediaan air minum. Secara umum, ditinjau dari kondisi fisik, sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Asmat masih menunjukkan kondisi fisik air sungai yang baik. Kondisi tersebut sangat ditunjang dengan adanya vegetasi yang tumbuh di sepanjang aliran sungai sebagai daerah tangkapan air hujan.

Beberapa sungai besar di Kabupaten Asmat diantaranya adalah Sungai Binar, Owap, Jats, Momats, Fai, Pomats, Unir, Asswet, Yiwe, Syiret, Bets, Assuwe, Fayit, Dere, dan Ayip. Panjang sungai di Kabupaten Asmat berkisar antara 9,3-517 km. Sungai terpanjang di Kabupaten Asmat adalah Sungai Syiret dengan panjang mencapai 517,5 km, diikuti Sungai Jats dengan panjang 200 km dan Sungai Pomats dengan panjang 152,2 km. Sungai Owap merupakan sungai terpendek di Kabupaten Asmat yaitu sepanjang 9,3 km.

Jika dilihat dari lebar muaranya, sungai di Kabupaten Asmat ada yang memiliki lebar muara rata-rata berkisar antara 47.810 M. Sungai Syiret selain merupakan sungai terpanjang, juga merupakan sungai dengan lebar muara terbesar mencapai mencapai 810,5 M, sedangkan sungai dengan lebar muara terkecil adalah Sungai Ayip, sebesar 47 meter. Kedalaman muara sungai di Kabupaten Asmat berkisar antara 10-20 M. Berikut nama dan karakteristik sungai di kabupaten Asmat, dalam dicantumkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2 Nama dan Karakteristik Sungai di Kabupaten Asmat

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Muara (m)	Kedalaman Muara (m)	Panjang Alur dari Muara ke Ibukota Kabupaten (km)
1.	Sungai Binar	48,00	151,00	15	115
2.	Sungai Owap	9,30	512,50	20	105
3.	Sungai Jats	200,00	215,00	15	50
4.	Sungai Momats	52,50	95,00	15	45
5.	Sungai Fai	65,00	222,50	20	35
6.	Sungai Pomats	152,20	515,00	15	25
7.	Sungai Unir	127,50	510,00	15	20
8.	Sungai Asswet	122,00	450,00	16	-
9.	Sungai Yiwe	47,50	60,00	10	-
10.	Sungai Syiret	517,50	810,50	17	45
11.	Sungai Bets	63,00	512,50	15	65
12.	Sungai Assuwe	55,00	134,00	10	60
13.	Sungai Fayit	35,00	60,00	10	70



No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Muara (m)	Kedalaman Muara (m)	Panjang Alur dari Muara ke Ibukota Kabupaten (km)
14.	Sungai Dere	36,00	65,50	12	105
15.	Sungai Ayip	52,00	47,00	10	125

Sumber : RTRW Kabupaten Asmat 2012-2032

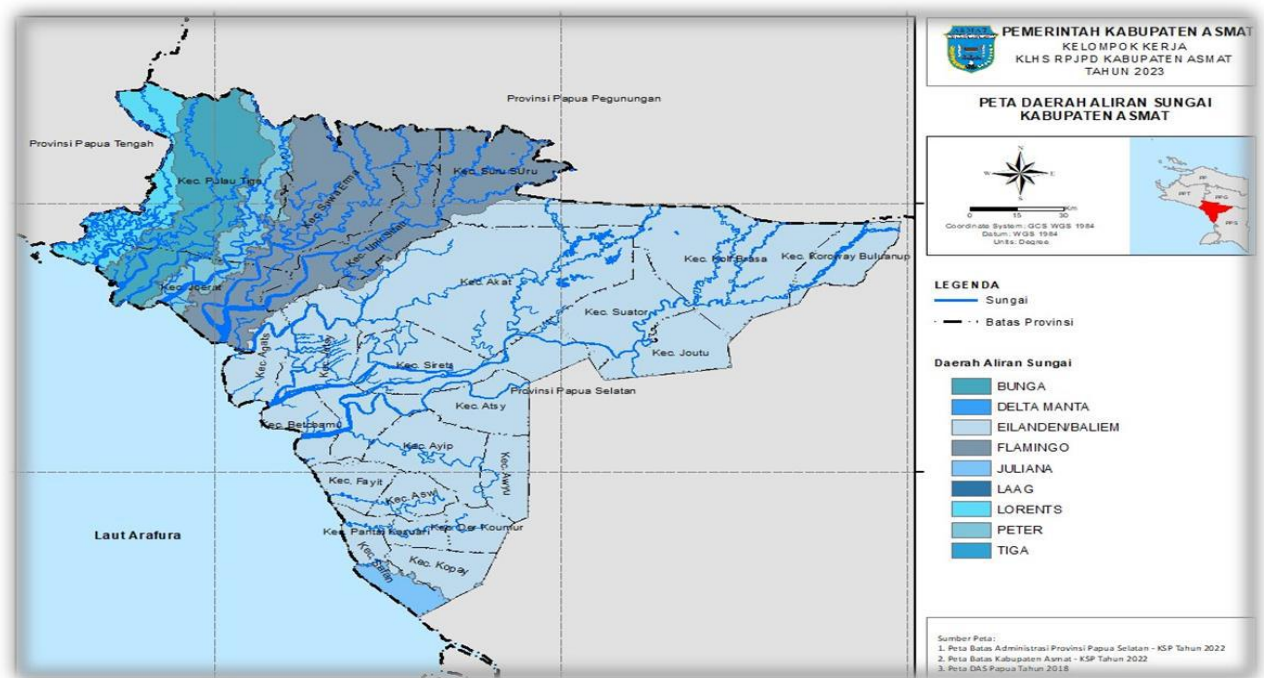
Diantara 15 (lima belas) sungai-sungai diatas, Aliran Sungai (DAS) yang melintasi Kabupaten Asmat sebanyak 9 Daerah, dan DAS Eilanden/Baliem merupakan DAS terbesar yang mendominasi wilayah kabupaten Asmat dengan luas sebesar 1,5 juta hektar atau sekitar 63,91%. Berikut nama DAS sungai menurut luasnya, sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Luasan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Asmat

No	Nama DAS	Luas	Persen
1	Bunga	197.896,10	7,91%
2	Delta manta	14,31	0,00%
3	Eilanden/baliem	1.598.608,73	63,91%
4	Flamingo	482.903,68	19,30%
5	Juliana	29.029,94	1,16%
6	Laag	161,41	0,01%
7	Lorents	97.085,92	3,88%
8	Peter	95.537,49	3,82%
9	Tiga	233,30	0,01%
	Jumlah	2.501.470,87	100,00%

Sumber: BPDAS Kabupaten Asmat

Sungai merupakan hal yang penting. Hal ini dikarenakan sungai bagi orang atau penduduk Asmat “ibarat hidup”. Selain menjadi sumber makanan, juga menjad media moda transportasi yang menghubungkan antara wilayah satu dengan lainnya. Hampir sebagian besar kehidupan masyarakatnya tergantung dengan sungai. Berikut peta-peta aliran sungai yang diidentifikasi dan ditampilkan dalam gambar berikut:



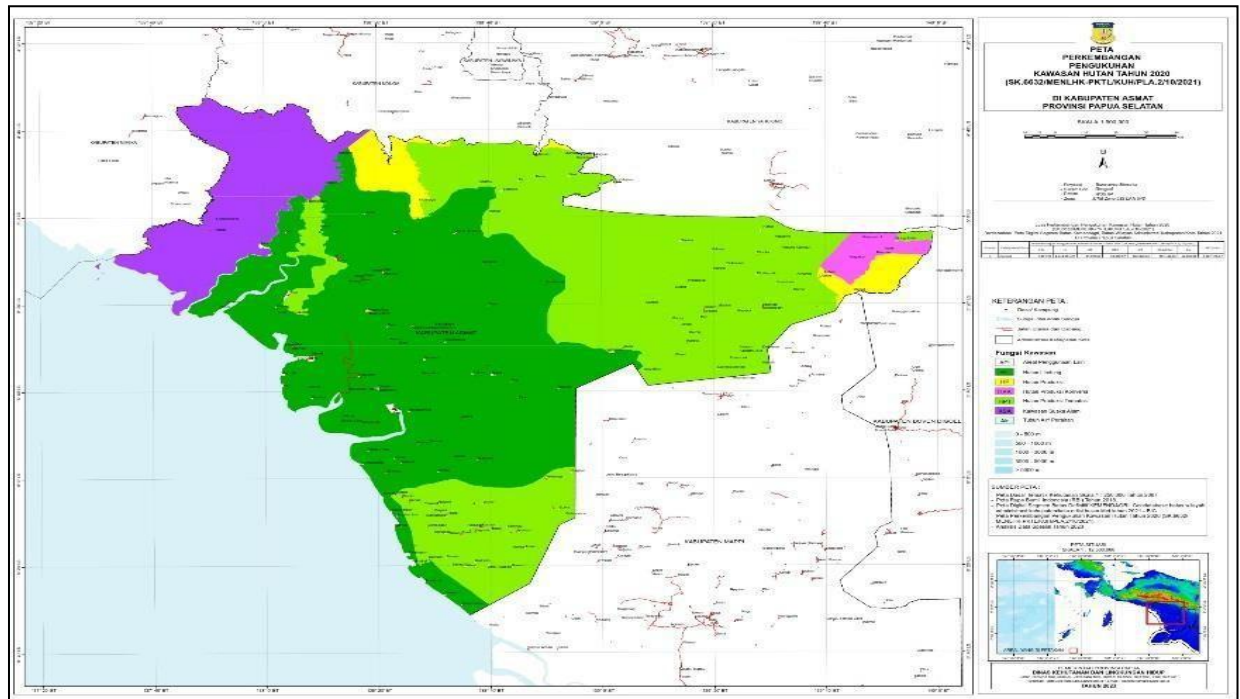
Gambar 2. 4 Peta Aliran Sungai Kabupaten Asmat
Sumber: Kesepakatan hasil olahan Kab. Asmat, 2023

2.1.1.5. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Asmat memiliki iklim tropis dengan perbedaan antara musim kemarau dan hujan yang jelas. Curah hujan di Kabupaten Asmat dalam satu tahun berkisar antara 3.000 milimeter hingga 5.000 milimeter. Suhu udara rata-rata siang hari sebesar 26°C. Pada malam hari sebesar 17°C. Curah hujan tertinggi berada di wilayah pedalaman, sedangkan terendah di pesisir pantai selatan, yaitu Distrik Pantai Kasuari. Kelembaban udara di Kabupaten Asmat cukup tinggi karena dipengaruhi oleh iklim tropis basah. Kelembabannya berkisar antara 78 persen hingga 81 persen. Hutan di Kabupaten Asmat merupakan jenis hutan hujan tropis, mengakibatkan tingginya kelembaban udara. Hampir setiap tahun hujan turun berkisar (100-150 hari). Frekuensinya melimpah pada musim hujan berlangsung bulan Mei sampai Juni mencapai 1.200 mm, dan agak berkurang pada saat musim kemarau. Tidak adanya sumber air tanah akibat lumpur dan naiknya air laut, sehingga penduduk menjadikan curah hujan, yang demikian besar, sebagai sumber air untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini nampak disetiap rumah dilengkapi tangki-tangki atau drum ember untuk menampung air hujan.

2.1.1.6. Kawasan Hutan

Kabupaten Asmat selain memiliki hamparan sungai juga masih menyisahkan hutan yang padar. Jumlah kawasan hutan yang berhasil diidentifikasi saat ini memiliki luas 2.5001.497,81 ha atau 20,76% dari total Wilayah Adat Anim-Ha. Hamparannya diperlihatkan dalam gambar berikut:



Gambar 2. 5 Kawasan Hutan Kabupaten Asmat

Sumber: Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Jayapura, 2023

Hasil analisis menunjukkan bahwa kawasan tersebut, sebagian besar masih berupa Kawasan Hutan Lindung (44,37%), dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (38,47%). Jika dibandingkan dengan kondisi di Wilayah Adat Anim-Ha lainnya, maka Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Asmat mampu menyumbang 65,02% dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas mampu memberikan kontribusi sebesar 37,62%. Selanjutnya selain kawasannya luas hutan di Kabupaten Asmat juga sudah terpetakan dan dicantumkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4 Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Asmat

No	Kawasan	Luas	Persen %
1	Areal Penggunaan Lain	7.251,48	0,29
2	Hutan Lindung	1.109.984,52	44,37
3	Hutan Produksi Terbatas	962.339,34	38,47
4	Hutan Produksi Tetap	84.734,94	3,39
5	Hutan Produksi yang dapat di Konversi	38.150,03	1,53
6	Taman Nasional	287.207,97	11,48
7	Taman Nasional (Perairan)	27,06	0,00
8	Tubuh Air	11.802,47	0,47
Jumlah		2.501.497,81	100,00%

Sumber: BPKH Wilayah X Jayapura, 2023

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Wilayah Kabupaten Asmat terletak di daerah dataran rendah yang mengalami genangan air sepanjang tahun, karena topografinya berada di bawah permukaan air



laut. Dalam perencanaan penggunaan lahan, Kabupaten Asmat telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 – 2032, dan telah ditetapkan melalui Perda Nomor 6 Tahun 2012. Perencanaan tata ruang ini meliputi rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Pada tahun 2023, total luas lahan yang tersedia di Kabupaten Asmat secara keseluruhan sebesar 15.258,46 km².

Dari keseluruhan lahan tersebut, sebagian besar lahan di Kabupaten Asmat termasuk dalam kawasan hutan hutan lindung, suaka alam, dan hutan produksi. Total luas kawasan hutan adalah seluas 15.207,09 km² yang terdiri atas kawasan hutan lindung seluas 11.325,81 km², kawasan suaka alam seluas 2.817,76 km², dan kawasan hutan produksi seluas 1.063,52 km². Kegiatan budidaya yang dilakukan oleh masyarakat, diantaranya adalah pertanian padi dan palawija, hortikultura, dan perkebunan. Luas kawasan pertanian padi dan palawija adalah seluas 1,49 km², hortikultura seluas 1,56 km², dan perkebunan seluas 48,32 km². Hasil identifikasi penggunaan lahan tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Kelas Tutupan Lahan di Kabupaten Asmat

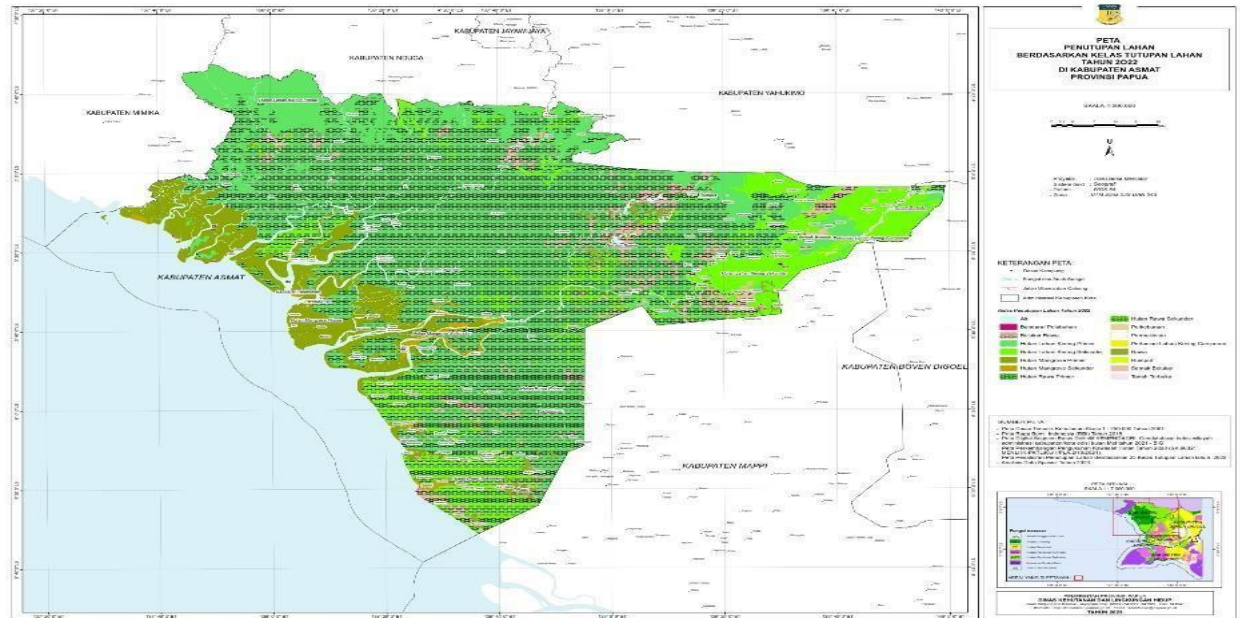
No	Kelas Tutupan	Luas (Ha)	Persen (%)
1	Bandara/Pelabuhan	49,21	0,00
2	Hutan Lahan Kering	241.205,16	9,64
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	168.131,85	6,72
4	Hutan Mangrove Primer	192.899,36	7,71
5	Hutan Mangrove Sekunder	20.987,04	0,84
6	Hutan Rawa Primer	1.354.985,58	54,17
7	Hutan Rawa Sekunder	263.433,72	10,53
8	Lahan Terbuka	24,39	0,00
9	Perkebunan	45,75	0,00
10	Permukiman	2.562,15	0,10
11	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	2.160,24	0,09
12	Rawa	22.329,01	0,89
13	Savana/Padang Rumput	741,69	0,03
14	Semak Belukar	12.025,37	0,48
15	Semak Belukar Rawa	125.236,14	5,01
16	Tubuh Air	94.655,21	3,78
Jumlah		2.501.471,88	100,00

Sumber : RTRW 2021-2032 Kab. Asmat

Dari tabel diatas nampak bahwa prosentase tutupan lahan di Kabupaten Asmat didominasi Hutan Rawa Primer sebesar 1.354.985,58 atau 54,17%. Disusul Hutan Rawa Sekunder 263.433,72 atau 10,53% dan Hutan Lahan Kering sebesar 241.205,16 sekitar 9,64%. Potensi Hutan Rawa ini sangat penting bagi Kabupaten Asmat karena akhir-akhir ini mulai dikaitkan dengan deposito karbon dan bisa menjadi sumber Penghasilan Daerah. Oleh karena itu ke depan Pemerintah Daerah segera melakukan pemetaan dan pengkajian untuk mengungkap dan melaporkan seberapa besar peluang tersebut dapat dimanfaatkan.



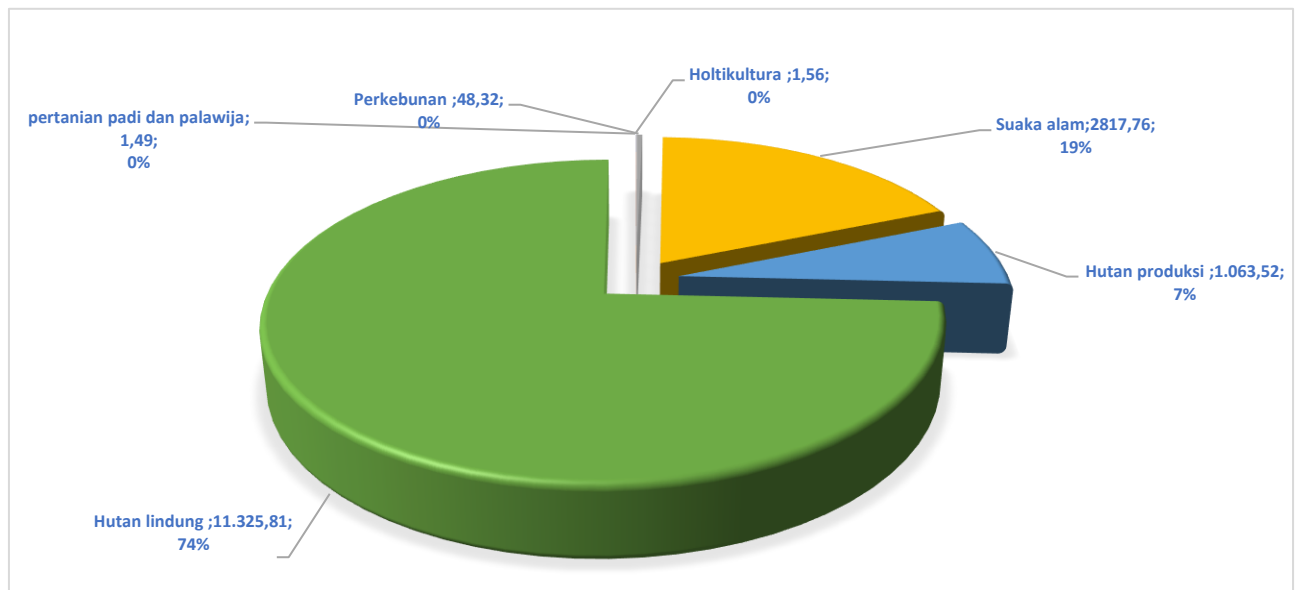
Selain sungai, hutan atau lahan seperti umumnya masyarakat Papua, telah menjadi sumber penopang bagi kehidupan masyarakat Asmat. Oleh karena itu upaya pemetaan menjadi penting. Melalui pemetaan dapat diketahui penggunaan kawasan lahan, terutama lahan-lahan tradisional yang selama ini menjadi aktifitas masyarakat adat dalam menopang kehidupan sehari-hari. Berikut gambaran tutupan lahan di Kabupaten Asmat:



Gambar 2. 6 Penutupan Lahan Kabupaten Asmat

Sumber: Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Jayapura 2023

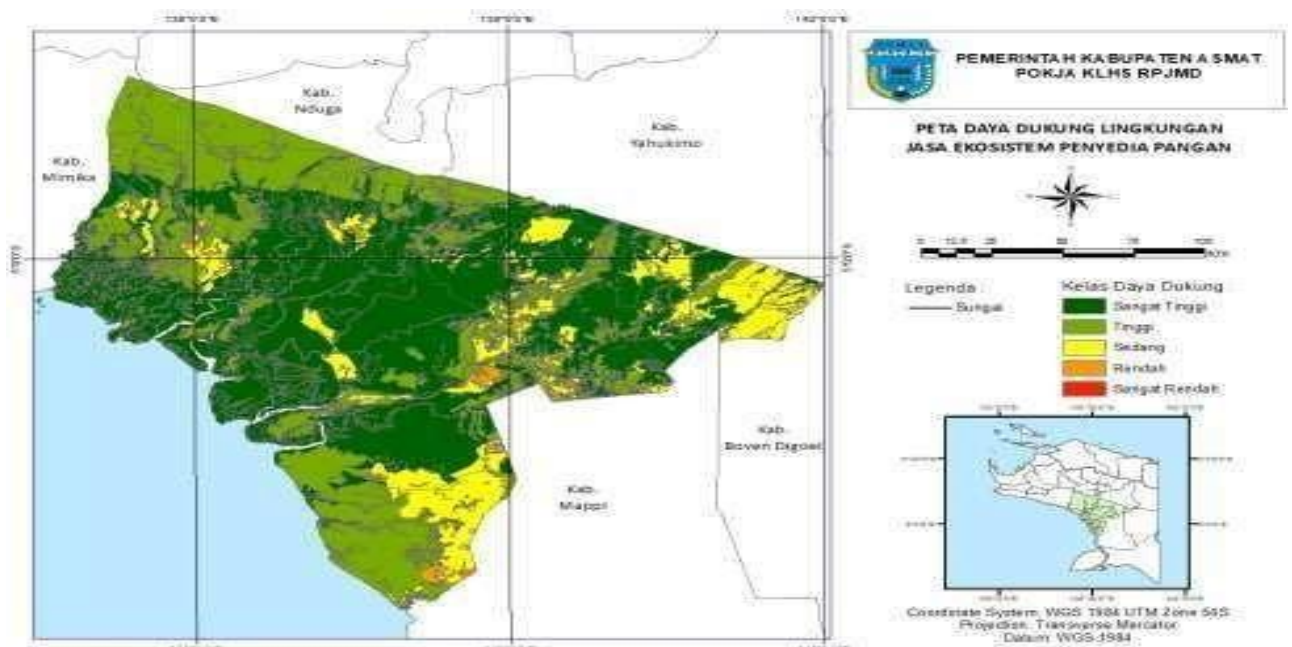
Selanjutnya dari pemetaan tutupan lahan tersebut juga dilakukan identifikasi dan inventarisasi menurut penggunaan potensinya yang bisa digunakan untuk lahan pangan. Hal ini dilakukan karena sektor pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia sehingga ketersediaan bahan pangan menjadi aspek penting. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan dari air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Berikut ini penampakan prosentase lahan yang digunakan untuk peruntukan pangan dan lainnya:



Gambar 2. 7 Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Asmat, 2021

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Asmat 2025-2029

Gambaran diatas juga sekaligus menunjukan bahwa daya dukung lahan untuk penyediaan pangan Kabupaten Asmat masih sangat tinggi di mana ditunjukkan dari 54% wilayah merupakan wilayah yang masih memiliki daya dukung sangat tinggi, 30% wilayah merupakan daerah dengan daya dukung yang tinggi dan 14% wilayah merupakan daerah dengan daya dukung yang sedang. Jadi, dapat dinyatakan secara umum Kabupaten Asmat tidak memiliki wilayah dengan daya dukung penyediaan pangan yang rendah karena hanya berada di bawah 2%.



Gambar 2. 8 Peta Indeks Daya Dukung Penyediaan Pangan Kabupaten

Sumber: KLHS Kabupaten Asmat, 2025-2029



2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Pertumbuhan daya saing daerah merupakan hal penting dalam pembangunan daerah, dimana penataan ruang menjadi salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat kondisi geografis, potensi sektor perikanan, pertanian secara keseluruhan dan potensi pariwisata di Kabupaten Asmat memiliki posisi strategis yang dapat menjadi sumber pendapatan dan kehidupan bagi masyarakatnya. Pembangunan Kabupaten Asmat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya potensial yang tersedia, dimana perencanaan pembangunan Kabupaten Asmat difokuskan lebih menekankan pada sektor-sektor unggulan yakni: perikanan, pertanian dan pariwisata. Hal yang harus diupayakan dalam pengembangan wilayah adalah pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta peningkatan kapasitas ekonomi di beberapa wilayah prioritas mengingat ada beberapa kawasan di Kabupaten Asmat yang masih tertinggal. Pengembangan dan pemerataan infrastruktur tersebut mutlak diutamakan. Hal ini didasarkan karena masih rendahnya tingkat pelayanan infrastruktur dasar pada wilayah yang akan berdampak pada terbatasnya kemampuan penduduk setempat dalam mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki.

Adapun rincian potensi pengembangan wilayah Pemerintah Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan mempertimbangkan arahan pengembangan kawasan budidaya dalam RTRW Provinsi Papua 2013-2033 sebagai provinsi induk, sebagai berikut:

Kawasan peruntukkan hutan produksi:

- a. Hutan produksi terbatas (HPT)
- b. Hutan produksi tetap (HP)
- c. Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), meliputi Kawasan hutan rakyat dan Kawasan peruntukkan pertanian
- d. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
- e. Kawasan peruntukkan perikanan, meliputi Perikanan tangkap dan Perikanan budidaya
- f. Kawasan peruntukkan pariwisata Wisata budaya Wisata alam dan Wisata minat khusus
- g. Kawasan peruntukkan permukiman meliputi Permukiman perkotaan dan Permukiman perkampungan

Selengkapnya kawasan-kawasan tersebut ditampilkan dalam gambar berikut:



- a. Kondisi atau kawasan pembangunan I, tersebar pada wilayah pembangunan Distrik Safan, Distrik Pantai Kasuari, Distrik Der Koumur, Distrik Fayit dan Distrik Aswi yang belum memadainya akses terhadap keberlangsungan pembangunan akses melalui jalur darat, laut/sungai, dan udara. Sebagai akibatnya, daerah-daerah pada wilayah tersebut memiliki permasalahan tersendiri terhadap pembangunan;
- b. Kondisi atau kawasan pembangunan II, tersebar pada wilayah pembangunan Distrik Atsy, Distrik Bectbamu, Distrik Ayip, Distrik Awyu, Distrik Siret, Distrik Suator, Distrik Kolf Brasa, Distrik Joutu dan Distrik Koroway Buluanop. Pada wilayah ini terdapat beberapa suku terasing yang sangat homogen, dengan pola kehidupan cenderung nomaden. Interaksi sosial yang terjadi, adalah interaksi sosial antar komunitas homogen tersebut atau pula berinteraksi dengan alam sekitar;
- c. Kondisi atau kawasan wilayah pembangunan III, tersebar pada wilayah pembangunan Distrik Agats, Distrik Jetsy, Distrik Akat, Distrik Sawa Erma, Distrik



Sor Ep, Distrik Tomor Birif, Distrik Joerat, Distrik Pulau Tiga, Distrik Unir Sirau dan Distrik Suru-Suru. Kecenderungan daerah-daerah pesisir memiliki akses yang dapat menghubungkan antar daerah dalam satu wilayah atau antar wilayah dengan wilayah. Akses terhadap daerah pesisir menggunakan jalur laut/sungai, sehingga memudahkan pergerakan arus barang dan manusia. Namun akses pada kawasan pesisir Asmat, belum sepenuhnya memadai, sehingga berdampak terhadap keseluruhan pembangunan.

2.1.1.9. Kondisi Sosial dan Budaya

Wilayah Adat Animha di Kabupaten Asmat merupakan wilayah berdiamnya 12 (duabelas) rumpun dan sekitar 8 (delapan) suku yang mendiami wilayah pesisir selatan yang berbatasan dengan suku Komoro di bagian barat sampai dengan pesisir yang bersebelahan dengan orang-orang dari suku Yaghai dan Tamariho di Mappi. Sedangkan wilayah pedalaman atau lebih kedaratan berbatasan dengan wilayah suku orang-orang Yahukimo dan Korowai bagian Boven Digoel. Kehidupan suku-suku di Asmat sangat dipengaruhi oleh zona ekologi sebagai habitat hidup mereka dimana wilayah Asmat masuk dalam zona rawa, pantai dan sepanjang aliran sungai, memiliki kesamaan dengan Mappi dan Merauke.

Sungai Aswet, Bets, Undir, Brazza, Lorentz, Sirets, dan Pomats adalah bagian daerah aliran sungai besar yang mengalir wilayah dataran bakau dan rawa dari bagian hulu sungainya berbatasan dengan wilayah adat suku suku di kabupaten Yahukimo, Boven digoel dan Mappi. Sungai-sungai besar ini disamping sebagai wadah transportasi sungai, masyarakat adat juga percaya ini merupakan aliran yang menghentar mereka dalam upaya mencari makan pada rawa rawa air payau sampai tawar dibelakang hamparan bakau luas. Asmat memiliki sungai sungai besar yang bermuara langsung ke laut Arafura misalnya sungai Bets, Siret, Biwir, Aswet, Pomats, Unir, fai Momats Yets dan beberapa sungai lainnya. Dari beberapa sungai besar itu terdapat percabangan anak-anak sungai yang menghubungkan wilayah Asmat hingga ke pedalaman. Kondisi lingkungan alam Asmat sendiri merupakan hutan heterogen berawa rendah diselingan dengan hutan sagu dan pohon nibung yang berada di tepian sungai, juga jenis-jenis pandanus dan tanaman berkayu keras.

2.1.1.10. Kondisi Kebencanaan

Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2024, Kabupaten Asmat termasuk kabupaten yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori sedang dengan skor secara keseluruhan sebesar 123,20. Jika dirinci menurut jenis bencana, kelas risiko bencana yang tinggi di Kabupaten Asmat adalah untuk bencana banjir, kebakaran lahan dan hutan, dan kekeringan. Untuk risiko bencana banjir, Kabupaten Asmat termasuk ke dalam kelas risiko tinggi dengan nilai sebesar 36. Ancaman bencana banjir yang tinggi di Kabupaten Asmat disebabkan oleh wilayahnya yang berupa dataran rendah bahkan berada di bawah permukaan laut. Jenis bencana banjir yang ada di



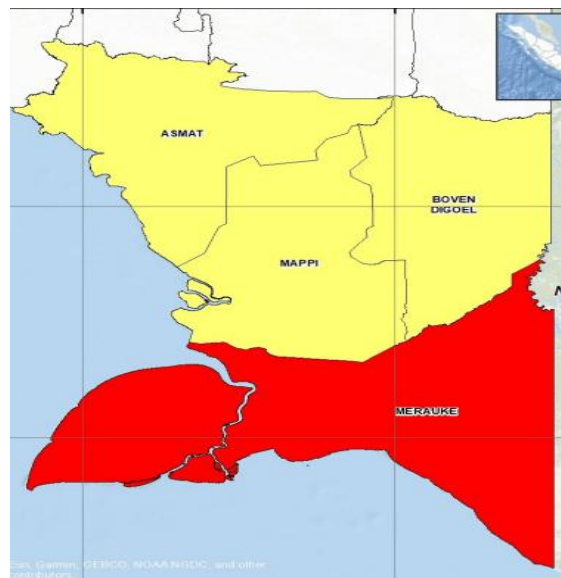
Kabupaten Asmat dapat berupa banjir yang berasal dari daratan karena banyaknya sungai besar dan banjir rob yang berasal dari aliran pasang air laut.

Tabel 2. 6 Kondisi Kebencanaan di Kabupaten Asmat

No.	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
1	Banjir	36	Tinggi
2	Gempa Bumi	14,4	Tinggi
3	Tsunami	8	Sedang
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	16,8	Tinggi
5	Tanah Longsor	8,4	Sedang
6	Gelombang ekstrem dan abrasi	13,6	Tinggi
7	Kekeringan	20,8	Tinggi
8	Cuaca Ekstrem	5,2	Rendah
9	Multi Bahaya	211.2	Tinggi

Sumber: BNPB, Tahun 2024

Berikut peta kenampakan kebencanaan di Papua Selatan, dimana nampak Kabupaten Asmat ditandai dengan warna kuning yang berarti tingkat mendapatkan bencana tergolong sedang. Seperti ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 2. 10 Indeks Risiko

Sumber: BNPB, 2024

Meskipun wilayah Kabupaten Asmat merupakan wilayah yang tidak termasuk dalam kawasan rawan bencana gempa tektonik atau bencana gelombang tsunami tetapi terjadinya cukup sering. Dengan demikian rencana pemanfaatan pola ruang diharuskan dan mempertimbangkan terjadinya bencana gempa bumi atau gelombang tsunami diperlukan. Bencana lain yang sering terjadi di Kabupaten Asmat ada bencana alam yaitu banjir dan lonsor yang sering melanda beberapa distrik di Kabupaten Asmat, atau terdapat hampir di semua distrik di Kabupaten Asmat.



Bencana alam kebakaran di Kabupaten Asmat memang sering terjadi. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayahnya berupa kawasan hutan, sehingga risiko bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Asmat termasuk ke dalam kategori tinggi dengan skor sebesar 16,8.

Selain itu, dengan risiko bencana kekeringan juga termasuk dalam kategori tinggi dengan skor 20,8. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua bencana tersebut dapat terjadi bersamaan, mengingat musim kemarau yang panjang di Kabupaten Asmat. Bencana kebakaran lahan dan hutan juga dapat terjadi dikarenakan oleh kegiatan budidaya yang dilakukan manusia. Pembukaan lahan hutan untuk kegiatan pertanian juga menjadi salah satu penyebab bencana karena pembukaan tersebut dilakukan dengan pembakaran untuk meminimalisasi biaya dan hasilnya sangat cepat. Oleh karena itu, regulasi tentang rehabilitasi hutan harus dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, mengingat ketergantungan yang masih tinggi dari masyarakat Asmat dengan sumberdaya hutan.

Selain itu, Kabupaten Asmat seperti diinformasikan di atas terkait tingkat kerawanan kebencanaan Kabupaten Asmat. Salah satu untuk menunjukan fakta-fakta tersebut, ditunjukan dengan rekapan bencana alam yang kerap terjadi di Kabupaten Asmat sepanjang tahun 2021-2022. Dari 3 (tiga) bencana alam yang disebabkan Bencana Gempa Tektonik disusul bencana Banjir. Gempa tektonik misalnya pada tahun 2020 terjadi di Distrik Fayt sampai 9 (sembilan) kali disusul Distrik Astrik Aswi sembilan (9) kali disusul Atsy dan Sawa Erma 7 (tujuh) kali. Distrik yang mendapatkan bencana banjir tahun 2020 adalah distrik Kopay dengan frekuensi 8 (delapan) kali. Sedang Bencana Longsor terjadi di Distrik Suru-Suru. Selengkapnya ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 7 Korban Bencana Alam Kabupaten Asmat 2020-2022

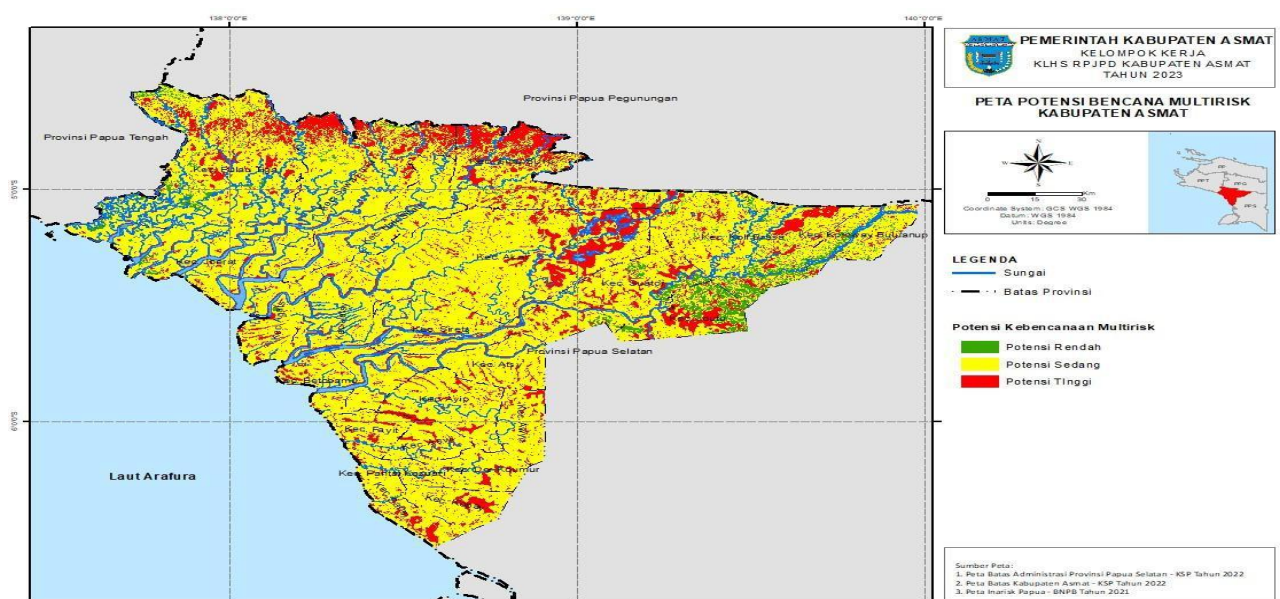
DISTRIK	BANJIR			GEMPA BUMI			TANAH LONGSOR		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PANTAI KASUARI	7	-	-	-	-	-	-	-	-
KOPAY	8	1	-	-	-	-	-	-	-
DER KOUMOR	6	1	-	-	-	-	-	-	-
SAFAN	5	-	-	1	-	-	-	-	-
AWYU	-	-	-	4	-	-	-	-	-
FAYIT	-	-	-	12	-	-	-	-	-
ASWI	-	-	-	9	-	-	-	-	-
ATSY	-	-	-	7	-	-	-	-	-
SIRETS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AYIP	-	-	-	2	-	-	-	-	-
BETCBAMU	-	-	-	5	-	-	-	-	-
AKAT	-	-	-	4	-	-	-	-	-
JETSY	-	-	-	4	-	-	-	-	-
AGATS	-	-	-	1	6	5	-	-	-
SAWA ERMA	-	-	-	7	-	-	-	-	-
SURU-SURU	3	-	-	-	-	-	1	-	-
JOERAT	-	-	-	3	-	-	-	-	-



DISTRIK	BANJIR			GEMPA BUMI			TANAH LONGSOR		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PULAU TIGA	-	1	-	6	6	-	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Asmat, 2023

Selanjutnya, selain berbagai sumber bencana yang digambarkan diatas, Pemerintah Kabupten Asmat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga memetakan potensi kebencanaan Multirisk. Bencana Multirisk dimaksud adalah irisan bencana berbasis hidrometeorologis, geofisika, atau akibat ulah manusia yang menimbulkan tingkat ancaman terhadap kehidupan, properti, atau lingkungan. Gambarnya seperti ditampilkan dalam peta berikut :



Gambar 2. 11 Potensi Kebencanaan Multirisk Kabupaten Asmat Tahun 2023

Sumber: Peta Inarisk Multibencana Papua – BNPB 2023

Warna merah menunjukkan wilayah-wilayah dengan multiresiko yang tinggi, terletak di bagian utara dan timur berbatasan dengan wilayah Papua Pegunungan, selebihnya berupa warna kuning dengan tingkat bencana multy resiko yang sedang berada di semua wilayah/distrik.

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Pertumbuhan daya saing daerah merupakan hal penting dalam pembangunan daerah, dimana penataan ruang menjadi salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat kondisi geografis, potensi sektor perikanan, pertanian secara keseluruhan dan potensi pariwisata di Kabupaten Asmat memiliki posisi strategis yang dapat menjadi sumber pendapatan dan kehidupan bagi masyarakatnya. Pembangunan Kabupaten Asmat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya potensial yang tersedia, dimana perencanaan pembangunan



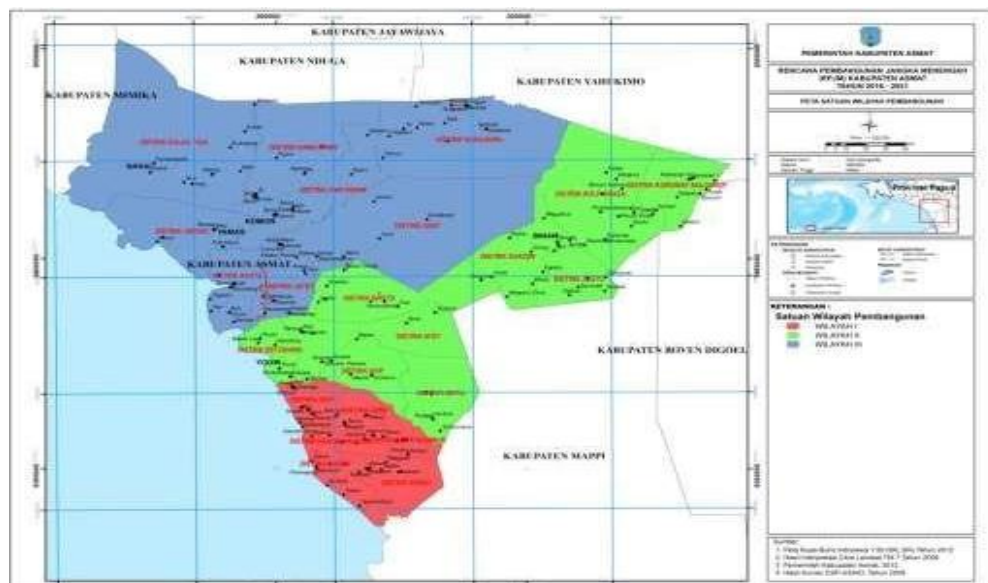
Kabupaten Asmat difokuskan lebih menekankan pada sektor-sektor unggulan yakni: perikanan, pertanian dan pariwisata. Hal yang harus diupayakan dalam pengembangan wilayah adalah pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta peningkatan kapasitas ekonomi di beberapa wilayah prioritas mengingat ada beberapa kawasan di Kabupaten Asmat yang masih tertinggal. Pengembangan dan pemerataan infrastruktur tersebut mutlak diutamakan. Hal ini didasarkan karena masih rendahnya tingkat pelayanan infrastruktur dasar pada wilayah yang akan berdampak pada terbatasnya kemampuan penduduk setempat dalam mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki.

Adapun rincian potensi pengembangan wilayah Pemerintah Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan mempertimbangkan arahan pengembangan kawasan budidaya dalam RTRW Provinsi Papua 2013-2033 sebagai provinsi induk, sebagai berikut:

Kawasan peruntukkan hutan produksi :

- Hutan produksi terbatas (HPT)
- Hutan produksi tetap (HP)
- Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), meliputi Kawasan hutan rakyat dan Kawasan peruntukkan pertanian
- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
- Kawasan peruntukkan perikanan, meliputi Perikanan tangkap dan Perikanan budidaya
- Kawasan peruntukkan pariwisata Wisata budaya Wisata alam dan Wisata minat khusus
- Kawasan peruntukkan permukiman meliputi Permukiman perkotaan dan Permukiman perkampungan

Selengkapnya kawasan-kawasan tersebut ditampilkan dalam gambar berikut:



Gambar 2. 12 Peta Pembagian Wilayah Pembangunan Kabupaten Asmat
Sumber: RTRW Provinsi Papua (2013-2033)



Potensi pengembangan wilayah ditetapkan melalui penetapan Kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Kawasan budidaya dapat berada di kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pemukiman, kawasan industri, Kawasan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan tempat beribadah dan kawasan pertahanan keamanan. Kawasan pertanian diartikan luas meliputi kawasan pertanian, perikanan dan peternakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemerintah Daerah melakukan kebijakan pemanfaatan ruang di Kabupaten Asmat dan rencana pengelolaan pemanfaatan ruang yang terdiri dari rencana pengelolaan budidaya yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Asmat. Pengembangan kawasan pertanian potensial baik tanpa reklamasi, dan atau dengan reklamasi secara fisik, kimia atau hidroteknik atau reklamasi yang bersifat terbatas. Kawasan pertanian lahan basah diarahkan dalam budidaya lahan basah (rawa) dengan pendekatan ekosistem persawahan rawa pedalaman (rawa lebak) yang tersebar di setiap distrik (Pantai Kasuari, Safan, Kopay, Der Koumor, Fayit, Atsy, Sirets, Betsbamu, Ayib, Agats, Akat, Jetsy, Suator, Suru Suru dan Sawa Erma).

Pencetakan sawah di lakukan di Pantai Kasuari Kampung Amaru, Amkay, Sagare, Yefu da Yaosakor serta di Distrik Sawa Erma dan Atsy. Pengembangan perkebunan yang direkomendasikan dapat ditanam di lahan kering adalah karet, kelapa, kelapa sawit, kakao, pala, jahe dan kapulaga yang tersebar di Pantai Kasuari (Kampung Abohoi, Bawor, Esep), Suator (Kampung Wagobis, assamur, Batusun, Asarep, Butu Katnau, Pustut), Sawa Erma (Kampung Tii, Yensuku, Ujin ajin, Jifak). Pengembangan kawasan budidaya perikanan adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan budidaya dalam rangka mendukung program utama intensifikasi budidaya ikan maupun non ikan melalui pelaksanaan kaji terap teknologi budidaya untuk menunjang pengembangan kegiatan budidaya.

Budidaya perikanan di Kabupaten Asmat ini meliputi budidaya perikanan pantai (laut) dengan mengembangkan perikanan tangkap, perikanan payau (tambak) dan perikanan air tawar dengan mengembangkan perikanan budidaya. Pengembangan perikanan budidaya terletak di Kampung Sona Distrik Sawa Erma, Kampung Beco Distrik Akat dan Kampung Binam Distrik Suator. Kawasan peternakan secara khusus diperuntukkan bagi kegiatan peternakan melalui pengembangan sentra ternak dalam skala besar maupun kecil. Pengembangan sektor peternakan adalah meningkatkan produksi dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat. Peternakan dengan jenis ternak tertentu seperti itik dan entong, pada kawasan lahan basah, dan pengembangan peternakan lahan kering seperti ayam, sapi, dan babi. Peternakan tersebut dapat dikembangkan di sebagian besar wilayah Kabupaten Asmat; di Distrik Pantai Kasuari, Kopay, Der Koumor, Safan, Sawa Erma, Pulau Tiga, Atsy, Ayip, Jetsy, Sirets, Suator, Suru Suru, Akat, Agats dan Distrik Fayit. Rencana pengembangan kawasan peternakan rakyat



yang berbasis agribisnis dan tersebar di setiap distrik dapat memberikan kecukupan daging, telur dan susu, sekaligus meningkatkan pendapatan.

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Merujuk dari dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045, Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) merupakan kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara Daya Tampung Lingkungan Hidup (DTLH) merupakan kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (UU PPLH 32/2009).

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) salah satunya dapat dikuantifikasi menggunakan nilai ambang batas dan status jasa ekosistem penyedia, yaitu jasa penyedia pangan dan jasa penyedia air. Kedua jenis jasa ekosistem tersebut dipilih karena merupakan dua sumber daya yang menjadi kebutuhan dasar manusia.

Adapun daya dukung yang ditampilkan dalam RPJMD Kabupaten Asmat 2025-2029 ini meliputi daya dukung Air, daya dukung pangan dan daya tampung Permukiman (tekanan perubahan penduduk). Ketiga komponen tersebut disarikan dari Kajian KLHSnya dan dijelaskan sebagai berikut:

a) Daya Dukung Air

Berdasarkan hasil perbandingan antara ketersediaan air (SA) dengan kebutuhan air (DA), maka dapat dilihat bahwa status daya dukung air di Kabupaten Asmat hingga tahun 2022 masih dalam kondisi belum terlampaui di seluruh distrik dalam wilayah kabupaten Asmat. Kondisi ketersediaan air permukaan berdasarkan jenis dan koefisien tutupan lahan dengan kondisi curah hujan menunjukkan angka mencapai 4.349.143.488 (m³/Tahun), sementara untuk kebutuhan air layak dengan jumlah penduduk di tahun 2022 sebesar 113.524 jiwa baru mencapai 181.638.400 (m³/Tahun). Dengan kondisi tersebut maka terlihat selisih antara ketersediaan dan kebutuhan masih sangat besar mencapai 4.167.505.088 (m³/Tahun). Berdasarkan luasan status daya dukung air, terdapat beberapa wilayah pada setiap distrik menunjukkan status defisit (warna merah pada Peta Daya Dukung Air) dengan luasan sebesar 4.468 ha atau sekitar 0,18% dari total luas wilayah kabupaten Asmat, dan kondisi defisit ini terjadi pada umumnya di kawasan permukiman dan usaha pertanian atau perkebunan.

b) Daya Dukung Pangan

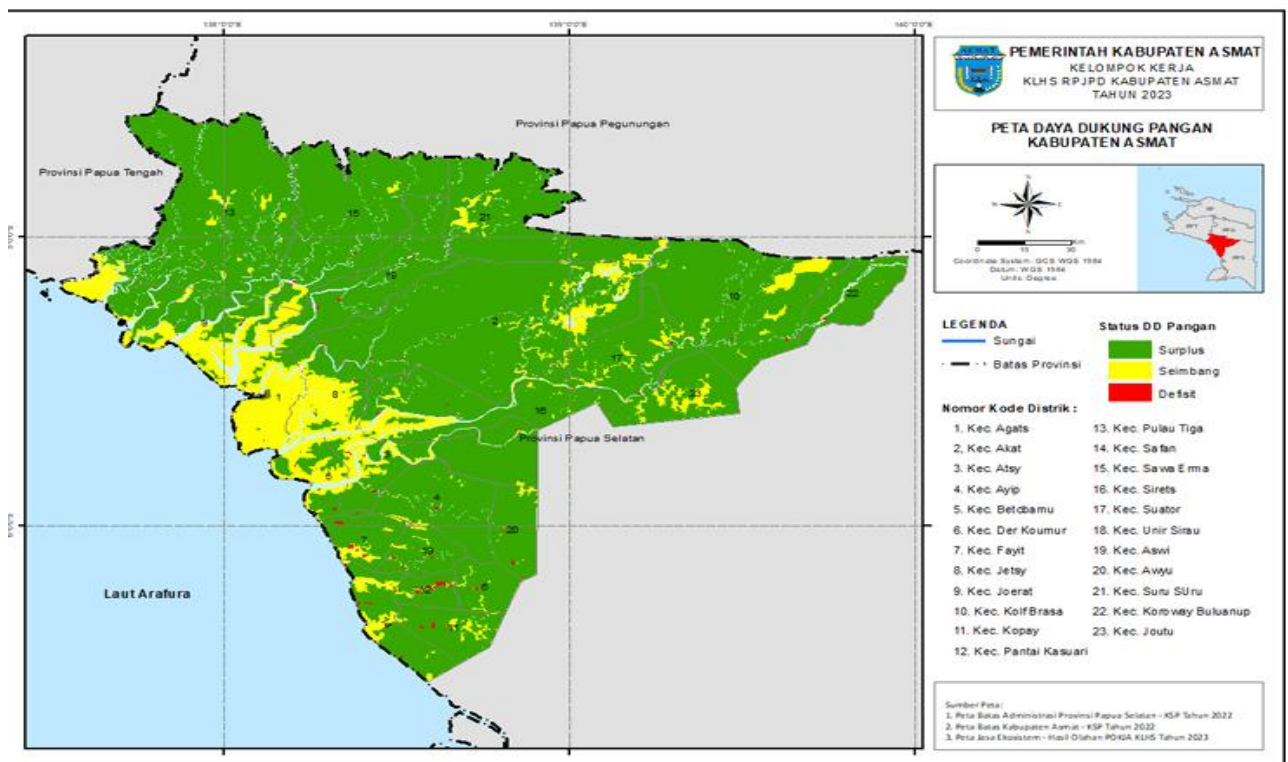
Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Daya dukung pangan dihitung untuk melihat status daya dukung pangan, dimana status daya dukung dilihat dari ambang batas daya dukung. Daya dukung



dikatakan telah melampaui ambang batas jika kebutuhan pangan lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaan yang dapat diberikan suatu wilayah. Perhitungan kapasitas daya dukung pangan di kabupaten Asmat adalah dengan melihat perbandingan antara jumlah ketersediaan pangan (total jumlah energi yang dihasilkan dari komoditas lokal) dibandingkan dengan Kebutuhan Energi bahan pangan yang diperoleh melalui perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG) penduduk Kabupaten Asmat tiap grid selama setahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia, maka nilai AKG bagi kebutuhan pangan adalah sebesar 2.150 kkal per kapita/hari. AKG yang dianjurkan ini adalah suatu kecukupan rata-rata gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kabupaten Asmat tahun 2024, terdapat beberapa jenis komoditas bahan pangan yang dibutuhkan untuk pemenuhan kecukupan energi, namun dari antara beberapa jenis komoditas bahan pangan tersebut, hanya jenis bahan pangan sagu yang memiliki data terupdate yang selanjutnya digunakan untuk menghitung jumlah ketersediaan energi di Kabupaten Asmat pada saat kajian ini dilakukan. Data survey produksi tanaman perkebunan rakyat di kabupaten Asmat menurut jenis tanaman pada tahun 2021 menunjukkan total jumlah produksi sagu dalam bentuk tepung sagu di 23 distrik sebesar 10.926,50 ton pada total luas area panen sebesar 2.186 hektar dari 4.292 hektar yang tersedia. Jumlah tepung sagu sebesar 10.926,50 setara dengan 26.223.600.000 (kkal) energi yang dibutuhkan penduduk kabupaten Asmat di Tahun 2021. Apabila dihitung jumlah kebutuhan energi penduduk Kabupaten Asmat di tahun 2021, maka terlihat bahwa ketersediaan energi dari bahan pangan sagu yang ada belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dalam pemenuhan energi masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan angka kebutuhan dan ketersediaan energi, terlihat bahwa jumlah total energi yang dibutuhkan oleh penduduk kabupaten Asmat di tahun 2021 adalah sebesar 89.087.959.000 (kkal) energi, dan apabila dibandingkan dengan ketersediaan energi dari bahan pangan lokal yang ada yaitu tepung sagu maka terlihat masih sangat minus mencapai -62.864.359.000 kkal. Konsumsi pangan yang cukup merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi tubuh. Apabila tubuh kekurangan zat gizi, khususnya energi dan protein dalam jangka waktu tertentu berdampak pada menurunnya produktivitas kerja. Pola konsumsi pangan yang terlalu tergantung pada satu jenis pangan dapat menimbulkan beberapa masalah. Pertama, keadaan pangan akan selalu rawan karena apabila terjadi kekurangan dalam jenis pangan ini akan timbul kerisauan di dalam masyarakat. Kedua, pola konsumsi pangan yang mengutamakan satu jenis pangan tidak dapat menjamin keseimbangan gizi yang memadai. Perubahan pola konsumsi pangan lokal dari umbi umbian dan sagu menjadi beras menyebabkan ketergantungan terhadap produksi beras yang cukup tinggi di Kabupaten Asmat saat ini. Data Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat kurang lebih 95 hektar lahan sawah yang telah dilakukan kegiatan penanaman di yang tersebar di 7 Distrik (14 Kampung). Kondisi ini diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan lokal selain sagu dan umbi-umbian, sehingga



ketergantungan dengan produksi beras import dari luar wilayah semakin lama semakin berkurang demi meningkatkan ketahanan pangan di kabupaten Asmat. Dari hasil analisa ketersediaan pangan yang mempengaruhi daya dukung pangan dengan menggunakan sistem grid, terlihat bahwa kondisi daya dukung ketersediaan pangan pada daerah yang merupakan kawasan pemukiman dalam kondisi “defisit”, sementara masih masih hampir sebagian besar wilayah masih berstatus “surplus” dan memiliki potensi untuk mendukung kebutuhan pangan di Kabupaten Asmat. Berikut gambar (peta) yang menunjukkan daya dukung pangan di Kabupaten Asmat, sebagai berikut :

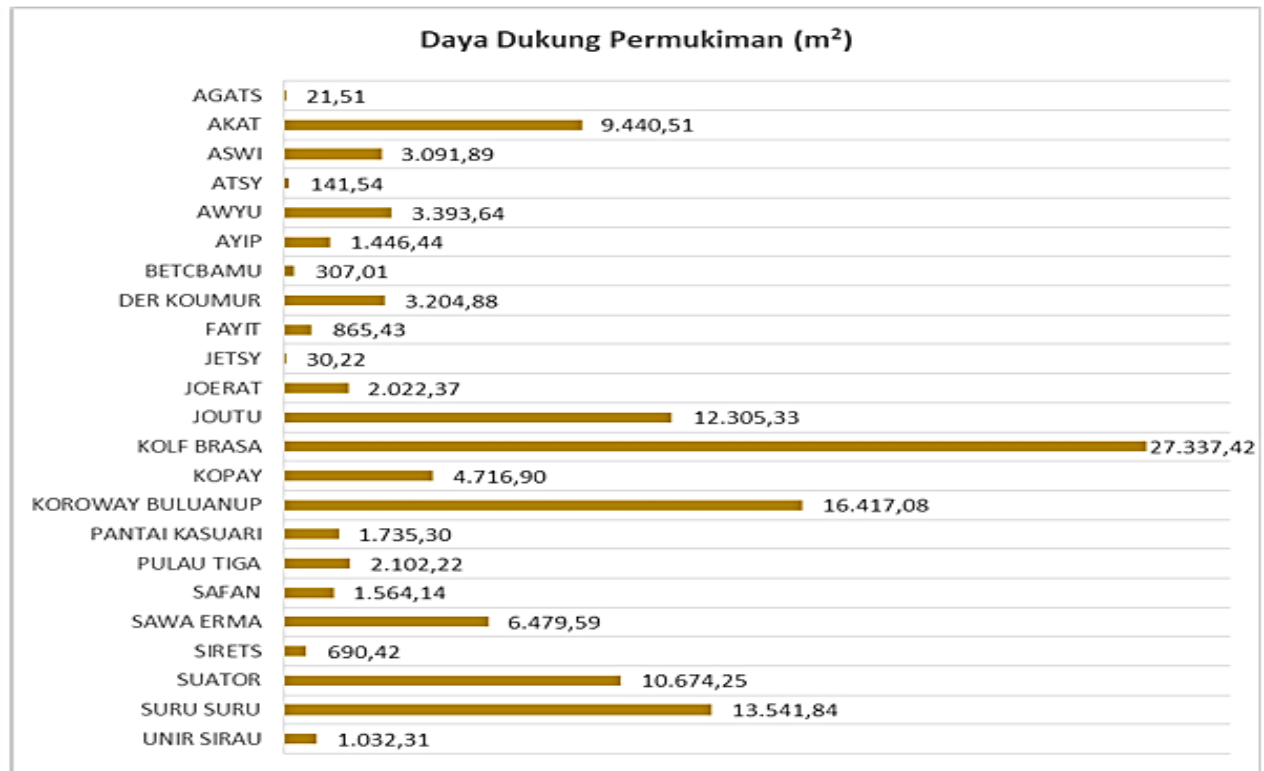


Gambar 2. 13 Daya Dukung Pangan Kabupaten Asmat Tahun 2023

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029

c) Daya Tampung Pemukiman

Perhitungan daya dukung permukiman dilakukan menggunakan batas deliniasi Distrik/Kecamatan pada 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Asmat, dan berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan formula diatas, terlihat bahwa rata-rata DDP > 1, namun dari sisa luas lahan yang tersedia di beberapa distrik sudah sangat sedikit dan perlu diantisipasi untuk memastikan ketersediaan lahan permukiman di masa mendatang, antara lain di distrik Agats yang tersedia sisa 21,51 m² dan di distrik Jetsy sebesar 30,22 m², lihat grafik berikut ini.



Gambar 2. 14 Daya Tampung Pemukiman di Kabupaten Asmat

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Asmat 2025-2029

2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

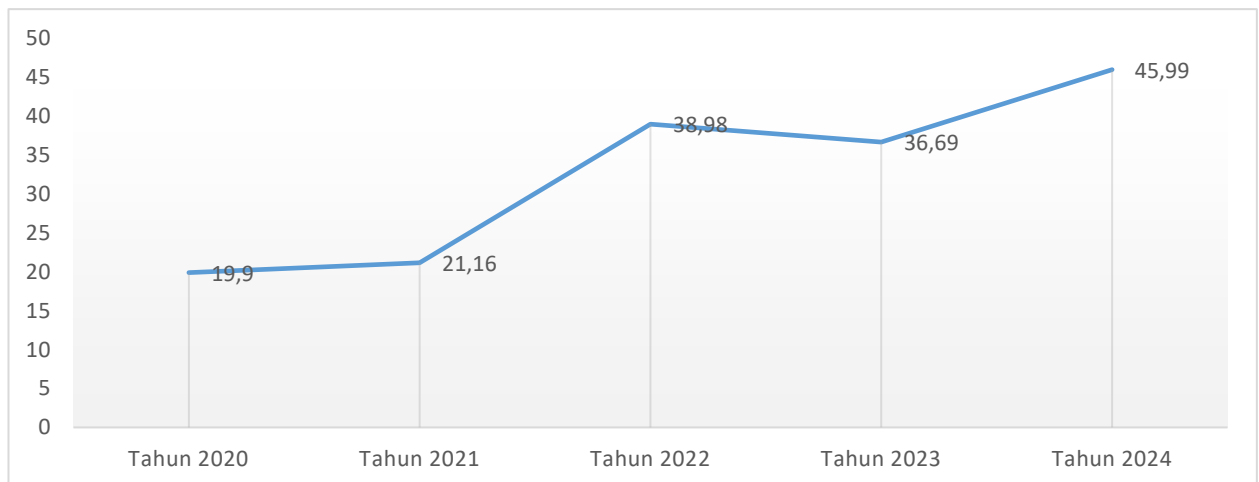
Kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan, dimana terdapat beberapa indikator yang perlu dipenuhi dan merupakan kinerja pemerintah Kabupaten Asmat, diantaranya : Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum, dan indikator lainnya. Di bagian ini diperlihatkan Indeks Ketahanan Pangan dan dan Prefalensi Ketidak Cukupan Pangan.

a. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka memenuhi tingkat ketahanan pangan suatu wilayah Badan Pangan Nasional membuat sistem penilaian yang telah dikembangkan dalam bentuk IKP dengan mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk ketahanan pangan. Terdapat sembilan indikator penyusun IKP yang kemudian diturunkan menjadi tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.



Indeks ketahanan pangan Kabupaten Asmat pada tahun 2020 hingga 2024 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, indeks ketahanan pangan Kabupaten Asmat sebesar 19,9 meningkat menjadi 38,98 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam aspek ketahanan pangan di Kabupaten Asmat menunjukkan ada keberhasilan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023. Selengkapnya perkembangan indeks ketahanan pangan Kabupaten Asmat dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 15 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Asmat Tahun 2020- 2024

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional, Tahun 2025

b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Ketidacukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) merupakan proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan.

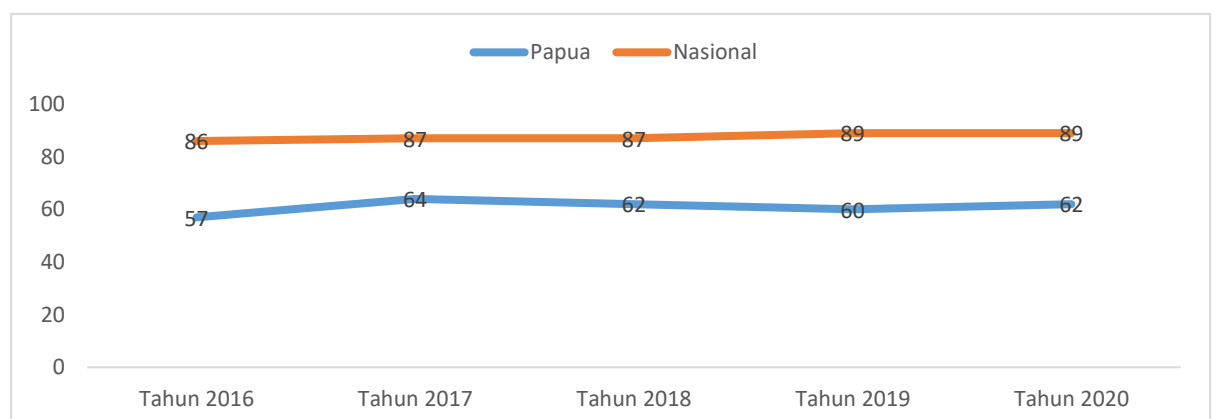
Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan Kabupaten Asmat pada tahun 2020-2024 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan Kabupaten Asmat sebesar 39,38 menjadi 37,05 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan angka nasional, nilai tersebut lebih tinggi dari capaian nasional selama periode tahun 2020-2024, sebagaimana pada grafik di bawah ini:



Gambar 2. 16 Prefalensi Ketidacupan Konsumsi Pangan diKabupaten Asmat
Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2025

c. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak dan Aman

Persentase rumah tangga dengan akses sumber air minum layak dan aman untuk Kabupaten Asmat lebih detail datanya hanya bisa digambarkan dari deskripsi presentasinya secara provinsi. Dalam hal ini provinsi Papua (induk). Besarnya persentase akses yang masih di bawah 62%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar yang harus diatasi untuk memastikan semua rumah tangga di Provinsi Papua termasuk Kabupaten Asmat dapat menikmati akses air minum yang layak dan aman.



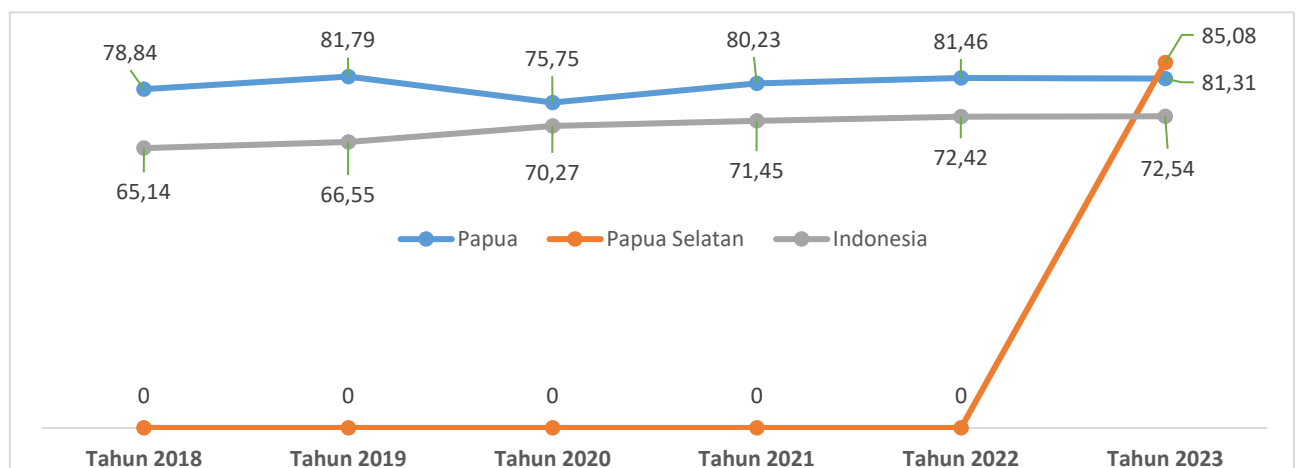
Gambar 2. 17 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak dan Aman Tahun 2016-2020

Sumber: Dirjen Cipta Karya, KEMENPUPR, Tahun 2021



2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Kualitas lingkungan hidup dirermati dapat diukur dari Indeks Kondisi Lingkungan Hidup yang menggambarkan kondisi udara, air dan lingkungan. Dari penelusuran yang dilakukan data secara publik, Indeks tersebut data data Indeks tersebut anya belum tersedia. Namun bila diproksi dari kondisi rawa, hutan dan sungai serta curah hujan, ketiga kategori tersebut masih sangat baik. Bisa dipastikan kualitas Karena itu, dapat dikatakan lingkungan hidup di Kabupaten Asmat cenderung berkualitas. Untuk meandapatkan gambaran tersebut dan sebagai gambaran, maka kajian ini ditampilkandapat didekati dari Indeks Kualitas Lingkungan Provinsi Papua (sebelum pemekaran). Dari gambaran dibawah ini nampak bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2018 sampai tahun 2022, rata-rata 80 dalam kategori baik dan diatas angka Indeks Nasional. Meskipun demikian harus diwaspadai mengingat aktifitas pembangunan yang tengah dilakukan cukup tinggi, maka hendaknya pertimbangan lingkungan selalu menjadi utama. Hal tersebut, diperlihatkan sebagai berikut:



Gambar 2. 18 Indeks Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2018-2023

Sumber: Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup-RI, Tahun 2025

2.1.6. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

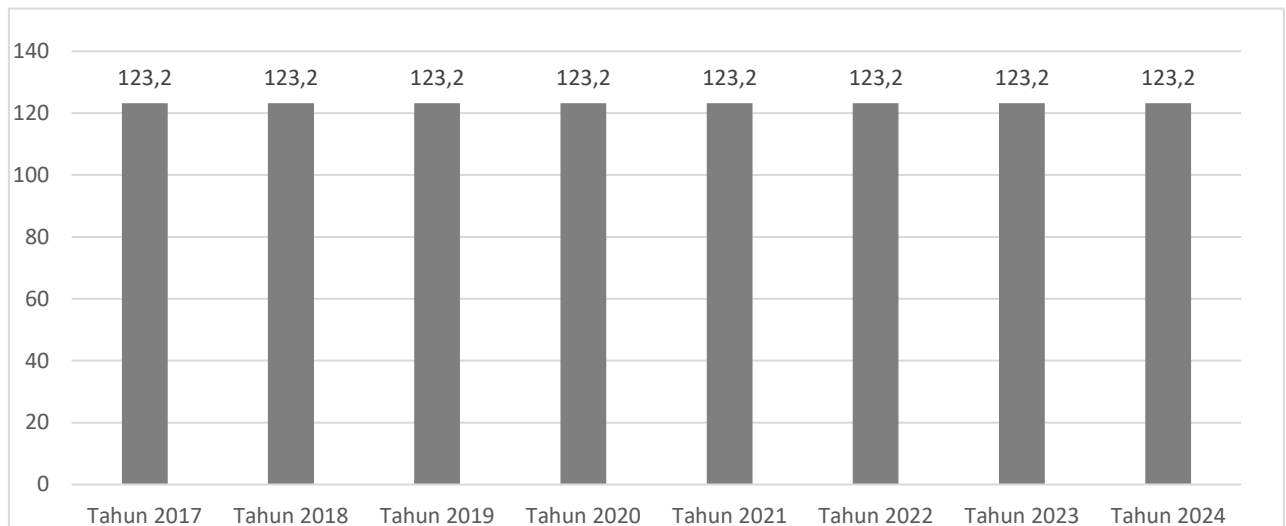
Kondisi ini merupakan kemampuan masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem untuk bertahan dan bangkit kembali setelah terkena dampak peristiwa ekstrem atau perubahan lingkungan. Dimana pemerintah Kabupaten Asmat perlu meningkatkan kinerja terhadap beberapa indikator sesuai kebutuhan daerah, diantaranya : Penurunan Intensitas Emisi GRK, Indeks Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2.1.6.1. Indeks Resiko Bencana

IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif



yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Kabupaten Asmat ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 2. 19 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Asmat Tahun 2017-2024

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025

Sesuai penelusuran diperoleh informasi Data Indeks bencana Kabupaten Asmat tersedia tahun 2017 sampai 2024, seperti pada gambar diatas. Dari Gambar diatas nampak bahwa Kabupaten Asmat klasifikasinya berada 13 - 144. Artinya masuk pada klasifikasi sedang, dan merupakan daerah yang memiliki indeks resiko bencana sedang dibandingkan dengan daerah-daerah lainya di Provinsi Papua Selatan.

2.1.7. Demografi

2.1.7.1. Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan penduduk di Kabupaten Asmat selama ini bergantung pada metode perhitungannya. Sesuai data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024, penduduk Kabupaten Asmat adalah sebanyak 120.902 jiwa yang terdiri atas 62.879 jiwa penduduk laki-laki dan 58.023 jiwa penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan total penduduk di tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Asmat tahun 2023-2024 sebesar 4,05 persen.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat kepadatan penduduk di Kabupaten Asmat tahun 2024 mencapai 4,83 jiwa/km². Artinya setiap 1 km² terdapat 3-4 jiwa. Kepadatan penduduk di 25 distrik cukup beragam dengan



kepadatan penduduk tertinggi terletak di Distrik Agats yaitu sebesar 35 jiwa/ km² dan terendah di Distrik Sor Ep sebesar 1 jiwa/ km². Seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Menurut Distrik Tahun 2019-2024

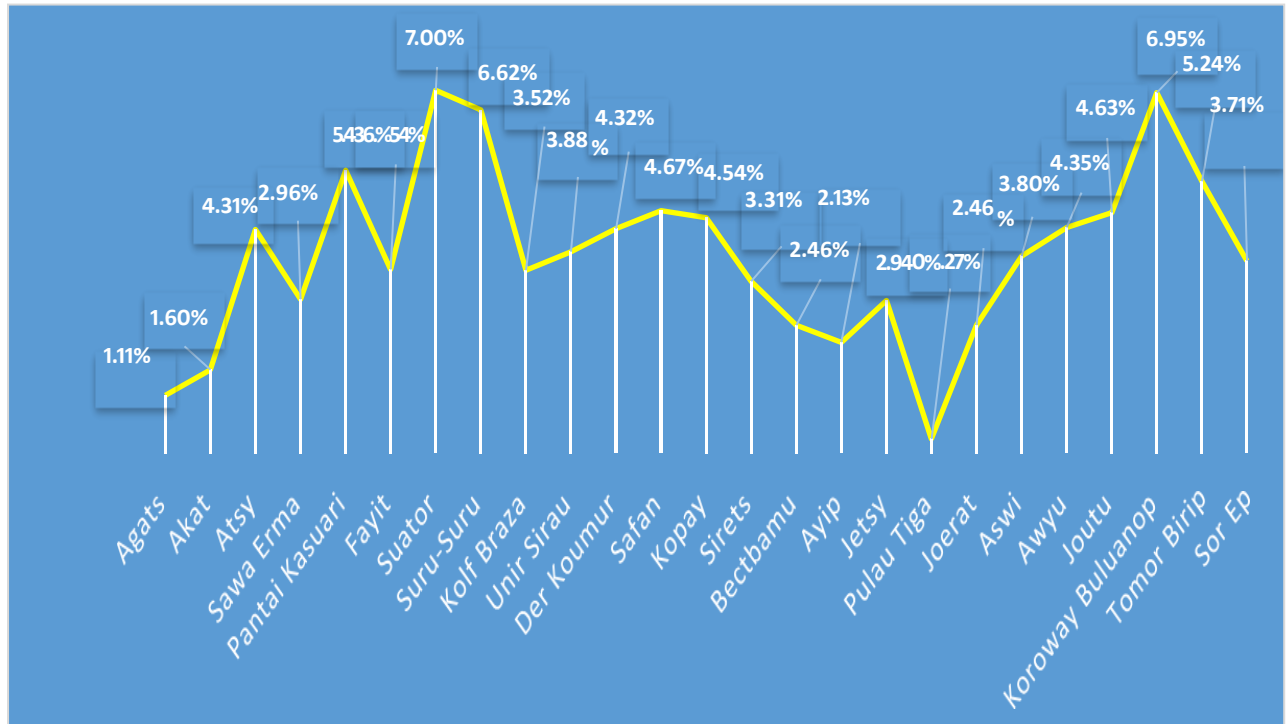
NO	Distrik	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Agats	15.529	15.841	24.809	24.861	24.837	25.113
2	Akat	4.333	4.420	5.721	5.885	2.807	2.852
3	Atsy	6.435	6.564	7.071	7.190	7.069	7.374
4	Sawa Erma	7.420	7.569	5.958	6.167	6.309	6.496
5	Pantai Kasuari	4.678	4.772	5.150	5.281	5.168	5.450
6	Fayit	5.807	5.924	5.584	5.713	6.700	6.937
7	Suator	3.594	3.666	3.271	3.355	4.031	4.313
8	Suru-Suru	1.817	1.853	4.524	4.488	3.144	3.352
9	Kolf Braza	1.720	1.755	2.806	2.868	1.788	1.851
10	Unir Sirau	3.727	3.802	3.274	3.386	1.881	1.954
11	Der Koumur	4.245	4.330	4.080	4.136	4.740	4.945
12	Safan	7.034	7.175	6.953	7.042	8.303	8.691
13	Kopay	3.547	3.618	3.743	3.822	4.033	4.216
14	Sirets	3.966	4.046	4.381	4.459	4.681	4.836
15	Bectbamu	3.056	3.117	2.785	2.860	3.327	3.409
16	Ayip	1.895	1.933	2.094	2.131	2.343	2.393
17	Jetsy	2.259	2.304	2.636	2.688	2.859	2.943
18	Pulau Tiga	3.475	3.545	3.588	3.655	4.077	4.088
19	Joerat	2.861	2.918	2.996	3.051	3.246	3.326
20	Aswi	3.160	3.224	3.855	3.979	3.869	4.016
21	Awyu	2.211	2.255	2.863	2.939	2.850	2.974
22	Joutu	2.053	2.094	2.158	2.199	2.352	2.461
23	Koroway Buluanop	750	765	1.332	1.369	1.583	1.693
24	Tomor Birip	-	-	-	-	2.461	2.590
25	Sor Ep	-	-	-	-	2.535	2.629
Jumlah		97.594		113.658	115.552	116.993	120.902

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Asmat 2024

Tabel diatas menjelaskan jumlah penduduk tinggi terjadi Agats sebagai ibukota Kabupaten Asmat dimana pusat pemerintahan berada dan pusat interaksi ekonomi. Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan



perpindahan penduduk dari dalam keluar. Pada hakekatnya migrasi penduduk merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Migrasi pada umumnya terkait dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran serta daya tarik suatu daerah karena dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber-sumber penghidupan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berikut ini trendline dinamika penduduk menurut distrik, ditampilkan pada gambar berikut:

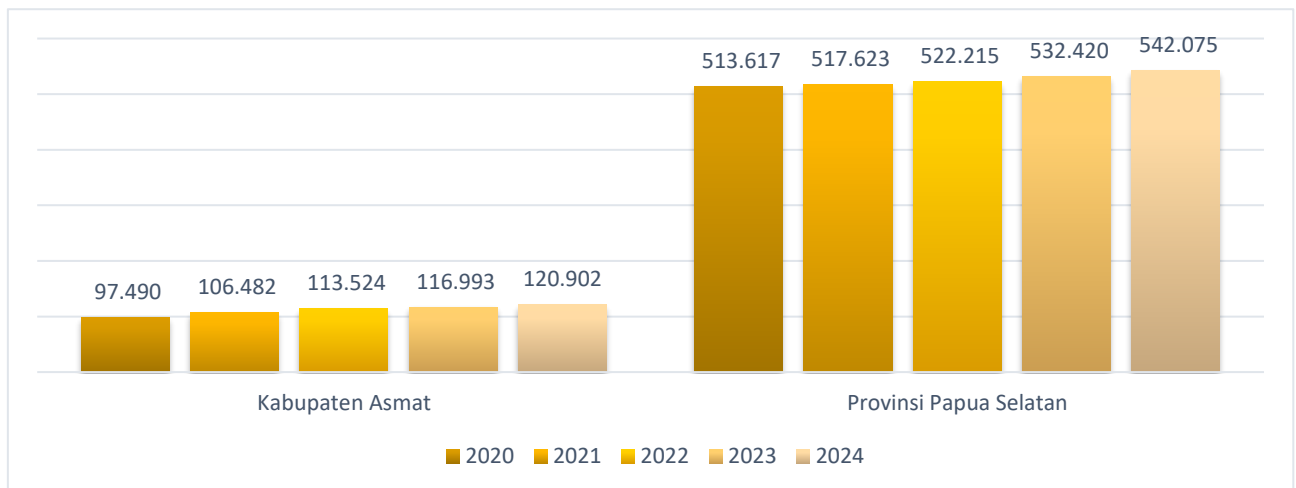


Gambar 2. 20 Trendline Presentase Pertumbuhan Penduduk Menurut Distrik di Kabupaten Asmat Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Asmat, 2024

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Asmat pada tahun 2024 semakin bertambah, Pertumbuhan penduduk terbesar terjadi pada distrik Suator yaitu sebesar 7% pada tahun 2024 di ikuti Distrik Koroway Buluanop sebesar 6,95% dan Suru-Suru sebesar 6,62%.

Pertumbuhan Penduduk terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar 12,94%, 2021 sebesar 1,39%, 2022 sebesar 1,69%, 2023 sebesar 2,63% hingga pada tahun 2024 pertumbuhan penduduk meningkat menjadi 4,05%. Jumlah penduduk Kabupaten Asmat pada tahun 2024 berjumlah 120.902 jiwa. Data perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Asmat selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 21 Grafik Perbandingan Perkembangan Jumlah Penduduk 2020-2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Asmat & Papua Seleatan Dalam Angka, 2024

Kepadatan penduduk di Kabupaten Asmat dikatakan masih sangat rendah, karena rata-rata kepadatan penduduk hanya sebesar 4,74 jiwa/km² per tahun selama periode 2020-2024. Sementara untuk kepadatan rumah tangga sebesar 3,78 jiwa/kk, dengan kata lain untuk setiap kepala keluarga di Kabupaten Asmat terdapat 3 sampai 4 jiwa yang menetap bersama. Kepadatan penduduk Kabupaten Asmat perluas wilayah adalah 4,74 jiwa/km², yang berarti setiap 1 km² dihuni oleh 4 sampai 5 penduduk.

Tabel 2. 9 Tingkat Kepadatan Pendudukan Kab. Asmat Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Luas Kabupaten Asmat (km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/ km2)
1.	2020	31.964,89	97.490	3,90
2.	2021	31.964,89	106.482	4,46
3.	2022	25.015,36	113.524	4,54
4.	2023	25.015,36	116.993	3,63
5.	2024	25.015,31	120.902	4,83

Sumber: Kabupaten Asmat Dalam Angka, 2024 & Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat, Tahun 2024

Indikator kependudukan lainnya yang juga penting adalah sex ratio, dimana sex rasio ini dapat menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan. Jika sex ratio dikalikan 100 maka dapat diartikan bahwa tiap 100 penduduk laki-laki terdapat sekian penduduk perempuan. Pada umumnya sex ratio nilainya dibawah 100, hal ini dikarenakan penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki, tetapi hal ini tidak terjadi di Kabupaten Asmat, justru sebaliknya bahwa sex ratio rata-rata diseluruh distrik di atas 100 yaitu: jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan.

Sex ratio dipakai untuk melihat perubahan penduduk menurut jenis kelaminnya. Dengan membandingkan besarnya sex ratio dari tahun sebelumnya akan membawa



kita pada sebuah pertanyaan mengapa perubahan itu terjadi. Perubahan itu bisa terjadi karena kelahiran, kematian dan migrasi. Sebagai contoh di Kabupaten Asmat, angka sex ratio pada tahun 2020 adalah 107,8 kemudian mengalami penurunan kenaikan pada tahun 2024 menjadi 108,49 dengan asumsi bahwa setiap 100 penduduk perempuan ada sekitar 108 penduduk laki-laki.

Struktur penduduk Kabupaten Asmat berdasarkan ilustrasi piramida penduduk di atas menggambarkan struktur umur yang ada di Kabupaten Asmat. Model piramida penduduk di Kabupaten Asmat menunjukkan pola bentuk ekspansi (piramida penduduk muda). Dasar piramida yang merupakan penduduk kelompok usia 0-4 tahun masih sangat lebar dibandingkan kelompok usia lainnya, dimana hal ini mengindikasikan dampak kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana (KB) di Asmat belum signifikan atau terlihat. Ujung piramida yang cukup curam menunjukkan masih rendahnya angka harapan hidup penduduk Asmat.

Tabel 2. 10 Jumlah Penduduk Kab. Asmat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2024

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0-4	5,680	5,085	10,765
5-9	11,508	10,750	22,258
10-14	9,301	8,407	17,708
15-19	6,882	5,979	12,861
20-24	4,925	4,514	9,439
25-29	4,550	4,087	8,637
30-34	3,718	3,752	7,470
35-39	3,902	3,912	7,814
40-44	3,285	3,346	6,631
45-49	3,150	2,895	6,045
50-54	2,026	1,820	3,846
55-59	1,822	1,575	3,397
60-64	1,007	923	1,930
65-69	620	518	1,138
70-74	320	274	594
75+	183	186	369
Asmat	62,879	58,023	120,902

Sumber: Asmat Dalam Angka, 2025

Selain pembagian (*cluster*) kependudukan menurut perngelompokan di atas, profil demografi penduduk Asmat yang bekerja ditampilkan pula dalam gen kekinian berdasarkan generasi dan status kelahiran dapat dilihat pada tabel dibawah ini, sebagai berikut:



Tabel 2. 11 Gambaran Pengelompokan Penduduk Menurut Generasi

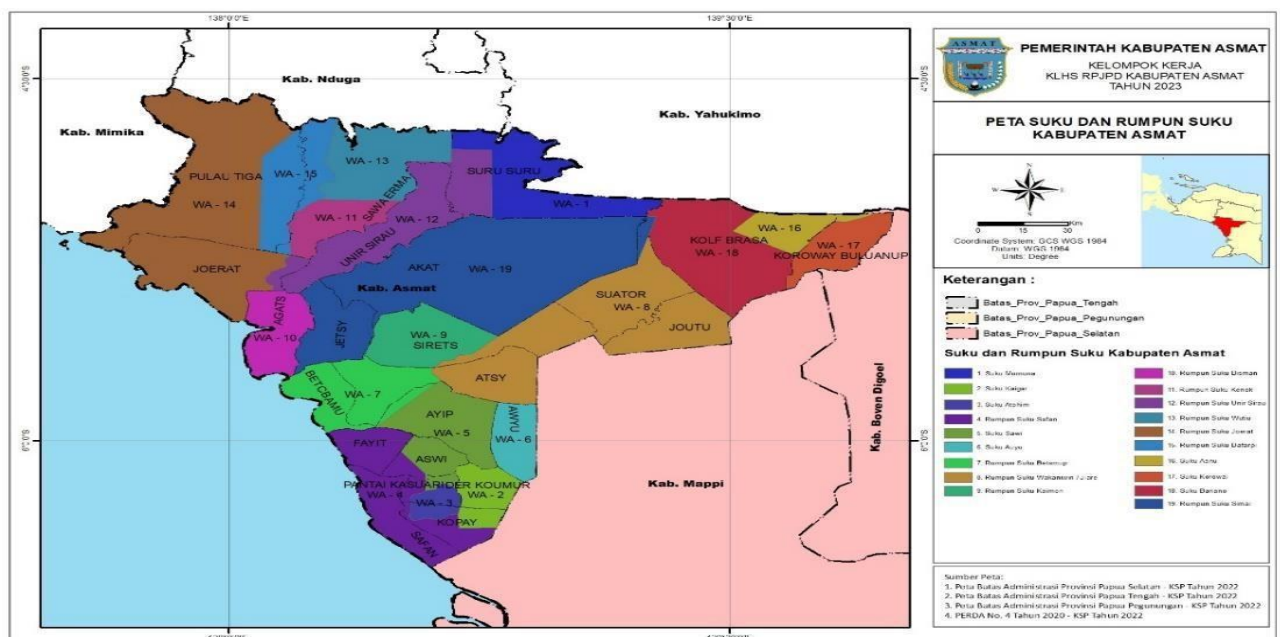
Hasil Long Form sensus penduduk 2020		Perkiraan
Komposisi Penduduk Bekerja	Sensus 2020	PYB 2020
Gen Z (10-15 tahun)	21,36%	10.929
Milenial (26-41 tahun)	44,54%	22.789
Gen x (42-47 tahun)	26,02%	13.313
Baby Boomer (58-76 tahun)	7,41%	3.791
Pre Boomer (>77 tahun)	0,67%	343
Jumlah		51.165

Sumber : BPS 2020

Dari tabel di atas nampak bahwa demografi penduduk Asmat didominasi oleh generasi Mileneal (26-41 tahun) Tahun sekitar 44,54% disusul Gen – X kisaran umur (42-47 tahun) tahun sebesar 26,02 %, lalu diikuti oleh generasi Z (10-15 tahun) sebesar 21,36 %.

2.1.7.2. Kondisi Masyarakat Asli Asmat

Otonomi khusus melalui peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang Pengakuan dan Hak Masyarakat Hukum Adat maka pemerintah kabupaten Asmat telah mengakui eksistensi dan keberadaan entitas orang Asli Papua terdiri dari 12 Forum Adat Rumpun dan 8 suku. Keberadaan posisi wilayah adat dan suku dalam administrasi kabupaten, dapat dilihat pada posisi wilayah adat setiap FAR yang ada di Asmat pada 23 distrik tersebar di 224 kampung di bawah ini :



Gambar 2. 22 Peta Suku dan Rumpun Suku Kab. Asmat

Sumber: RPJPD Kab. Asmat, 2025-2045



Adapun penjelasan dari persebaran penduduk menurut wilayah adat diperlihatkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 12 Wilayah Adat Rumpun dan Suku dalam Administrasi Distrik di Kabupaten Asmat

No	Distrik	Luasan (ha)	Kampung	Wilayah Adat
1	AGATS	70.000,26	Asuwetsy, Bis Agats, Bisman, Bou, Briten, Kaye, Mbait, Per, Saw, Suwru, Uwus, Yomoth (12)	Bisman
				Simai
2	AKAT	348.594,09	Ayam, Bayiw, Pinam, Beco, Buetkwar, Cumnew, Fakan, Jewes, Menepsimni, Simini, Waw, Yuni (11)	Momuna
				Wakaniwin / Jiare
				Kaimon
				Unir Sirau
3	ATSY	119.075,21	Amanamkai, Ambisu, Atsy, Bakasei, Bine, Bipin, Cewewyamew, Sagoni, Yaisiu (9)	Betsmup
				Wakaniwin / Jiare
				Simai
4	AYIP	87.156,41	Mausi Kawet, Comoro (3)	Sawi
				Betsmup
5	BETCBAMU	47.380,32	Atambuts, Biwar Laut, Desep, Omanesep, Pirpis, Warkai, Yauw (7)	Betsmup
				Simai
6	DER KOUMUR	34.464,04	Amagais, Amaru, Amkai, Amkum, Ero Saman, Yamkap (6)	Kaigar
7	FAYIT	38.468,32	Ocenep, Ais, Bakyor, Basim, Kayarpis, Nanai, Pirien, Sayoa, Waras, Yawas, Isar, Bora, Biopis (13)	Safan
8	JETSY	68.953,72	Amborep, Birak, Dawer, Katew, Pau, Powetsy, Sisakam, Yetsy/Warsa (8)	Kaimon
				Bisman
				Simai
9	JOERAT	130.375,87	Omor, Onavai, Yamas, Yaun, Yeni, Yufri/Smith (6)	Kenok
				Unir Sirau
				Joerat
				Dafarpi
10	KOLF BRASA	203.849,71	Binamzain, Pirabanak, Woutu Braza, Patipi, Woutu Kolof, Sipanap, Pepera, Ulakin, Waijens, Butukatnau, Auban, Bummu, Kapayap1, Kapayap2 (14)	Momuna
				Wakaniwin / Jiare
				Aanu
				Simai
				Korowai
				Banano
11	KOPAY	46.872,13	Aikut, Hahare, Heiyaram, Kaipom, Kawem, Sanem, Airo Sapen, Sasime, Senepit, Wagasu (10)	Kaigar
				Atohim
				Safan
12	PANTAI KASUARI	23.826,76	Bawor, Hainam, Kamur, Sanapai, Sanep, Saramit, Sarmafo, Yagamit,	Atohim
				Safan

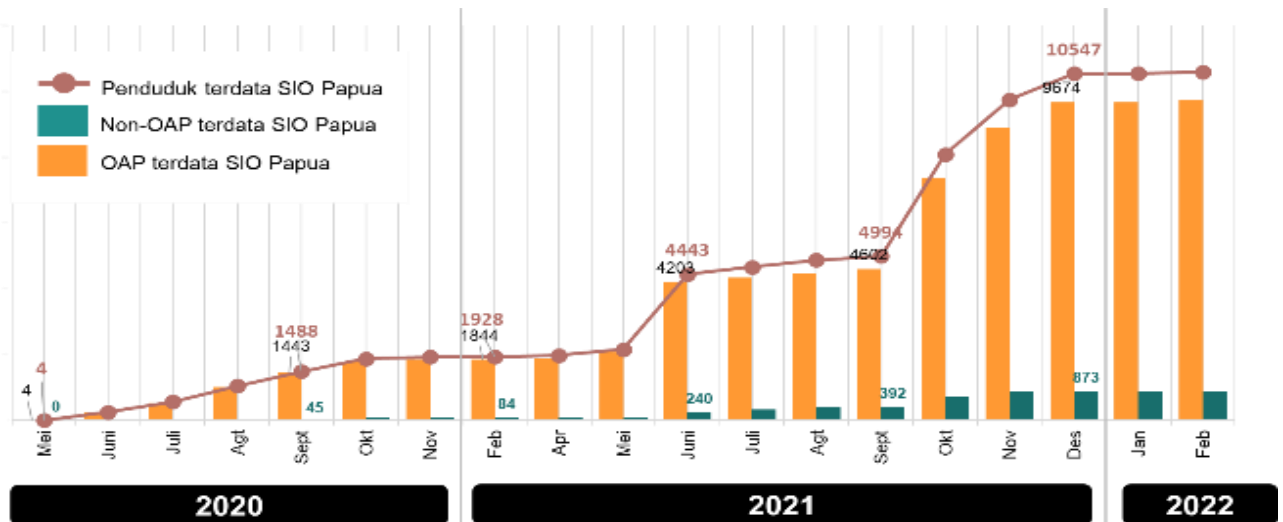


No	Distrik	Luasan (ha)	Kampung	Wilayah Adat
			Yahoi (9)	Sawi
13	PULAU TIGA	312.497,16	Aoep, Aou, As, Atat, Eroko, Esmapan, Fumeripit, Kapi, Nakai, Weo, Yakapis(11)	Joerat Dafarpi
14	SAFAN	58.996,20	Aworkey, Bayun, Emene, Jitorsok, Kagirim, Primapun, Saman, Samendoro, Santabor, Simsagar, Tereo, Yaptambor (12)	Safan
15	SAWA ERMA	198.560,80	Agani, Bu,Er, Erma, Mumugu, Mumugu Dua, Pupis, Sauti, Sawa, Sona (10)	Momuna Kenok Unir Sirau Wutiu Dafarpi Momuna
16	SIRETS	136.061,57	Awok, Biwar Darat, Damen, Fos, Kaimo, Sakor, Waganu, Yaosakor (8)	Wakaniwin / Jiare Kaimon Simai
17	SUATOR	94.908,56	jinak, Wowi, Karbis, Bubis, Binam, Burbis, Waganu Dua, Soray, Wagabus, Emnam (10)	Wakaniwin / Jiare Simai
18	UNIR SIRAU	109.251,61	Abamu, Amor, Ayir, Berip, Komor, Munu, Paar, Werer, Yipawer (9)	Unir Sirau Wutiu Simai
19	ASWI	36.019,92	Piramat, Bawos, Bagair, Tauro, Kagas, Wiyar, Amaita, Akan Tapak, Mapane, Ainamsato (10)	Safan Sawi
20	AWYU	46.757,38	Sohomane, Suagai, Sagare, Yefuwagi, Wagi (6)	Auyu
21	SURU SURU	160.707,05	Ajin, Asgun, Berimono, Besika, Dumaten, Hom-hom, Hulam, Jifak, Katalina, Kebikduk, Koba, Korobuk, Laluk, Linduk, Obio, Sagapu, Salbik, See, Suru-Suru, Tii, Tomor, Walase, Yensuku (23)	Momuna Unir Sirau Banano Simai Wutiu
22	KOROWAY BULUANUP	58.397,73	Mabul, Ayak, Banum, Ujung Batu, Nagatun, Amakot, Kapayap III (7)	Aanu Korowai Banano Korowai
23	JOUTU	70.354,48	Bor, Vakan Dua, Wabak, Vakam, Dekamer, Samnak, Daikot (8)	Wakaniwin / Jiare

Adapun kondisi demografi OAP dan non-OAP di Provinsi Papua Selatan khususnya di kabupaten Asmat telah dilakukan pendataan berbasis kampung melalui



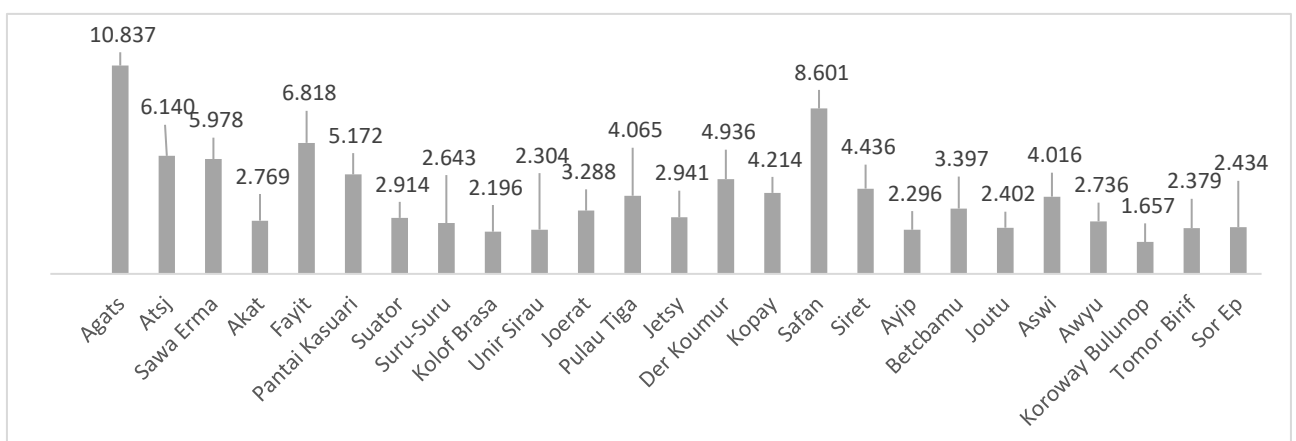
Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua) di wilayah Papua Adapun cakupan pendataan yang dilakukan sampai dengan 21 Maret 2023 di 4 kabupaten di wilayah Papua Selatan sebesar 23.873 jiwa atau 4,69% dari total jumlah penduduk dalam sensus penduduk 2020 (jumlah penduduk dalam SP 2020: 513.617 jiwa). Sedangkan penduduk OAP yang terdata di Kabupaten Asmat pada akhir Tahun 2024 menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebanyak 101.569 jiwa, sedangkan Non-OAP sebesar 19.333 jiwa sehingga penduduk Asli Papua total keseluruhan sebesar 84% jiwa dari total penduduk kabupaten Asmat.



Gambar 2. 23 Grafik Perkembangan Cakupan Pendataan OAP dan Non-OAP di Asmat Dalam SIO Papua (Update: 18 April 2023)

Sumber: Sistem Informasi Orang Papua, 2023

Dari diagram nampak bahwa dominasi penduduk di Kabupaten Asmat adalah Orang Asli Papua. Selanjutnya gambaran komposisi Orang Asli Papua ditunjukkan pada diagram berikut:



Gambar 2. 24 Komposisi OAP di Kabupaten Asmat

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat 2024

Jumlah dan Distribusi Orang Asli Papua/OAP etnik Asmat di kabupaten Asmat melalui data Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil tahun 2024 menunjukkan tingkat penyebaran OAP terbesar terjadi di distrik Agats sebesar 10.837 jiwa atau sekitar 8.96%



dan kemudian distrik Safan dengan 8.601 jiwa atau sekitar 7.11% dan Distrik Fayit sebesar 6.818 jiwa atau sekitar 5.94% Sedangkan Distribusi OAP terendah terjadi di Distrik Koroway Buluanop.

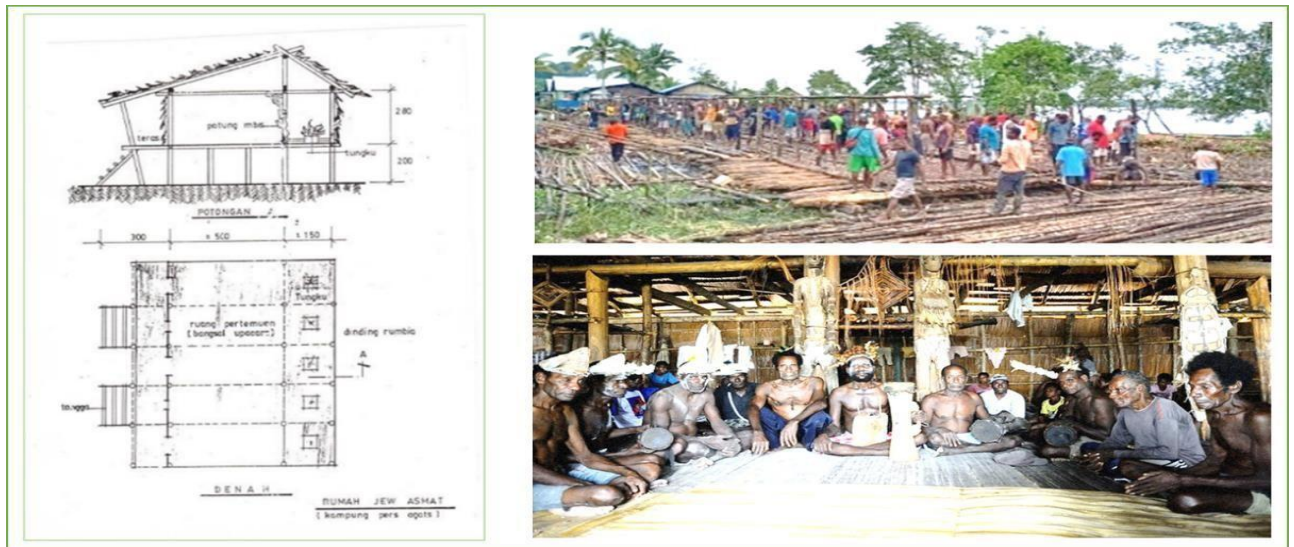
2.1.7.3. Sosial-Budaya Orang Asli Asmat

Suku Asmat mendiami daerah dataran rendah yang berawa-rawa dan berlumpur serta dikelilingi hutan tropis. Daerahnya landai dan dikelilingi ratusan anak sungai. Curah hujan turun sebanyak 200 hari setiap tahun. Suhu minimal 21°C dan maksimal 32°C. Perbedaan pasang dan surut mencapai 4-5 meter. Dengan pengetahuan akan situasi dan keadaan lingkungan disekitar yang terjadi dimanfaatkan oleh masyarakat suku Asmat untuk kapan harus melakukan kegiatan berlayar, apabila air surut, orang Asmat berperahu ke arah hilir dan kembali ke hulu ketika pasang naik. Ini upaya memanfaatkan arus naik dan turun untuk membantu mereka mendayung.

Sistem Pengetahuan dan Teknologi Pembangunan Rumah telah dikenal sejak lama oleh orang Asmat terutama teknologi bahan bangunan. Jew selalu didirikan menghadap ke arah sungai. Sebagai tiang penyangga utama rumah adat, digunakan kayu besi bermotif ukiran Asmat. Jumlah pintu Jew sama dengan tungku api dan patung Mbis (patung gambaran leluhur Orang Asmat). Jumlah pintu ini juga dianggap mencerminkan rumpun Suku Asmat yang berdiam di sekitar rumah adat. Tangganya terbuat dari rangkaian kayu bulat, panjangnya sama dengan ukuran rumah. Di depan Jew, terdapat dayung dan tombak berhiaskan bulu burung Kaka Tua berwarna putih. Benda ini melambangkan kemenangan. Oleh karena itu, Suku Asmat sangat percaya, apapun yang akan dikerjakan, entah berperang ataupun lainnya, jika telah melalui ritual di dalam Jew, pasti berhasil.

Rumah Jew/Yew yang berukuran cukup besar dengan lebar 8 x panjang 12 meter yang tentu menggunakan jenis bahan jenis kayu yang kuat dan tahan pada wilayah pesisir bakau sampai dataran rendah, terutama untuk tiang-tiang penyangga dan pengikat, Keseluruhan proses pembuatan rumah hingga selesai dengan sempurna apabila memenuhi unsur indah dan kuat.

Salah satu hal yang membuat suku asmat cukup dikenal di dunia sampai saat ini adalah hasil ukiran kayu tradisional yang sangat khas dan bercerita biasanya. Beberapa ornamen / motif yang seringkali digunakan dan menjadi tema utama dalam proses pemahatan patung yang dilakukan oleh penduduk suku asmat adalah mengambil tema nenek moyang dari suku mereka, yang biasa disebut mbis. Namun tak berhenti sampai disitu, seringkali juga ditemui ornamen / motif lain yang menyerupai perahu atau wuramon, yang mereka percayai sebagai simbol perahu arwah yang membawa nenek moyang mereka di alam kematian. Bagi penduduk asli suku Asmat, seni ukir kayu lebih merupakan sebuah perwujudan dari cara mereka dalam melakukan ritual untuk mengenang arwah para leluhurnya. Berikut ini diuraikan rangkaian pengetahuan dan teknologi pembuatan rumah Jew/Yew:



Gambar 2. 25 Tradisi Membangun Rumah Jew
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025

Karakteristik Rumah Adat Asmat:

1. Tiang Penyangga, dapat berupa pokok-pohon hidup yang dipangkas pada bagian atas sebagai tempat kedudukan badan rumah dan ditambah lagi dengan beberapa batang kayu untuk memperkuat tiang pokok. Tiang penyangga dipilih kayu yang sama kuat dan besarnya, Untuk memperkuat ikatan pada bagian atas tiang, penyangga, digunakan batang kayu bercabang sebagai kedudukan gelagar/ balok lantai pengikat antar tiang penyangga balok atas.
2. Badan Rumah, Biasanya terdiri dari tiga bagian yaitu: bagian atas rumah, bagian dinding, dan alas/lantai rumah. Pada waktu membangun rumah, setelah tiang penyangga dibuat, pembuatan lantai. Sebagian orang yang terlibat dalam pendirian rumah tersebut, menaiki lantai rumah, menari dan melompat-lompat, rangkaian ini termasuk ritual upacara adat. Setelah pengetesan dilakukan, mulailah dibuat dinding dan bagian atas rumah.
3. Atap Rumah, proses pembuatan atap rumah, membutuhkan keterampilan khusus, karena atap bukan saja dilihat dari fungsinya sebagai penutup bagian atas rumah, akan tetapi kekuatan bahan dan cara pemasangan sangat diperhatikan. Setelah proses menganyam atap (dari daun sagu) selesai dikerjakan oleh juru anyaman, kemudian dipasang oleh orang yang ahli memasang atap. Beberapa jenis bahan yang disiapkan sebelum membangun rumah antara lain: Batang kayu bulat (tiang penyangga, rangka dinding dan atap rumah), Bilah batang dan kulit sagu (lantai rumah), Daun sagu (untuk atap rumah).
4. Tali rotan/ kulit kayu (sebagai pengikat).
5. Selain rumah adat Jew rumah adat lainnya adalah rumah Tysem, atau biasa diartikan rumah keluarga, karena dihuni oleh mereka yang telah berkeluarga, biasanya ada dua sampai tiga pasang keluarga yang mendiami tysem. Ukuran tysem lebih kecil dibandingkan jew, dan biasanya, rumah tysem dibuat mengelilingi rumah jew.



Gambar 2. 26 Model Rumah Tysem dan Rumah Pohon Korowai

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025

Karya seni suku asmat yang cukup dikenal di dunia sampai saat ini adalah hasil ukiran kayu tradisional yang sangat khas dan bercerita biasanya. Beberapa ornamen / motif yang seringkali digunakan dan menjadi tema utama dalam proses pemahatan patung yang dilakukan oleh penduduk suku asmat adalah mengambil tema nenek moyang dari suku mereka, yang biasa disebut mbis. Namun tak berhenti sampai disitu, seringkali juga ditemui ornamen / motif lain yang menyerupai perahu atau wuramon, yang mereka percayai sebagai simbol perahu arwah yang membawa nenek moyang mereka di alam kematian. Bagi penduduk asli suku asmat, seni ukir kayu lebih merupakan sebuah perwujudan dari cara mereka dalam melakukan ritual untuk mengenang arwah para leluhurnya.

2.1.7.4. Pemanfaatan Flora dan Fauna sebagai sumber penghidupan masyarakat asli Suku Asmat

Pemanfaatan flora dan fauna di lingkungan orang Asmat dapat ditemui seperti sagu. Sagu merupakan makanan pokok orang Asmat. Sagu diibaratkan wanita karena kehidupan keluar dari pohon sagu sebagaimana kehidupan yang keluar dari Rahim ibu. Kayu kuning sangat berharga bagi orang Asmat sebagai bahan utama ukiran, pahatan dan kapal. Rotan sebagai bahan utama pembuatan keranjang sedangkan labu yang dikeringkan dimanfaatkan sebagai botol air. Hasil pangan berupa cocok tanam meliputi umbi umbian dan peternakan meliputi ayam dan babi. Masyarakat suku Asmat juga mengkonsumsi ulat sagu, tikus hutan, kuskus, iguana, ikan dan kepiting rawa/mangrove. Assesories hiasan pada seorang laki laki asmat dan perempuan memanfaatkan semua bahan alami baik dari tumbuhan seperti rumbia dari daun sagu kering, Cangkang kerang dan gigi anjing dimanfaatkan sebagai perhiasan kalung, bulu burung cenderawasih dan bangau, Kulit kus-kus sebagai hiasan kepala dan manik manik dari biji bijian. Eesse atau tas dari anyaman daun kelapa dan daun rumput rawa yang dipintal menjadi benang, biasanya disematkan di tubuh sebagai lambang bahwa orang tersebut memiliki kemampuan finansial. Biasanya dalam satu upacara adat orang



Asmat melukis wajah/tubuh atau disebut wasse mbi (rias tubuh) yaitu biasanya dengan tiga warna. Mereka mengambil warna merah dari tanah merah dicampur air, putih dari kulit siput yang dihaluskan dan diberi air, juga hitam dari arang yang dibakar dan dicampur air.

Suku Asmat sangat bergantung pada air hujan untuk konsumsi minum tetapi juga pemakaian lain, karena air di sekitar rawa-rawa dan sungai sangat payau. Orang Asmat juga memperoleh air minum ketika air sungai sangat surut sehingga tidak terlalu payau. Hasil sumber daya alam yang menjadi bahan mentah meliputi: kKayu gaharu, rotan, kemiri, damar, kemenyan, kulit masohi, kulit lawang, cucut, udang, teripang, cumi-cumi, ikan, nipah, kerang, keong laut, kayu kuning, sagu, labu, ilalang, dsb..

2.1.7.5. Sistem Teknologi dan Peralatan

Teknologi dan peralatan adalah suatu sistem pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material dan proses yang membantu manusia untuk melakukan aktivitas/kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang berlangsung turun temurun maupun akibat adaptasi dengan lingkungan dimana orang asmat berada, tentunya bentuk peralatan orang asmat akan memiliki kesamaan dan perbedaan dengan suku suku lain yang berada di pedalaman sampai pegunungan terutama material dasar yang digunakan dan juga bentuk teknologinya. Peralatan dimaksud yang telah dimiliki oleh suku Asmat sejak jaman dahulu dan sampai sekarang mengalami inkulturasi antara lain:

- Alat-alat produktif; jaring yang terbuat dari anyaman sagu, ukiran yang terbuat dari gigi hewan, kapak batu namun seiring dengan berkembangnya zaman mereka beralih ke pisau dan model pahatan. Untuk memotong tubuh hewan buruan atau ikan yang ditangkap mereka biasa menggunakan kulit kerang yang ditajamkan tetapi seiring waktu mereka sudah menggantinya dengan pisau yang terbuat dari besi.
- Senjata; perisai, tombak dari kulit kayu sagu, dan panah yang ujungnya terbuat dari kuku burung kasuari dan busur dari bambu.
- Alat transportasi; perahu lesung yang digunakan untuk persiapan suatu penyerangan. Kayu yang digunakan untuk membuat perahu adalah kayu kuning ketapang, bintanggur.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi Kabupaten Asmat dapat tergambar dan diukur sekurang-kurangnya dari beberapa indikator-indikator seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB PerKapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Gini, Indeks Modal Manusia (IMM)/Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Dalam menarasikan agar dikorelasikan satu indikator dengan indikator lainnya sehingga dapat



dipahami secara utuh dan lebih bermakna.

Pembangunan di bidang ekonomi diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu total nilai tambah yang dihasilkan oleh masing masing lapangan usaha dalam satu wilayah dalam suatu waktu. Dari indikator PDRB di peroleh beberapa besarnya total penciptaan nilai tambah dengan harga berlaku dan harga konstan. Nilai PDRB ADHB dimanfaatkan untuk melihat struktur perekonomian sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi.

Nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Asmat dari tahun 2023 ke tahun 2024 atas dasar harga konstan meningkat sebesar Rp 95,87 miliar atau tumbuh sebesar 5,54 persen. Pertumbuhan nilai tambah PDRB ADHK ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,68 persen. Aktivitas ekonomi dengan nilai PDRB ADHK yang meningkat tersebut terutama didorong oleh sektor konstruksi dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Ada 2 sektor yang menurun PDRB ADHK tahun 2024 yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor industri pengolahan.

Sesuai Data Statistik Kabupaten Asmat yang dilaporkan oleh BPS tahun 2024, menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asmat diperlihatkan melalui gambar tabel berikut.

Tabel 2. 13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Asmat Tahun 2020-2024

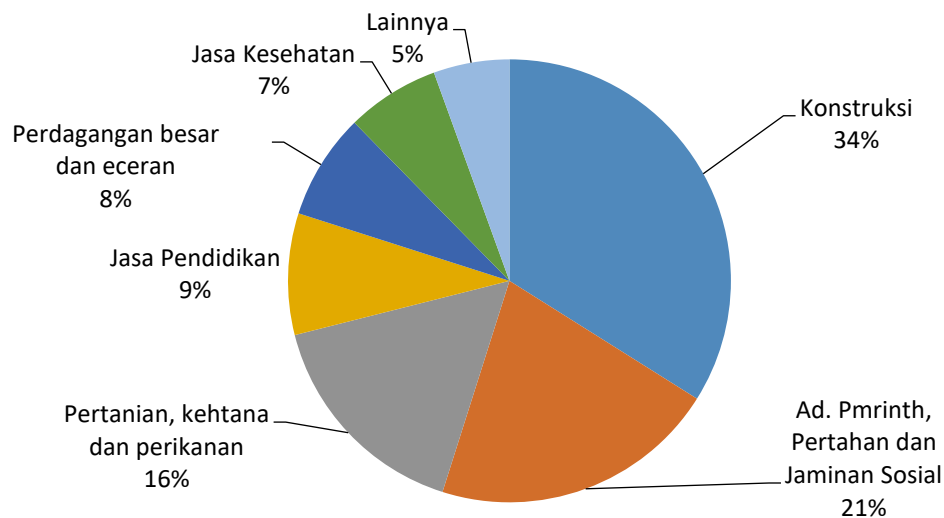
Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,30%	2,13%	4,85%	5,50%	-1,42%
B	Pertambangan dan Penggalian	1,47%	1,77%	3,16%	0,95%	0,70%
C	Industri Pengolahan	-2,45%	0,75%	-0,05%	2,64%	-4,43%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,50%	1,01%	1,78%	0,42%	5,72%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,41%	1,41%	2,13%	0,12%	0,62%
F	Konstruksi	-0,24%	3,93%	8,62%	6,73%	9,97%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,49%	3,66%	5,26%	7,70%	6,41%
H	Transportasi dan Pergudangan	-14,89%	4,28%	15,20%	11,85%	5,39%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,19%	2,79%	3,65%	5,41%	0,41%
J	Informasi dan Komunikasi	9,53%	9,50%	8,43%	4,97%	3,95%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-1,70%	1,11%	1,66%	6,24%	2,62%
L	Real Estate	0,47%	0,40%	4,53%	2,25%	1,20%
M,N	Jasa Perusahaan	3,50%	1,35%	2,52%	6,04%	-0,91%
O	Administrasi Pemerintahan,	2,58%	-0,48%	-0,41%	4,56%	6,64%



Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	1,24%	0,11%	3,11%	3,32%	5,28%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,88%	3,28%	0,60%	6,64%	6,80%
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,68%	4,68%	4,68%	1,33%	7,78%
	Pertumbuhan PDRB	0,59%	2,11%	4,65%	5,68%	5,54%

Sumber : Kabupaten Asmat dalam Angka, beberapa tahun, BPS Kabupaten Asmat Statistik Kabupaten Asmat Tahun 2024

Pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Asmat secara umum mengalami pelambatan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dampak pandemi COVID-19. Namun, laju pertumbuhan tahun 2020 masih positif jika dibandingkan daerah lain yang rata-rata negatif. Ekonomi Kabupaten Asmat terus mengalami recovery dan pulih seperti sebelum dampak pandemi COVID-19. Pemulihan terus menunjukkan arah positif dan ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Asmat Tahun 2024 tumbuh sebesar 5,54 persen. Namun sedikit melambat dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 5,68%. Beberapa sektor ekonomi tumbuh melambat sehingga berdampak pada menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan dari tahun sebelumnya, ada 7 sektor yang tumbuh positif tahun 2024 diantaranya sektor jasa lainnya, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Namun ada 11 sektor yang pertumbuhannya melambat dibandingkan tahun lalu, seperti sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa perusahaan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sumber pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Asmat selama periode 2020-2024 bertumpu pada 3 sektor utama yaitu sektor konstruksi, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Selanjutnya sektor-sektor yang memicu laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asmat ditampilkan sebagai berikut:



Gambar 2. 27 Sektor-Sektor yang berkontribusi dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Asmat

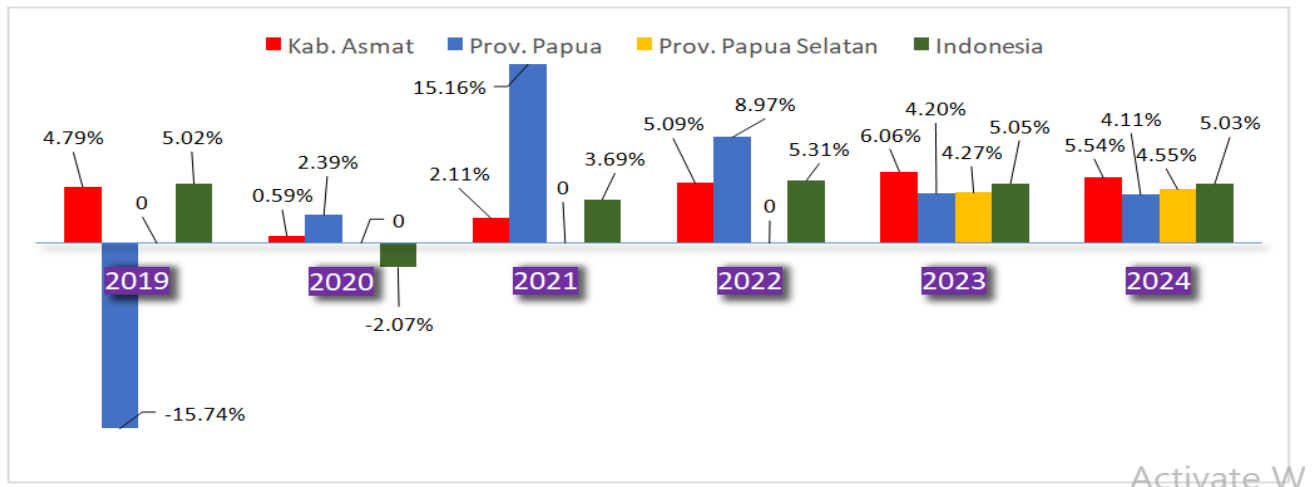
Sumber : Statistik Kabupaten Asmat, 2024

PDRB ADHB tahun 2024 sebesar 3,41 triliun rupiah sedangkan PDRB harga konstannya sebesar 1,82 triliun rupiah. Lapangan usaha yang memberikan share terbesar terhadap PDRB ADHB Kabupaten Asmat tahun 2024 adalah konstruksi; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; dan pertanian, kehutanan, dan perikanan, berturut-turut dengan jumlah sebesar 343,6193 persen; 1920,956 persen; dan 16,0317 persen. Ketiga sektor ini memberikan kontribusi ekonomi sebesar 70,59 persen. Besaran kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Asmat ke Provinsi Papua Selatan terus meningkat. Pada tahun 2023 kontribusi sebesar 17,44 persen dan pada tahun 2024 menjadi 17,98 persen, Diharapkan trend kontribusi terus meningkat sehingga peran ekonomi di Kabupaten Asmat dapat membantu perkembangan perekonomian di tingkat provinsi Papua Selatan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 yaitu 5,03 persen, sedikit lebih lambat daripada tahun 2023 yang sebesar 5,05 persen. Tekanan turunnya pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asmat juga mengalami tekanan ditandai dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Asmat tahun 2024. Namun, laju penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Asmat tahun 2024 lebih tinggi daripada di tingkat nasional. Bila dibandingkan kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dibandingkan antara Nasional, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Selatan menunjukkan Kabupaten Asmat masih lebih tinggi. Kondisi ini perlu terus dipertahankan agar dapat mengejar ketertinggalan ekonomi dengan daerah-daerah lainnya. Gambar berikut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asmat diantara Provinsi Papua Selatan dan Nasional:



Gambar berikut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asmat diantara Provinsi Papua Selatan dan Nasional:



Gambar 2. 28 Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi antara Nasional, Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Asmat

Sumber: BPS Indonesia, BPS Provinsi Papua dan BPS Kabupaten Asmat, beberapa tahun, 2024

Kondisi diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asmat meskipun tren pertumbuhannya fluktuatif tetapi selalu positif setiap tahun. Pertumbuhan tertinggi tercatat tahun 2023 sebesar 6,06% melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua, Papua Selatan dan Nasional. Sebaliknya pertumbuhan rendah di Tahun 2020, sebesar 0,59%. Hal ini disebabkan adanya wabah COVID-19 yang melanda dunia, berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi baik daerah, provinsi maupun nasional.

2.2.1.1. Sistem Mata Pencarian dan Ekonomi

Orang Asmat sebagai kelompok suku yang mendiami zona ekologis rawa bakau dan aliran sungai di tanah Papua mata pencaharian pokok mereka adalah Meramu sagu. Selain meramu sagu merupakan mata pencaharian pokok penduduk, mereka juga melakukan aktivitas berburu, dan mencari ikan di laut dan sungai di sekitar kampung. Jenis jenis hasil alam yang biasanya dimanfaatkan oleh suku asmat di kampung kampung adalah meliputi Kayu gaharu, rotan, kemiri, damar, kemenyan, kulit masohi, kulit lawang, cucut, udang, teripang, cumi-cumi, ikan, nipah, kerang, keong laut, kayu kuning, sagu, labu, ilalang, dsb. Setelah ada pemerintah pada jaman belanda sampai RI sebagian warga menggantungkan hidup dari gaji yang didapatkan sebagai pegawai negeri sipil walaupun memiliki dusun area meramu, pekerjaan lainnya seperti pemahat patung dan penarik ojek speedboad dan longboat sewaan. Memahat patung untuk kemudian dijual kepada pengunjung kota Agats adalah salah satu aktivitas mata pencaharian yang giat dilakukan cukup lama semenjak karya pahatan patung kayu berupa manusia, hewan, dan lain-lain telah beralih fungsi dan tidak lagi menjadi bagian dalam perlengkapan upacara-upacara religius di kalangan orang Asmat.

Orang Asmat menganggap Pohon sagu sebagai ibu, dimana sebagai ibu, sagu



selalu memberikan kecukupan makan bagi mereka, sebagai makanan pokok penduduk biasanya diambil dan dikelola di dusun milik klen/marga yang terletak di sepanjang aliran sungai. Aktivitas meramu sagu biasanya dilakukan bersama-sama oleh satu atau lebih keluarga inti dan anak-anak selama beberapa hari di dusun. Dalam perjalanan menuju dusun kelompok peramu menggunakan sarana transportasi dari perahu panjang dan dayung. Pada saat sekarang ini ada saja penduduk yang menggunakan motor tempel untuk bepergian kedusun untuk meramu sagu. Di dusun kelompok peramu sagu biasanya menginap selama beberapa hari (sekitara 3-5 hari) pada pondok-pondok yang dibangun sambil mengumpulkan pati tepung sagu dan hasil buruan untuk dibawa pulang.

Dalam aktivitas meramu sagu baik laki-laki ataupun perempuan bekerja sesuai beban kerja yang telah ditentukan. Kelompok lakilaki biasanya bekerja menebang pohon, membelah batang sagu, sementara pekerjaan menokok/pangkur untuk mengeluarkan serat-serat (empulur) di dalam pokok pohon sagu dan meremas sagu dilakukan oleh perempuan. Proses untuk mendapatkan pati sagu dilakukan dengan cara serat sagu diremas dengan bantuan air pada sarana tersendiri. Sarana proses pengambilan pati sagu terbuat dari pelepah pohon sagu yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat mengalirkan air dan pati sagu kedalam wadah yang tersedia. Mereka juga menggunakan lembaran kasa dari pohon sagu ataupun kelapa sebagai penapis untuk memisahkan pati/ tepung sagu dari serat/empulur. Pada saat sekarang ini mereka banyak menggunakan kain kasa yang halus dan kuat sebagai penyaring. Pati sagu yang terpisahkan dari proses peramasan dibiarkan mengendap di dalam wadah penampung dari pelepahsagu. Pati yang telah mengeras karena mengendap diambil, diisi dalam wadah yang terbuat dari daun sagu dan selanjutnya dibawa pulang untuk dikonsumsi.

Dalam pekerjaan meramu sagu peralatan yang digunakan adalah kapak, parang, dan alat penokok/pangkur, noken dan karung. Selain meramu sagu kelompok peramu juga biasanya mengambil ulat sagu yang tertinggal dalam pokok pohon sagu yang ditebang dan dibiarkan membusuk. Demikian juga mereka akan mengambil hasil hutan lainnya seperti jenis-jenis sayuran, bumbu serta hasil kebun berupa ubi untuk dibawa pulang. Setelah beberapa hari di dusun mereka akan kembali pulang ke kampung dengan persediaan sagu untuk beberapa bulan kedepan. Rutinitas meramu sagu dilakukan terus-menerus mengikuti kebutuhan pokok penduduk. Hasil meramu sagu dan tumbuhan hutan yang didapatkan didusun keluarga biasanya dikonsumsi sendiri, dibagikan kepada kerabat atau tetangga dan sebagian dijual. Aktivitas berburu penduduk biasanya dilakukan sendiri dan juga bersama-sama dengan anak ataupun anggota kerabat lain. Aktivitas berburu dilakukan oleh kelompok laki-laki di sekitar wilayah dusun sagu dan hutan di sekitarnya. Di dalam melakukan perburuan terhadap binatang buruan mereka menggunakan panah dan tombak serta menangkap hewan buruan dengan menggunakan jerat. Aktivitas berburu biasanya dilakukan dapat lebih dari satu hari. Jenis-jenis hewan yang diburu adalah tikus hutan, kuskus, babi hutan, dan burung. Hasil buruan yang didapat dibawa pulang untuk dikonsumsi dan dijual.

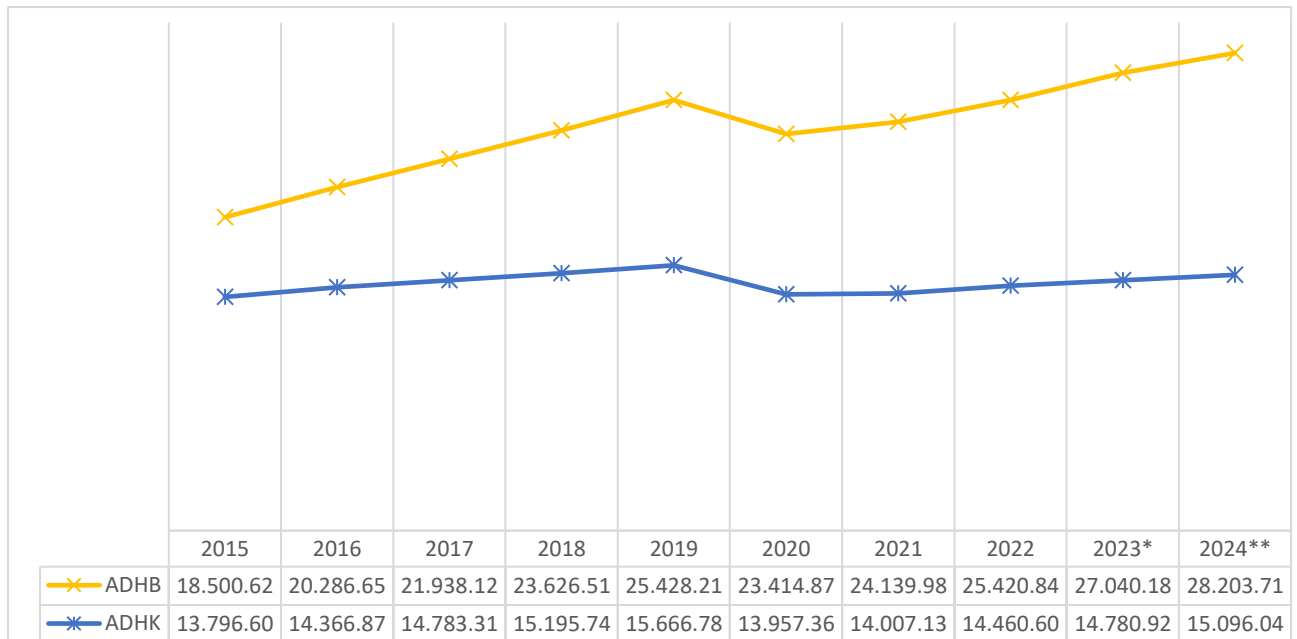


Aktivitas mencari ikan dilakukan setiap hari dengan cara memancing dan menggunakan jaring. Beragam jenis ikan didapat dalam aktivitas ini, seperti ikan bobara, sejenis ikan lele, ikan pari, dan udang. Penduduk juga menangkap kepiting di rawa-rawa bakau sebagai sumber protein bagi keluarga. Dalam pekerjaan mencari ikan dan udang sebagian besar dilakukan oleh perempuan. Peralatan yang digunakan dalam aktivitas menangkap ikan adalah jala, kail, nilon, dan lain-lain. Hasil kegiatan penangkapan ikan dikonsumsi sendiri dan dijual. Berkebun sangat minim dilakukan oleh penduduk asmat secara umum karena wilayah yang berawa sehingga tidak memungkinkan. Walaupun demikian sebagian penduduk memanfaatkan luas areal tanah yang dimiliki untuk menanam sejumlah tanaman seperti ubi kayu, pisang, rica, dan daun gatal. Kreativitas sejumlah warga kampung dalam memahat patung kayu dalam bentuk manusia dan hewan adalah bentuk pekerjaan yang cukup penting saat ini untuk mendapatkan penghasilan; apakah itu pada saat ada festival budaya asmat ataupun dapat di jual pada artshop di agast.

Kalau pada waktu lalu orang Asmat memahat patung sebagai perangkat dalam ritual-ritual religius dalam kehidupan di kampung, kini telah beralih menjadi nilai untuk mendapatkan penghasilan. Dalam konteks sensitif gender kegiatan ekonomi sehari-hari banyak dijalankan oleh perempuan terutama untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga. Perempuan dalam aktivitasnya bekerja memangkur sagu, menangkap ikan, udang, dan kepiting, mengumpulkan kayu bakar di hutan, serta menganyam atap rumah, mengasuh anak, dan mengolah makanan, mereka juga menganyam tikar (tapin). Laki-laki mengerjakan pekerjaan tertentu seperti, berburu, menebang dan membelah batang pohon sagu dalam aktivitas meramu sagu, membuat perahu baru, membangun rumah, dan memahat patung.

2.2.1.2. Perkembangan PDRD per Kapita

PDRB per kapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Data ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita daerah tersebut. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut. Walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Asmat menurut harga berlaku mengalami kenaikan dari 23,414 juta rupiah di tahun 2020 menjadi 28,203 juta rupiah di tahun 2024. Sedangkan PDRB per kapita menurut harga konstan menunjukkan kenaikan juga, dari tahun 2020 sebesar 13,957 juta rupiah menjadi 15,096 juta rupiah pada tahun 2024.



Gambar 2. 29 Grafik Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Asmat Tahun 2015-2024

Sumber: BPS Kabupaten Asmat, beberapa tahun, 2024

2.2.1.3. Gambaran Ketenagakerjaan

Pembahasan mengenai aspek pengangguran menjadi salah satu ulasan utama bagi pengambilan kebijakan-kebijakan ekonomi, karena aspek pengangguran merupakan bagian dari ketenagakerjaan merupakan aspek pokok dalam pembahasan kesejahteraan penduduk. Data ketenagakerjaan merupakan salah satu informasi penting yang diperlukan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, dan tentu saja sangat erat kaitannya dengan tingkat pembangunan manusia di suatu daerah. Ada dua faktor yang mempengaruhi keadaan ketenagakerjaan, yaitu faktor permintaan faktor penawaran. Faktor permintaan dipengaruhi oleh dinamika pembangunan ekonomi, sedangkan faktor penawaran ditentukan oleh perubahan struktur umur penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak berbasis investasi dan tidak inklusif mengakibatkan tidak adanya penyerapan tenaga kerja baru.

Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan tenaga kerja dapat menimbulkan meningkatnya jumlah pengangguran. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan masalah ketenagakerjaan Pertama, apakah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Asmat melebihi pertumbuhan kapital. Kedua, apakah profil penduduk di Kabupaten Asmat merupakan penduduk muda. Jika suatu daerah memiliki struktur penduduk yang didominasi usia muda, maka akan semakin banyak penduduk yang masuk ke lapangan kerja dan perlunya kebijakan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru Ketiga, struktur ekonomi yang cenderung bukan *labour intensive* dan tingkat ketrampilan penduduk yang belum memadai membuat penciptaan lapangan kerja baru semakin sulit dan kompleks. Berikut gambaran ketenagakerjaan di Kabupaten Asmat :



Tabel 2. 14 Gambaran Ketenagakerjaan di Kabupaten Asmat Tahun 2020-2024

Kegiatan Utama	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja	52.411	53.754	55.098	37.331	49.178
Bekerja	51.165	53.514	54.619	36.531	48.170
Pengangguran Terbuka	1.246	240	479	800	1.008
Bukan Angkatan Kerja	11.676	12.477	13.476	25.190	14.009
Jumlah PUK (Penduduk Usia Kerja)	64.087	66.231	68.574	62.521	63.187
TPAK (Tingkat Partisipasi Angk. Kerja)	81,78%	81,16%	80,35%	59,71%	77,83%
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	2,38%	0,45%	0,87%	2,14%	2,05%

Sumber : Profil Ketenagakerjaan Provinsi Papua dan Kabupaten Asmat dalam Angka, beberapa tahun

Kondisi diatas menunjukkan bahwa angkatan kerja dan orang bekerja di Kabupaten Asmat setiap tahun tubuh secara fluktuatif. Tingkat pengangguran juga demikian, Tahun 2020 angak pengangguran terbuka sebesar 1,246 sekitar 2,38% kemudian menurun tahun 2021 sebanyak 240 orang tetapi naik lagi hingga tahun 2024 menjadi 1,008 orang atau 2,05%.

Selain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditemukan bahwa Angka **Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** di Kabupaten Asmat yang dirilis BPS Kabupaten Asmat Tahun 2024 tepat diangka **77,83 %**. Artinya dari seluruh **penduduk usia kerja** (yaitu yang berusia 15 tahun ke atas), sebanyak **77,83% ikut aktif dalam kegiatan ekonomi**, baik dengan **bekerja maupun sedang mencari pekerjaan**.

Selama periode 2020 sampai dengan 2024, rata-rata TPAK sebesar 76,17 persen dan bila dilihat dari trend terlihat sedikit penurunan TPAK dibandingkan di tahun 2020. Ini menjadi pertanda semakin meningkatnya penduduk bukan angkatan kerja. Ada beberapa penyebab menurunnya TPAK, salah satunya adalah semakin meningkatnya penduduk usia kerja yang masuk dalam dunia pendidikan. Selain itu, ada peningkatan dalam Kelompok lainnya, yaitu penduduk usia kerja yang sudah putus asa masuk dalam angkatan kerja dan tidak berusaha lagi mencari pekerjaan (discouraged workers). Rata-rata TPAK laki-laki lebih tinggi (84,78 persen) daripada rata-rata TPAK perempuan (70,14 persen). Ini artinya TPAK masih di dominasi oleh laki-laki. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja menurun lebih cepat daripada laki-laki, Hal ini karena rentannya perempuan untuk masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja, kemungkinan masuk dalam kelompok yang sedang sekolah, Kelompok rumah tangga dan lainnya.

Pada tahun 2024, penduduk yang bekerja masih di dominasi oleh orang yang tidak punya ijazah SD sampai dengan lulusan SD (68,12 persen). Untuk pekerja lulusan SD terus mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2022 dengan tahun 2023,



namun meningkat kembali di tahun 2024. Untuk pekerja yang lulusan SLTA dan Diploma/Universitas terus mengalami peningkatan. Semakin banyaknya pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi diharapkan akan berkontribusi banyak pada pembangunan di Kabupaten Asmat.

Rata-rata TPT perempuan lebih tinggi dari TPT laki-laki. Ini menunjukkan bahwa akses pekerjaan untuk perempuan lebih sulit daripada laki-laki. Perlu dikuatkan kebijakan pemerataan kesempatan kerja gender.

2.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Asmat yang tercermin pada indeks komposit IPM (Indeks Pembangunan Manusia). indeks komposit IPM (Indeks Pembangunan Manusia) mencakup 3 dimensi pembangunan manusia yaitu usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent living). Dengan metode perhitungan baru dengan menggunakan rata-rata geometrik, menunjukkan kenaikan dari tahun 2023 sebesar 53,19 menjadi 57,63 pada tahun 2024. Kategori IPM Kabupaten Asmat masih dalam kategori IPM rendah. IPM Kabupaten Asmat tahun 2024 masih yang terendah dibandingkan dengan 3 kabupaten lainnya di Provinsi Papua Selatan. Untuk Merauke telah mencapai 74,53, Boven Digoel mencapai 68,16 dan Mappi mencapai 61,66. Pertumbuhan nilai indeks IPM terus meningkat dari tahun ke tahun. Laju IPM di tahun 2024 menurun (1,37 persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (1,88 persen). tapi Kabupaten Asmat tertinggi pada laju pertumbuhan IPM dibandingkan 3 kabupaten lainnya. Diharapkan ke depannya Pemerintah Kabupaten Asmat perlu tetap fokus dalam mengejar ketertinggalan dengan daerah sekitarnya.

Tabel 2. 15 IPM Kabupaten Asmat, Tahun 2021-2024

INDIKATOR					
TAHUN	ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)	HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)	PENGELUARAN (RIBU RP)	IPM KAB. ASMAT
2021	67,07	9,3	5,08	5.736	54,8
2022	67,46	9,49	5,36	5.860	55,8
2023	67,84	9,7	5,58	6.057	56,85
2024	68,05	9,71	5,82	6.262	57,63

Sumber : BPS Provinsi Papua (Indikator Penting Papua Selatan), 2025

Dari 3 dimensi IPM, di tahun 2024 ukuran Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Per Kapita adalah ukuran yang nilai capaiannya masih di bawah 3 kabupaten lainnya. Sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) yang masih lebih baik (di perangkat ke 3 dari 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan). Angka Harapan Hidup di Kabupaten Asmat terus meningkat karena adanya beberapa program kesehatan yang sudah berjalan, seperti peningkatan sarana dan prasarana kesehatan tingkat pertama.



Walaupun dimensi pendidikan lebih rendah dibandingkan daerah lain, tapi laju pertumbuhan dimensi ini lebih tinggi daripada daerah lainnya. Ini karena adanya program guru bantu seperti Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T) dan adanya program guru garis depan juga ikut memajukan sarana belajar. Ini juga terlihat dengan meningkatnya rekrutmen ASN P3K untuk guru di Kabupaten Asmat untuk tahun 2024. Diharapkan dengan upaya-upaya tersebut dapat meningkatkan ukuran dimensi pendidikan, salah satunya rata-rata lama sekolah (pendidikan formal) yang masih sampai jenjang kelas 5 SD semester II. Selain itu juga diharapkan terjadi peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang saat ini nilai indeksinya lebih rendah daripada daerah lainnya di Papua Selatan. Pada tahun 2017-2024, perkembangan IPM Kabupaten Asmat menunjukkan perkembangan yang positif yaitu selalu mengalami kenaikan setiap tahun.

Tabel 2. 16 IPM Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2024

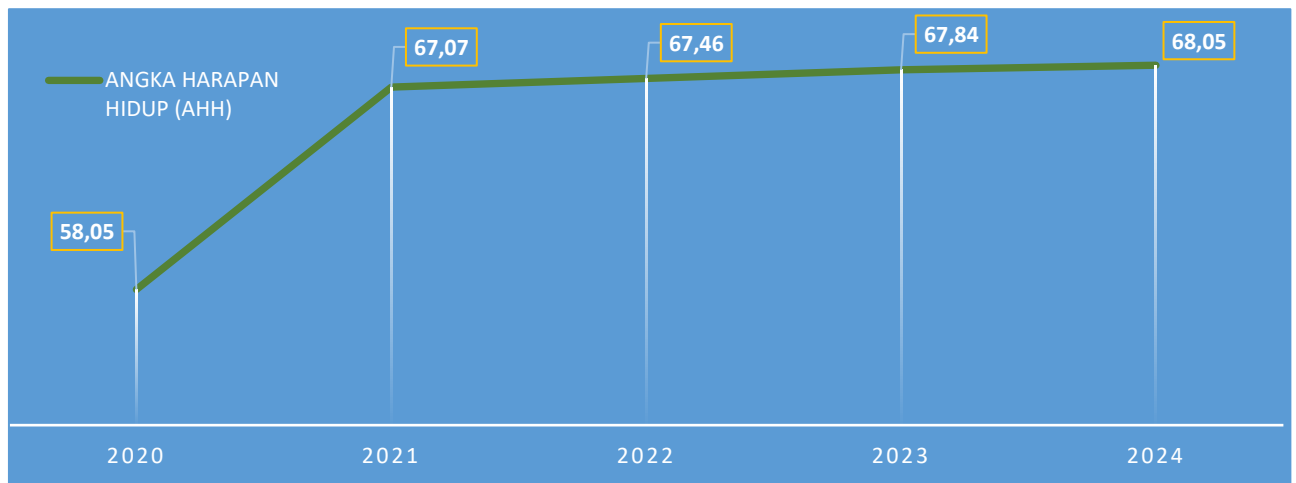
Indikator	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Merauke	68,64	69,38	69,98	70,09	70,49	71,24	72,19	74,53
	Boven Digoel	60,14	60,83	61,51	61,53	61,62	62,52	63,46	68,16
	Mappi	57,10	57,72	58,30	58,15	58,70	59,61	60,57	61,66
	Asmat	48,49	49,37	50,37	50,55	54,8	55,8	56,85	57,63

Sumber : BPS Provinsi Papua (Indikator Penting Papua Selatan), 2025

2.2.2. Kesehatan Untuk Semua

2.2.2.1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Semakin tinggi AHH, memberikan indikasi bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Seperti di daerah lainnya, angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Asmat juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018, AHH di Kabupaten Asmat adalah sebesar 56,88, kemudian tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 57,53. Hal tersebut berarti bahwa kondisi angka kematian bayi (infant mortality rate) di Kabupaten Asmat termasuk dalam kategori hardrock yang artinya dalam waktu satu tahun penurunan angka kematian bayi yang tajam sulit terjadi. Implikasinya adalah bahwa AHH yang dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir menjadi lambat untuk kemajuan. Kondisi tersebut juga terjadi untuk tingkat nasional dimana penurunan angka kematian bayi terjadi secara gradual bahkan mengarah melambat.



Gambar 2. 30 Trendline Perkembangan AHH Kabupaten Asmat (tahun), 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Asmat, 2025

2.2.2.2. Tingkat Morbiditas

Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk, misal pekerja yang tidak mengalami gangguan kesehatan akan dapat bekerja dengan jumlah jam kerja yang lebih lama dan bekerja lebih optimal dibanding pekerja yang menderita sakit. Status kesehatan penduduk secara keseluruhan dapat dilihat dengan menggunakan indikator angka morbiditas (angka kesakitan) dan rata-rata lama sakit. Angka morbiditas menunjukkan angka kesakitan yang dialami penduduk, sedangkan rata-rata lama sakit mencerminkan kerugian materiil yang dialami masyarakat selama sakit. Seseorang dikatakan mengalami sakit apabila mendapatkan keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.

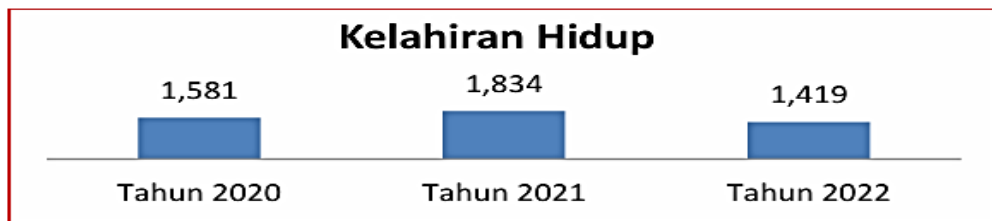
2.2.2.3. Kesehatan Balita

Kesehatan balita merupakan salah satu indikator kesejahteraan bangsa. Artinya bahwa, suatu bangsa akan dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik apabila tingkat kesehatan balita memiliki angka yang baik pula. Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, juga dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya adalah penolong kelahiran. Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dianggap lebih baik dibandingkan yang ditolong oleh dukun, keluarga atau lainnya. Penolong kelahiran tidak hanya terkait dengan angka kematian bayi saja, namun juga angka kematian ibu sebagai risiko proses kelahiran. Dalam proses kelahiran bayi tidak dapat dipisahkan antara kemungkinan keselamatan ibu atau anak yang dilahirkan. Keduanya harus diselamatkan dalam risiko besar sebuah kelahiran.



2.2.2.4. Angka Kelahiran Hidup, Kematian Ibu dan Kunjungan K1 dan K2

Di Kabupaten Asmat masalah kesehatan masih merupakan hal yang krusial. Selama ini dominan dilakukan melalui tindakan preventif, sementara masyarakat juga memerlukan tindakan kuratif dan promosi. Demikian pula penggelontoran biaya. Masyarakat Asmat juga sering mencampuradukkan persoalan penyakit dengan hal-hal yang mistik. Berikut gambaran angka kelahiran hidup bayi, angka kematian ibu dan kunjungan Ibu Hamil untuk imunisasi K1 dan K2.



Gambar 2. 31 Angka Kelahiran Hidup, Kematian Ibu dan Kunjungan K1 dan K2 Kabupaten Asmat tahun 2024

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, 2024

Tabel 2. 17 Angka Kematian Ibu, Kunjungan K1 dan K2 Kabupaten Asmat Tahun 2024

Angka Kematian Ibu di Asmat			
Asmat	3	1834	164
pps	24	8507	282

Kabupaten	Jumlah Ibu Hamil	K1		K4	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Asmat	3,367	2,121	63.0%	620	18.4%
pps	13,504	12,646	93.6%	4,029	29.8%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, 2024

Data yang ditampilkan bersifat absolut, tetapi bisa didapatkan data kecenderungannya menunjukkan angka kelahiran hidup kecenderungannya menurun dimana tahun 2020 sebesar 1.581 kasus menjadi 1.419 kasus pada tahun 2024. Sementara angka kematian ibu dibandingkan dengan angka Provinsi Papua Selatan secara absout meningkat. Untuk kesadaran Ibu Hamil melakukan imunisasi K1 diatas 50% cukup memadai, tetapi untuk K4 hanya 18%, tergolong masih redah.

2.2.2.5. Penderita Penyakit

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat pada tahun 2024, jenis penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Asmat diantaranya adalah saluran pernafasan, malaria, Gastritis, Polimialgia Reumatik, Diare tanpa dehidrasi, Vulnus,



Tension Headache, Arthritis/Osteoarthritis, Karies Gigi, Tinea Corporis. Jenis penyakit yang paling banyak diderita penduduk di Kabupaten Asmat adalah penyakit saluran pernafasan dengan jumlah mencapai 23.529 kasus.

Selain penyakit tersebut permasalahan yang menjadi tantangan pada Kabupaten Asmat adalah kasus Malnutrisi dengan angka stunting pada tahun 2024 Tiwulan Pertama sebanyak 26,04%, Wasting sebanyak 1,04%.

2.2.2.6. Stunting

Dalam rangka peningkatan konvergensi percepatan penurunan Stunting di daerah melalui 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka Pemerintah Kabupaten Asmat melalui Kesepakatan Rembuk Stunting untuk tahun 2023 (9 lokus) dan 2024 menetapkan lokasi fokus (39 lokus) yang akan diintervensi sebagai berikut :

Tabel 2. 18 Prevalensi Stunting Tahun 2023-2024 di Kabupaten Asmat

NO	DISTRIK	PUSKESMAS	KAMPUNG	2023	2024
1	SUATOR	BINAM	Wagabus	100	
2	ATSY	ATSY	Bine	660.714	
3	ATSY	ATSY	Bipim	566.667	
4	UNIR SIRAU	UNIR SIRAU	Paar	357.143	
5	FAYIT	BASIM	Pirien	196.429	
6	DER KOUMUR	KAMUR	Yamkap	18.75	
7	DER KOUMUR	KAMUR	Amagais	166.667	
8	UNIR SIRAU	UNIR SIRAU	Amor	71.429	
9	UNIR SIRAU	UNIR SIRAU	Ayir	4.878	
10	UNIR SIRAU	UNIR SIRAU	Jipawer	0	
11	SURU-SURU	SURU-SURU	See	0	
12	SUATOR	BINAM	Bubis		100
13	AGATS	AGATS	Per		100
14	SUATOR	BINAM	Wagabus		100
15	FAYIT	BASIM	Sayoa		854.167
16	AGATS	AGATS	Uwus		75
17	FAYIT	BASIM	Bakyor		708.333
18	SAFAN	Bayun	Bayun		680.556
19	FAYIT	BASIM	Waras		666.667
20	AKAT	AYAM	Fakan		666.667
21	SAFAN	Bayun	Itersok		663.636
22	ATSY	ATSY	Bine		660.714
23	SAFAN	KAMUR	Semendoro		654.545
24	SAFAN	Bayun	Kairin		640.845
25	SIRETS	PUSKESMAS YAUSAKOR	Kaimo		607.843



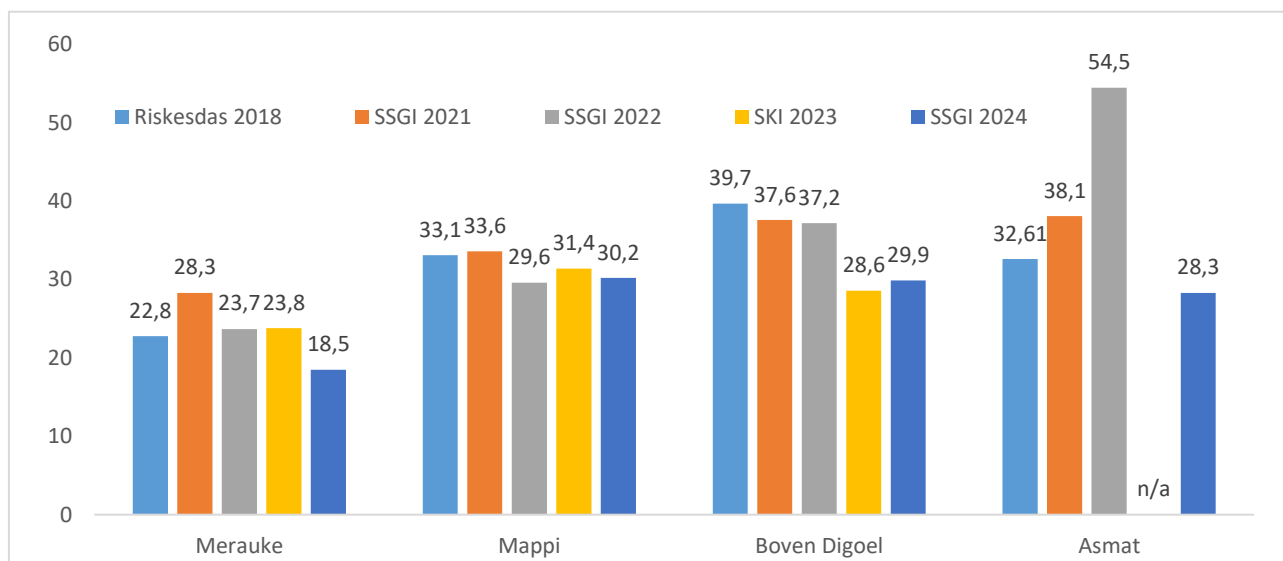
NO	DISTRIK	PUSKESMAS	KAMPUNG	2023	2024
26	BECTBAMU	ATSY	Desep		576.923
27	ATSY	ATSY	Bipim		566.667
28	SURU-SURU	TOMOR	Tomor		546.667
29	ASWI	BASIM	AKANTAPAK		527.778
30	SAFAN	Bayun	Tareo		520.548
31	ATSY	ATSY	Amanamkai		50
32	FAYIT	BASIM	Basim		461.538
33	SAWA ERMA	Mumugu	Mumugu		45
34	SUATOR	BINAM	Emnam		432.432
35	FAYIT	BASIM	Biopis		431.818
36	SAFAN	Bayun	Santambor		392.308
37	SAFAN	Bayun	Yaptambor		391.304
38	AWYU	KAMUR	YEFU		383.333
39	SAFAN	KAMUR	Primapun		382.353
40	SIRETS	PUSKESMAS YAUSAKOR	Damen		380.952
41	ATSY	ATSY	Yasiu/Yaisu		368.421
42	FAYIT	BASIM	Ais		368.421
43	AGATS	AGATS	Bismam		361.111
44	UNIR SIRAU	UNIR SIRAU	Paar		357.143
45	ATSY	ATSY	Atsy		353.448
46	UNIR SIRAU	UNIR SIRAU	Munu		343.511
47	AKAT	AYAM	Cumnew		326.923
48	PULAU TIGA	NAKAI	Atat		303.571
49	SIRETS	PUSKESMAS YAUSAKOR	Awok		30
50	SAFAN	Bayun	Simsagar		296.552

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB Kab. Asmat 2025

Hasil yang didapati dalam bentuk % yang melebihi 100% karena data yang diambil berdasarkan sasaran dari kementerian terkait.



Bila prefalensi stunting dicermati dari 4 (empat) wilayah di provinsi Papua Selatan maka posisi Kabupaten Asmat didiskripsikan sebagai berikut:



Gambar 2. 32 Prefalensi Stunting di Kab. Asmat Tahun 2021-2024

Sumber: Sumber Riset Kesehatan Dasar 2018, Studi Status Gizi 2021, Studi Status Gizi 2022, Survei Kesehatan Indonesia 2023, Survei Status Gizi Indonesia 2024

Dari diagram diatas nampak bahwa prevalensi Stunting Kabupaten Asmat memiliki kecenderungan yang tinggi bila dibandingkan dengan wilayah lainya. Kondisi ini menjadi pekerjaan utama bagi pasangan bupati terpilih untuk mengatasinya.

2.2.3. Pendidikan Berkualitas Yang Merata

2.2.3.1. Angka literasi dan Numerasi

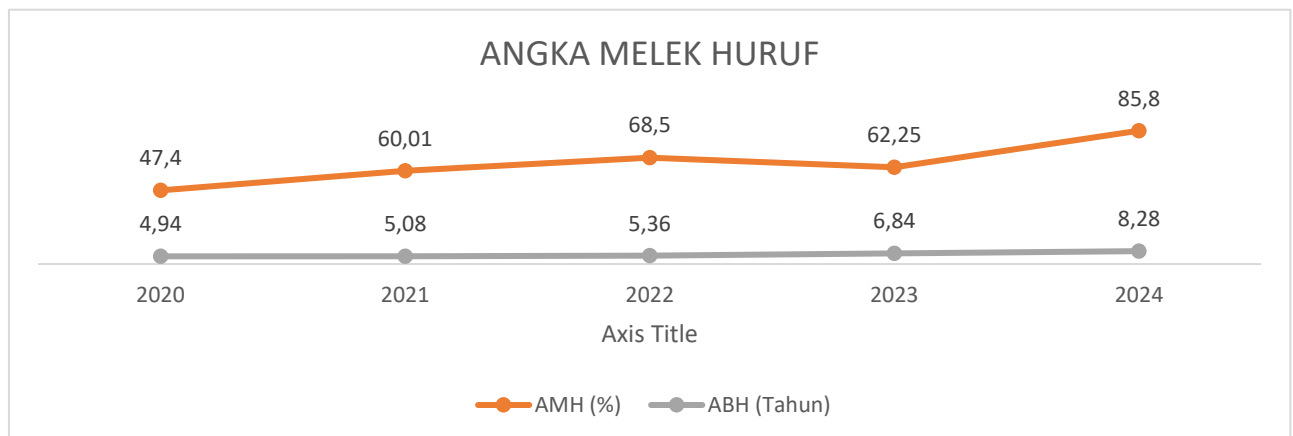
Literasi numerasi adalah proses pembelajaran kemampuan dalam pemahaman, penggunaan, dan penerapan keterampilan membaca, menulis, dan berbicara, serta kemampuan matematika yang meliputi pemahaman angka, konsep matematika, statistik, dan penggunaan informasi kuantitatif dalam kehidupan sehari-hari. Dari penelusuran literatur dari data UNDP pada tahun 2020, tingkat melek huruf (literasi dasar) masyarakat Asmat hanya 79,19 %, jauh di bawah rata-rata nasional sekitar 98,44 %. Sedangkan gambaran literasi di Kabupaten Asmat sebagaimana dilaporkan Wahana Visi Indonesia (WVI) tahun 2022, sangat memprihatinkan dimana Hanya 10,87-11 % siswa kelas 3 SD yang dapat membaca dan memahami teks dengan baik, Sisanya, sekitar 89 %, tidak lancar membaca, tidak memahami teks, atau bahkan masih mengalami butaraksara. Dan Rata-rata seorang anak kelas 3 SD di Asmat hanya dapat membaca sekitar 5 kata per menit, jauh di bawah standar minimal 80 kata per menit. Untuk gambaran angka numerasi didikripsikan sebagai berikut: Studi etnografi oleh Andri & Anugrahana (2022) menemukan bahwa masyarakat Asmat memiliki sistem bilangan berpola, menggunakan pola kelipatan (2-5) dan sistem satuan untuk angka 1–10, serta puluhan untuk angka 11–30. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman numerik awal yang terikat



budaya.

2.2.3.2. Angka Melek Huruf

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pendidikan adalah berkurangnya penduduk yang buta huruf. Selama periode 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Asmat dalam pelaksanaan program pemberantasan buta huruf terjadi kenaikan angka melek huruf. Pada tahun 2020, persentase penduduk yang melek huruf sebesar 47.4 persen dan ABH mencapai 4.94 Tahun. AMH kemudian mengalami peningkatan menjadi 60.01 persen pada tahun 2021 hingga pada tahun 2024 AMH mencapai 85.8 persen dengan ABH mencapai 8.28 Tahun.



Gambar 2. 33 Trendline Angka Melek Huruf dan Angka Buta Huruf

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, 2024

Lambatnya laju kenaikan angka melek huruf diduga karena didominasi oleh kelompok tersulit dalam masyarakat untuk diberikan pelayanan pendidikan keaksaraan. Kelompok tersulit tersebut antara lain adalah penduduk usia tua (45 tahun keatas), penduduk yang tinggal di daerah terpencil, komunitas-komunitas khusus, dan penyandang cacat. Kelompok penduduk ini sulit untuk dijangkau pelayanan pendidikan disebabkan baik oleh faktor internal seperti kemampuan dan keinginan belajar yang sudah menurun dan faktor eksternal seperti terbatasnya ketersediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi mereka.

2.2.3.3. Angka Harapan Lama Sekolah Dan Rata-rata Lama Sekolah

Dimensi pendidikan dijelaskan oleh Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. HLS menjelaskan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (mulai umur 7 tahun ke atas) di masa yang akan datang. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Asmat terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir.

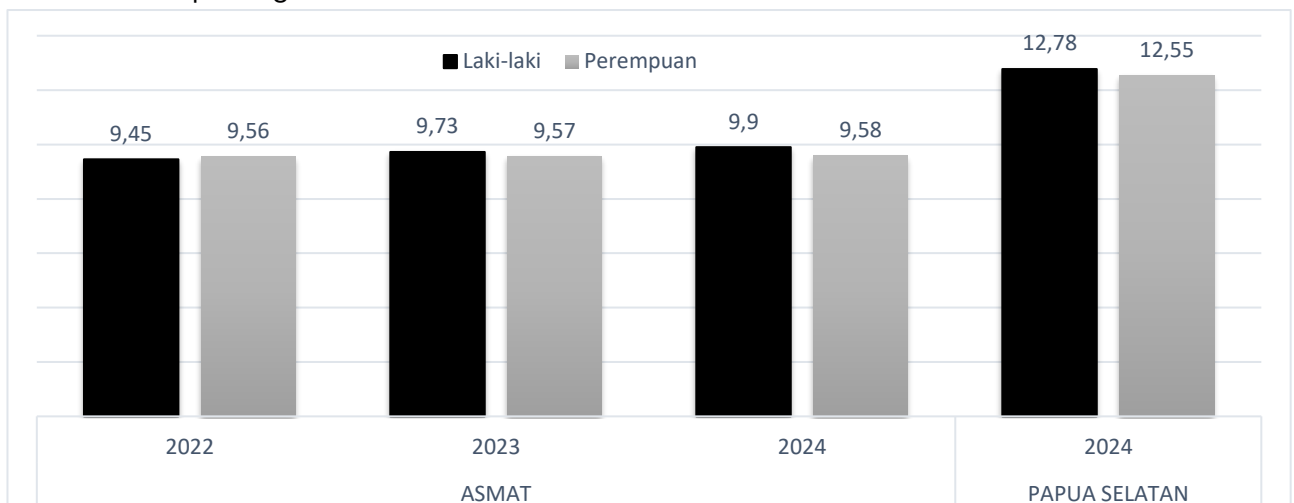
Meningkatnya Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Asmat menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2024, HLS dengan jenis kelamin laki-laki meningkat menjadi 9,9 tahun dari yang sebelumnya, sebesar



9,73 tahun. Maksud dari angka ini adalah anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 8,74 tahun. Hal ini juga berarti bahwa anak-anak usia 8 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga ke jenjang kelas III-Semester I Sekolah Menengah Pertama.

Penurunan terjadi untuk indikator Rata-Rata Lama Sekolah bagi perempuan (RLS), yaitu dari 6.81 tahun pada tahun 2023 menjadi 5.1 tahun pada tahun 2024. Sedangkan kenaikan terus terjadi pada indikator RLS untuk Laki-laki. Hal ini mengandung pengertian bahwa rata-rata lama sekolah pendidikan formal yang sudah dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas (dengan asumsi pada usia 25 tahun, pendidikan sudah selesai) adalah 4,82 tahun atau secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas menempuh pendidikan sampai dikelas 5 Sekolah Dasar (SD).

Perkembangan HLS dan RLS Kabupaten Asmat selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut berikut:



Gambar 2. 34 Grafik Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Asmat, Tahun 2022-2024

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

2.2.3.4. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misal APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Peningkatan APK menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana



pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan. Peningkatan partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Asmat telah menyadari pentingnya arti pendidikan.

Tabel 2. 19 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Asmat

Tahun	APK PAUD	APK SD	APK SMP	APK SMA
2020	38.4	130.7	62.2	42.5
2021	42.4	84.8	62.3	28
2022	43.8	86.9	63.4	29.5
2023	45.4	88.2	64.7	31.1
2024	46.2	89.5	66.4	32.7

Sumber: Pendidikan Kabupaten Asmat, 2024

2.2.3.5. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan cara membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Misal APM SD merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Tabel 2. 20 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Asmat, 2016-2024

TAHUN	TK/PAUD	SD	SMP	SMA/SMK
2020	82.9	81.3	36.4	18.11
2021	79.97	82.1	37.8	19.3
2022	80.02	83.2	42.4	20.2
2023	100	84.5	44.1	21.5
2024	100	86.6	46	23.9

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, 2024

2.2.4. Perlindungan Sosial Yang Adaptif

2.2.4.1. Persentase Penduduk Miskin dan Kemiskinan Ekstrem

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Asmat selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 sebanyak 25,12 ribu naik menjadi 26,24 ribu



tahun 2024. Jumlah orang miskin tidak turun secara signifikan dapat disebabkan karena terus meningkatnya garis kemiskinan tapi tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan pada kelompok miskin dan rentan miskin. Hal ini berdampak juga kepada persentase penduduk miskin yang meningkat pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya. Selain persentase kemiskinan, yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (P2). Dari data BPS Asmat, tingkat kedalaman kemiskinan (P1) terus meningkat dan pada tahun 2024 sebesar 4,17. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Asmat yang terus naik dari tahun 2020 sebesar 0,75 menjadi 1,04 pada tahun 2024. Tingkat keparahan kemiskinan pun naik secara signifikan. Tingkat kedalaman kemiskinan yang terus meningkat menunjukkan bahwa semakin jauh jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Sehingga semakin sulit bagi penduduk miskin keluar dari garis kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan karena terus meningkatnya garis kemiskinan tapi tidak diimbangi dengan peningkatan pengeluaran penduduk miskin atau dengan kata lain, peningkatan pengeluaran di penduduk miskin belum mampu melepaskan diri dari garis kemiskinan. Selain itu, dilihat dari tingkat keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Asmat yang terus naik dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa jarak pengeluaran antara penduduk miskin semakin meningkat. Artinya pengeluaran diantara penduduk miskin semakin timpang. Ini dapat disebabkan karena antara penduduk miskin terjadi peningkatan pengeluaran tapi tidak merata atau ada penduduk miskin yang pengeluarannya stagnan, tapi penduduk miskin lainnya mengalami kenaikan pengeluaran. Perlu ditelaah kembali program/kegiatan/sub kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang inklusif di dalam upaya pengentasan kemiskinan, agar semua penduduk merasakan dampak pembangunan secara adil dan merata.

Secara umum bila dilihat perkembangannya di tahun 2024, jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 26,24 (ribuan) dan persentase orang miskin menurun, namun tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (P2) meningkat. Hal ini dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 2. 21 Data Kemiskinan Kabupaten Asmat, 2020 –2024

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (DALAM RIBUAN)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	TINGKAT KEDALAMAN KEMISKINAN	TINGKAT KEPARAHAN KEMISKINAN	GARIS KEMISKINAN
		(%)	(P1)	(P2)	(RP)
2020	25,12	25,49	3,54	0,75	383.790
2021	25,04	24,83	4,081	0,911	405.368
2022	25,6	24,87	3,573	0,81	424.978
2023	25,58	24,36	3,75	0,89	450.237
2024	26,24	24,5	4,173	1,043	487.035

Sumber BPS Kabupaten Asmat 2025

Pada tabel diatas menunjukan, prosentasi angka kemiskinan menurun landai

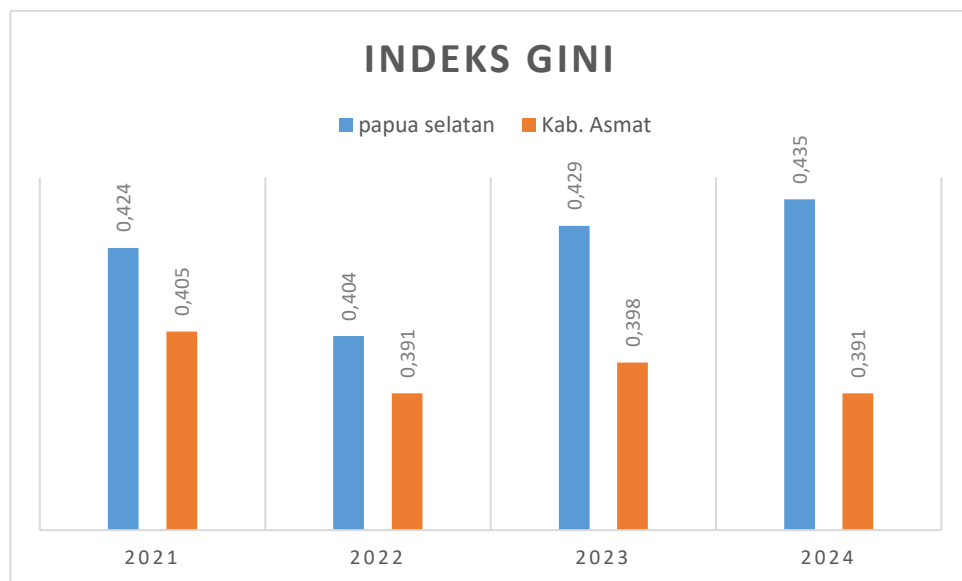


dimana pada tahun 2020 sebesar 25,49% dan tahun 2024 menjadi 24,5%. Fenomena tersebut hendaknya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah

Selain kemiskinan absolut Kabupaten Asmat dalam penelusuran literature belum ditemukan rilis resmi terkait angka kemiskinan ektrim. Namun Menurut ALRC, pada tahun 2018 terjadi **wabah campak dan malnutrisi** akibat kemiskinan ekstrem dan minimnya akses pelayanan; sekitar **70 anak meninggal** di 11 distrik di Asmat (termasuk Fayit, Pulau Tiga. Pada saat itu, provinsi Papua mencatat tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia (~27,8%), namun data per kabupaten khususnya Asmat tidak tersedia .

2.2.4.2. Indeks Gini Ratio

Gini ratio adalah indikator ekonomi yang mengukur ketimpangan pendapatan antar masyarakat di sebuah daerah. Nilai indeks gini berkisar antara 0-1. Sebuah daerah akan memiliki skor 0 apabila penduduk daerah tersebut memiliki distribusi pendapatan yang merata. Sebaliknya, kalau sebuah daerah memiliki skor 1, itu artinya sekelompok irang di daerah tersebut menguasai seluruh sumber pendapatan. Adapun gambaran *gini ratio* Kabupaten Asmat dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 35 *Gini Ratio* Kabupaten Asmat dan Provinsi Papua Selatan

Sumber : Hasil Olahan dari berbagai sumber, 2025

Dari tabel diatas nampak bahwa *gini ratio* Kabupaten Asmat tahun 2024 sebesar 0,391 hampir mendekati 0,4, yang berarti sudah masuk kategori ketimpangan tinggi. Demikian pula di Provinsi Papua Selatan dengan *gini ratio* mencapai 0,43 masuk dalam kategori ketimpangan tinggi.

Selain itu kesenjangan pendapatan dapat pula digambarkan melalui Indeks Wiliamson pada tabel berikut:



Tabel 2. 22 Gambaran Ketimpangan Pendapatan (Menurut Bank Dunia)

TAHUN	Ketimpangan Pendapatan		
	40% Berpendapatan Terendah	40% Berpendapatan Sedang	20% Berpendapatan Tinggi
2021	17,56	32,63	49,81
2022	18,74	33,3	47,79
2023	18,68	31,5	49,82

Kondisi diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 ketimpangan pendapatan dimana 20% penduduk golongan berpendapatan tinggi menguasai hampir 50% total pendapatan sedangkan 40% golongan penduduk berpendapatan sedang menguasai hampir 33,3% dari total pendapatan dan untuk 40% golongan penduduk berpendapatan terendah hanya memiliki pendapatan 18% saja. Hal yang sama terjadi pada tahun 2022. Dari tabel diatas nampak bahwa *gini ratio* Kabupaten Asmat tahun 2024 sebesar 0,391 hampir mendekati 0,4, yang berarti sudah masuk kategori ketimpangan tinggi. Demikian pula di Provinsi Papua Selatan dengan *gini ratio* mencapai 0,43 masuk dalam kategori ketimpangan tinggi pada tahun 2022 dan tahun 2023. Namun sebagai catatan, terjadi perbaikan untuk 40% penduduk yang berpendapatan terendah mengalami kenaikan pendapatan menjadi 18,68% (tahun 2023). Sebaliknya untuk penduduk kelas menengah sedikit tertekan ditandai dengan menurunnya porsi pendapatan menjadi 31,5% (tahun 2023).

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Potret Kabupaten Asmat dalam penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa terlihat dari keamanan wilayah, dimana kondisi ini diupayakan melalui indikator-indikator seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Pembangunan Kebudayaan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah

2.2.5.1. Agama dan Kepercayaan

Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penduduk Asmat mayoritas penganut Kristen, selebihnya penganut agama lain. Penduduk di Kabupaten Asmat memeluk berbagai agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Mayoritas penduduk di Kabupaten Asmat merupakan pemeluk Katolik yang jumlahnya pada tahun 2024 mencapai 65.461 jiwa (56,92 persen), diikuti oleh pemeluk Kristen sebanyak 36.781 jiwa (36,29 persen), Islam sebanyak 6.751 jiwa (6,75 persen), Hindu sebanyak 30 jiwa (0,028 persen), dan Budha sebanyak 7 jiwa (0,006 persen) dari total jumlah penduduk 120.902 jiwa. Fasilitas tempat peribadatan yang ada di Kabupaten Asmat baik yang dibantu oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat adalah masjid, gereja



protestan, gereja katolik, dan kapel. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 23 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Distrik, 2024

No.	Distrik	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik
1	Agats	2	2	7	9
2	Akat	-	-	1	1
3	Aswi	-	-	3	3
4	Atsj	2	-	4	6
5	Awyu	1	-	5	1
6	Ayib	-	-	4	-
7	Betcbamu	-	-	2	5
8	Der Koumur	-	-	3	4
9	Fayit	-	1	1	6
10	Jetsy	-	-	4	6
11	Joerat	-	-	-	6
12	Joutu	-	-	6	-
13	Kolf Braza	-	-	-	-
14	Kopay	-	-	4	8
15	Koroway Buluanop	-	1	4	-
16	Pantai Kasuari	-	-	8	3
17	Pulau Tiga	-	-	2	6
18	Safan	-	1	2	10
19	Sawa Erma	-	-	4	10
20	Sirets	1	1	4	4
21	Sor Ep	1	-	5	1
22	Suator	3	-	7	3
23	Suru-suru	-	-	14	-
24	Tomor Birip	-	-	6	3
25	Unir Sirau	-	-	-	2
		10	6	100	97

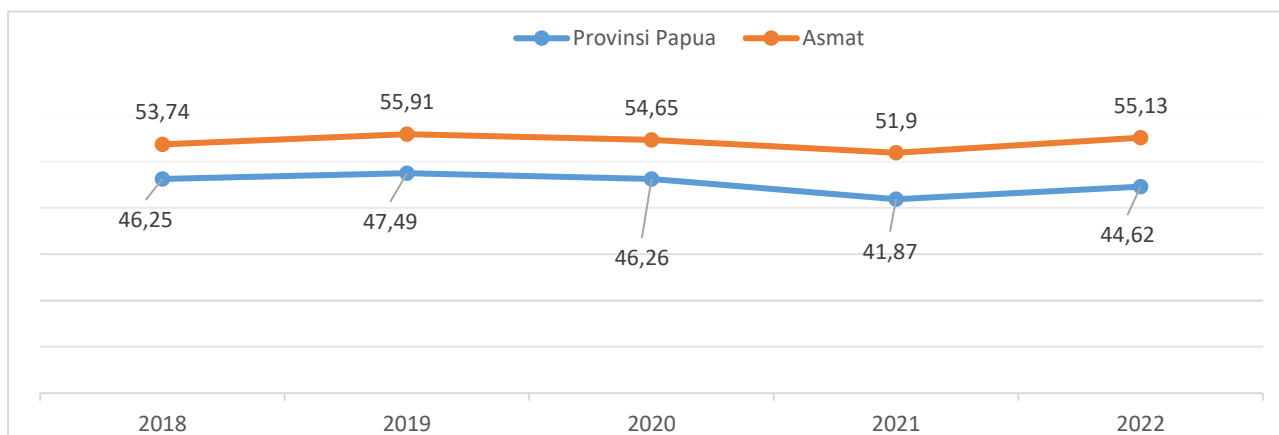
Sumber: BPS Kabupaten Asmat, 2025

2.2.5.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Kerukunan Beragama

Indeks pembangunan kebudayaan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan kebudayaan suatu negara atau daerah. IPK bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa jauh suatu masyarakat menghargai, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Sampai saat ini Indeks Pembangunan Kebudayaan Asmat belum bisa dicermati, maka untuk membandingkannya dianalisis melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Provinsi Papua (induk) dimana pada tahun 2018 memiliki capaian sebesar 46,25 persen. Kemudian jika dibandingkan dengan capaian IPK Nasional, maka Nasional lebih unggul daripada IPK Provinsi Papua. Hingga pada tahun 2022 Provinsi Papua memiliki capaian sebesar 44,62 persen dan IPK pada Nasional sebesar 55,13 persen. Terdapat beberapa faktor penyebab IPK rendah, seperti: 1) pelestarian warisan budaya yang kurang sehingga pada situs bersejarahm tradisim dan warisan budaya lainnya dapat



menyebabkan degradasi atau kehilangan elemen budaya yang penting; 2) rendahnya partisipasi dalam ekspresi budaya, tingkat partisipasi masyarakat rendah dalam seni dan kegiatan budaya lainnya. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan rendahnya kreativitas dan ekspresi budaya; 3) kurangnya infrastruktur dan fasilitas budaya yang memadai. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Gambar 2. 36 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Sementara itu seperti halnya indeks pembangunan kebudayaan, angka indeks Kerukunan Beragama belum ada terpublikasi. Satu-satunya cara untuk menggambarkan indeks kerukuan beragama di Kabupaten Asmat dapat diproksi dari Angka Indeks Kerukunan Beragama Provinsi Papua (sebelum pemekaran) pada tahun 2021 sebesar 80,20 kategori sangat tinggi.

2.2.5.3. Fokus Sosial Dan Budaya

Fokus ini dilaksanakan melalui beberapa program prioritas antara lain program pengelolaan kekayaan budaya, pengelolaan keragaman budaya dan pengembangan kemitraan. Program-program tersebut diupayakan melalui kegiatan pengembangan kreativitas seni ukiran Asmat berupa pelatihan 20 pengukir, penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal (RIPDA) dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Asmat. Kegiatan lainnya adalah fasilitasi penyelenggaraan festival kebudayaan daerah di Agats yang dilaksanakan setiap bulan Oktober dan juga merupakan promosi wisata budaya yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Asmat. Selain kegiatan-kegiatan diatas telah pula dibangun sanggar-sanggar seni dan budaya di masing-masing distrik yang diharapkan dapat digunakan sebagai pusat pengembangan dan pelestarian budaya Asmat. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Asmat tahun 2012-2023 telah menetapkan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal yang merupakan suatu kawasan khusus yang ada di Kabupaten Asmat. Kawasan ini terdiri dari 1) Perkampungan leluhur di Amunpun distrik Atsy; 2) Upacara inisiasi di distrik Sawa Erma; 3) Upacara perdamaian di kampung Sawi distrik Pantai Kasuari. Kawasan lindung ini memberikan gambaran kekhasan dan keunikan lokal yang ada di



Papua, khususnya di Kabupaten Asmat sehingga oleh Pemerintah Kabupaten Asmat telah menetapkan kawasan-kawasan tersebut perlu untuk dilindungi keberadaannya.

Cakupan pelaku seni dan budaya yang meningkat kemampuannya dalam pengembangan kekayaan seni, budaya dan adat Asmat sampai dengan tahun 2023 telah mencapai target yaitu 100 persen, maka presentase capaian indikator ini adalah sebesar 100 persen. Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini ialah kegiatan sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, pengembangan kreativitas seni ukir Asmat dan fasilitas penyelenggaraan festival kebudayaan Asmat pada 25 distrik serta pengembangan SDM di bidang kepariwisataan bekerjasama dengan lembaga lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut diatas telah menjadi kegiatan rutin/tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Asmat sejak tahun 2020- 2023 sehingga cakupan pelaku seni dan budaya terus meningkat di Kabupaten Asmat.

Tabel 2. 24 Perkembangan Indikator Seni dan Budaya di Kabupaten Asmat, 2020-2023

No.	Capaian Pembangunan	Satuan	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan pelaku seni dan budaya yang meningkat kemampuannya dalam pengembangan kekayaan seni, budaya dan adat Asmat	Persen	100	100	94,4	100
2.	Jumlah obyek wisata budaya yang telah dikembangkan	Obyek	1	1	13	15
3.	Jumlah pelaku seni dan budaya yang eksis di tingkat nasional maupun internasional.	Kelompok	1	1	10	12
4.	Jumlah materi publikasi budaya Asmat	Materi	1	1	12	15
5.	Cakupan jumlah obyek budaya yang telah disahkan HAKI nya	Unit	1	1	12	14
6.	Cakupan kekayaan budaya yang dilindungi dalam Perda	Persen	1	1	80	80

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Asmat 2024

Pengembangan obyek wisata budaya sampai dengan tahun 2023 telah melampaui target dengan kegiatan antara lain fasilitasi penyelenggaraan festival kebudayaan daerah, pembangunan sanggar ukir di kampung uwus, pembangunan sanggar ukir di kampung erma, pembangunan sanggar ukir di kampung biwar laut, pembangunan *art shop* di Ewer, pembangunan sanggar ukir di kampung omanesep, pembangunan sanggar ukir di kampung saptambor pembangunan sanggar ukir di kampung ocenep, pembangunan sanggar ukir di kampung kairin, pembangunan sanggar ukir di yahui, pembangunan sanggar seni ukir di kampung kamur, pembangunan sanggar seni ukir di kampung syuru, pembangunan sanggar seni ukir di kampung pirimapun, pembangunan sanggar seni ukir di kampunf waras, pembangunan sanggar ukir di Agats dan pembangunan sanggar seni ukir di Komor.




Jumlah pelaku seni dan budaya yang eksis di tingkat nasional maupun internasional belum memenuhi target, dimana target akhir periode yaitu di tahun 2023 sebanyak 12 kelompok namun baru hanya tercapai 10 kelompok saja. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui kegiatan fasilitasi penyelenggaraan festival kebudayaan daerah tingkat Provinsi di Jayapura, Pusat di Jakarta, analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata di Eropa dan pengembangan jaringan kerjasama promosi wisata lainnya. Belum tercapainya indikator ini dikarenakan keterbatasan dana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Asmat sehingga beberapa program prioritas perlu tunda penganggarannya.

Capaian indikator jumlah materi publikasi Asmat sampai dengan tahun 2023 mencapai 6 materi dari target 10 materi. Indikator ini diupayakan melalui kegiatan pengembangan jaringan kerja sama promosi wisata berupa pembuatan buklet, pamlet dan brosur yang disebar di berbagai counter-counter pariwisata di luar Kabupaten Asmat (Bandara Sokarno-Hatta Jakarta dan Bandara Ngurah Rai Denpasar) serta pengelolaan Art Shop di Agats.

Cakupan jumlah obyek budaya yang telah disahkan HAKInya sampai dengan tahun 2023 sudah dilaksanakan, maka persentase capaian indikator ini sebesar 100 persen. Beberapa upaya yang dilaksanakan antara lain pembentukan tim dan inventarisasi bentuk dan corak seni ukir serta pakaian adat Asmat.

Orang Asmat secara turun-temurun memiliki kemampuan untuk menghasilkan patung-patung dalam ritual dan cerita mitos pada setiap pahatan dan ukiran dari kayu yang dibentuk menyerupai tiang, perisai dan tombak, pada perahu dan dayung, tiang penyangga utama rumah adat/Jew dan seterusnya. Menurut unsur jenis, kewilayahan, motif, arti umum dan khusus dalam ukiran asmat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 25 Jenis Pahatan dan Ukiran di Kabupaten Asmat

Unsur	Macam Jenis	Keterangan
Jenis ukiran 	Patung Besar	Patung yang di buat dengan ukuran besar dan digunakan secara umum untuk menghormati orang- orang yang berpengaruh seperti kepala perang. Patung-patung besar ini biasa ditempatkan diluar rumah, di tempat-tempat umum, dusundusun sagu, kebun dan tepi sungai. Patung atau ukiran besar ini dalam kehidupan orang Asmat di kenal dengan sebutan Patung "Mbis". Berikut ini adalah penjelasan tentang pengertian, fungsi, dan arti simbolik dari patung Mbis ;
	Patung Kecil	Patung yang ukurannya kecil dan biasanya disebut patung ke keluarga karena patung ini digunakan untuk kepentingan keluarga. Patung-patung kecil ini ditempatkan di dalam rumah atau



Unsur	Macam Jenis	Keterangan
		tempattempat khusus milik keluarga dari nenek moyang yang diukir.
	Ukiran di papan, dayung, perahu, perisai dan lain lain	Ukiran-ukiran ini biasa dipakai sebagai pencari nafkah atau lambang kebesaran. Para pengukir Asmat sangat genius dalam mengukir suatu patung, perisai dan benda-benda seni lainnya. Perisai dalam bahasa daerah disebut "Jamasi". Perisai dibuat dari akar pohon besar.
Sesuai 4 wilayah	Teluk flaminggo sampai pantai kasuari,	Perisai di daerah ini berbentuk empat persegi panjang dengan ukiran nenek moyang dibagian atas, yang berbentuk lonjong yang mereka kenal dengan sebutan Cemen "Kemaluan lakilaki".
	Sebelah Timur laut,)	bentuknya lebih besar dan lonjong dengan bagian kepala yang jelas, yang pada umumnya menggambarkan fisik "ikan Pari", Mbu "kura-kura" atau PI "Kasuari". Disamping itu ada juga yang berbentuk kemaluan laki- laki yang menggambarkan keperkasaan dan kejantanan laki-laki.
	Sebelah Timur,	bentuk perisainya yang terbesar, bagian atas runcing dan bagian bawah datar, pada bagian atas menunjukkan abstraksi dari kepala manusia.
	Sungai Braza	penduduk kaki bukit sebelah timur laut, hampir sama dengan perisai di daerah sebelah timur yang terkesan sulit di bedakan.
Motif	1) Motif manusia;	Motif manusia yang diukir tidak langsung, artinya motif manusia dengan memakai lambang seperti mengukir burung taun-taun, burung kakak tua dan lain-lain. Jadi motif binatang digunakan untuk menggambarkan tata kelakuan manusia.
		Motif manusia yang diukir langsung, misalnya motif manusia yang diukir pada perisai dimaksudkan untuk manusia yang
		dibuat patungnya pada perisai agar berkenan kepada mereka yang menggunakan perisai itu.
	2) Motif binatang;	Patung ukir berbentuk hewan dari jenis burung, buaya, ikan, kus kus, kelelawar dst
	3) Motif benda-benda;	Kaitannya dengan benda atau alat yang digunakan
	4) Motif Alam sekitar	Semua yang disimbolkan di alam baik hayati maupun non organik.
Arti umum	Manusia : a. Alat kelamin manusia	yang mengandung makna kesubaran,
	b. Telapak tangan	yang menggambarkan kehidupan roh nenek



Unsur	Macam Jenis	Keterangan
		moyang,
	c. Mata dan mulut	menyatakan perhatian roh nenek moyang
	d. Perut	menyatakan kemewahan dan kemakmuran, dan
	e. Bagian manusia secara keseluruhan	memanggil arwah nenek moyang
	Binatang	
	a. Sirip Buaya	berarti kebesaran seseorang panglima (kekuatan, keberanian),
	b. Ekor Kus-kus,	menyatakan harapan kepada leluhur
	c. Kelelawar	lambang kebaikan dan keburukan manusia
	d. Burung kasuari	Dipandang sebagai penyelamat.
	Alam Sekitar	
	1. Akar pohon beringin	Artinya percaya pada roh leluhur,.
	2. Daun pakis	Artinya darah manusia,
	3. Buih air	Artinya adanya kehadiran roh-roh.
Fungsi pokok ukiran	Sebagai lambang dan simbol kehadiran nenek moyang atau arwah leluhur sehingga nenek moyang yang telah meninggal di percaya masih hidup dan mempengaruhi seluruh hidup masyarakat.	
	Keyakinan akan roh-roh leluhur mereka tuangkan pada unsur unsur kebudayaan yang lain dan biasanya digunakan pada dayung, tombak, perahu, perisai, dan lain-lain.	
	Penghormatan terhadap arwah leluhur. Mereka berkewajiban membalas dendam atas kematian nenek moyang sehingga disusun suatu rencana pembalasan. Menurut orang Asmat, mereka harus bertanggung jawab atas kematian anggota masyarakat / keluarga, agar arwah orang yang meninggal dapat kembali dan membawa hidup baru dari dunia nenek moyang dan dapat pula memberi kekuatan bagi yang masih hidup dari musuh yang dibunuhnya.	
	Berfungsi sebagai pernyataan sedih atau gembira, karena kesedihan atau kegembiraan dapat diekspresikannya lewat ukiran-ukiran yang dibuatnya.	
	Berfungsi sebagai alat pembina mental untuk bersikap tabah, maka diukir simbolsimbol pahlawan yang bermotif manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan ataupun benda.	
	Berfungsi sebagai lambang keindahan yang dapat mempengaruhi sikap anggota masyarakat. Makin indah sebuah ukiran makin nyata dan besar pula pengaruh arwah nenek moyang arwah leluhur terhadap masyarakat.	
	Sebagai potret leluhur untuk dikenang masyarakat.	
	Sebagai lambang kesuburan dan kemakmuran.	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025



2.2.5.4. Sistem Religi dan Mitologi

Penduduk asli di Kabupaten Asmat terdiri dari kelompok etnik yang dinamakan Asmat. Penamaan ini diberikan oleh orang Asmat untuk menamakan diri mereka sendiri berdasarkan kepercayaannya yang diwariskan melalui mytologi penciptaannya bahwa mereka diciptakan oleh dewa pencipta bernama Fumeripits dari pohon. Juga penamaan ini dikaitkan dengan hubungan orang Asmat yang sangat erat dengan pohon. Orang Asmat memiliki keyakinan kepada roh-roh leluhur yang merupakan pendiri suku, klen, ataupun kampung yang telah meninggal yang merupakan pelindung orang Asmat dan pemberi kekuatan dalam peristiwa-peristiwa penyerangan terhadap kampung dan suku lain.

2.2.5.5. Mite Manusia Pertama Orang Asmat

Orang Asmat yakin bahwa mereka adalah keturunan dewa yang turun dari dunia gaib yang berada di seberang laut di belakang ufuk, tempat matahari terbenam tiap hari. Dalam keyakinan orang Asmat, dewa nenek moyang itu dulu mendarat di bumi disuatu tempat yang jauh di pegunungan. Dalam perjalanannya turun ke hilir sampai ia tiba di tempat yang kini didiami orang Asmat hilir. Dalam perjalannya ia mengalami banyak petualangan. Dalam mitologi orang Asmat yang berdiam di daerah Teluk Flaminggo misalnya dewa itu namanya Fumeriptsy. Ketika ia berlayar dari hulu sungai ke arah laut, ia diserang oleh seekor buaya raksasa. Perahu lesung yang ditumpangnya tenggelam. Dalam perkelahian sengit yang terjadi, ia dapat membunuh si buaya, tetapi ia sendiri luka parah. Ia hanyut terbawah arus yang mendamparkannya di tepi sungai Asewtsy, kampung Syuru sekarang. Untung ada seekor burung Flaminggo yang merawatnya sampai ia sembuhkembali, kemudian ia membangun sebuah rumah yew dan mengukir dua patung yang sangat indah serta membuat sebuah genderang, em, yang sangat nyaring bunyinya. Setelah selesai, ia mulai menabuh genderang sambil menari terus menerus tanpa henti, dan kekuatan sakti yang keluar dari gerakannya itu memberi hidup pada kedua patung yang diukirnya, dan mereka kemudian menjadi pasangan manusia yang pertama, yaitu nenek moyang orang Asmat (Zegwaard, 1955). Sesudah itu datang lagi seekor buaya raksasa yang juga mencoba menyerang kedua manusia pertama tadi, tetapi Fumeripitsy dapat membunuhnya juga. Kepala buaya itu dipenggalnya dan badannya dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil dan dilemparkannya kesemua arah penjuru mata angin. Potongan-potongan buaya tadi itulah menjadi nenek moyang suku-suku bangsa lain yang tinggal di sekeliling tempat tinggal orang Asamat dan menjadi musuh mereka, Dengan demikian mite ini menggambarkan tindakan pengayauan pertama dan penciptaan manusia musuh Asmat oleh Fumeripitsy. Mite ini juga melambangkan proses daur ulang hidup dan mati (Smith 1970; Schneeboum, 1985). Hubungan antara manusia yang hidup dengan alam roh leluhur biasanya dipelihara dan dihormati dalam upacara-upacara ritual dan dikaryakan dalam bentuk pahatan patung leluhur yang telah meninggal. Penghormatan kepada leluhur ini sering dilakukan dalam pesta-pesta, seperti pesta patung, pesta topeng setan, dan pesta-pesta saat inisiasi. Seluruh aktifitas berupa perayaan upacara ritual, pemujaan roh leluhur, rencana penyerangan dan pengayauan, upacara-upacara



dalam inisiasi, proses belajar kebudayaan semuanya berpusat di dalam rumah bujang / laki-laki yang disebut "Jew"¹. Orang Asmat memiliki keyakinan akan dewa tertinggi atau Tuhan yang disebut "Mbiwiripitsy". Dalam pandangan hidup mereka meyakini akan suatu tempat kehidupan bahagia atau surga yang juga akan ditempati seseorang setelah meninggal dunia, yaitu "Safan". Safan menurut orang Asmat adalah dunia seberang atau surga yang merupakan tempat kediaman dari arwah-arwah orang-orang tua dan leluhur orang Asmat yang telah meninggal dunia. Kehidupan di Safan adalah kehidupan yang bahagia dibandingkan dengan kehidupan di bumi atau dunia nyata, yang penuh dengan kesengsaraan, penderitaan, malapetaka, penyakit, dan situasi tidak bahagia. Selain kehidupan di dunia atau dunia nyata yang disebut "Onpu ow Capinmi", konsep dunia lain yang diyakini adalah apa yang disebut sebagai dunia persinggahan bagi orang-orang meninggal sebelum sampai ke Safan atau "Dampu ow Capinmi". Dalam hubungan saling bergantung dan membutuhkan orang Asmat memenuhinya dengan menyelenggarakan sejumlah upacara-upacara sakral untuk menghormati leluhur yang hidup di Safan. Tidak sekedar upacara, orang Asmat juga menghormati leluhurnya dengan membuat ukiran-ukiran manusia, dan melakukan pengayauan-pengayauan. Upacara, membuat patung Mbis, pengayauan, dan persembahan diberikan kepada leluhur dengan harapan selama kehidupan di dunia nyata selalu mendapat perlindungan dan kedamaian. Harapan yang lebih nyata adalah bahwa ketika meninggal dunia dapat mencapai Safan dengan sempurna. Mereka sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara saja, sebab pada akhirnya manusia akan mati dan roh atau arwahnya akan menghadap nenek moyang. Kalau dalam hidupnya di dunia ini orang tidak menghormati arwah nenek moyang melalui sajian, arwah nenek moyang itu akan mem persulit kehidupannya di Safan pada saat dia meninggal". Orang Asmat yakin bahwa dilingkungan tempat tinggal manusia juga diam berbagai macam roh yang dibagi dalam tiga golongan yakni: Yi-ow, roh nenek moyang yang pada dasarnya bersifat baik, terutama bagi keturunannya. Osbopan, yaitu roh jahat yang membawa penyakit dan bencana. Dambin-ow, roh jahat dari orang yang mati konyol. Orang Asmat mengenal beberapa upacara besar yang menyangkut aktivitas sosial budaya dan kultural yang berkaitan dengan penghormatan kepada roh-roh nenek moyang yaitu: ¹

- Mbismbu atau pembuatan patung Mbis, atau upacara pembuatan patung nenek moyang suku Asmat.
- Yentpokmbu upacara pembuatan dan pengukuhan rumah Jew.
- Tsyimbu upacara pembuatan dan pengukuhan perahu.
- Yamasy pokumbu upacara pembuatan perisai/tameng.
- Mbipokumbu upacara pembuatan topeng.
- Salah satu upacara yang penting dalam adat orang Asmat adalah upacara

¹ *Filosofi Budaya Rumah/Bangunan Dalam sebuah rumah adat yang disebut Jew/Yew pada bagian tengah rumah yang biasanya ditempati oleh kepala suku terdapat sebuah tiang berukir menyerupai sebuah patung manusia (Patung Mbis). Melalui mitologi patung ini merupakan manifestasi dari roh nenek moyang/leluhur suku Asmat (pria dan wanita) yang hidup rukun dan saling mengasihi. Rumah Jew/Yew ini melambangkan bahwa alam semesta dan mahluk yang hidup di dalamnya (manusia, roh) hidup rukun dan saling mengasihi.*



pengukuhan dan pembuatan rumah Jew.

2.2.5.6. Pandangan Orang Asmat Tentang Keseimbangan Dalam Kehidupan

Orang Asmat percaya bahwa dunia dalam pandangan mereka terbagi atau terdiri dari tiga (3) bagian yaitu;

- 1) "Asamat Ow Capinmi" adalah "Dunia Tempat Manusia / Orang Asmat Hidup".
- 2) "Damir Ow Capinmi" adalah "Tempat Persinggahan Orang Yang Sudah Meninggal dan Belum Masuk Dalam Tempat Istirahat Kekal di Surga.
- 3) "Safan" adalah Tempat peristirahatan terakhir yang kekal / surga.

Semua orang Asmat ingin masuk ke Safan ketika mereka meninggal karena Safan adalah tempat tinggal roh leluhur / nenek moyang mereka yang penuh dengan kebahagiaan tanpa ada penderitaan. Untuk dapat masuk ke Safan semasa hidupnya seorang Asmat harus banyak melakukan kebaikan, menghormati roh nenek moyangnya dan mentaati / mengikuti semua aturan adat mereka. Menurut orang Asmat seorang pahlawan, panglima perang, tua-tua adat, dukun, ketika mereka meninggal rohnya dapat langsung masuk ke Safan, namun apabila seseorang meninggal karena dibunuh musuh, sakit penyakit, sihir hitam, dendam, maka rohnya tidak dapat menuju Safan melainkan akan tinggal di "Damir Ow Capinmi"/ Tempat persinggahan orang yang sudah meninggal. Roh-roh yang belum sampai ke Safan inilah yang dapat menyebabkan penyakit, penderitaan, gempa bumi dan peperangan bagi orang Asmat yang masih hidup. Sehingga bagi orang yang masih hidup harus menebus roh-roh ini dengan membuat pestapesta dan ukiran-ukiran. Dengan memberi nama mereka pada ukiran/ patung patung tersebut agar roh-roh tersebut dapat masuk ke Safan.

Berdasarkan pandangan hidup inilah dalam kehidupannya orang Asmat sangat menjunjung tinggi keseimbangan, yaitu suatu pandangan atau pemikiran yang menjadi dasar hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya dan manusia dengan dunia spiritual (arwah leluhur atau arwah orang mati). Hubungan tersebut terjadi dalam situasi suatu kerjasama, persaingan, ataupun konflik. Demikian bahwa keseimbangan yang dipahami terbentuk, terjaga dan terjadi secara mekanis adalah saling membutuhkan, membuat manusia hidup, membuat orang Asmat mendapatkan perlindungan, membuat orang Asmat dengan sempurna dapat mencapai Safan, membuat orang Asmat memperoleh kemenangan-kemenangan dalam pengayauan, norma dan aturan dalam masyarakat tertata baik dan lain sebagainya. Keseimbangan inilah yang diyakini membuat orang Asmat tetap ada dan hidup. Keseimbangan hubungan antara manusia Asmat dengan alam maupun dengan dunia spiritual tercermin dalam perilaku dan tindakan orang Asmat sehari-hari. Mereka percaya bahwa untuk mendapatkan perlindungan di dunia nyata, dunia mereka hidup saat ini maupun untuk dapat mencapai hidup di Safan, maka mereka harus melakukan ritual-ritual magis dan penyembahan kepada leluhur.

Penghormatan kepada leluhur juga dilakukan dalam bentuk pahatan-pahatan



dalam rupa manusia pada media kayu, melakukan perjalanan-perjalanan pengayauan terhadap kelompok lain, melakukan tindakan-tindakan balas dendam, melagukan nyanyian-nyanyian dan tarian dan sebagainya. Tidak mengherankan dan harus dipahami oleh orang luar bahwa dunia orang Asmat dipenuhi dengan ritualritual. Orang Asmat juga memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya dengan seadanya tanpa melakukan eksplorasi secara besar-besaran. Hampir sama dengan kelompok masyarakat pemburuperamu dengan orientasi hidup masa kini. Sumber daya alam yang berlimpah, di antaranya sagu, ikan di laut dan sungai, udang, kepiting, dan hewan hutan dimanfaatkan secukupnya. Mereka mengambil sumber ekonomi tersebut untuk dimanfaatkan hari ini selanjutnya besok akan diambil lagi. Mereka memanfaatkan sumber daya yang ada untuk pemenuhan kebutuhan saat ini, sedangkan Untuk kebutuhan hari esok dan hari-hari selanjutnya akan dicari lagi.

Orang Asmat juga banyak menyamakan atau melambangkan diri mereka dengan hewan, tumbuhan, dan lain-lain dalam arti simbolisme (simbolik). Kekayaan lambang juga tercermin dalam dalam guratan pahat pada kayu dalam bentuk manusia dan hewan. Bentuk rupa manusia pada patung Mbis adalah cerminan leluhur yang telah meninggal dunia. Mereka menyamakan diri mereka dengan pohon sagu, pohon kelapa, buah kelapa, burung dan simbolisme lainnya. Sebagaimana ungkapkan di atas bahwa pohon sagu dilambangkan sebagai ibu, demikian juga pohon kelapa. Burung-burung sebagai makhluk yang suka memakan buah-buahan diibaratkan tindakan mereka yang suka melakukan perjalananperjalanan jauh untuk melakukan pengayauan. Tindakan memakan buah bagi mereka memiliki makna yang cukup luas dan tidak terbatas pada peristiwa pengayauan saja. Jan Boelars mengatakan, "demikian pula cerita-cerita dan nyanyian-nyanyian mereka mengandung kekayaan lambang dan pikiran". Tabel berikut ini menunjukkan beberapa bentuk kearifan adat yang diturunkan baik dalam pandangan maupun ritual dan bentuk simboliasasi.

Tabel 2. 26 Beberapa Bentuk Nilai Kearifan Lokal Suku Asmat

No	Bentuk Nilai Kearifan	Keterangan	Wilayah adat
1.	Odakemminisme	Mitosnya suku sawi Atap-hapkon melalu dogma 'Odakemminisme' tentang kultus. Perjalanan mite dari kegelapan kepada dunia baru yang secara religi dipercaya hadir dengan inkulturasi kekristenan yang hadir kemudian.	Safan Distrik Pantai Kasuari, Auwyu
2.	Ritual Pesta Ulat Sagu (Tow Pok Mbu)	Makna Ritual merupakan pandangan tersendiri tentang pohon sagu sebagai simbol seorang ibu yang memberi yang terbaik bagi anggota keluarga. Biasanya dilakukan tiga hal penting yaitu menyanyi, menari (pujian Em so) dan makan bersama	Semua Rumpun
3.	Tradisi Perjodohan	Pandangan orang Asmat melamar mengandung maksud perjodohan dan sebaliknya.	Semua Rumpun

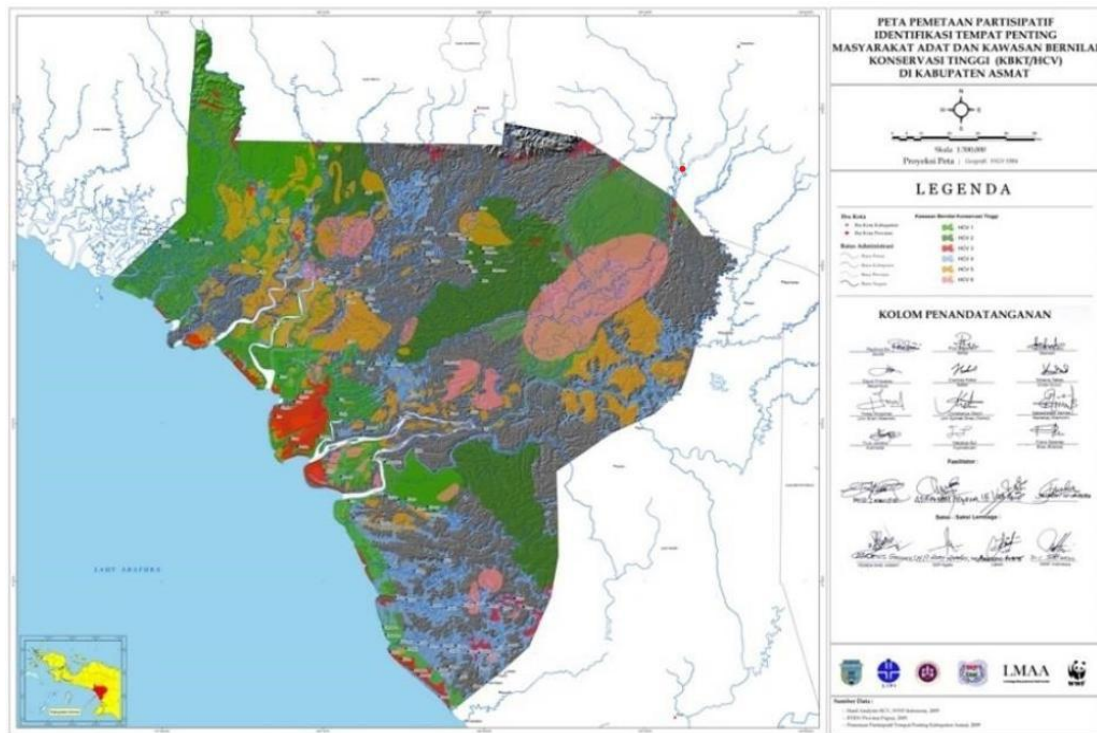


No	Bentuk Nilai Kearifan	Keterangan	Wilayah adat
4.	Tradisi Pembayaran Maskawin	Benda-benda pembayaran mas kawin umumnya berasal dari alam dan beberapa peralatan yang biasa digunakan sebagai alat perang dan alat mencari nafkah. Busur, panah, dan tombak mengasosiasikan budaya perang suku di satu sisi, dan alat berburu	Semua Rumpun
		dan keamanan di sisi lain. Kapak batu adalah salah satu contoh benda berharga yang menentukan wibawa mempelai laki-laki.	
5.	Tradisi Melahirkan Suku Asmat	Teweraut merupakan lambang tradisi bersalin di bawah pohon lebat dan tinggi. Teweraut nama yang dipakai untuk menyebutkan tokoh utama roman ini merupakan salah satu tanaman lokal bernama anggrek Teweraut. Anggrek ini berkelopak merah jingga dan termasuk tanaman langka. Tanaman ini hidup sebagai epifit di pohon-pohon besar, seperti habitat anggrek pada umumnya.	Semua Rumpun
6.	Kearifan Seni ukir Asmat	Pada awalnya merupakan manifestasi dari mite dan kepercayaan orang asmat melalui membuat simbol ukiran patung di kayu mereka menjaga hubungan baik manusia dengan Tuhan dan Leluhur serta orang yang sudah meninggal. Biasanya dibuat dalam bentuk patung Mbis, ukiran di berbagai peralatan hidup, rumah dan bahkan perahu lesung.	semua Rumpun, dengan patung Mbis dalam beberapa Versi : Atsy, Mbismam
7.	Filosofi Sungai ,Sampan, Sagu	Masyarakat Asmat percaya bahwa secara sosial melalui aspek mata pencaharian sepanjang hidup mereka selalu berhubungan dengan Sungai sebagai jalur transportasi, sumber air, sumber makanan hewani, Sampan merupakan alat yang digunakan sejak awal untuk berperang, moda utama yang digunakan untuk mencapai wilayah lain, dan tertentu, Sagu adalah ibu yang memberi makan dan kehidupan.	Semua Rumpun dan Suku

Sumber: diolah dari berbagai sumber artikel dan jurnal



Sistem kepercayaan, pandangan dan mite orang Asmat kemudian melahirkan kawasan atau area tempat penting masyarakat adat Asmat yang mereka peruntukan untuk berbagai kepentingan adat dan tradisional baik area dalam kerangka ritual, tempat upacara maupun tempat yang dianggap sakral akibat satu kejadian tertentu yang terjadi pada waktu lalu.



Gambar 2. 37 Peta Tempat penting suku Asmat

Sumber : RPJPD Kab. Asmat, 2025-2025

Dari hasil pemetaan tempat penting orang Asmat yang diselenggarakan pemerintah kabupaten Asmat kerjasama dengan WWF Indonesia dan Keuskupan Agung Agats telah menghasilkan area konservasi tinggi yang memuat bentang alam penting, jasa ekosistem penting, mata pencaharian tradisional dan tempat penting sebagai kawasan simbolisasi identitas orang Asmat, adapun tempat penting suku asmat berupa kuburan leluhur, dusun sagu, sumber air, jalur perjalanan leluhur, tempat sakral, tempat persinggahan leluhur, tempat sejarah dna hutan lindung adat, dst. Sedangkan yang berkorelasi dengan mata pencaharian masyarakat seperti dusun sagu, tempat berburu, rawa, dan kampung lama (biasanya masih ada dusun kelapa dan kebun). Gambar 2.37 memperlihatkan hasil pemetaan partisipatif yang menjadi kesepakatan masyarakat Hukum Adat Asmat yang disaksikan pemerintah daerah.

2.2.5.7. Sistem Kekerabatan dan Kepemimpinan

a. Struktur Sosial

Orang Asmat yang tersebar di seluruh wilayah Asmat terbagi-bagi ke dalam kesatuan-kesatuan sosial yang disebut ye. Suatu kesatuan social yang disebut ye adalah sama dengan pengertian kampung dalam struktur pemerintahan masa sakarang. Tiap kampung memiliki suatu teritorium kekuasaan tertentu dan di dalam wilayah kekuasaan



itulah terdapat dusun-dusun sagu, areal hutan untuk berburu dan perairan untuk menangkap ikan. Kampung-kampung orang Asmat biasanya dibangun di tepi sungai dalam bentuk memanjang mengikuti arah sungai.

Kesatuan sosial yang lebih kecil dari kesatuan sosial kampung adalah klan atau marga. Tiap kampung dibentuk oleh sejumlah klan atau marga. Keanggotaan dalam suatu marga adalah berdasarkan keturunan dari seorang moyang yang sama dan bersifat patrilineal. Tiap klan menggunakan nama tertentu untuk menyatakan identitas keanggotaan klan yang bersangkutan dan sekaligus untuk membedakan mereka dari anggota klan lain. Para anggota dari klan yang sama tidak boleh saling kawin, dengan demikian maka klan bersifat exogami, artinya kawin di luar klan sendiri. Perkawinan boleh terjadi antara anggota yang berasal dari klan yang berbeda. Biasanya para anggota tiap klan menempati bagian tertentu dalam suatu kampung.

Di bawah kesatuan klan terdapat kesatuan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum berumah tangga sendiri. Keluarga inti merupakan kesatuan sosial yang paling kecil tetapi paling penting dalam kehidupan orang Asmat sebab selain keluarga inti berfungsi sebagai tempat untuk, meneruskan keturunan, juga berfungsi sebagai kesatuan kerja yang menghasilkan berbagai kebutuhan hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga. Pada masa sekarang setiap keluarga inti menempati sebuah rumah sendiri.

b. Kekerabatan

Sistem istilah kekerabatan suku bangsa Asmat termasuk tipe Hawaian atau yang disebut juga tipe generasi sesuai dengan klasifikasi terminologi kekerabatan yang dibuat oleh L.H. Morgan. Tipe Hawaian adalah suatu sistem pengelompokan yang menggunakan istilah yang sama untuk menyebut saudara-saudara sekandung dan semua saudara sepupu silang dan paralel. Pada angkatan satu generasi di atas Ego (aku), yaitu ayah dan ibu juga semua saudara kandung laki-laki; baik dari pihak ayah maupun ibu disebut "ayah". Sementara semua saudara kandung perempuan dari pihak ayah maupun pihak ibu disebut "ibu". Pada angkatan aku (ego) semua saudara sepupu seajajar dan saudara sepupu silang disebut dengan istilah yang sama, yaitu "saudara". Untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan disebut berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Suku bangsa Asmat, dalam sistem kekerabatan mengenal 3 (tiga) bentuk keluarga, yaitu :

- a) Keluarga Inti Monogami dan Kandung Poligami
- b) Keluarga Luas Uxorilokal : keluarga yang telah menikah berdiam di rumah keluarga dari pihak istri
- c) Keluarga Ovunkulokal : keluarga yang sudah menikah berdiam di rumah keluarga istri pihak ibu.

Orang Asmat tinggal bersama dalam rumah panggung seluas 3 x 4 x 4 meter yang disebut Tsyem. Ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan senjata dan peralatan berburu, bercocok tanam, dan menangkap ikan. Berdasarkan garis



keturunan melalui garis ayah (patrilineal), terdapat adat perkawinan adalah eksogami (kawin di luar kelompok fratri) dan adat menetap setelah kawin adalah patrilokal dan matrilokal (pasangan pengantin tinggal dan menetap di sekitar tempat tinggal suami, tetapi juga bisa ditempat tinggal pengantin perempuan). Anak-anak di orang Asmat tidak semuanya dapat mengikuti garis keturunan ayah atau menggunakan nama keluarga ayah. Anak-anak dalam keluarga kadang-kadang menggunakan nama keluarga ibu (matrilineal).

Namun demikian tidak serta-merta semua anak-anak dalam keluarga harus dibagi untuk mengikuti garis keturunan ayah atau ibu. Situasi demikian dapat terjadi bukan karena telah ditentukan oleh aturan adat, tetapi adalah merupakan kebiasaan ketika seorang anak menjadi lebih dekat dan akrab kepada anggota kerabat ibunya, maka si anak akan menggunakan nama keluarga ibu. Seorang anak yang lebih dekat hubungan dengan kaum kerabat pihak ibu akan diperlakukan dengan baik; perkembangan pertumbuhan dan pengawasan selalu diikuti. Maka dengan demikian oleh pihak keluarga ayah akan mengakui kepada pihak MB untuk mengasuh, sekaligus memakai nama keluarga dari pihak ibu.

Jozh R, Mansoben mengatakan "Situasi yang terjadi menyebabkan sejumlah kajian Antropologi menyebutkan bahwa penelusuran garis keturunan pada orang Asmat adalah patrilineal dan matrilineal". Adat menetap yang tidak taat asas dan garis keturunan yang dapat berubah-ubah (patrilineal atau matrilineal), kesimpulannya orang Asmat menganut sistem ambilineal descent dengan pola menetap dan organisasi sosial yang dualistik yang saling tumpang tindih (Koentjaraningrat; 1993 :344).

Dalam adat perkawinan orang Asmat telah diatur bahwa anak-anak dalam keluarga ketika hendak mencari pasangan hidup untuk kawin di luar kelompok fratri, yaitu aipmu dan aipem. Klen-klen.marga yang ada di dalam aipmu dan aipem tidak dibenarkan untuk saling kawin. Adapun seseorang bila hendak kawin, misalnya dari fratri aipmu, maka dia harus mencari pasangan untuk kawin dari kelompok aipem. Demikian pula sebaliknya laki-laki dari kelompok fratri aipmu hanya boleh mencari perempuan sebagai pasangan untuk kawin dari kelompok fratri aipem. Dengan demikian bahwa perkawinan yang terjadi diantara laki-laki dan perempuan di dalam kelompok adalah perkawinan yang dilarang oleh adat. Pelanggaran terhadap adat perkawinan dengan kawin di dalam kelompok merupakan tabu dengan sanksi yang cukup tegas.

Mengenai tempat tinggal setelah kawin, pasangan suami isteri biasanya tinggal di tempat kediaman dari pihak laki-laki. b) Kelompok kekerabatan dan Jalinan Pertalian Kerabat Basis yang paling dasar dalam kelompok kekerabatan adalah keluarga inti (batih) yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum kawin. Keluarga inti terbentuk berdasarkan suatu ikatan perkawinan yang diakui sah oleh adat. Dewasa ini ikatan keluarga juga diakui keberadaannya oleh gereja khatolik maupun protestan. Ikatan pertalian kerabat antara orang tua dan anak tetap diakui secara sah, biarpun sejak anak telah digiring untuk tinggal terpisah dari orang tua. Anak-anak pada usia 5 tahun pada umumnya ditempatkan di rumah bujang atau Jew agar anak dapat belajar



tentang masyarakat, kebudayaan, adat-istiadat dan lingkungan alamnya. Dalam perkembangan ketika aturan adat mulai longgar banyak anak-anak yang tidak tinggal di Jew dapat tinggal di rumah orang tuanya dan kadang-kadang juga tinggal di Jew. Sebuah pasangan keluarga yang baru menikah biasanya akan tinggal bersama-sama di rumah orang tuanya dan setelah dapat membangun rumah sendiri akan tinggal terpisah dari rumah orang tuanya.

Orang Asmat sangat memperhatikan jalinan hubungan dengan saudara sekandung. Jalinan pertalian hubungan dengan kerabat sebagai anggota keluarga luas ini sangat akrab, mesra serta saling tolong-menolong, demikian juga jalinan hubungan dengan anggota keluarga dari pihak ibu. Seorang anak lakilaki ketika pertama kali hidup bersama-sama dengan pasangan hidupnya akan tinggal bersama-sama di rumah ibu bapaknya. Bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi untuk kelangsungan keluarga tersebut, seperti pergi bersama-sama meramu sagu, berburu atau mencari ikan. Ikatan pertalian hubungan sebagai anggota keluarga luas di kalangan mereka tetap terpelihara antara keluarga ayah dan keluarga anak, biarpun anak telah memiliki rumah sendiri, yang terpisah dari rumah orang tuanya dan tungku tersendiri. Secara ekonomis isterinya yang akan menyiapkan makanan dan bukan lagi didapat dari dapur orang tuanya. Bentuk kelompok kerabat yang lain lagi adalah adalah fratri atau moety.

Dalam kehidupan kekerabatan masyarakat Asmat pada umumnya terbagi atas dua kelompok besar, yaitu aipmu dan aipem. Di dalam kedua kelompok besar ini terdiri dari klen-klen. Sejumlah aturan menata kedua kelompok ini dalam kehidupannya, termasuk didalamnya adalah aturan untuk tidak kawin di antara sesama klen yang tergolong dalam aipmu atau aipem. Sesama anggota fratri biasanya saling mengenal dengan baik, saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam aktivitas-aktivitas menyangkut perayaan adat, aktivitas ekonomi dan lain sebagainya. Jalinan pertalian sebagai kerabat di antara orang Asmat tidak hanya terjadi karena dijalin atas dasar hubungan perkawinan dan hubungan darah. Pertalian sebagai kerabat dapat juga terjadi dari suatu hubungan pertemanan yang terjalin sejak masih kanak-kanak ketika bersama-sama hidup di Jew hingga sehingga kedua orang menjadi dewasa. Hubungan pertemanan dalam hal ini adalah saling membantu dalam kesulitan, membagi rokok, membagi makanan, dan lain-lain. Jalinan pertemanan kemudian berlanjut menjadi jalinan kerabat ketika salah satu orang meninggal dunia.

Kaum kerabat dari individu yang meninggal selanjutnya akan mengangkat sahabatnya yang masih hidup sebagai pengganti saudara mereka yang telah meninggal. Individu yang masih hidup juga akan dipanggil namanya sesuai dengan nama saudara mereka yang telah meninggal. Kaum kerabat dari orang yang meninggal juga memberikan barang-barang dan bahan makanan, seperti sagu, siput, pakaian, gula, beras kepada individu yang masih hidup. Setelah itu individu yang bersangkutan bersama-sama dengan anggota keluarganya yang akan melakukan pelayanan di rumah duka selama lebih dari 3 hari. Kewajiban dari individu yang masih hidup dalam kehidupannya adalah ikut memperhatikan kelangsungan hidup dari anggota keluarga



sahabatnya yang telah meninggal dunia dalam hal bantuan dalam pembayaran mas kawin, dend-denda, terlibat dan ikut memihak apabila ada konflik dan lain sebagainya. Hubungan pertemanan yang akrab, mesra dan bersahabat juga berperan ketika terjadi penyerangan- penyerangan terhadap kelompok lain. Kedua sahabat baik akan saling melindungi agar dapat berhasil dan pulang dengan selamat. Pada waktu lalu untuk lebih mengikat hubungan pertemanan kedua sahabat lebih mengakrabkan dengan saling menukar isteri. Pada upacara mbis pokmbu. "Tarian-tarian yang dilakukan sangat erotik dan dinamis, pada saat-saat yang demikian, terjadilah tindakan papisj, diantara mereka yang mempunyai hubungan papisj – yaitu dua orang sahabat saling menukar isteri untuk malam-malam yang telah ditentukan. Maksud tindakan papisj ialah untuk tetap mempererat hubungan persahabatan di antara kedua sahabat tersebut yang sangat diperlukan dalam saat-saat tertentu, umpama dalam peperangan" yang baik dan akrab sering ditindaklanjuti dalam tindakan-tindakan papisj dalam pesta-pesta adat dengan saling menukar isteri pada malam-malam tertentu. (Patti, Semuel: 1976:62).

c. Kepemimpinan Tradisional

Kepemimpinan tradisional di masyarakat Asmat pada waktu lalu adalah kepemimpinan yang diperoleh seseorang karena kemampuan lebih yang dimiliki dan telah dicapai dalam kehidupan di masyarakat. Seseorang selanjutnya dihargai dan memperoleh pengakuan sebagai pemimpin karena hebat, kuat dan pintar dalam menyusun strategi dalam penyerangan-penyerangan panga yauan yang sukses terhadap kelompok dan kampung lain.

Pemimpin juga adalah orang yang pandai berdiplomasi, menjadi penengah dalam menangani konflik konflik di masyarakat, mampu melindungi kampung dari seranganserangan musuh, berwibawa, dan memiliki banyak ide. Kedudukan menjadi seorang pemimpin diperoleh karena penghargaan dan pengakuan masyarakat adalah upaya yang dilakukan seorang diri karena kemampuan dan kelebihan dalam hidup dan kehidupannya di masyarakat. Kedudukan sebagai pemimpin pada masyarakat ini tidak didapat karena keturunan. Pencapaian kedudukan dengan model seperti ini dalam tipe kepemimpinan tradisional, termasuk tipe achieves status atau pencapaian kedudukan diperoleh karena upaya sendiri. Sistem kepemimpinan model demikian dalam kajian Antropologi dikenal dengan sebutan Big man atau pria berwibawa.

Johz Mansoben (2003) mengatakan kebudayaan Asmat memiliki orientasi nilai budaya yang menghargai usaha orang. Upaya seseorang untuk menampilkan dan mengukuhkan diri sebagai seorang pemimpin perang sangat dihargai dan dinilai tinggi sebab perang merupakan sarana untuk memperlancar berbagai aktivitas kehidupan manusia, baik yang bersifat kegiatan ekonomi maupun upacara-upacara ritus. Penghargaan terhadap orang-orang yang berhasil menjadikan dirinya pemimpin perang adalah pengakuan masyarakat terhadap mereka bukan saja sebagai pemimpin perang tetapi juga pemimpin masyarakat. Kepemimpinan tradisional kampung-kampung di Asmat secara keseluruhan saat ini telah mengalami peningkatan dalam organisasi. Kepemimpinan tradisional telah memiliki wadah, yang didapat karena



keturunan.

Saat ini peran kepala perang dan pahlawan yang adalah laki-laki sudah tidak lagi dilakukan seperti dulu terutama dalam mengorganisir perang, tetapi lebih kepada memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan hal-hal yang bersifat politis seperti memperjuangkan pembangunan masyarakat di wilayah kabupaten Asmat. Perangkat organisasi yang berada di bawah naungan Lembaga Masyarakat Adat memiliki kepengurusan di tingkat kabupaten, distrik dan kampung-kampung. Prinsip kelembagaan dan kepemimpinan suku Asmat patut menjadi tolak ukur dan mewarnai nilai pelaksanaan pada sistem kepemimpinan daerah di kabupaten Asmat sehingga arah pembangunan manusia Asmat sejalan dengan nilai budaya yang dianut secara turun temurun bahkan terlindungi dan dilestarikan.

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Menjelaskan kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Bagian yang bisa digambarkan disini, terutama Kesenjangan Gender.

2.2.6.1. Kesenjangan Gender

Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan baik di tingkat dasar, menengah maupun perguruan tinggi merupakan salah satu tujuan pembangunan milenium (MDGs) yang harus dicapai oleh semua negara. Sehingga isu ketimpangan gender dalam bidang pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang perlu dicermati untuk melihat sejauh mana pembangunan di bidang pendidikan telah memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Pada pendidikan tingkat sekolah dasar (SD), secara umum tidak terjadi ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Asmat. Hal tersebut terlihat dari rasio APS penduduk usia 7-12 tahun antara perempuan dan laki sebesar 88.84 persen. Ukuran batas rasio APS dikatakan kesetaraan gender. Jika Rasio APS antara perempuan dan laki-laki berkisar antara 95 persen sampai dengan 105 persen. Nilai rasio APS 7-12 tahun di Kabupaten Asmat yang berkisar antara 100 mengindikasikan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan.

Fasilitas pendidikan yang ada dapat diakses oleh anak laki-laki dan perempuan kesenjangan gender dalam hal pendidikan terjadi pada jenjang pendidikan menengah utamanya terlihat pada angka melek huruf pemuda (usia 15-24 tahun) dengan gap cukup lebar. Disparitas antara laki-laki dan perempuan pada indikator AMH yang paling lebar adalah daerah yang nilai rasio AMH-nya menjauh dari nilai seratus, yaitu berturut-turut Kabupaten Asmat. Dilihat dari kepemilikan ijazah, kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan jelas terlihat. Persentase perempuan usia 10 tahun ke



atas yang telah menamatkan pendidikan dasar (SMP ke atas) lebih sedikit dibanding laki-laki.

Dibidang legislative tercatat periode **2019–2024**, terdapat **7 (tujuh) perempuan dari total 25 anggota DPRD Kabupaten Asmat**, mereka aktif memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan, anak, pendidikan, dan ekonomi keluarga.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

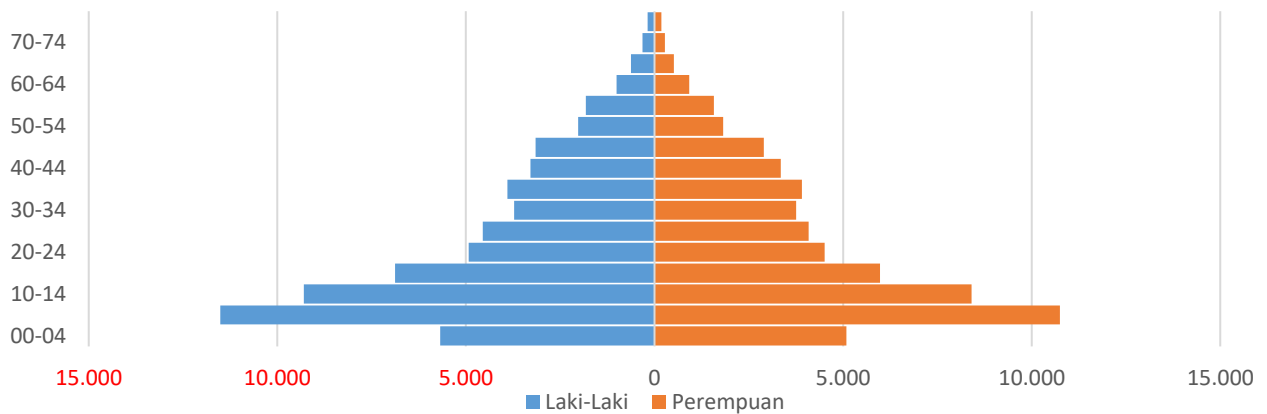
Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Penjelasan gambaran daya saing SDM ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Angka Ketergantungan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2.3.1.1. Angka Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase dependency ratio, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Laju pertumbuhan penduduk : 3,34%. Disparitas kepadatan penduduk tinggi (kab. Asmat 4,83 jiwa/km²). Persentase penduduk laki-laki : 52,01% dan perempuan 47,99%. Gambarnya dapat diperlihatkan melalui piramida penduduk sebagai berikut:



Gambar 2. 38 Piramda Penduduk Kabupaten Asmat Tahun 2024

Sumber : Kabupaten Asmat Dalam Angka 2025

Bentuk piramida penduduk Asmat ber bentuk piramida ekspansif dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Dasar piramida yang lebih lebar menunjukkan jumlah kelahiran di wilayah ter sebut tinggi dan angka kematian cukup rendah. Tingkat kelahiran yang tinggi ditunjukkan dengan komposisi penduduk kelompok balita (usia 0-4 tahun) lebih tinggi dibanding ke lompok usia lainnya, yaitu sebanyak 21.632 jiwa (18,61 persen). Selain itu dari piramida penduduk juga dapat melihat gambaran ketergantungan penduduk yaitu beban/jumlah penduduk tidak produktif yang harus ditanggung oleh penduduk produktif. Penduduk yang dikategorikan tidak produktif adalah mereka yang berusia di bawah 15 tahun (0-14 tahun) dan mereka yang sudah berusia 65 tahun ke atas (65+). Sedangkan, penduduk usia produktif adalah mereka yang berusia 15-64 tahun. Penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2024 sebanyak 68.070 jiwa dan penduduk usia tidak produktif adalah 52.832 jiwa, sehingga angka ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif Kabupaten Asmat adalah 56,3. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif (usia 0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (usia 65+).

Berdasarkan kelompok usia, komposisi penduduk Asmat memiliki jumlah yang semakin mengecil seiring dengan bertambahnya kelompok usia, dan terlihat penduduknya didominasi oleh kelompok usia muda yaitu 0-14 tahun. Bentuk piramida penduduk mengerucut ke atas. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Asmat sebesar 107,1 yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Komposisinya adalah 52,01 persen laki-laki dan 47,99 persen perempuan. Terkait dengan IPM, penurunan angka ketergantungan akan memberi keleluasan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap naiknya angka IPM, jika mereka dapat memperoleh akses untuk pengembangan dirinya. Seperti akses kependidikan dan pelatihan, fasilitas kesehatan, dan akses ke sumber modal untuk meningkatkan usahanya. Jika mereka tidak mendapatkan akses tersebut, maka bonus demografi yang ditandai dengan makin menurunnya angka ketergantungan justru akan menjadi malapetaka. Sebuah bencana bagi suatu daerah karena banyak penduduk usia produktif yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai pekerjaan, akibatnya bisa jadi sering terjadi tindakan kriminalitas.



Adapun diskripsi antara usia produktif dan non produktif penduduk Kabupaten Asmat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 39 Perbandingan antara Usia Produktif dan Non Produktif Penduduk Kabupaten Asmat Tahun 2024

Sumber : BPS kabupaten Asmat tahun 2025

2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Kondisi Iptek dan inovasi yang menjadi pendorong pelaksanaan pembangunan dan keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi di Kabupaten Asmat dalam jangka panjang., dapat diukur sekurang-kurangnya melalui indikator-indikator seperti Rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif, Rasio Kewirausahaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Inovasi Daerah, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2.3.2.1. Indeks Inovasi Daerah (IID)

Kabupaten Asmat termasuk ke dalam provinsi Papua Selatan, yang secara keseluruhan mendapat skor rendah (sekitar 1,20) dalam penilaian IID 2023 oleh Kemendagri. Angka ini dibawah 0,40 dapat diartikan kurang inovatif.

2.3.2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

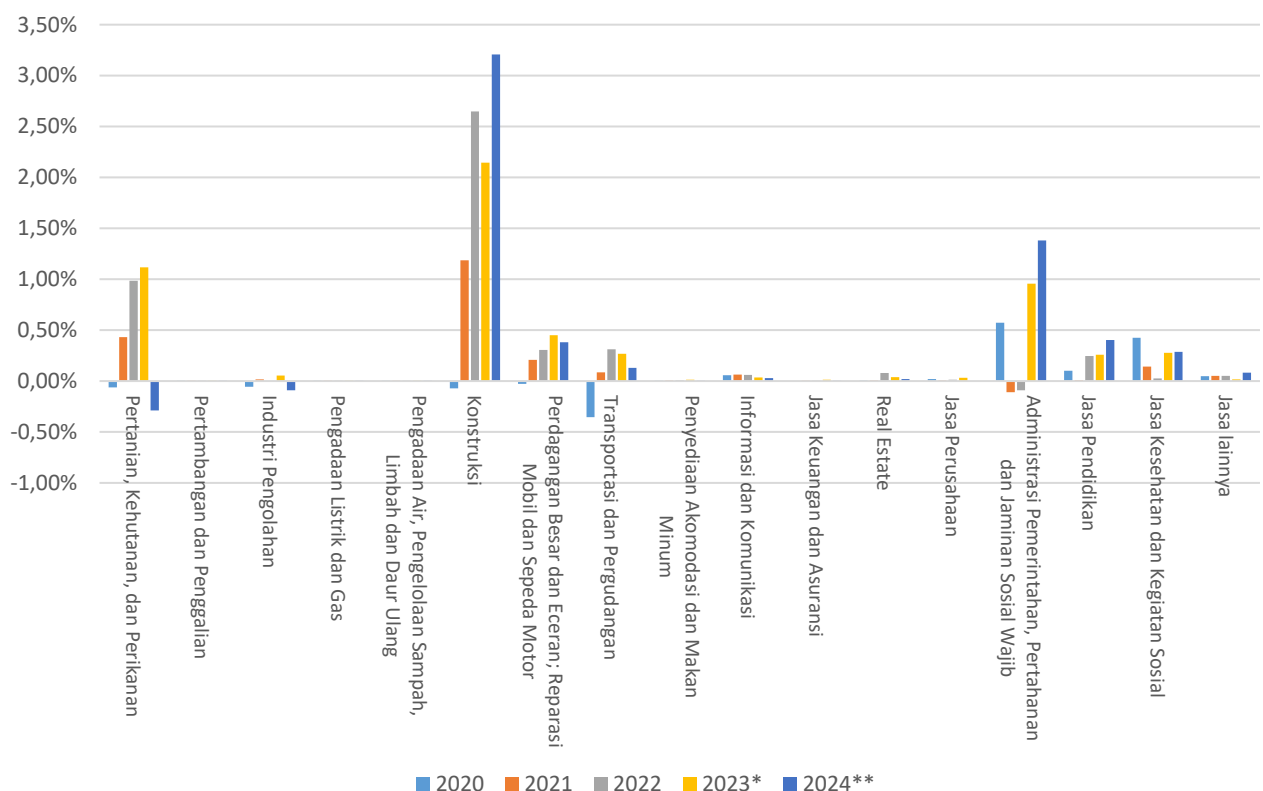
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menggambarkan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Berdasarkan Profil Ketenagakerjaan Provinsi Papua dan Kabupaten Asmat dalam Angka, realisasi persentase penduduk usia kerja pada tahun 2024 di Kabupaten Asmat adalah penduduk bekerja, yaitu sekitar 76,23 persen. Persentase yang cukup tinggi ini dari sisi produktivitas tenaga kerja sangat bagus karena dengan banyaknya tenaga kerja yang memperoleh pekerjaan. Namun, produktivitas juga harus dikaitkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Asmat. Karena meskipun jumlah tenaga kerja besar kalau tidak diimbangi dengan skill atau keterampilan yang memadai tidak akan menghasilkan produktivitas yang diinginkan.



Sekitar 76,23 persen dari penduduk usia kerja di Kabupaten Asmat merupakan penduduk yang aktif secara ekonomi (penduduk yang termasuk angkatan kerja), hal ini ditunjukkan dari tingginya angka TPAK yaitu sebesar 77,83 persen. Sisanya (22,17 persen) tidak aktif secara ekonomi, yaitu penduduk bukan angkatan kerja dengan kegiatan utama sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya. Dilihat dari sisi gender, TPAK laki-laki dengan perempuan yaitu masing-masing sebesar 84,78 dan 70,14 persen. Angka yang sama-sama tinggi tersebut mencerminkan bahwa secara umum kesempatan penduduk perempuan dalam kegiatan ekonomi sama besar dengan penduduk laki-laki. Secara tidak langsung, hal tersebut menunjukkan bahwa pencari nafkah dalam keluarga tidak lagi hanya kaum laki-laki.

2.3.2.3. Kontribusi Sektoral PDRB ADHB tahun 2020 sampai 2024

Pertumbuhan ekonomi sebuah daerah biasanya ditunjukan melalui kontribusi dari sektor-sektor penunjang perekonomian. Kinerja share kontribusinya memberikan gambaran tentang produktifitas ekonomi suatu daerah. Berikut gambaran kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Asmat Tahu 2020-2024.



Gambar 2. 40 Kontribusi Sektor PDRB ADHB Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kabupaten Asmat 2025 (data diolah)

Perkembangan kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 10 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar diatas. Walaupun sektor pertanian, perkebunan dan perikanan mempunyai peran yang besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Asmat, namun nilai kontribusinya terus menurun sampai tahun 2021, namun kembali meningkat pada tahun 2024 tapi belum kembali seperti sebelum periode COVID-19.



Pergerakan positif dari pertumbuhan di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan diharapkan terus berlanjut pada tahun berikutnya. Sebaliknya, kontribusi sektor konstruksi pada terus meningkat. Kontribusi sektor konstruksi tahun 2024 menjadi 34,61 persen. Selain itu, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 terus tertekan dan memberikan kontribusi yang menurun.

2.3.3. Tranformasi Digital

Menjelaskan tentang pengarusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Berikut diskripsi proksi indikator yang dicoba untuk menunjukan aktifitas transforasi digital di Kabupaten Asmat:

Tabel 2. 27 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asmat Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase kelompok informasi masyarakat ditingkat distrik terbina	%			100	100	100
2	Persentase informasi pembangunan daerah yang terpublikasikan media Komunikasi	%			93,33	92,27	144,67
3	Persentase Kampung dengan akses internet	%	NA	NA	NA	39 %	42%
4	Persentase Kampung yang terlayani internet gratis	%	NA	NA	NA	NA	NA
5	Persentase perangkat daerah yang menerapkan aplikasi sistem informatika dalam pelayanan publik	%	NA	55,45	6,67	75	82,35

2.3.4. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang berkelanjutan, di Kabupaten Asmat, dapat di gambarkan sekurang-kurangnya melalui indikator-indikator seperti Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Persentase Desa Mandiri, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.



2.3.4.1. Kondisi Jalan dan Jembatan

Jalan merupakan prasarana yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Tersedianya jalan yang berkualitas akan meningkatkan usaha pembangunan khususnya dalam upaya memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lain. Berdasarkan data tahun 2024, panjang jalan di seluruh wilayah Asmat mencapai 229.819 Km. Berdasarkan pengelolaannya, seluruhnya merupakan jalan Kabupaten. Seperti tabel berikut:

Tabel 2. 28 Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Asmat, 2016-2024

NO	TAHUN	PANJANG JALAN (Km)	Kondisi				Kinerja	
			Kondisi Baik	Kondisi Sedang	Kondisi Rusak	Kondisi Rusak Berat	Kemantapan	Tidak Mantap
							Baik & Sedang	Rusak ringan & Rusak Berat
1	2016	886,479	308,495		577,984		34,80	65,20
2	2017	887,479	251,753	57,088	283,743	293,895	34,84	65,16
3	2018	888,479	253,560	60,706	278,885	293,328	35,45	64,55
4	2019	889,479	26,662	6,012	748,305	105,500	3,69	96,31
5	2020	890,479	14,124	140,135	653,985	78,235	17,4	82,6
6	2021	886,479	18,921	259,051	122,835	485,672	31,35	68,65
7	2022	886,479	20,597	259,051	121,159	485,672	31,35	68,46
8	2023	886,479	32,729	256,276	113,421	484,053	32,601	67,399
9	2024	229,819	63,095	0,955	0,228	165,541	27,87	72,13

Sumber: Dinas PUPR Kab. Asmat, 2024

Selain gambaran kualitasnya, pembanguna jalan di Kabupaten Asmat juga diperlihatkan proses penambahan panjangnya dari tahu 2016 sampai 2024, ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 29 Pembangunan Jalan di Kabupaten Asmat, 2016-2024

PROGRAM /KEG	Realisasi Per Tahun									Jumlah Total (m)
	2016 (m)	2017 (m)	2018 (m)	2019 (m)	2020 (m)	2021 (m)	2022 (m)	2023 (m)	2024 (m)	
Pembangunan Jalan Komposit	766.00	116.00	42.00	-	942.00	-	-	-		1,866.00
Pembangunan Jalan Beton	3,401.00	5,620.91	2,143.50	2,575.62	3,401.00		2,203.98	2,763.40	3,382.87	25,492.28
Pembangunan Jalan Jembatan	2,816.00	771.00	507.00	2,049.00	2,856.00	2,500.00	616.00	680.00	878.75	13,673.75
Pembangunan Jalan Kayu Atap	-	-	-	-	-	-	3,396.43	2,906.00	4,871.19	11,173.62

Sumber: Dinas PUPR Kab. Asmat, 2024



Seluruh jaringan jalan di Kabupaten Asmat merupakan jaringan jalan kabupaten sehingga kewenangannya berada di Kabupaten Asmat. Kelas jalan di Kabupaten Asmat secara keseluruhan termasuk dalam kelas III C. Pada tahun 2024, jaringan jalan di Kabupaten Asmat yang berada dalam kondisi baik adalah sepanjang 63,095 km. Bila dibandingkan dengan kondisi jalan baik pada tahun 2018 yang mencapai 253,560 km, maka dapat dikatakan terjadi penurunan signifikan pada kualitas jalan di Kabupaten Asmat. Panjang jalan dengan kondisi sedang pada tahun 2024 adalah sepanjang 0,955 km, sementara jalan dalam kondisi rusak ringan sepanjang 0,228 km, dan jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 165,541 km atau 72.03% dari panjang jalan.

Persentase panjang dan jembatan kondisi layak dan baik pada tahun 2024 adalah sebesar 2 p% dengan target pada tahun 2024 sebesar 36.56%, yang artinya target 2024 dapat tercapai dengan capaian kinerja 27.87%. dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 2. 30 Persentase Jalan Menurut Kondisi Jalan, 2024

2024					
TOTAL PANJANG	886.479 km				
KONDISI	KM	%	TIPE PERKERASAN/PERMUKAAN	KM	%
KONDISI BAIK	63,095	27,45	ASPAL (AC, HRS, ATB)	7,645	3,33
KONDISI SEDANG	0,955	0,42	PERKERASAN BETON	57,359	24,96
KONDISI RUSAK RINGAN	0,228	0,10	LAPIS PENETRASI/LATASIR/MACADAM	0,000	0,00
KONDISI RUSAK BERAT	165,541	72,03	TELFORD/KERIKIL/URPIL	0,000	0,00
TANAH/BELUM TEMBUS				164,815	71,72

Sumber: Dinas PUPR Kab. Asmat, 2024

2.3.4.2. Akses Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan

Upaya pembangunan di bidang kesehatan adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan secara merata kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat hidup dengan umur panjang dan sehat jasmani rohani sebagai modal dasar pembangunan. Untuk melihat masyarakat yang mempunyai kesehatan yang cukup, ada beberapa faktor penentu diantaranya adalah akses air bersih, sanitasi, dan perumahan. Fasilitas air minum bersih adalah faktor yang sangat menentukan, karena air minum selalu dikonsumsi oleh masyarakat tiap harinya. Dalam satu hari seseorang membutuhkan air minum rata-rata 1,5 liter (sekitar 8 gelas). Artinya jika satu rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota (ayah, ibu, dan 2 orang anak) maka dalam satu hari rumah tangga tersebut membutuhkan sedikitnya 6 liter air untuk keperluan minum. Jika kondisi air yang diminum tersebut tidak mempunyai syarat cukup air bersih, maka akan



mengakibatkan gangguan kesehatan bagi peminumnya. Dalam publikasi Statistik Kesra BPS disebutkan yang dimaksud air bersih adalah air minum yang bersumber dari air kemasan, air ledeng, air bor/pompa, air sumur terlindung, dan mata air terlindung yang jaraknya lebih dari 10 m dari pembuangan limbah terdekat.

Penyediaan air minum bersih di Kabupaten Asmat sangat sedikit. Untuk keperluan minum dan memasak, rumah tangga di Kabupaten Asmat kebanyakan berasal dari air hujan. Kondisi tersebut sangat berpengaruh derajat kesehatan masyarakat, karena air hujan masih mengandung bahan-bahan berbahaya seperti zat kapur dan sebagainya. Hanya persen penduduk yang memanfaatkan air minum kemasan sebagai sumber air minum utamanya. Berikut tabel yang menunjukkan perluasan akses air bersih yang dilakukan Pemda Asmat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 2. 31 Perluasan Air Bersih, 2020-2024

PROGRAM/ KEG	JUMLAH					TOTAL	KETERANGAN
	2020	2021	2022	2023	2024		
Pembangunan sarana prasarana air bersih (Reservoar)							
Pembangunan sarana prasarana air bersih (PAH)	5	4		6	2	17	Tersebar di beberapa Distrik
Pembangunan sarana prasarana air bersih (SUMUR BOR)		2	1	1	1	5	Tersebar di dua Distrik
Pembangunan sarana prasarana air bersih (Bak Penampungan)							
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (MCK)	332	140	186	70	61	832	Tersebar di beberapa Distrik

Sumber: Dinas PUPR Kab. Asmat, 2024

Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya listrik, air bersih serta tersedianya jamban dan tangki septik. Berdasarkan data dinas PUPR 2023, sebesar 78,30 persen rumah tangga di Kabupaten Asmat masih menggunakan pelita/sentir/obor sebagai sumber penerangan rumahnya. Hal ini berarti pelayanan listrik masih belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Asmat. Keadaan ini juga diperjelas dengan sedikitnya penggunaan listrik sebagai sumber penerangannya yang hanya terdapat 21,70 persen rumah di Kabupaten Asmat.

2.3.4.3. Transportasi dan Telekomunikasi

Tersedianya jalan yang berkualitas akan meningkatkan usaha pembangunan



khususnya dalam upaya memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lain. Kondisi geografis Kabupaten Asmat yang berawa dan memiliki banyak sungai besar berimplikasi pada kebutuhan masyarakat dalam menggunakan akses transportasi tidak hanya pada transportasi darat, namun juga bertumpu pada transportasi sungai. Masyarakat memerlukan alat transportasi sungai untuk memenuhi kebutuhan mobilitas antar kampung, ke ibukota distrik, ataupun ke ibukota kabupaten. Untuk mobilitas antar distrik, penduduk di Kabupaten Asmat menggunakan transportasi darat jika wilayah yang akan dituju telah terhubung dengan jaringan jalan. Untuk transportasi yang digunakan dari ibukota kabupaten ke distrik-distrik.

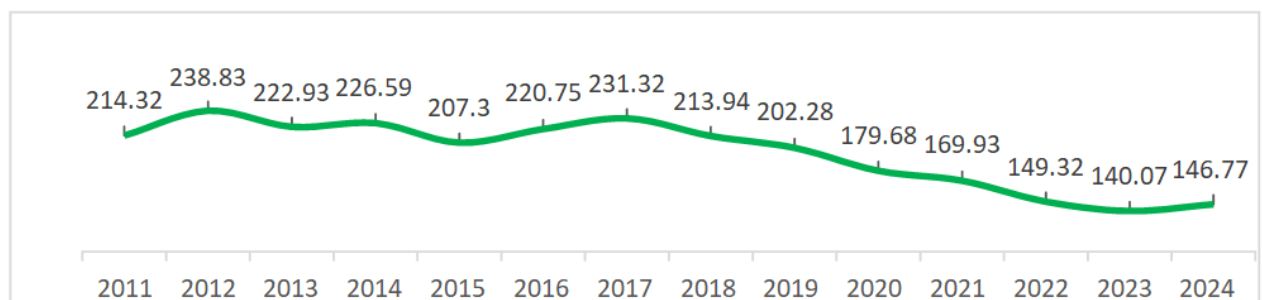
Dari realisasi tahun 2023 sebesar 19.192 jiwa, terjadi peningkatan penumpang tahun 2024 sebesar 22.143 jiwa sehingga capaian kinerja mencapai 189.16% dengan kategori baik.

2.3.5. Stabilitas Ekonomi Makro

Menjelaskan kondisi tentang stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, Tingkat Inflasi, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Diantara indikator dimaksud yang bisa digambarkan indikator tingkat inflasi.

Menurut BPS Papua Selatan, angka inflasi Kabupaten Asmat baru dirilis tahun 2024 sebesar 1,78% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,90.

Berikut gambaran angka Indeks Kemahalan Konstruksi sebagai bagian yang mempengaruhi angka inflasi di Kabupaten Asmat :



Gambar 2. 41 Grafik Perkembangan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Asmat 2019-2024

Sumber : Data BPS Kab Asmat, 2024

Untuk mengetahui perkembangan harga, akan dibahas tentang indeks kemahalan konstruksi (IKK) yang ada di Kabupaten Asmat. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah indeks spasial yang menggambarkan tingkat harga serta tingkat kemahalan konstruksi suatu wilayah dibandingkan dengan kota acuannya (kota



Semarang = 100 sampai tahun 2020, kota makassar = 100 untuk tahun 2021 sampai tahun 2023 dan tahun 2024 kota Banjarmasin = 100 dan seterusnya).

Pergerakan IKK di Kabupaten Asmat dari tahun 2016 ke tahun 2017 sedikit naik, namun pada tahun 2017 sampai tahun 2023 menurun secara kontinu. Sehingga bila di tarik garis linier dari tahun 2011, menunjukkan semakin menurun indeksnya. Pada tahun 2024, IKK di Kabupaten Asmat sebesar 146,77 dan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 140,07. Arti nilai IKK sebesar 146,77 dengan acuan Kota Banjarmasin (IKK=100) menjelaskan bahwa kemahalan barang-barang konstruksi di Asmat harganya mencapai lebih dari 1,46 kali lipat dari harga yang ada di Kota Banjarmasin. Atau dengan kata lain, jika biaya membangun suatu gedung sebesar Rp 100 juta di Kota Banjarmasin, maka dengan bangunan yang sama di Kabupaten Asmat nilainya sebesar Rp 146,77 juta. IKK Kabupaten Asmat lebih tinggi sedikit daripada IKK Provinsi Papua Selatan tahun 2024 yang sebesar 142,98. Ini artinya biaya konstruksi di Kabupaten Asmat masih lebih mahal sedikit daripada di tingkat Provinsi Papua Selatan.

Tingginya IKK Provinsi Papua Selatan dibandingkan dengan sebagian besar IKK provinsi lain, utamanya dikarenakan hampir seluruh barang konstruksi pabrian didatangkan dari luar Provinsi Papua Selatan. Lamanya waktu tempuh dari provinsi asal barang ke Provinsi Papua Selatan dan kondisi geografis yang sulit menyebabkan tingginya biaya transportasi, dalam hal ini biaya angkut barang antar wilayah. Besarnya margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) yang terbentuk, pada akhirnya berdampak pada pembentukan harga barang konstruksi di Provinsi Papua Selatan. Selain itu, Penggunaan transportasi multimoda atau perpaduan moda transportasi darat, laut, dan udara dalam kegiatan distribusi barang, seperti yang umumnya terjadi di Provinsi Papua Selatan, juga terbukti menyebabkan harga barang menjadi lebih mahal (Juniati, 2017). Hal yang sama terjadi di Kabupaten Asmat, nilai IKK kembali naik di tahun 2024. Tingginya harga barang disebabkan oleh kenaikan harga di sektor transportasi dan pergudangan, sedangkan sektor konstruksi terjadi deflasi. Diharapkan ke depan, IKK Kabupaten Asmat akan tetap terus menurun, sehingga semakin murah biaya konstruksi di Kabupaten Asmat.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Penyelenggaraan pemerintahan umum dalam era otonomi daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) yang mengacu pada UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas KKN dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih akuntabel, transparan dan partisipatif berdasar pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pelayanan publik yang berkualitas mencerminkan profesionalisme aparatur dan citra kelembagaan Perangkat Daerah (PD) yang baik. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Setda menunjukkan tren kenaikan dengan ditunjukkan oleh



capaian indikator Persentase layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berjalan baik; Persentase pemenuhan kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; Persentase OPD yang memberikan LKJIP secara rutin; Presentase mahasiswa penerima beasiswa; Persentase dokumen administrasi pemerintahan berkualitas baik; Persentase Produk Hukum yang dapat diterbitkan; Persentase Kerjasama Antar Daerah terfasilitasi dan Cakupan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah yang tercapai 100%, berikut merupakan capaian indikator kinerja program.

Tabel 2. 32 Capaian Indikator Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berjalan baik	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pemenuhan kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100	100
3	Persentase layanan Protokol, Pendokumentasian dan Komunikasi Pimpinan berjalan Baik	%	60	70	70	70	80
4	Persentase OPD yang memberikan LKJIP secara rutin	%	100	100	100	100	100
5	Presentase mahasiswa penerima Beasiswa	%	100	100	100	100	100
6	Cakupan Pemberian Bantuan Lembaga Keagamaan dan	%	100	100	100	100	100
7	Persentase Penyelesaian Tapal Batas Antar Daerah	%	20	50	70	90	
8	Persentase dokumen administrasi pemerintahan berkualitas baik	%	100	100	100	100	100
9	Persentase Produk Hukum yang dapat diterbitkan	%	100	100	100	100	100
10	Persentase Bantuan Hukum yang diberikan	%	0	0	0	0	0
11	Persentase Produk Hukum yang diakses oleh publik	%	12	12	22	32	50
12	Persentase Kerjasama Antar Daerah terfasilitasi	%	100	100	100	100	100
13	Cakupan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah	%	100	100	100	100	100
14	Persentase pengelola pengadaan barang/jasa memahami proses pengadaan barang dan jasa	%					
15	Persentase BUMD dan BLUD terkelola dengan baik	%	100	100	66,67	66,67	66,67
16	Tingkat Pengendalian dan Distribusi	%	0	0	100	100	88



No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Perekonomian Daerah						
17	Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	%	0	0	50	100	67
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	NA	NA	NA	NA	NA
21	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Nilai (Predikat)	NA	NA	NA	NA	43,47 C
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai (Mutu Pelayanan)	NA	NA	NA	NA	NA

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan transtibmas. Salah satu keberhasilan dalam menciptakan kondisi yang aman dan nyaman untuk keseluruhan masyarakat di Kabupaten Asmat merupakan tanggungjawab pemerintah daerah. Sebagai kota dengan aktivitas kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya yang tidak pernah mati, tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menjamin rasa aman kepada warganya. Selain keamanan dan ketertiban, hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kenyamanan masyarakat adalah penanganan kriminalitas.

2.4.2.1. Angka Kriminalitas

Kejahatan/pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Asmat relatif bisa ditangani oleh aparat yang berwenang. Meskipun demikian, angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Asmat tetap harus diwaspadai dan menjadi catatan tersendiri bagi kenyamanan penduduk Kabupaten Asmat. Jumlah perkara pidana di Kabupaten Asmat selama tahun 2020 tercatat 53 perkara pencurian dan 31 perkara penganiayaan. Pada tahun 2020, jumlah perkara pidana tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu sebanyak 11 perkara pencurian dan 6 perkara penganiayaan, sedangkan perkara pidana terendah terjadi pada bulan Maret dan Juli yang hanya tercatat 3 perkara. Berikut ditampilkan dalam table 2.33:

Tabel 2. 33 Angka Kriminalitas dan Jumlah Parkara Pidana di Kabupaten Asmat

No	Uraian	2024	Ket/status
1	Jumlah CT	48	
2	Jumlah CC	36	
3	Prosentase Selra	75%	
4	Selang Waktu (crime lock)	11H,5J,2M,0D	



No	Uraian	2024	Ket/status
5	Resiko Terkena	40,67	
6	Pencurian Biasa	4	3
7	Pencurian Dengan Kekerasan	2	2
8	Aniaya Berat/Mati	1	1
9	Pembunuhan	1	1
10	Perjudian	1	0
11	Penipuan	2	1
12	Penggelapan	2	1
13	Penghinaan	1	0
14	Pengeroyokan	6	3
15	Pencemaran Nama Baik	2	1
16	KDRT	3	3
17	Penganiayaan	13	11
18	UU Perlindungan Anak	5	4
19	UU Pemilu	1	1
20	Penemuan Mayat	2	2
21	KDSA	2	0
	Jumlah	48	34

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2024

Kinerja penyelenggaraan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat juga ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan); Persentase pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai respon time dan Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) yang telah tercapai 100%, kemudian capaian indikator program dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

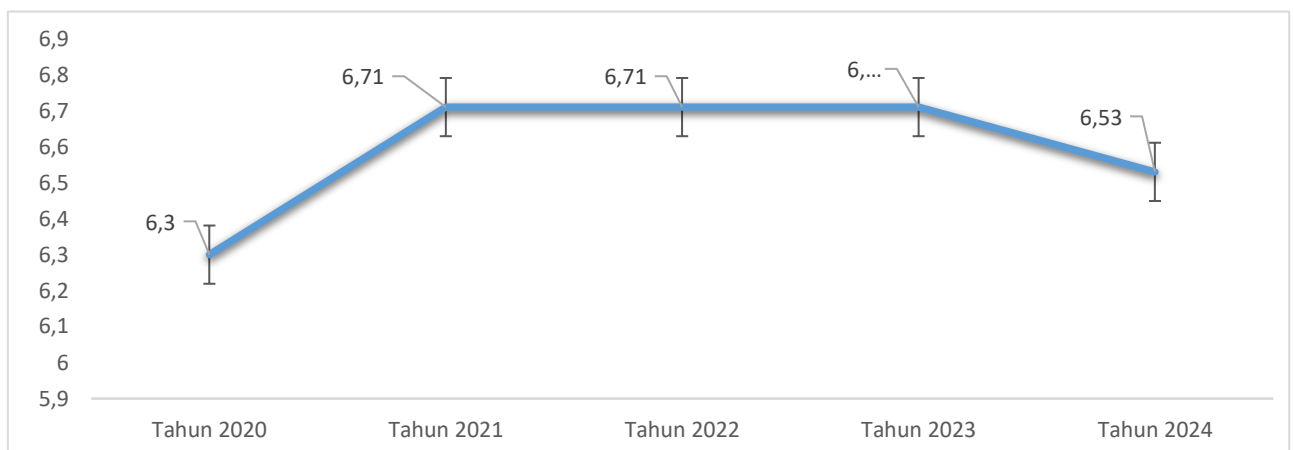
Tabel 2. 34 Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Asmat Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	95,5	93,3	60	100	100
2	Persentase Linmas yang dibina	%	81	81			
3	Persentase Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai respon time	%	68,63	100	100	100	100
4	Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)	%	40	75	78	91,37	100
5	Jumlah Cakupan pelayanan di Kabupaten Asmat, 224	Laporan				98	2



No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Kampung/Kelurahan dan 23 Distrik						
6	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit				88	48
7	Jumlah SDM Aparatur TRC dan Pusdalops yang terlatih	Orang				70	7

Sementara itu untuk mengukur indikator Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial, peruntukan di Kabupaten Asmat bisa dipotret dari Indeks Demokrasi Nasional dan Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif. Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020-2023 dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 2. 42 Indeks Demokrasi Nasional Tahun 2020-2023

Sumber : Data BPS tahun 2024 (diolah)

Gambar diatas menunjukkan bahwa trend perkembangan demokrasi kita, mengalami penurunan. Penurunan itu disinyalir terdapat penurunan dari pilar budaya politik dan kebebasan sipil, yang menjadi pilar dalam penilaian indeks demokrasi secara keseluruhan. Terhadap partisipasi publik/masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Secara khusus di Kabupaten Asmat, Data dari KPU Provinsi Papua Selatan jumlah melaporkan DPT 63.279 orang tercatat 58.035 orang menggunakan hak pilih menghasilkan tingkat partisipasi sebesar 91,71 %. Di tingkat provinsi, Propinsi Papua Selatan memiliki tingkat partisipasi mencapai ± 84 % pada Pemilu Serentak 14 Februari 2024, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (81,8 %).

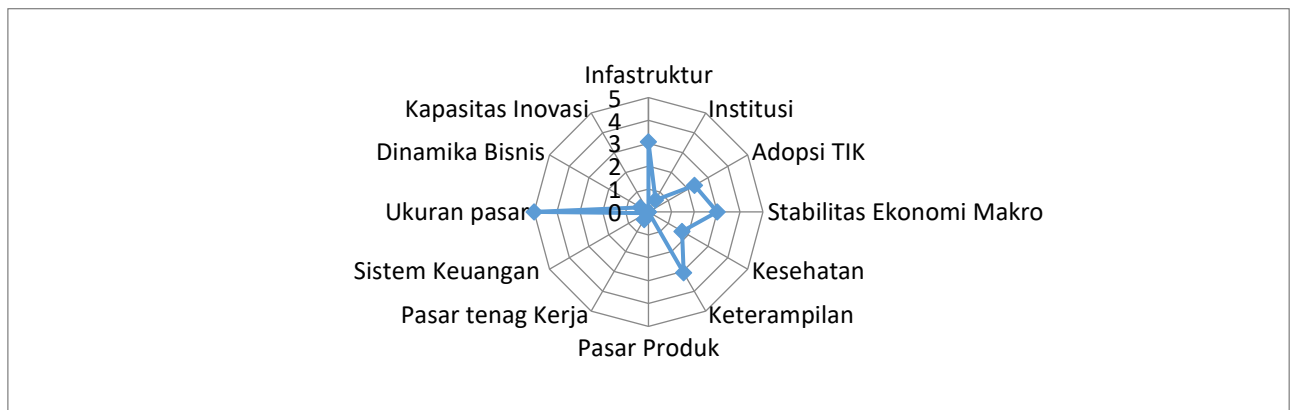
2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

Menjelaskan tentang ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gantar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara (antar daerah) yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Daya Saing Daerah dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.



2.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah

Nilai indeks daya saing daerah Kabupaten Asmat baru dirilis oleh BRIN tahun 2024 berupa skor dengan nilai 2,08. Angka ini dalam kategori daya saing rendah. Angka tersebut didapatkan dari penilaian yang dilakukan terhadap aspek-aspek yang ada yakni lingkungan penguat, sumberdaya manusia, pasar dan ekosistem inovasi. Aspek-aspek tersebut kemudian dipecah menjadi 12 pilar yakni kelembagaan, infrastruktur, perekonomian daerah, kesehatan, pendidikan, efisiensi pasar produk, ketenagakerjaan, akses keuangan, ukuran pasar, adopsi teknologi, dinamika bisnis, dan kapasitas inovasi. Hasil analisisnya diperlihatkan pada gambar berikut :



Gambar 2. 43 Nilai Masing-Masing Faktor/Pilar dalam Indeks Daya Saing daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021
Sumber : BRIN Tahun 2023

Nilai tertinggi berdasarkan dalam aspek yang ada dalam indeks daya saing daerah Kabupaten Asmat adalah di faktor ukuran pasar (5). Sedangkan yang paling rendah adalah aspek sistem keuangan (0,1). Dua pilar yang tidak ada datanya yakni pasar produk dan kapasitas inovasi.

2.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Asmat mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan desentralisasi sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk menyelenggarakan urusan yang berskala kabupaten meliputi urusan wajib dan urusan lainnya bersifat pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Asmat meliputi 18 urusan wajib. Di samping urusan wajib tersebut, terdapat urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Asmat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujudnya masyarakat asmat yang maju sejahtera dan bermartabat. Adapun kinerja urusan tersebut ditampilkan sebagai berikut:



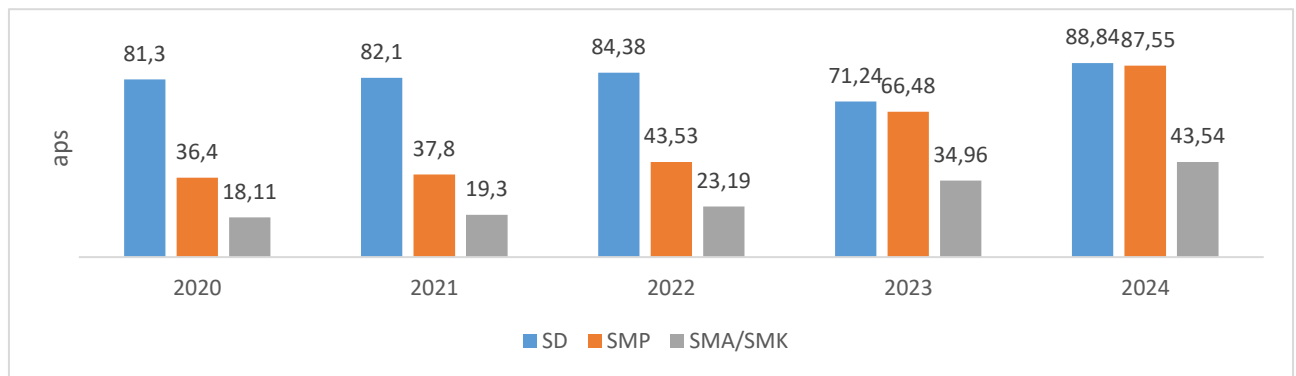
2.4.4.1. Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti yang baik. Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa/daerah banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

1) Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Indikator inilah yang digunakan sebagai petunjuk berhasil tidaknya program tersebut. Sebagai standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS SD sebesar 100 persen dan APS SMP sebesar 100 persen atau dengan kata lain semua anak usia sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun bersekolah. Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan. Realisasi Angka Melek Huruf pada tahun 2023 adalah sebesar 62.25% dan di tahun 2024 mencapai 85.8% dari yang ditargetkan sebesar 53.70%. Rata-rata lama sekolah realisasi di tahun 2024 mencapai umur 5.5 tahun, dengan target di tahun 2023 adalah 5.58 tahun. Terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2024 adalah 5.82 tahun. Target angka partisipasi murni (APM) Pada Sekolah Dasar (SD) sebesar 84.12%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 41.50% dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 22.60%. Realisasi angka partisipasi murni (APM) tahun 2024 Pada Sekolah Dasar (SD) sebesar 86.6%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 38.7% dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 40.82%.

Salah satu komponen pembentuk angka rata-rata lama sekolah yakni Angka Partisipasi Sekolah atau (APS), yang diukur menurut tingkatan umur. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS adalah gambaran penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur. Di Kabupaten Asmat ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 2. 44 Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, 2025

Target angka partisipasi murni (APM) Pada Sekolah Dasar (SD) sebesar 84.12%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 41.50% dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 22.60%. Realisasi angka partisipasi murni (APM) tahun 2023 Pada Sekolah Dasar (SD) sebesar 82.76%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 67.44% dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 92.46%. sehingga capaian kinerja pada Sekolah Dasar (SD) sebesar 98.38%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 162.51% dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 409.12%.

2) Fasilitas dan Tenaga Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi manajemen pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu isu strategis dalam rangka peningkatan kualitas sumberddaya manusia yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asmat.

Kabupaten Asmat masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana fisik sekolah disamping juga menghadapi kendala dalam penyediaan tenaga pengajar dan ketidakmerataan tenaga pengajar pada beberapa distrik. Terbatasnya tenaga pengajar tidak hanya persoalan sedikitnya jumlah guru tetapi juga komitmen guru yang masih rendah. Banyak tenaga pengajar yang masih sering meninggalkan tugasnya karena tidak bersedia menetap di lokasi tugasnya serta sering pergi ke kota dalam waktu yang relatif cukup lama. Kondisi ini mengakibatkan ada sebagian guru yang menanggung beban tugas melebihi porsi yang sebenarnya seperti harus mengajar lebih dari satu kelas pada waktu yang bersamaan sehingga para siswa kurang mendapat perhatian dalam pembelajaran.

Pada tahun 2024, fasilitas pendidikan di Kabupaten Asmat meliputi berbagai tingkat pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/KB), Taman Kanak-kanak (TK) hingga SMA/SMK. Jumlah PAUD Jumlah sebanyak 34 Unit terdiri atas, TK sebanyak 20 unit, sementara itu jumlah SD adalah sebanyak 137 unit. Untuk fasilitas pendidikan menengah, jumlah SMP sebanyak 23 unit, sedangkan jumlah SMA/SMK adalah 4 unit



dan 1 Unit SMK. Selain fasilitas pendidikan yang sudah ada, ketersediaan tenaga pengajar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan.

Jumlah tenaga pengajar pada pendidikan PAUD/KB adalah sebanyak 232 guru. Jumlah tenaga pengajar pada pendidikan TK adalah sebanyak 129 guru. Jumlah tenaga pengajar SD adalah sebanyak 952 guru. Jumlah tenaga pengajar SMP adalah sebanyak 408 guru dan SMA/K sebanyak 156 guru.

Jika dirinci menurut fasilitas pendidikan dan distrik, terlihat bahwa persebaran fasilitas pendidikan di Kabupaten Asmat belum merata dan cenderung terpusat di Distrik Agats. Sebagai contoh, fasilitas pendidikan SMA hanya berada di 2 distrik yang berada di agats dan atsj.

Tabel 2. 35 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan dan Distrik, 2024

NO	DISTRIK	PAUD/KB	TK	SD	SMP	SMA	SMK
1	Kec. Agats	18	6	12	6	3	1
2	Kec. Sawa Erma	3	3	16	2	0	0
3	Kec. Pantai Kasuari	0	1	13	1	0	0
4	Kec. Atsj	2	2	8	1	1	0
5	Kec. Suator	2	1	10	1	0	0
6	Kec. Safan	1	2	7	2	0	0
7	Kec. Sirets	0	1	8	1	0	0
8	Kec. Akat	1	1	7	1	0	0
9	Kec. Fayit	0	1	6	1	0	0
10	Kec. Betcbamu	2	0	5	0	0	0
11	Kec. Kolf Braza	0	0	5	1	0	0
12	Kec. Joerat	1	1	2	1	0	0
13	Kec. Awyu	1	0	2	2	0	0
14	Kec. Jetsy	0	1	4	0	0	0
15	Kec. Joutu	0	0	4	0	0	0
16	Kec. Kopay	0	0	4	1	0	0
17	Kec. Sor Ep	2	0	3	0	0	0
18	Kec. Pulau Tiga	0	0	4	1	0	0
19	Kec. Der Koumur	0	0	3	1	0	0
20	Kec. Aswi	0	0	4	0	0	0
21	Kec. Tomor Birip	0	0	3	0	0	0
22	Kec. Unir Sirau	1	0	2	0	0	0
23	Kec. Suru-suru	0	0	2	0	0	0
24	Kec. Ayib	0	0	2	0	0	0
25	Kec. Koroway Buluanop	0	0	1	0	0	0
JUMLAH		34	20	136	22	4	1

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, 2024

Secara keseluruhan data jumlah sekolah menurut status di Kabupaten Aamat ditunjukkan dalam tabel berikut:



Tabel 2. 36 Jumlah Sekolah Berdasarkan Status Negeri / Swasta Menurut Tingkat Pendidikan dan Distrik, 2024

No	Wilayah	Total			TK			KB			SD			SM P			SM A			SM K		
		Jm l	N	S	Jm l	N	S	Jm l	N	S	Jm l	N	S	Jm l	N	S	Jm l	N	S	Jm l	N	S
1	Agats	55	30	5	6	3	3	18	1	3	12	6	6	6	3	3	3	1	2	1	1	0
2	Sawa Erma	25	20	5	3	2	1	3	2	1	16	14	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pantai Kasuari	16	12	4	1	0	1	0	0	0	13	11	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Atsj	15	11	4	2	1	1	2	2	0	8	6	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0
5	Suator	15	14	1	1	1	0	2	2	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6	Safan	13	7	6	2	1	1	1	0	1	7	4	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0
7	Sirets	12	9	3	1	1	0	0	0	0	8	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8	Akat	11	7	4	1	1	0	1	0	1	7	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
9	Fayit	9	8	1	1	1	0	0	0	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10	Betcbamu	7	6	1	0	0	0	2	2	0	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kolf Braza	7	6	1	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
12	Joerat	6	4	2	1	1	0	1	1	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
13	Awyu	6	4	2	0	0	0	1	1	0	2	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
14	Jetsy	5	3	2	1	1	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Joutu	5	4	1	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kopay	5	3	2	0	0	0	0	0	0	4	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
17	Sor Ep	5	5	0	0	0	0	2	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Pulau Tiga	5	3	2	0	0	0	0	0	0	4	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
19	Der Koumur	4	4	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
20	Aswi	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Tomor Birip	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Unir Sirau	3	1	2	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Suru-suru	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ayib	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Koroway	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



No	Wilayah		Total			TK			KB				SD				SM P				SM A				SM K			
		Jm l	N	S	Jm l	N	S	Jm l	N	S	Jm l	N	S	Jm l	N	S	Jm l	N	S	Jm l	N	S	Jm l	N	S			
5	Buluanop																											
Total		2	17	7	2	1	7	3	2	7	1	1	2	2	1	5	4	2	2	1	1	0						
		4			0	3		4	7	3	0		9	3	8													
		1	1	0																								

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, 2024

Berdasarkan tingkat pendidikannya, masyarakat di Kabupaten Asmat dapat dikatakan memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Hal tersebut didasarkan fakta bahwa penduduk Kabupaten Asmat yang mengenyam pendidikan tinggi hanya sebesar 2,07 persen pada tahun 2020, sedangkan penduduk yang tidak memiliki ijazah mencapai 53,34 persen. penduduk yang memiliki ijazah SD/MI sebesar 21,49 persen, SMP/MTS sebesar 9,18 persen, dan SMA/SMK sebesar 15,99 persen. Dengan masih minimnya tingkat pendidikan di Kabupaten Asmat, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Jumlah lulusan perguruan tinggi yang ada sekarang dirasakan belum memadai mengingat Kabupaten Asmat memiliki sumberdaya hayati yang tinggi. Ke depan, penduduk yang memiliki pendidikan yang tinggi diharapkan mampu menjadi tulang punggung bagi pembangunan Kabupaten Asmat.

3) Pendidikan Keaksaraan dan Berkelanjutan

Pendidikan keaksaraan merupakan program pendidikan dalam rangka memberantas penduduk buta aksara supaya menjadi melek aksara (huruf). Seseorang dikatakan melek huruf jika orang tersebut mampu membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Pendidikan keaksaraan berkaitan dengan kinerja pendidikan dasar bagi kelompok usia sekolah. Kegiatan dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi kelompok buta aksara baru baik sebagai akibat adanya anak usia 7-12 tahun yang tidak terlayani pendidikan dasar, maupun anak putus sekolah pendidikan dasar. Selain pada pendidikan dasar, pendidikan keaksaraan juga diperuntukkan bagi orang dewasa (*adult education*) untuk penduduk usia dewasa (15 tahun ke atas). Indikator-indikator yang biasa dijadikan ukuran keberhasilan program pendidikan keaksaraan diantaranya angka melek huruf, dan pendidikan yang ditamatkan penduduk.

Program pemberantasan buta aksara di Kabupaten Asmat selama dua tahun terakhir belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) yang melek huruf selama dua tahun terakhir mengalami perubahan meskipun tidak terlalu signifikan, yaitu sebesar 85.8 persen. Dengan kata lain masih terdapat 20,20 persen penduduk Kabupaten Asmat yang masih buta aksara. Lambatnya laju kenaikan angka melek huruf diduga karena didominasi oleh kelompok tersulit (*hardrock*) dalam masyarakat untuk diberikan pelayanan pendidikan keaksaraan. Kelompok tersulit tersebut antara lain adalah penduduk usia tua (45 tahun ke atas), penduduk yang tinggal di daerah terpencil, komunitas- komunitas khusus, dan



penyandang cacat. Kelompok penduduk ini sulit untuk dijangkau pelayanan pendidikan disebabkan baik oleh faktor internal seperti kemampuan dan keinginan belajar yang sudah menurun dan faktor eksternal seperti terbatasnya ketersediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi mereka.

Pendidikan keaksaraan yang umumnya diberikan dalam kelompok belajar sulit untuk menjangkau penduduk buta aksara di Kabupaten Asmat yang sebagian besar wilayahnya sulit dijangkau dengan tempat tinggalnya secara umum menyebar. Kelompok tersulit lain adalah masyarakat yang belum memahami manfaat kemampuan keaksaraan sebagai kemampuan dasar untuk memperoleh nilai tambah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari termasuk dalam meningkatkan produktivitas mereka. Data pendidikan terakhir yang ditamatkan penduduk semakin menegaskan bahwa tingkat buta aksara di Kabupaten Asmat cukup tinggi.

Model pendidikan SD-SMP satu atap dan berasrama yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Papua perlu didukung sepenuhnya agar pendidikan bagi anak-anak Papua yang hidup di wilayah terpencil terpenuhi haknya. Dalam model pendidikan ini, pendidikan dasar dibagi menjadi 2 bagian yaitu SD kecil 3 tahun (sampai kelas 3) dan sekolah sambungan 6 tahun satu atap dan berpola asrama (SD dan SMP satu manajemen). SD kecil bertanggung jawab atas pendidikan dari kelas satu sampai dengan kelas tiga, diselenggarakan di daerah yang terpencil, terisolir serta belum mendapat layanan pendidikan, sedangkan sekolah sambungannya selama 6 tahun adalah sekolah kelas 4-6 SD dilanjutkan ke kelas 1-3 SMP yang berada di tingkat distrik dan dilengkapi asrama bagi siswa dan siswi.

2.4.4.2. Kesehatan

Dalam perspektif pembangunan manusia ada 3 (tiga) domain utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun sesungguhnya ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berinter-relasi satu dengan yang lainnya. Dapat dimengerti bahwa, tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga masyarakat dapat membaik pula. Tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik/prima, ekonomi yang layak sulit untuk dicapai. Namun sebaliknya pula, tanpa ekonomi yang kuat, kesehatan dan pendidikan keluarga/masyarakat pun tidak mungkin dapat membaik pula. Ada beberapa indikator yang dapat menjadi acuan dalam menilai perkembangan kualitas kesehatan di suatu daerah.

1) Fasilitas Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Dengan demikian akses masyarakat ke sarana dan prasarana kesehatan lebih mudah terutama lapisan masyarakat yang paling bawah dan terpencil. Bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakatpun tidak henti-hentinya dilaksanakan. Salah satu cara adalah dengan



mengaktifkan kembali fungsi posyandu. Tidak ketinggalan pula menambah tenaga medis dan meningkatkan profesionalisme tenaga medis yang ada. Sebagai contoh langkah yang ditempuh adalah memperbanyak penerimaan pegawai khususnya tenaga kesehatan. Upaya meningkatkan pemerataan kesehatan masyarakat antara lain ditempuh dengan jalan menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sebab tanpa sarana yang memadai kiranya derajat kesehatan penduduk yang baik akan sulit tercapai. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang menunjang bagi masyarakat merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan dapat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Tabel 2. 37 Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan Menurut Distrik, 2021 - 2025

No	Distrik	2021		2022		2023		2024		2025	
		Rumah Sakit	Puskesmas	Rumah Sakit	Puskesmas	Rumah Sakit	Puskesmas	Rumah Sakit	Puskesmas	Rumah Sakit	Puskesmas
1	Pantai Kasuari	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	Fayit	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
3	Atsy	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1
4	Suator	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
5	Akat	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
6	Agats	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Sawa Erma	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2
8	Suru-suru	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
9	Kolf Braza	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
10	Unir Sirau	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
11	Kopay	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
12	Der Koumur	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
13	Safan	0	3	0	2	0	2	0	2	0	2
14	Sirets	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
15	Ayip	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
16	Bectbamu	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
17	Jetsy	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
18	Joerat	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
19	Pulau Tiga	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
20	Joutu	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
21	Aswi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Koroway Buluano p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Awyu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Sor Ep										
25	Tomor Birip										
Total		1	19	1	21	1	23	1	23	1	23

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, 2024



Jenis fasilitas yang kesehatan yang ada di Kabupaten Asmat adalah rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan balai pengobatan. Selain fasilitas di atas, Pemerintah Kabupaten Asmat juga menyediakan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling berupa perahu (speed boat dan long boat). Jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Asmat pada tahun 2024 adalah sebanyak 1 unit dan jumlah balai pengobatan berjumlah 2 unit yang berada di Distrik Safan Kampung Bayun dan Saman. Untuk puskesmas, jumlahnya pada tahun 2024 adalah sebanyak 25 unit yang tersebar di beberapa distrik yang distribusinya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 38 Jumlah dan Jenis Fasilitas Kesehatan Menurut Distrik, 2024

No.	Distrik	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Balai Pengobatan	Puskesmas Keliling	Polindes
1	Pantai Kasuari	-	1	2	-	1	2
2	Fayit	-	1	3	-	1	2
3	Atsy	-	1	2	-	1	4
4	Suator	-	1	3	-	1	2
5	Akat	-	1	-	-	1	0
6	Agats	1	1	5	-	1	4
7	Sawa Erma	-	2	5	-	1	5
8	Suru-suru	-	1	1	-	1	1
9	Kolf Braza	-	1	3	-	1	-
10	Unir Sirau	-	1	-	-	1	1
11	Kopay	-	1	3	-	1	-
12	Der Koumur	-	1	2	-	1	1
13	Safan	-	2	5	2	1	-
14	Sirets	-	1	2	-	1	4
15	Ayip	-	1	3	-	1	1
16	Bectbamu	-	1	3	-	1	1
17	Jetsy	-	1	2	-	1	1
18	Joerat	-	1	1	-	1	1
19	Pulau Tiga	-	1	3	-	1	1
20	Awyu	-	-	3	-	-	1
21	Aswi	-	-	3	-	-	1
22	Joutu	-	1	4	-	1	-
23	Koroway Buluanop	-	-	2	-	-	-
24	Sor Ep	-	-	5	-	-	1
25	Tomor Birip	-	1	3	-	1	3
Total		1	23	68	2	23	37

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, 2024

Puskesmas pembantu (pustu) telah tersebar merata di Kabupaten Asmat kecuali distrik Akat dan Unir Sirau, jumlahnya pada tahun 2024 sebanyak 68 unit. Distrik yang paling banyak memiliki pustu adalah Distrik Agats, Sawa Erma, Safan dan Sor Ep masing-masing memiliki 5 unit, sedangkan distrik yang belum tersedia pustu yaitu adalah Distrik Akat dan Unir Sirau. Fasilitas Polindes di Kabupaten Asmat pada tahun 2024 berjumlah 37 unit dan tersebar di 19 distrik dengan distrik yang tidak memiliki



fasilitas Polindes adalah Distrik Akat, Kolf Brasa, Kopay, Safan, Joutu dan Koroway Buluanop.

Melihat perkembangan fasilitas kesehatan pada tahun 2024, untuk fasilitas seperti rumah sakit tetap 1 unit dan balai kesehatan jumlahnya menjadi 2 unit. Untuk puskesmas, jumlahnya mengalami peningkatan dari 10 unit pada tahun 2016 menjadi sebanyak 23 unit pada tahun 2024, Polindes bertambah dari 29 unit menjadi sebanyak 37 unit pada tahun 2024. Sebenarnya cukup sulit untuk menilai apakah sarana yang tersedia seperti tersebut di atas sudah sesuai dengan kebutuhan untuk Kabupaten Asmat. Karena keberadaan sarana tersebut hanya bisa dijangkau dengan mudah oleh Masyarakat yang bermukim di Kampung tersedbut. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya sarana transportasi umum yang bisa memobilisasi antar kampung.

Namun demikian, untuk gambaran secara kasar, dapat diinformasikan bahwa untuk sarana kesehatan seperti rumah sakit masih dirasakan belum cukup. Puskesmas yang merupakan unit pelayanan fungsional yang berfungsi sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Namun demikian dari data yang ada menunjukkan bahwa keberadaan sarana kesehatan ini (terutama puskesmas) belum menyebar di seluruh distrik dan berada di ibukota kecamatan sehingga untuk daerah Distrik dan kampung terpencil aksesnya masih kurang. Sejalan dengan keadaan tersebut maka fungsi dari puskesmas pembantu dan posyandu di kampung-kampung sangatlah dominan.

Tenaga kesehatan di Kabupaten Asmat diantaranya adalah dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga medis lainnya, dan apoteker. Jumlah tenaga Kesehatan di Kabupaten Asmat pada tahun 2024 adalah sebanyak 552 orang (Tabel 2.39). Jumlah tenaga kesehatan puskesmas di Kabupaten Asmat sebagian besar berada di Distrik Agats dan memiliki tenaga kesehatan yang lengkap dari dokter hingga apoteker yang mencapai 72 orang. Hal tersebut disebabkan karena posisi Distrik Agats sebagai ibukota kabupaten dan tentunya didukung juga oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang cukup memadai diantaranya rumah sakit dan balai kesehatan.

Tabel 2. 39 Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Menurut Distrik, 2024

No.	Nama Puskesmas	Dokter	Perawat	Perawat Gigi	Bidan	SKM	Farmasi	Apoteker	Gizi	Kesling	AnalS	Rekam Medis	Total
1	Agats	5	39	0	18	2	0	3	1	1	3	0	72
2	Atsj	1	18	0	14	4	0	3	1	1	1	0	43
3	Ayam	1	17	0	12	2	2	1	1	1	1	0	38
4	Basim	1	11	0	9	0	1	0	1	1	2	0	26
5	Binam	1	12	0	12	4	1	0	2	0	0	0	32
6	Bayun	0	8	0	5	0	1	0	1	1	0	0	16
7	Comoro	1	11	0	10	1	1	0	1	1	2	0	28
8	Kamur	1	15	0	8	3	0	1	1	1	2	0	32
9	Unir Sirau	1	7	0	6	1	1	0	2	0	1	0	19
10	Primapun	1	13	0	4	0	2	0	0	1	0	0	21
11	Kolfrabrasa	1	12	0	2	0	1	0	1	0	2	0	19
12	Mumugu	0	8	0	7	0	0	0	0	0	0	0	15
13	Yaosakor	1	15	0	8	1	1	0	1	1	2	0	30
14	Tomor	2	16	0	8	0	1	0	1	0	0	0	28



No.	Nama Puskesmas	Dokter	Perawat	Perawat Gigi	Bidan	SKM	Farmasi	Apoteker	Gizi	Kesling	Analisis	Rekam Medis	Total
1 5	Youw	1	5	0	1	1	1	0	0	0	0	0	9
1 6	Warse	1	7	0	2	1	1	0	0	0	1	0	13
1 7	Daikot	1	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9
1 8	Hahare	0	6	0	1	0	0	1	1	0	1	0	10
1 9	Nakai	2	14	0	4	2	2	0	0	0	1	0	25
2 0	Sawa Erma	1	16	0	12	2	0	1	2	0	2	1	37
2 1	Joerat	1	8	0	5	1	1	0	0	0	1	0	17
2 2	Der Koumor	1	9	0	2	0	0	0	0	0	1	0	13
2 3	Suru Suru	Tidak Aktif Sejak Desember 2022 (Karena Faktor Keamanan)											
Jumlah		25	272	0	153	25	17	10	17	9	23	1	552

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat 2024

2.4.4.3. Bidang Komunikasi dan Informatika

Dalam mencapai target yang ditetapkan yaitu meningkatkan kapasitas Jaringan bandwidth dari 2G ke 4G serta perluasan dan pembangunan infrastruktur jaringan dengan membangun BTS-BTS di setiap kampung dan pemasangan Akses Internet Gratis di sekolah-sekolah, puskesmas, dan fasilitas layanan publik lainnya, Dinas Kominfo Kabupaten Asmat telah bersinergi dan melakukan kerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika - Kementerian KOMINFO RI, dan PT. Telkomsel di wilayah Kabupaten Asmat. Kapasitas jaringan 2G dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2017 adalah 6 Mbps. Sedangkan peningkatan jaringan 2G ke 4G dimulai dari tahun 2017 akhir pada saat itu dengan kapasitas bandwidth 42 Mbps. Ditahun 2019 PT Telkomsel meningkatkan Bandwidth 4G dari 42 Mbps ke 500 Mbps pada Site Permanen (72M) Agats dan ditahun 2021 sampai dengan tahun 2024 kapasitas jaringan telah menacapi 1 Gbps pada Tower Permanen (72M) Agats. Pada Tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Asmat bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) bersama sama melaksanakan Program Pemerataan Akses Telekomunikasi di daerah Asmat dengan dimulainya pembangunan BTS 2G Tower 32 M, pada lima kampung yaitu Kampung Ayam, Kampung Jinak, Kampung Comoro, Kampung Basim dan Kampung Kamur.

Pada tahun 2018 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Asmat bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) melanjutkan pembangunan delapan (8) Tower 2G BTS BAKTI-KOMINFO sebanyak 8 lokasi. dan pada Tahun 2021 akhir pembangunan Tower BTS BAKTI- KOMINFO dilanjutkan dengan membangun Tower BTS 4G BAKTI-KOMINFO sampai dengan bulan Juni 2024 telah terbangun 128 Tower BTS BAKTI-KOMINFO dan masih akan tetap dilanjutkan sampai akhir tahun 2024.

Kabupaten Asmat yaitu Kota Agats juga merupakan bagian dari Jaringan Kabel Bawah Laut Fiber Optik, Proyek Strategis Nasional sebagai salah satu NOC Palapa Ring Timur. Pada tahun 2017 telah terpasang jaringan Wide Area Network dengan inti Fiber Optik, sebagai capaian peningkatan kualitas dan kuantitas data trafik, sehingga tercapai jaringan data internet terintegrasi antar seluruh organisasi perangkat daerah.



2.4.4.4. Bidang Statistik dan Persandian

Gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan urusan pendataan statistik dan persandian daerah dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

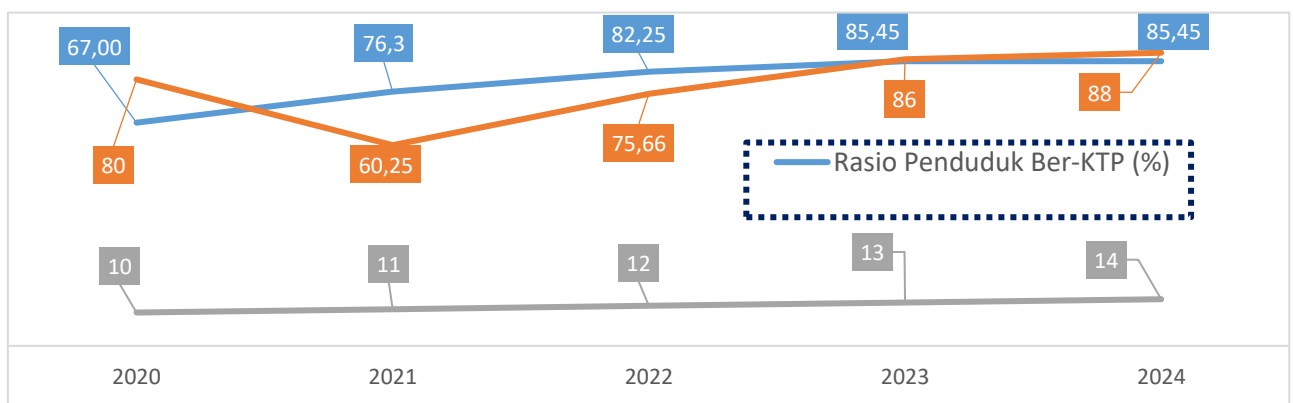
Tabel 2. 40 Gambaran Umum Pendataan Statistik dan Persandian

No	Indikator	Satuan	Capaian	Ket
1	Peningkatan Ketersediaan Data yang Valid dan diakui secara Nasional Guna Menunjang Data Penyusunan Program Pembangunan Lebih baik.	Buki	30	
2	Peningkatan Pendataan kualitas jaringan komunikasi dan penggunaanya	Kampung	30	
3	Peningkatan ketersediaan perangkat radio SSB dan RIG di semua Ibukota Distrik	Distrik	9	

Sumber : Bagian Statistika dan Persandian, Setda KAB. Asmat (2025)

2.4.4.5. Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil yang tengah gencar dilakukan terkait dengan pencacahan dokumen-dokumen kependudukan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain : Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah, Akta Kelahiran dan akta Kematian. Salah satu yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten asmat adalah pencacahan Kartu Penduduk. Adapun progress kinerjanya ditampilkan pada grafik berikut:



Gambar 2. 45 Rasio Penduduk yang telah Memiliki Dokumen Kependudukan Secara Lengkap, 2020-2024

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Asmat, 2024

Dari grafik diatas nampak bahwa penduduk yang berjenis kelami laki-laki (warna merah) dan perempuan (warna kuning) menunjukkan progress meningkat. Hal ini nampak dari rata-rata yang ditampilkan, 10 % tahun 2020 meningkat menjadi 14% tahun 2024.



Mempelajari masalah dan kendala yang terjadi di lapangan tahun tersebut, Dukcapil Kabupaten Asmat mempunyai strategi khusus untuk mencapai target nasional yaitu ketika sedang ada event pemerintah dimana masyarakat berkumpul maka petugas perekaman akan membawa alat perekaman dan melakukan perekaman e-KTP atau Dukcapil menempatkan petugas di rumah sakit.

2.4.4.6. Keluarga Berencana

1) Klinik KB

Program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membatasi angka pertumbuhan penduduk. Jumlah klinik KB di Kabupaten Asmat pada tahun 2020 hanya sebanyak 4 unit. 2 klinik KB lainnya masing-masing dikelola oleh instansi pemerintah lainnya dan pihak swasta.

Tabel 2. 41 Jumlah Klinik KB di Kabupaten Asmat, 2024

Klinik KB	Jumlah	Jumlah Pengguna KB
Dinas Kesehatan	0	0
Instansi Pemerintah	2	352
Swasta	2	675
Total	4	1027

Sumber: Laporan Dinas PPKB Kabupaten Asmat, 2025

2) Akseptor Aktif dan Baru dan Pasangan Usia Subur

Jenis alat kontrasepsi yang digunakan oleh akseptor aktif di Kabupaten Asmat adalah IUD, pil, suntikan, kondom, dan susuk. Pada Tahun 2019-2020, jumlah akseptor aktif di Kabupaten Asmat mengalami peningkatan yang signifikan dari hanya sebanyak 5.327 akseptor aktif pada tahun 2019 menjadi sebanyak 6.261 akseptor aktif pada tahun 2020. Peningkatan jumlah akseptor tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Asmat telah cukup berhasil mengedukasi masyarakat akan pentingnya keluarga berencana.

Tabel 2. 42 Perkembangan Jumlah Akseptor Aktif di Kabupaten Asmat, 2024

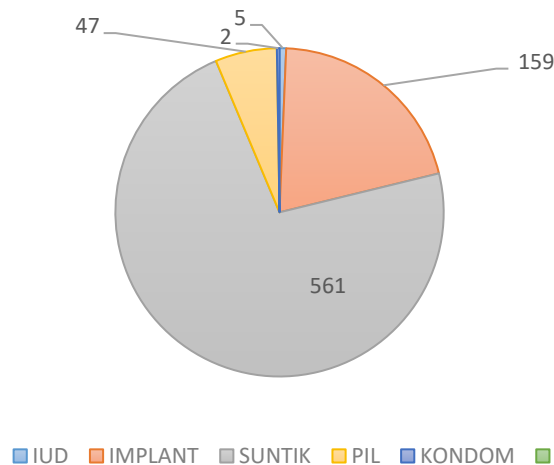
No	Distrik(Puskesmas)	Pemakaian Alat					
		IUD	Pil	Suntikan	Kondom	Implan	Total
1	Agats	5	2	115	-	52	174
2	Akat	-		61		61	122
3	Atsj	-	15	45	1	29	90
4	Ayip	-	-	6	-	-	6
5	Betcbamu	-	-	2	-	-	2
6	Fayit			38			38
7	Jetsi	-	-		-	-	-



No	Distrik(Puskesmas)	Pemakaian Alat					
		IUD	Pil	Suntikan	Kondom	Implan	Total
8	Joerat	-	13	27	-	-	40
9	Der Komour	-	1	13	-	17	31
10	Kolofbraza	-	6	13	-	-	19
11	Kopay	-		5	-	-	5
12	Pantai Kasuari	-	1	31	-		32
13	Pulau Tiga	-	1	24	-		25
14	Safan/Primapun	-		26	1		27
15	Safan/Bayun	-		59	-	-	59
16	Sawaerma	-		46	-		46
17	Siret/Yousakor	-	6	16	-		22
18	Tomor Birip	-	2	15	-		17
19	Unir Sirau	-		17		-	17
20	Awyu	-	-		-	-	-
21	Aswy	-			-	-	-
22	Joutu	-	-	2	-	-	2
23	Koroway Buluanop						0
Total		5	47	561	2	159	774

Sumber: Dinas PPKB Kab. Asmat, 2024

Pada Tahun 2024 jumlah akseptor baru di Kabupaten Asmat adalah 774 akseptor aktif. Jumlah akseptor tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Asmat telah cukup berhasil mengedukasi masyarakat akan pentingnya keluarga berencana. Jenis alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh akseptor aktif adalah suntik dengan jumlah sebanyak 561 akseptor, alat kontrasepsi selanjutnya yang paling banyak digunakan adalah implan yaitu sebanyak 159 akseptor. Jumlah akseptor yang menggunakan kontrasepsi pil sebanyak 47 akseptor, IUD sebanyak 5 akseptor, dan Kondom sebanyak 2 Akseptor. Akseptor aktif di Kabupaten Asmat hanya tersebar di 23 distrik dengan distrik yang memilki jumlah akseptor aktif terbanyak adalah Distrik Agats yaitu sebanyak 174 akseptor dan Distrik Atsy sebanyak 263 akseptor. Secara terperinci melalui tampilan diagram digambarkan sebagai berikut



Gambar 2. 46 Jumlah Aktif Menurut Pemakaian Alat Kontrasepsi, 2024

Sumber: Dinas PPKB Kab. Asmat 2024

Dari diagram nampak bahwa sampai tahun 2024, pemakai alat kontrasepsi paling banyak, bagi peserta KB di Kabupaten Asmat didominasi penggunaan suntik 47 jiwa, disusul Implant 159 orang, PIL 47 orang. Sedangkan kondom dan IUD kecil masing-masing 2 dan 5 orang. Walaupun terjadi kecenderungan peningkatan akseptor aktif, Pemerintah Kabupaten Asmat terus menggalakkan pemakaian alat kontrasepsi kepada penduduk untuk menekan pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dan peningkatan kesejahteraan.

Terkait Pasangan Usia Subur di Kabupaten Asmat dari jumlah yang tidak ber KB di Kabupaten Asmat pada tahun 2024 adalah sebanyak 10.345 pasangan. Jika jumlah akseptor dibandingkan dengan per 100 PUS tidak ber KB, rasio tertinggi berada Distrik Agats 6.486 (26%), diikuti Distrik Fayit 1.969 (8 %), Distrik Atsy 1.859 (7%) dan diikuti oleh Distrik lainnya.

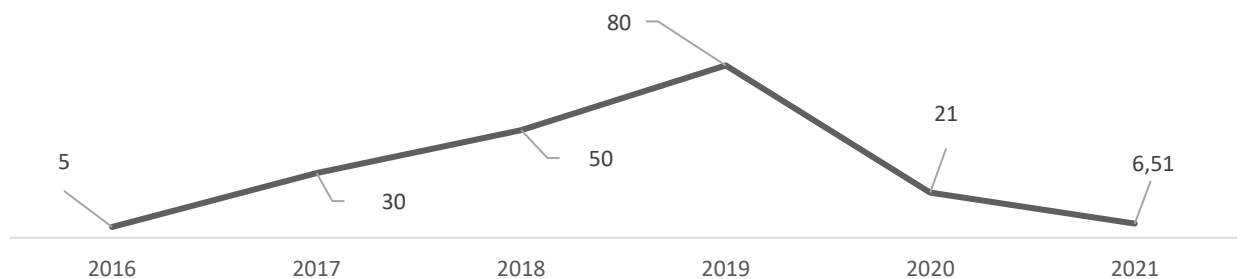
2.4.4.7. Sosial

Pembangunan bidang sosial pada hakekatnya adalah yang fokus sasarannya diarahkan kepada pembangunan sumberdaya manusia di bidang sosial yang sebaik-baiknya serta menciptakan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis, dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat, pada gerak langkahnya senantiasa berhadapan dengan berbagai kendala dan tantangan yang semakin luas dan kompleks. Sangat disadari sejalan dengan perkembangan kondisi sosial saat ini maka perkembangannya penyandang masalah kesejahteraan sosial turut berkembang baik secara kuantitas maupun kompleksitasnya dan tidak hanya berbentuk permasalahan kesejahteraan sosial kontemporer. Perlindungan dan tingkat kesejahteraan sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran baik anak maupun lanjut usia, kecacatan, ketunasosialan, bencana alam, dan bencana sosial. Penanganan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya fakir miskin, apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial



masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan terisolasi.

Selama Tahun 2016-2020, persentase cakupan KAT dan PMKS yang telah terlayani di Kabupaten Asmat mengalami peningkatan dari sebelumnya hanya sebesar 50 persen pada tahun 2018 menjadi sebesar 80 persen pada tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2020, persentase cakupan pelayanan mengalami penurunan hingga hanya menjadi 21 persen. dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial, Pemerintah Kabupaten Asmat juga mendorong partisipasi masyarakat dimana persentase partisipasi masyarakat terus meningkat dari hanya sebesar 40 persen pada tahun 2017 menjadi sebesar 100 persen pada tahun 2018. Selain itu, hal yang juga dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberdayakan lembaga kesejahteraan sosial di Kabupaten Asmat untuk menanggulangi PMKS dengan cakupan lembaga yang diberdayakan mengalami peningkatan dari 38 persen pada tahun 2017 menjadi sebesar 100 persen pada tahun 2019.



Gambar 2. 47 Persentase Cakupan KAT dan PMKS yang telah Terlayani, 2016-2021

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Asmat, 2022

Selain persentase Cakupan Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, kinerja bida sosial juga ditampilkan melalui gambaran penyandang penderita cacat yang ditangani, seperti berikut:

Tabel 2. 43 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penderita Cacat 2023

No	Distrik	Cacat Netra	Cacat Rungu	Cacat Tubuh	Cacat Mental	Cacat Ganda	Jumlah
1	Pantai Kasuari	4	4	40	25	9	82
2	Kopay	5	3	7	1	2	18
3	Der Koumur	-	-	-	-	-	0
4	Safan	23	3	20	1	4	51
5	Awyu	-	-	-	-	-	0
6	Fayit	11	6	15	2	-	34
7	Aswi	2	7	6	-	1	16
8	Atsy	4	7	7	1	1	20
9	Sirets	15	5	13	1	1	35
10	Ayip	-	1	-	-	-	1
11	Bectbamu	1	-	3	-	-	4
12	Suator	-	-	-	-	-	0



No	Distrik	Cacat Netra	Cacat Rungu	Cacat Tubuh	Cacat Mental	Cacat Ganda	Jumlah
13	Kolf Braza	9	-	21	1	1	32
14	Joutu	6	4	11	2	1	24
15	Koroway Buluanop	-	-	-	-	-	0
16	Akat	6	2	6	1	3	18
17	Jetsy	-	5	5	-	6	16
18	Agats	9	18	18	1	3	49
19	Sawa Erma	2	5	14	4	3	28
20	Suru-suru	1	4	13	2	-	20
21	Unir Sirau	10	1	10	1	2	24
22	Joerat	3	2	12	-	1	18
23	Pulau Tiga	5	9	9	2	1	26
Jumlah		117	116	86	230	45	39

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Asmat, 2024

Dari tabel dapat dilihat bahwa penyandang cacat yang banyak diatasi adalah yang berasal dari cacat mental disusul cacat netra (117 orang) dan cacat rungu 116 orang.

Berikut tabel yang menggambarkan keluarga penyandang masalah kesejahteraan menurut distrik, seperti berikut:

Tabel 2. 44 Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Distrik

No	Distrik	Perumahan	Masyarakat Terasing (KK)	Korban Bencana Alam	Fakir Miskin / Keluarga Miskin
1	Pantai Kasuari	-	-	-	421
2	Kopay	-	-	-	431
3	Der Koumur	-	-	-	354
4	Safan	-	-	-	893
5	Awyu	-	-	-	82
6	Fayit	-	-	-	0
7	Aswi	-	-	-	125
8	Atsy	-	-	-	481
9	Sirets	-	-	-	466
10	Ayip	-	-	-	206
11	Bectbamu	-	-	-	265
12	Suator	-	-	-	320
13	Kolf Braza	-	-	-	203
14	Joutu	-	-	-	172
15	Koroway Buluanop	-	-	-	27



No	Distrik	Perumahan	Masyarakat Terasing (KK)	Korban Bencana Alam	Fakir Miskin / Keluarga Miskin
16	Akat	-	-	-	295
17	Jetsy	-	-	-	229
18	Agats	-	-	16	985
19	Sawa Erma	-	-	-	565
20	Suru-suru	-	-	-	331
21	Unir Sirau	-	-	-	204
22	Joerat	-	-	-	281
23	Pulau Tiga	-	-	-	464
JUMLAH		-	-	16	7,800

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Asmat, 2024

Dari tabel diatas nampak bahwa pada tahun 2023 keluarga penyandang sosial yang banyak disantuni banyak dari golongan fakir miskin / keluarga miskin sebanyak 7.800orang, disusul korban bencana alam. Berikut digambarkan pula Data Komunitas Adat terpencil atau KAT tahun 2023 dipublikasikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 45 Data Komunitas Adat Terpencil (KAT) dari Dinas Sosial Kabupaten Asmat Tahun 2023

No.	Distrik	Luas (KM ²)	Jumlah		Pemberdayaan		Ket
			Lokasi KAT	Jumlah KK	Belum	Sudah	
1	Pantai Kasuari	-	-	-	-	-	-
2	Kopay	-	-	-	-	-	-
3	Der Koumur	-	-	-	-	-	-
4	Safan	-	-	-	-	-	-
5	Awyu	-	-	-	-	-	-
6	Fayit	-	-	-	-	-	-
7	Aswi	-	-	-	-	-	-
8	Atsy	-	-	-	-	-	-
9	Sirets	-	-	-	-	-	-
10	Ayip	-	-	-	-	-	-
11	Bectbamu	-	-	-	-	-	-
12	Suator	-	-	-	-	-	-
13	Kolf Braza	-	-	-	-	-	-
14	Joutu	-	-	-	-	-	-
15	Koroway Buluanop		1	40	Belum	-	
16	Akat	-	-	-	-	-	-
17	Jetsy	-	-	-	-	-	-
18	Agats	-	-	-	-	-	-
19	Sawa Erma	-	-	-	-	-	-
20	Suru-suru	-	-	-	-	-	-



No.	Distrik	Luas (KM ²)	Jumlah		Pemberdayaan		Ket
			Lokasi KAT	Jumlah KK	Belum	Sudah	
21	Unir Sirau	-	-	-	-	-	-
22	Joerat	-	-	-	-	-	-
23	Pulau Tiga	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	1	40	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Asmat, 2024

Pada tabel di atas nampak bahwa Data Komunitas Adat Terpencil diperoleh dari Koroway Buluno sebanyak 40 KK tetapi statusnya belum dilakukan pemberdayaan. Selanjutnya data banyaknya Panti Asuhan/Asrama yang dasuh menurut distrik sebagai berikut:

Tabel 2. 46 Banyaknya Panti Asuhan/Asrama, Kapasitas Asuh Menurut Distrik

NO	Distrik	Panti Asuhan/Asrama		Kapasitas	Jumlah Anak Asuh
		Pemerintah	Swasta		
1	Pantai Kasuari	-	-	-	-
2	Kopay	-	-	-	-
3	Der Koumur	-	-	-	-
4	Safan	-	-	-	-
5	Awyu	-	-	-	-
6	Fayit	-	-	-	-
7	Aswi	-	-	-	-
8	Atsy	-	-	-	-
9	Sirets	-	-	-	-
10	Ayip	-	-	-	-
11	Bectbamu	-	-	-	-
12	Suator	-	-	-	-
13	Kolf Braza	-	-	-	-
14	Joutu	-	-	-	-
15	Koroway Buluanop	-	-	-	-
16	Akat	-	-	-	-
17	Jetsy	-	-	-	-
18	Agats	-	PA. Yan Smith	-	46
		-	PA. Martinus Depores	-	26
19	Sawa Erma	-	-	-	-
20	Suru-suru	-	-	-	-
21	Unir Sirau	-	-	-	-
22	Joerat	-	-	-	-
23	Pulau Tiga	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	72

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Asmat, 2024



Dari data nampak bahwa Panti Asuhan di Kabupaten Asmat terkonsentrasi di Distrik Agats dengan jumlah penghuni sebanyak 72 orang. Bagian penting lainnya dalam penanggulangan masalah sosial adalah mereka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) usia lanjut (lansia) di Kabupaten Asmat mereka tersebar di hampir semua Distrik.

Tabel 2. 47 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lanjut Usia (LANSIA) Menurut Distrik

No	Distrik	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pantai Kasuari	67	49	117
2	Kopay	-	-	75
3	Der Koumur	-	-	-
4	Safan	-	-	22
5	Awyu	-	-	-
6	Fayit	-	-	27
7	Aswi	-	-	40
8	Atsy	-	-	39
9	Sirets	-	-	98
10	Ayip	-	-	6
11	Bectbamu	-	-	14
12	Suator	-	-	-
13	Kolf Braza	-	-	26
14	Joutu	-	-	38
15	Koroway Buluanop	-	-	-
16	Akat	-	-	24
17	Jetsy	-	-	16
18	Agats	-	-	29
19	Sawa Erma	-	-	12
20	Suru-suru	-	-	21
21	Unir Sirau	-	-	35
22	Joerat	-	-	43
23	Pulau Tiga	-	-	41
JUMLAH		-	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Asmat, 2024

Seperti ditunjukan pada tabel diatas penyandang masalah kesejahteraan sosial dari golongan lanjut usia (lansia) pada tahun 2023, terbanyak berdomisili di distrik Pantai Kasuari sebanyak 117 orang. Dinas Sosial Kabupaten Asmat juga melakukan pendataan terhadap Korban NAPZA, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2. 48 Korban Penyalahgunaan Narkotik Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)

No	Distrik	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Keterangan
1	Pantai Kasuari	-	-
2	Kopay	-	-
3	Der Koumur	-	-
4	Safan	-	-
5	Awyu	-	-
6	Fayit	-	-
7	Aswi	-	-
8	Atsy	-	-
9	Sirets	-	-
10	Ayip	-	-
11	Bectbamu	-	-
12	Suator	-	-
13	Kolf Braza	-	-
14	Joutu	-	-
15	Koroway Buluanop	-	-
16	Akat	-	-
17	Jetsy	-	-
18	Agats	84	-
19	Sawa Erma	-	-
20	Suru-suru	-	-
21	Unir Sirau	-	-
22	Joerat	-	-
23	Pulau Tiga	-	-
JUMLAH		84	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Asmat, 2024

Data Tahun 2024 menunjukan para korban penyalah gunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya sebanyak 84 Orang berdomisili di Distrik Agats, sebagai lokasi Ibu Kota. Berikut data bantuan perumahan dalam rangka penanggulangan masalah-masalah di Kabupaten diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 49 Bantuan Perumahan Untuk Masyarakat KAT yang Sudah Terlayani

NO	Distrik	Bantuan Rumah Untuk Masyarakat KAT (Komunitas Adat Terpencil)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pantai Kasuari	-	-	-	-	-	-
2	Kopay	-	-	-	-	-	-
3	Der Koumur	-	45 Unit	-	-	-	-
4	Safan	-	40 Unit	-	-	-	-



NO	Distrik	Bantuan Rumah Untuk Masyarakat KAT (Komunitas Adat Terpencil)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	Awyu	-	-	-	-	-	-
6	Fayit	-	-	-	-	-	-
7	Aswi	-	-	-	-	-	-
8	Atsy	-	-	-	-	-	-
9	Sirets	-	-	-	-	-	-
10	Ayip	-	-	-	-	-	-
11	Bectbamu	-	-	-	-	-	-
12	Suator	37 unit	-	-	-	-	-
13	Kolf Braza	-	-	-	-	-	-
14	Joutu	-	-	-	-	-	-
15	Koroway Buluanop	-	-	35 Unit	-	-	-
16	Akat	-	-	-	-	-	-
17	Jetsy	-	-	-	-	-	-
18	Agats	-	-	-	-	-	-
19	Sawa Erma	-	-	-	-	-	-
20	Suru-suru	-	-	-	-	-	-
21	Unir Sirau	-	-	-	-	-	-
22	Joerat	-	-	-	-	-	-
23	Pulau Tiga	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		37 unit	85 Unit	35 Unit	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Asmat, 2024

Dari tabel diatas nampak bahwa jumlah rumah yang dibangun untuk penangananan masyarakat adat sampai tahun 2023 sebanyak 157 unit.

Selanjutnya sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi sumber yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Asmat, seperti TKSK (Tenaga Sosial Kecamatan), Pendamping Program Keluarga Harapan dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) serta kelompok Karang Taruna.

Tabel 2. 50 Tenaga Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

No	Distrik	Jumlah	
		Tenaga Sosial Kecamatan	Pendamping Program Keluarga Harapan
1	Pantai Kasuari	1	1
2	Kopay	1	1
3	Der Koumur	1	1



No	Distrik	Jumlah	
		Tenaga Sosial Kecamatan	Pendamping Program Keluarga Harapan
4	Safan	1	1
5	Awyu	1	1
6	Fayit	1	1
7	Aswi	1	1
8	Atsy	1	2
9	Sirets	1	1
10	Ayip	1	2
11	Bectbamu	1	2
12	Suator	1	1
13	Kolf Braza	1	
14	Joutu	1	1
15	Koroway Buluanop	1	-
16	Tomor Birip	1	
17	Sor Ep	1	
18	Akat	1	1
19	Jetsy	1	1
20	Agats	1	4
21	Sawa Erma	1	2
22	Suru-suru	1	-
23	Unir Sirau	1	-
24	Joerat	1	1
25	Pulau Tiga	1	1
JUMLAH		25	26

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Asmat, 2024

Data tahun 2023, menunjukan tenaga pendamping baik tenaga sosial di Distrik maupun pelaksana keluarga harapan sebanyak 45 orang. Selanjutnya potensi sumber kesejahteraan sosial yang menjadi organ di kampung selama ini, ditunjukan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 51 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna, Tagana dan Kampung Siaga Bencana)

No	Distrik	Jumlah		
		Karang Taruna	Tagana	Kampung Siaga Bencana
1	Pantai Kasuari	-	-	-
2	Kopay	-	-	-
3	Der Koumur	-	-	-
4	Safan	-	-	1



No	Distrik	Jumlah		
		Karang Taruna	Tagana	Kampung Siaga Bencana
5	Awyu	-	-	-
6	Fayit	-	-	-
7	Aswi	-	-	-
8	Atsy	-	-	-
9	Sirets	-	-	-
10	Ayip	-	-	-
11	Bectbamu	-	-	-
12	Suator	-	-	-
13	Kolf Braza	-	-	-
14	Joutu	-	-	-
15	Koroway Buluanop	-	-	-
16	Akat	1	-	1
17	Jetsy	1	-	-
18	Agats	2	30	-
19	Sawa Erma	-	-	-
20	Suru-suru	-	-	-
21	Unir Sirau	-	-	-
22	Sor Ep	1		
23	Tomor Birip			
24	Joerat	-	-	-
25	Pulau Tiga	-	-	-
Jumlah		5	30	2

Sumber Data Dinas Sosial Kabupaten Asmat, 2024

Dari tabel di atas nampak bahwa organisasi Karang Taruna, Tagana dan Kampung Siaga Bencana tidak merata keberadaanya di setiap kampung. Tagana banyak terkonsentrasi di Agat sebanyak 30. Namun secara keseluruhan organ tersebut berjumlah 37 buah.

2.4.4.8. Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan koperasi dan usaha kecil menengah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja pada tabel 2.51.

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan, dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan, dan menurunnya jumlah pengangguran. Selama 2019-2020, jumlah koperasi di Kabupaten Asmat tidak mengalami peningkatan hanya sebanyak 65 unit pada tahun 2019 dan 2020. Walaupun jumlah



koperasi tidak mengalami peningkatan, akan tetapi jumlah anggota koperasi mengalami peningkatan dari hanya sebanyak 2.297 anggota pada tahun 2019 menjadi sebanyak 2.654 anggota pada tahun 2020. Adapun perkembangan dari jumlah dan anggota Koperasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 52 Perkembangan Jumlah dan Anggota Koperasi, 2019-2020

Tahun	KUD		Non KUD	
	Jumlah	Anggota	Jumlah	Anggota
2019	65	2297	1	20
2020	65	2654	1	20

Sumber: Dinas Perindagkop Kab. Asmat, 2024

Dilihat dari jenis koperasi pada tahun 2020, jumlah KUD adalah sebanyak 6 unit, koptan sebanyak 1 unit, KPN sebanyak 1 unit, koperasi nelayan sebanyak 1 unit, koperasi serba usaha sebanyak 43 unit, kopwan sebanyak 1 unit, koperasi tani sebanyak 2 unit, dan kopermas sebanyak 11 unit. Jumlah anggota koperasi terbanyak adalah untuk jenis KSU yaitu sebanyak 4977 anggota, diikuti kopermas sebanyak 220 anggota, KUD sebanyak 120 anggota, koperasi tani sebanyak 40 anggota, koptan, kopwan, KPN dan koperasi nelayan dengan masing-masing sebanyak 20 anggota.

Tabel 2. 53 Jumlah dan Anggota Koperasi Menurut Jenis, 2024

Kecamatan District	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Safan	—	—	—	—
Kopey	—	—	—	—
Pantai Kasuari	—	—	—	—
Derikoumur	—	—	—	—
Fayit	—	—	—	—
Aswi	—	—	—	—
Awya	—	—	—	—
Bectbamu	—	—	—	—
Atsy	3	3	3	3
Ayip	—	—	—	—
Agats	22	22	22	22
Jetsy	—	—	—	—
Sirets	—	—	—	—
Suater	3	3	3	3
Joutu	—	—	—	—
Joerat	—	—	—	—
Unir Sirau	—	—	—	—
Akat	9	9	9	9
Sor Ep	—	—	—	—
Kolf Braza	—	—	—	—
Koroway/Bulanep	—	—	—	—
Pulau Tiga	—	—	—	—
Sawa Erma	2	2	2	2
Tomar Birip	—	—	—	—
Suna-Suna	—	—	—	—
Asmat	39	39	39	39

Sumber: BPS Kab. Asmat, 2025



2.4.4.9. Pertanian

Kabupaten Asmat memiliki potensi pengembangan sektor pertanian yang tinggi mengingat adanya ketersediaan lahan yang besar. Namun masih terbatas pada sapaas dan teknologi pertanian yang digunakan oleh masyarakat masih tradisional dan belum bersifat komersial, sehingga sektor pertanian belum berkembang. Jika dilihat dari penggunaan lahan dimana sebesar seluas 2,3 juta hektar, sebagian besar lahan di Kabupaten Asmat merupakan hutan dimana lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan masih relatif kecil (kurang dari 1 persen).

1) Pertanian Tanaman Pangan

Kondisi lahan di Kabupaten Asmat secara umum belum mendukung untuk pertumbuhan optimal padi karena masih merupakan lahan baru berupa lahan gambut yang memiliki keasaman tanah cukup tinggi sehingga membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan kondisi yang cocok untuk pertumbuhan tanaman padi. Luas tanam padi di Kabupaten Asmat mengalami peningkatan selama tahun 2020- 2023 dari sebelumnya hanya 125 ha pada tahun 2020, menjadi seluas 113,70 ha pada tahun 2023. Luas panen padi di Kabupaten Asmat di tahun 2024 seluas 147,25 ha dari luas tanam sebesar 149,25 ha dan produksi padi sebesar 692,08 ton, dengan produktivitas tanaman padi di Kabupaten Asmat pada tahun 2024 adalah sebesar 4,70 ton per ha.

Tabel 2. 54 Luas Panen, Luas Tanam Produksi, dan Produktivitas Padi di Kabupaten Asmat, 2020-2024

No	Tahun	Luas Tanam Ha	Luas Panen Ha	Produksi Ton	Produktivitas Ton/ Ha
1	2020	125.00	80.27	375.26	4.67
2	2021	129.00	103.50	486.45	4.70
3	2020	135.45	131.30	617.11	4.70
4	2023	113.70	111.25	467.25	4.20
5	2024	149.25	147.25	692.08	4.70

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian, 2024

Selain Luas Panen, Luas Tanam Produksi, dan Produktivitas Padi, juga diperlihatkan Luas Panen, Luas Tanam, dan Produksi Tanaman Palawija, diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 55 Luas Panen, Luas Tanam, dan Produksi Tanaman Palawija di Kabupaten Asmat, 2024

No	Komoditas	Luas Tanam Ha	Luas Panen Ha	Produksi Ton	Produktivitas Ton/ Ha
1	Padi	149.25	147.25	692.08	4.70



No	Komoditas	Luas Tanam Ha	Luas Panen Ha	Produksi Ton	Produktivitas Ton/ Ha
2	Jagung	19.75	19.50	136.50	7.00
3	Ubi Kayu	90.75	90.25	1218.38	13.50
4	Ubi Jalar	108.25	105.25	999.88	9.50
5	Keladi	63.25	62.25	451.31	7.25
6	Kacang Tanah	7.75	5.25	13.13	2.50
7	Kedelai	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian, 2024

2) Pertanian Hortikultura

Pertanian hortikultura di Kabupaten Asmat berada di hamparan dataran rendah di hampir seluruh wilayah distrik. Berbagai macam sayuran dan buah- buahan dihasilkan di Kabupaten Asmat meskipun dalam skala yang belum begitu besar. Dengan demikian, pertanian hortikultura di Kabupaten Asmat dapat dikatakan belum berorientasi komersial dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan subsisten masyarakat.

Komoditas sayuran yang dihasilkan Kabupaten Asmat terdiri dari berbagai jenis diantaranya adalah bayam, cabe rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, terong, dan tomat.

Tabel 2. 56 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Sayuran di Kabupaten Asmat Tahun 2024

No	Komoditas	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Bayam	19.41	18.86	39.23
2	Cabe Rawit	18.62	12.65	31.63
3	Kacang panjang	24.07	17.74	40.80
4	Kangkung	41.80	41.20	173.04
5	Ketimun	8.52	4.17	15.64
6	Terong	10.32	8.82	43.65
7	Tomat	9.46	5.97	29.85

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian, 2024

Komoditas buah-buahan yang dihasilkan Kabupaten Asmat terdiri dari berbagai jenis diantaranya pisang, salak, rambutan, durian, mangga, nangka, nanas, jeruk siam, jeruk besar, matoa, pepaya, sukun, jambu biji, dan semangka. Produksi berbagai komoditas buah-buahan di Kabupaten Asmat pada tahun 2024 diantaranya adalah pisang sebanyak 1644,92 ton, nangka 97,46 ton, sukun 6,41 ton, jeruk siam 49,18 ton, dan lain-lain.



Tabel 2. 57 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Buah di Kabupaten Asmat

No	Komoditas	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Pisang	74.49	30.43	1644.92
2	Salak	6.69	781.00	1.56
3	Rambutan	532.00	113.00	5.79
4	Durian	75.00	0.00	0.00
5	Mangga	968.00	215.00	15.73
6	Nangka	2387.00	1332.00	97.46
7	Nanas	10.17	867.00	0.69
8	Jeruk Siam	7997.00	1703.00	49.18
9	Jeruk Besar	20.00	8.00	0.24
10	Matoa	1.06	0.00	0.00
11	Pepaya	4551.00	3162.00	9.39
12	Sukun	2569.00	213.00	6.41
13	Jambu Biji	396.00	370.00	7.45
14	Semangka	10442.00	1002.00	1.60

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian, 2024

3) Tanaman Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan yang dibudidayakan masyarakat di Kabupaten Asmat diantaranya adalah kelapa, karet, kopi, dan sagu. Dari berbagai komoditas tanaman perkebunan yang dibudidayakan masyarakat, komoditas kelapa dan sagu merupakan komoditas utama tanaman perkebunan dilihat dari sisi luas area dan produksinya. Kedua komoditas tersebut tersebar merata di seluruh distrik yang ada di Kabupaten Asmat. Luas area tanaman kelapa di Kabupaten Asmat pada tahun 2024 adalah seluas 581,26 ha dengan produksi mencapai 158,91 ton, sedangkan luas tanaman sagu pada tahun 2024 adalah seluas 4357,50 ha dengan produksi mencapai 9513,52 ton pada tahun 2024. Tingginya produksi sagu di Kabupaten Asmat disebabkan karena wilayahnya yang cocok untuk perkembangan optimal tanaman sagu dan tanaman tersebut merupakan salah satu makanan pokok yang ada di Kabupaten Asmat.

Tabel 2. 58 Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Asmat

No	Komoditas	Luas Tanam Ha	Produksi Ton
1	Sagu	4357.50	9513.52
2	Kelapa	581.26	158.91
3	Kopi	9.00	0.00
4	Karet	19.50	0.00

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian, 2024

4) Peternakan



Sektor peternakan di Kabupaten Asmat belum berkembang, hal ini disebabkan usaha yang dilakukan masyarakat masih dalam skala rumah tangga. Jenis ternak yang dibudidayakan masyarakat adalah sapi, kambing, dan babi. Jenis ternak utama yang dibudidayakan masyarakat adalah babi dimana jumlah populasinya tertinggi dibandingkan ternak lainnya dan tersebar di seluruh distrik yang ada. Tabel dibawah menunjukkan bahwa populasi ternak kambing selama periode 2019-2024 cenderung fluktuatif, begitupun dengan ternak sapi yang pada periode 2019-2024 mengalami peningkatan dan juga penurunan. Ternak sapi yang pernah didistribusikan kepada masyarakat hampir seluruhnya hidup liar, sehingga sulit dipantau populasinya setiap tahun. Berdasarkan pendataan di lapangan hanya tersisa 26 ekor sapi pada tahun 2024. Sedangkan populasi ternak babi mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2023 jumlahnya mencapai 2630 ekor dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 2427 ekor.

Tabel 2. 59 Perkembangan Jumlah Ternak di Kabupaten Asmat, 2019- 2024

Tahun	Jumlah (Ekor)		
	Sapi	Kambing	Babi
2020	261	211	1721
2021	285	256	2089
2022	51	86	1206
2023	250	103	2360
2024	26	72	2427

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian, 2025.

Selanjutnya untuk ternak unggas, jenis unggas yang dibudidayakan masyarakat di Kabupaten Asmat adalah itik/entog, ayam buras dan ayam ras pedaging (Broiler). Populasi itik hampir tersebar merata di seluruh distrik, sedangkan populasi ayam buras tersebar di seluruh distrik di Kabupaten Asmat. Selama periode 2021-2024, populasi itik dan ayam di Kabupaten Asmat cenderung fluktuatif.

Tabel 2. 60 Perkembangan Jumlah Ternak Unggas di Kabupaten Asmat, 2020-2024

Tahun	Jumlah (Ekor)			
	Itik	Ayam Broiler	Ayam Buras	Ayam Petelur
2020	1381	0	7565	0
2021	1608	0	8225	3800
2022	657	0	4502	3395
2023	1785	700	8817	4295
2024	1154	100	9439	1000

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kab. Asmat, 2025

2.4.4.10. Kehutanan

Pembangunan sektor kehutanan mencakup semua upaya memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan



ekologi, dan sosial masyarakat untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat terutama masyarakat kawasan sekitar hutan. Oleh karena itu, potensi sektor kehutanan harus diolah sebaik mungkin sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Asmat. Pengembangan sektor kehutanan harus melingkupi berbagai usaha pemanfaatan hutan secara maksimal dengan tidak mengabaikan aspek lingkungan hidup dalam arti luas, pada hakekatnya harus berprinsip dapat memberikan manfaat optimal jangka panjang, meliputi sistem dan manajemen pengelolaan kawasan hutan beserta isinya sebagai sumber pendapatan daerah dan masyarakat agar sejahtera dan berkeadilan.

Tabel 2. 61 Luas Kawasan Hutan Menurut Paduserasi di Kabupaten Asmat, 2021

No.	Jenis Hutan	Luas (ha)
1.	Kawasan Hutan Lindung (HL)	1.111.365,28 Ha
2.	Kawasan Suaka Alam/Konservasi (KSA)	827.861,53 Ha
3.	Kawasan Hutan Produksi (HP)	84.880,79 Ha
4.	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	962.795,50 Ha
6.	Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK)	38.136,50 Ha
7.	Areal Penggunaan Lain (APL)	7.264,91 Ha

Sumber: KEMENLHK-RI Tahun 2021

Sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor: SK.6632/MENLHK-PKTL/ KUH/PLA. 2/10/2021 Tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2020, dimana Luas hutan lindung di Kabupaten Asmat Tahun 2020 sebesar 1.111.365,28 Ha. Hutan produksi tetap 84.880,79 Ha, Hutan produksi terbatas 962.795,50, sedangkan Kawasan suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam di Kab.Asmat sebesar 287.861,53 Ha.

Dari seluruh luasan tersebut, jenis hutan di Kabupaten Asmat adalah jenis hutan lindung dan hutan produksi. Produk kayu dari hutan di Kabupaten Asmat hingga saat ini adalah kayu gergaji. Di samping kayu, hutan di kabupaten Asmat juga menghasilkan kayu gaharu, sagu, dan kemendangan.

2.4.4.11. Perikanan

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor andalan di Kabupaten Asmat. Wilayah Kabupaten Asmat yang berada di pesisir Laut Arafura dan memiliki banyak sungai besar membuat wilayah ini memiliki potensi perikanan yang besar baik untuk perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi ikan di Kabupaten Asmat masih dapat ditingkatkan mengingat usaha perikanan yang dilakukan masyarakat sebagian besar masih skala tradisional. Pada tahun 2018, produksi sektor perikanan hanya sebesar 12.206,79 ton atau senilai Rp. 191.916.655.000,-. Angka tersebut terus meningkat hingga tahun 2024 dengan produksi mencapai 15,673.02 ton atau setara Rp. 222,907,836,-.



Tabel 2. 62 Produksi dan Nilai Produksi Sektor Perikanan Kabupaten Asmat Tahun 2024

No.	Perikanan	2024
1.	Perikanan Laut	
	Produksi (ton)	15,673.02
	Nilai (000) Rp	222,907,836
2.	Perikanan Darat	
A.	Perikanan Budidaya	128.2
	Produksi (ton)	6,401,846
	Nilai (000) Rp	15,673.02
B.	Perairan Umum	n,a
	Produksi (ton)	n.a
	Nilai (000) Rp	n.a

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Asmat, 2024

Selain produksi dan nilainya pengembangan sector perikanan di Kabupate Asmat bias didiskripsikan juga dari perkembangan armada tangkap ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 63 Perkembangan Jumlah Armada Penangkapan Ikan (Unit) Tahun 2024

NO	JENIS ARMADA	TAHUN						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perahu Tanpa Motor	-	-	-	-	-	4.879	4,025
	a. Laut	655	622	625	606	-	-	1,930
	b. Perairan Umum	3,143	2,986	2,991	2,961	-	-	2,095
2	Perahu Motor Tempel	-	-	-	-	-	1014	1,088
	a. Laut	646	718	706	692	-	692	736
	b. Perairan Umum	913	1,097	1,069	1,048	-	322	352
3	Kapal Motor							
	3.1 < 5 GT	30	45	48	56	-	0	3
	3.2 5 – 10 GT	6	10	9	7	-	30	11
	3.3 10 -20 GT	5	5	3	-	-	3	0
	3.4 20 – 30 GT	8	10	14	4	-	14	0
	3.5 30 – 50 GT	-	-	-	1	-	-	1
	3.6 50 – 100 GT	16	16	10	14	-	10	6
	3.7 100 – 200 GT	1	-	-	-	-	-	
	3.8 > 200 GT	-	-	-	-	-	-	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Asmat, 2024

Dari tabel diatas nampak bahwa perahu tanpa motor masih dominan pemiliknya



dari yang tidak punya motor. Sedangkan mesin motor didominasi 5-10 GT. Untuk perkembangan alat tangka ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 64 Perkembangan Alat Tangkap Ikan

NO	ALAT PENANGKAP IKAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024
LAUT			
1	Pukat Ikan		
2	Pukat Udang		
3	Pukat Pantai	8	8
4	Jaring Insang Hanyut	1.702	1798
5	Jaring Insang Tetap	13.904	13.904
6	Jaring Insan Kakap	2.377	2.377
7	Lempara Dasar	81	81
8	Rawai Dasar		
9	Serok	1.951	1.951
10	Pancing	2.464	2.464
11	Lain-lain	275	275
UMUM/DARAT			
1	Perangkap Kepiting	1.835	1.835
2	Jaring Kakap	2.322	2773
3	Jaring Bulanak	1.419	1.419
4	Jaring Udang	85	85
5	Rawai Dasar	1.466	1.466
6	Serok	1.128	1.128
7	Lempara Dasar	715	715
8	Lain-Lain	-	-

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Asmat, 2024

Dari tabel diatas nampak bahwa alat tangka jaring insan tetap banyak dimanfaatkan dilaut, sedangkan di perairan umum banyak memanfaatkan jaring kakap.

Tabel 2. 65 Perkembangan Pemasaran Antar Pulau Komoditi Olahan dan Ikan Beku (Ton)

NO	KOMODITI	TAHUN						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	KOMODITI OLAHAN							
1	Udang	-	-	-	-	-	7,83	-
2	Ikan Asin	0,94	1,43	2,44	2,44	3,04	3,07	3,07
3	Gelembung Ikan	7,87	10,16	4,21	4,21	5,08	7,83	7,83
4	Sirip Ikan Hiu	-	-	-	-	-	-	-
5	Tulang Ikan Hiu	-	-	-	-	-	-	-
6	Kulit Ikan	-	-	-	-	-	-	-
7	Teripang	-	-	-	-	-	-	-
	IKAN BEKU							
1	Ikan Beku Campuran	67,28	149,786	550,036	550,036	1180,10	913,75	511,5
JUMLAH/TOTAL		506,94	76,09	161,38	556,69	556,69	924,65	522,4



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Asmat, 2024

Untuk komoditi pemasaran antar pulau didominasi jenis ikan beku campuran. Pada komoditi olehan melalui penjualan gelembung ikan dan ikan asin. Adapun masyarakat dengan mata pencaharian dari laut, ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 66 Perkembangan Petani Ikan/Nelayan Di Kabupaten Asmat (Orang)

NO	URAIAN	TAHUN						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembudidaya Ikan	2.010	2.136	2.136	2.136	2.136	2.974	10,775
2	Nelayan Penuh	10.152	10.213	10.305	10.416	10.423	10.656	19,958
3	Nelayan Sambilan Utama	18.886	18.962	19.057	19.411	19.439	19.958	4,011
4	Nelayan Sambilan Tambahan	3.624	3.635	3.642	3.824	3.852	3.936	2,974
JUMLAH/TOTAL		33.130	34.672	35.140	35.787	35.850	37.524	37,718

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Asmat, 2024

Jika dirinci menurut monografi dari sector kelautan menurut jenisnya pada tahun 2024, produksi perikanan di Kabupaten Asmat didominasi oleh produksi perikanan laut yang mencapai sebanyak 15,673.02 ton dengan nilai dari produksi mencapai Rp. 222,907,836,-. Produk unggulan perikanan laut Kabupaten Asmat adalah pari, cucut, dan bulanak, sedangkan produk unggulan perikanan darat adalah bandeng.

Lebih jauh lagi, terdapat banyak peluang peningkatan produksi sektor perikanan di Kabupaten Asmat. Berdasarkan data dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Asmat, sebagian besar armada perikanan tangkap di Kabupaten Asmat adalah perahu tanpa motor dengan jumlah sebanyak 4.879 unit. Sedangkan untuk armada perikanan tangkap yang menggunakan perahu motor berkekuatan 21-30 GT hanya sebanyak 14 unit. Jika armada perikanan tangkap di Kabupaten Asmat ditingkatkan kapasitasnya dari perahu tanpa motor menjadi perahu motor, maka jumlah produksi perikanan akan mengalami peningkatan. Di samping itu, sebagian besar nelayan di Kabupaten Asmat adalah nelayan sambilan utama sebanyak 19.958 orang dan nelayan pembudidayaannya sebanyak 2.136 orang. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan kerja sektor perikanan di Kabupaten Asmat masih bisa dioptimalkan dengan memberikan fasilitasi peningkatan kemampuan produksi perikanan kepada para pelaku usaha perikanan.

2.4.4.12. Pariwisata

Potensi wisata di Kabupaten Asmat meliputi wisata alam, budaya, dan sosial. Wisata alam didominasi oleh wisata pesisir seperti pantai dan pulau, selain wisata



Taman Nasional Lorens. Untuk wisata budaya dan sosial, yang ditonjolkan adalah keunikan budaya suku asmat seperti pesta budaya suku asmat, museum budaya dan kerajinan, dan rumah pohon. Objek wisata di Kabupaten Asmat yang fokus pada alam dan budaya merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi alam yang masih belum banyak terpengaruh budaya luar. Jika objek wisata ini dapat dipasarkan secara menarik, akan banyak wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Asmat. Namun demikian, perlu diperhatikan sarana pendukung pariwisata seperti transportasi dan penginapan.

Tabel 2. 67 Lokasi Objek Wisata dan Jenis Wisata

No.	Lokasi Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
1.	Distrik Agats	Kampung Syuru	Wisata Budaya Pesta dan Tarian Adat
2.	Distrik Agats	Kampung Uwus	Wisata Budaya Pesta Adat dan Ukiran
3.	Distrik Agats	Ibu Kota Kabupaten	Wisata Budaya Pesta Adat, Ukiran dan Anyaman Noken
4.	Distrik Pulau Tiga	Taman Loreus	Wisata Alam
5.	Distrik Atsy	Kampung Atsj	Wisata Budaya Pesta Patung Bis, Ukiran dan Anyaman Noken
6.	Distrik Bectbamu	Kampung Biwa Laut	Wisata Budaya Pesta Patung Bis, Ukiran, Wisata alam dan Ukiran
7.	Distrik Bectbamu	Kampung Pirpis	Wisata Budaya, Pesta Perahu Baru / Cibi Tari
8.	Distrik Suator	Rawa Baki	Wisata Alam
9.	Distrik Korowai buluanop	Korowai	Wisata Alam, Rumah Pohon
10.	Distrik Fayit	Ocenep Piriye	Wisata Budaya, Ukiran Patung

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2023

Dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Asmat, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan merupakan prasyarat utama untuk mendukung hal tersebut. Ketersediaan penginapan sangat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian suatu daerah. Banyaknya penginapan dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Jumlah hotel yang ada di Kabupaten Asmat pada tahun 2020 adalah sebanyak 6 hotel dengan jumlah kamar sebanyak 62 kamar. Dari 6 hotel tersebut, 5 diantaranya terdapat di Distrik Agats dan 1 hotel berada di Distrik Atsy. Sedangkan jumlah penginapan pada Tahun 2020 sebanyak 5 Penginapan dengan jumlah kamar sebanyak 52 kamar.

2.4.4.13. Perhubungan

Ketersediaan infrastruktur perhubungan merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan



suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.

Angkutan laut dan sungai adalah salah satu sarana transportasi utama yang digunakan di Kabupaten Asmat. Jumlah pengguna jasa transportasi sungai di Kabupaten Asmat dapat dikatakan fluktuatif. Pada tahun 2024 jumlah pengguna jasa transportasi laut sebanyak 22.143 jiwa. Angkutan udara menjadi salah satu alternatif mobilitas barang dan penduduk di Kabupaten Asmat dengan jumlah pengguna jasa transportasi udara pada tahun 2024 sebanyak 32.071 jiwa mengingat kondisi geografis Kabupaten Asmat yang berupa perairan dan masih memiliki hutan yang luas. Untuk mobilisasi penduduk di tingkat Provinsi Papua, penduduk di Kabupaten Asmat menggunakan transportasi udara melalui Bandara Ewer.

Tabel 2. 68 Jumlah Pengguna Jasa Transportasi Laut dan Pengguna Jasa Transportasi Udara Tahun 2018-2024

NO.	TAHUN	Jumlah Pengguna Jasa Transportasi Laut	Jumlah Pengguna Jasa Transportasi Udara
1	2018	23.642	3.511
2	2019	18.572	16.347
3	2020	29.915	12.550
4	2021	0	21.794
5	2022	9.587	26.794
6	2023	19.192	29.924
7	2024	22.143	32.071

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Asmat, 2024

2.4.4.14. Ketenagakerjaan Menurut Tingkat Pendidikan

Komposisi penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama. Dari tabel di bawah ini ada peningkatan jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, di dominasi oleh peningkatan status pekerjaan pekerja keluarga tak dibayar, buruh/karyawan/pegawai, lalu diikuti dengan status pekerjaan berusaha sendiri, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh dibayar. Yang menariknya adalah ada pengurangan status pekerjaan pekerja bebas dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh tidak dibayar.

Tabel 2. 69 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Asmat, 2020-2024

Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
Tidak punya ijazah SD	26.517	38.373	40.701	24.947	32.812
SD	11.126				
SLTP	3.186	4.050	3.462	4.029	3.744
SLTA	4.804	5.551	6.088	4.745	6.614

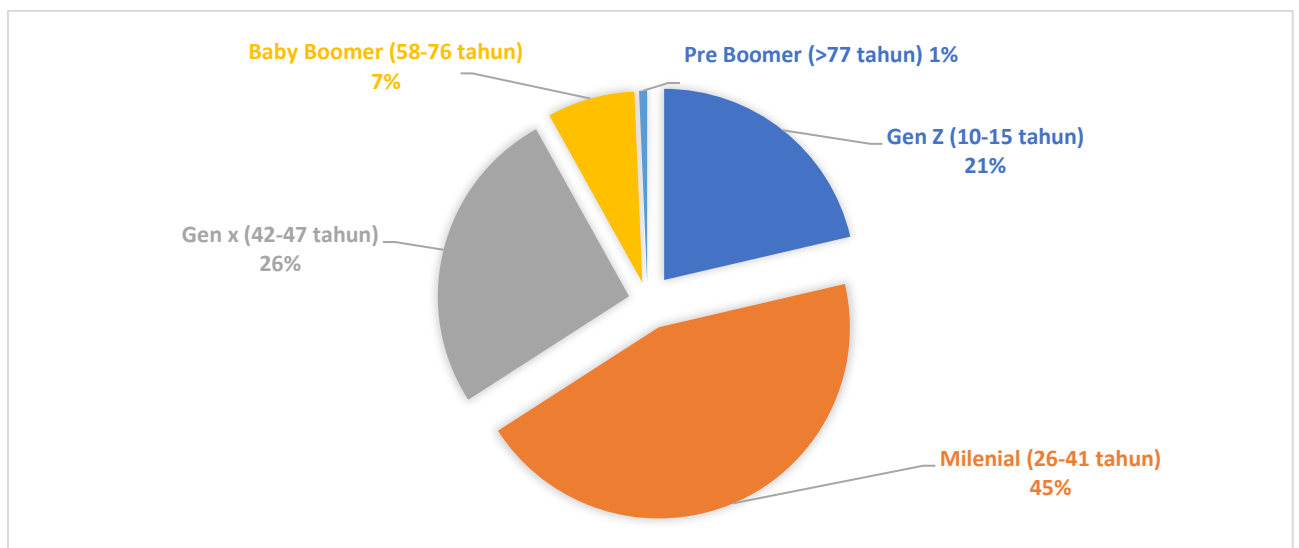


Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
Dip/Universitas	5.532	5.540	4.368	2.809	5.000
Jumlah	51.165	53.514	54.619	36.531	48.170

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Prov. Papua 2024

Penduduk yang bekerja masih di dominasi oleh orang yang tidak punya ijazah SD sampai dengan lulusan SD (68,12%). Lulusan SLTA dan Diploma/Universitas terus mengalami peningkatan sampai tahun 2024. Hanya tingkat SLTP yang menurun. Semakin banyaknya pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih baik diharapkan akan berkontribusi banyak pada pembangunan di Kabupaten Asmat. Penduduk yang bekerja masih didominasi di sektor pertanian sebesar 68,83% (2023), diikuti jasa (29,15%) dan manufaktur (2,02%).

Selanjutnya struktur penduduk yang bekerja berdasarkan generasi dan status kelahiran dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dari hasil sensus 2020, penduduk yang bekerja di dominasi oleh generasi milenial (26-41 tahun) dan generasi x (42-47 tahun) sebesar 70,56 persen. Selebihnya adalah dari generasi Z (10-15 tahun) sebesar 21,36 persen.



Gambar 2. 48 Komposisi Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Status Kelahiran, Sensus Penduduk 2020

Sumber : Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, BPS Kabupaten Asmat

Penduduk yang bekerja masih di dominasi oleh orang yang tidak punya ijazah SD sampai dengan lulusan SD. Namun untuk pekerja lulusan SD terus mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Tapi ada sedikit kenaikan di tahun 2021 dan tahun 2022 dibanding tahun 2020. Dan untuk pekerja yang lulusan SLTA dan Diploma/Universitas terus mengalami peningkatan sampai tahun 2021. Namun pada tahun 2022, ada sedikit penurunan pada tingkat diploma/universitas. Sedangkan untuk tingkat SLTA di tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021.



2.4.4.15. Kepegawaian

1) Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan

Jumlah PNS pada tahun 2023 adalah 2.578 orang, berkurang dari tahun 2022. Persentase PNS menurut jenis kelamin pada tahun 2023 adalah laki-laki sebanyak 60,24 persen dan perempuan 39,76 persen. Ada sedikit kenaikan proporsi di kelompok PNS perempuan dan penurunan di proporsi PNS laki-laki di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2023, PNS terbanyak menurut jenis jabatan adalah jabatan fungsional umum/pelaksana (51,2 persen), lalu jabatan fungsional guru (18,7 persen), dan jabatan fungsional medis (12,3 persen).

Tabel 2. 70 Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan di Kabupaten Asmat Desember 2022 – Desember 2024

No	Jabatan	Desember 2022		Jumlah	Desember 2023		Jumlah	Desember 2024		Jumlah
		L	P		L	P		L	P	
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	25	2	27	28	2	30	27	2	29
4	Administrator	92	30	122	85	27	112	94	33	127
5	Pengawas	163	85	248	134	73	207	154	82	236
6	Eselon V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jabatan Fungsional Dosen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Jabatan Fungsional Guru	303	208	511	278	204	482	375	318	693
9	Jabatan Fungsional Medis	78	175	253	96	221	317	122	280	402
10	Jabatan Fungsional Teknis	14	6	20	58	52	110	50	27	77
11	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	952	547	1499	874	446	1320	602	236	838
Jumlah		1627	1053	2680	1553	1025	2578	1424	978	2402

Sumber: Badan Kepegawaian dan SDM, 2024

2) Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

Mayoritas pendidikan PNS pada tahun 2024 adalah tingkat sarjana S1/S2/S3/doktor sebesar 1.280 orang dari total PNS di Kabupaten Asmat. Urutan kedua adalah tingkat SMA/ sederajat sebanyak 537 orang. Untuk tingkat diploma (Diploma III/IV/Sarjana Muda) sebanyak 56 orang.



Tabel 2. 71 Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Desember 2022		Jumlah	Desember 2023		Jumlah	Desember 2024		Jumlah
		L	P		L	P		L	P	
1	Sekolah Dasar (SD)	108	-	108	106	-	106	79	0	79
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	467	205	672	56	3	59	47	1	48
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	55	2	57	449	196	645	363	174	537
4	Diploma I, II	57	40	97	56	38	94	4	0	4
5	Diploma II/Akta II	-	-	-	-	-	-	51	33	84
6	Diploma III/Akta III	-	-	-	-	-	-	134	236	370
7	Diploma IV/IV/Akta IV/Sarjana Muda	191	288	479	171	274	445	35	21	56
8	Tingkat Sarjana S1/S2/S3/Doktor/Ph.D	749	518	1.267	715	514	1.229	-	-	-
9	S1/Sarjana	-	-	-	-	-	-	669	498	1167
10	S2/Pasca Sarjana	-	-	-	-	-	-	41	15	56
11	S3/Doktor/Ph.D	-	-	-	-	-	-	1	0	1
Jumlah		1.627	1.053	2.68	1.553	1.025	2.578	1424	978	2402

Sumber: Badan Kepegawaian dan SDM, 2024

2.5. Evaluasi RPJMD Periode Sebelumnya

Evaluasi RPJMD yang dilakukan dengan mencermati perkembangan indikator-indikator makro yang dipotret dari laporan RKPD setiap tahun, digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2. 72 Evaluasi RPJMD Periode Sebelumnya

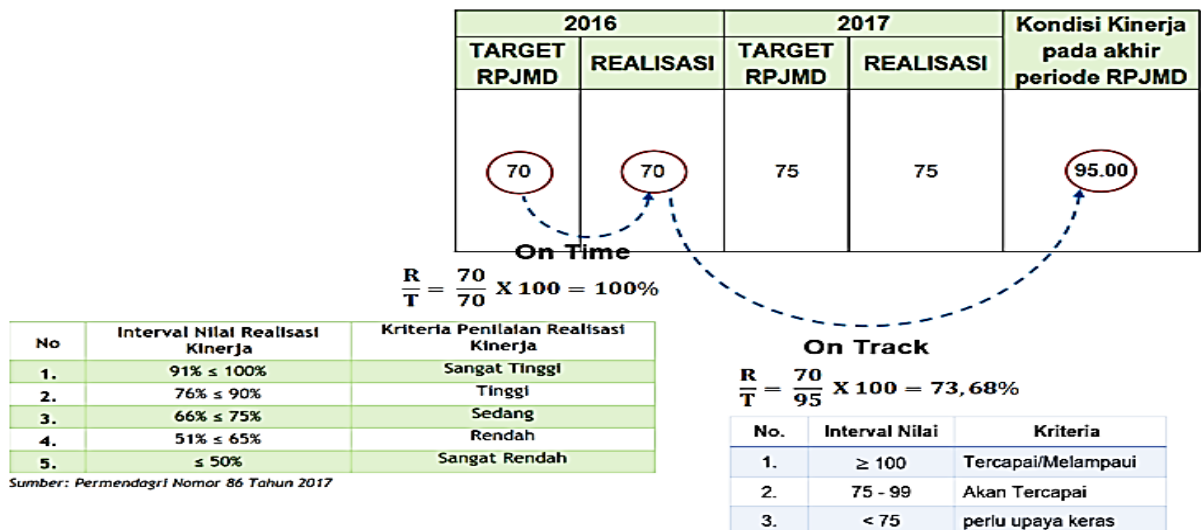
No	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024		Target 2025
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
1	Indeks Pembangunan Manusia	50.55	50.55	50.92	54.8	51.60	55.8	51.60	56.85	52.2	57.63	53
2	Persentase Penduduk Miskin	24.34	25.49	24.34	24.83	23.12	24.87	22.65	24.36	22	24.5	21.42 %
3	PDRB Perkapita (Jutaan)	56	23.41	56	24.6	59.20	25.88	62.55	27.93	63.40	29.62	31.29
4	Pertumbuhan Ekonomi	4.72	0.59	4.9	2.11	5.30	4.65	5.50	5.68	5.60	5.54	6.18%
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.3	2.38	5,3	0.45	5.2	0.87	5.0	0,87	4.7	2.05	4.70%

Idealnya evaluasi yang dilakukan untuk mengukur capaian-capaian Indikator Utama (IKU) Kabupaten Asmat dilakukan pada akhir RPJMD Asmat yakni tahun 2025. Namun dikarenakan penyusunan RPJMD kali ini disesuaikan dengan kebijakan Nasional, Hasil Pemilukada Serentak tahun 2024 maka, melahirkan periode Kepala Daerah Terpilih tahun 2025-2029. Maka evaluasi yang dilaksanakan berupa Evaluasi Akhir. Evaluasi jenis ini merupakan salah satu diantara 2 (dua) evaluasi akhir dan evaluasi kebijakan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2019. Evaluasi dimaksud



berupa capaian pada saat ini (on time) tahun 2024) dan kecenderungan capaian pada tahun 2025 sebagai tahun akhir RPJMD Asmat (on track). Hasilnya disimpulkan melalui kriteria yang dicantumkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2019, yakni :

Contoh Evaluasi Kinerja On Time dan On Track



Gambar 2. 49 Contoh Evaluasi Kinerja On Time dan On Track

Dalam evaluasi tersebut dihasilkan, untuk rasio capaian *on time* terhadap indikator laju pertumbuhan ekonomi diperoleh 99,28% kategori **Sangat Tinggi**, sedangkan *on track* (kecenderungan pencapaian target diakhir tahun RPJMD) sebesar 98,83% kategori **Akan Tercapai**. Untuk Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, kecenderungan hasil capaian secara *on time* progresnya mencatat prosentase 110,2% kategori **Sangat Tinggi**. Sedangkan secara *on track*, capaian diakhir tahun RPJMD juga sebesar 117,23%. Kategorinya **Melampaui/Tercapai**. Pada Indikator Tingkat Kemiskinan tampak hasilnya baik pada kinerja capaian secara *on time* : **sangat rendah** maupun *on track* : **perlu upaya keras**, karena rasio capainya baru mencapai 33,46% dan sampai diakhir Periode RPJMD baru tercapai 30,99%. Kesimpulannya dalam evaluasi pelaksanaan ini progres capaian Indikator Utama dalam RPJMD Kabupaten Asmat tahun 2021-2025 telah mencapai 80,98% kategori Tinggi dan kecenderungan untuk pencapaian diakhir RPJMD sekitar 82,39%, kategori : **Akan Tercapai**.

2.6. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal

Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal, ditujukan pada 6 (enam) bidang, yakni:

- a) Bidang Pendidikan meliputi: jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar dan Penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM serta pembinaan dan pengawasan SPM oleh pemerintah daerah. Adapun capainya terkonfirmasi melalui Laporan RKPD Tahun 2025, dipotret dari anggaran yang digunakan setiap realisasinya mencapai hampir 100%. Meskipun demikian permasalahannya terletak



pada keberlanjutannya, antara lain dinas Pendidikan mengalami keterbatasan anggaran sehingga tidak bisa memenuhi keseluruhan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.

- b) Bidang Kesehatan: Seperti halnya bidang urusan pendidikan cakupan SPM di bidang kesehatan meliputi ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar berupa peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif. Capaiannya didiskripsikan dari realisasi anggaran yang digunakan mencapai 100%, setiap tahun. Namun permasalahannya, masih saja ditemukan tingkat kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup sehat masih rendah,
- c) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemerintah Kabupaten Asmat menetapkan dua indikator dibidang ini yakni penyediaan kebutuhan pokok air sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Capaian indikatornya masih dibawah 100%. Hal ini disebabkan (1) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari limbah cair yang dibuang tanpa melalui proses pengolahan. Dan (2) Keterbatasan kemampuan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target indikator SPM sesuai urusan wajib pemerintah.
- d) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan: Indikatornya meliputi (1) Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, dan (2) Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah. Adapun capaiannya tidak/belum dilaksanakan. Permaalahannya belum dialokasikan anggaran.
- e) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat: Adapun indikator-inidkator yang dijadikan target di bidang ini, meliputi
 - Peningkatan, Pengawasan, dan penegakan/penindakan terhadap perda/perkada
 - Pelayanan Presentase Pelayanan 0 % Rp.0.
 - Informasi Rawan Bencana Rawan Kabupaten/Kota
 - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana
 - Penataan sistem dasar penanggulangan bencana

Cakupan realisasinya tidak/belum bisa didiskripsikan akibat keterbatasan anggaran Bidang Sosial: Indikatornya meliputi: (1). Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti Kabupaten/Kota; (2). Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti Kabupaten/Kota; (3). Rehabilitasi SosialDasarLanjut Usia Telantar Di Luar Panti Kabupaten/Kota; (4). Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Kabupaten/Kota; dan (5). Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Adapun capaian indikatornya masih dibawah target, dan pemerintah Kabupaten Asmat baru melaksanakan indikator Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota, akibat kekuarangan anggaran.



2.7. Gambaran Keuangan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Gambaran keuangan daerah memberikan informasi terkait kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerahnya. Analisis keuangan daerah dilakukan dengan melihat perkembangan pelaksanaan APBD 5 tahun sebelumnya dan mengukur proyeksi keuangan daerah 5 tahun setelahnya. Dengan melakukan analisis keuangan daerah ini Pemerintah Kabupaten Asmat dapat menentukan kebijakan keuangan yang lebih akurat dalam rangka pembangunan Kabupaten Asmat kedepan.

2.7.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

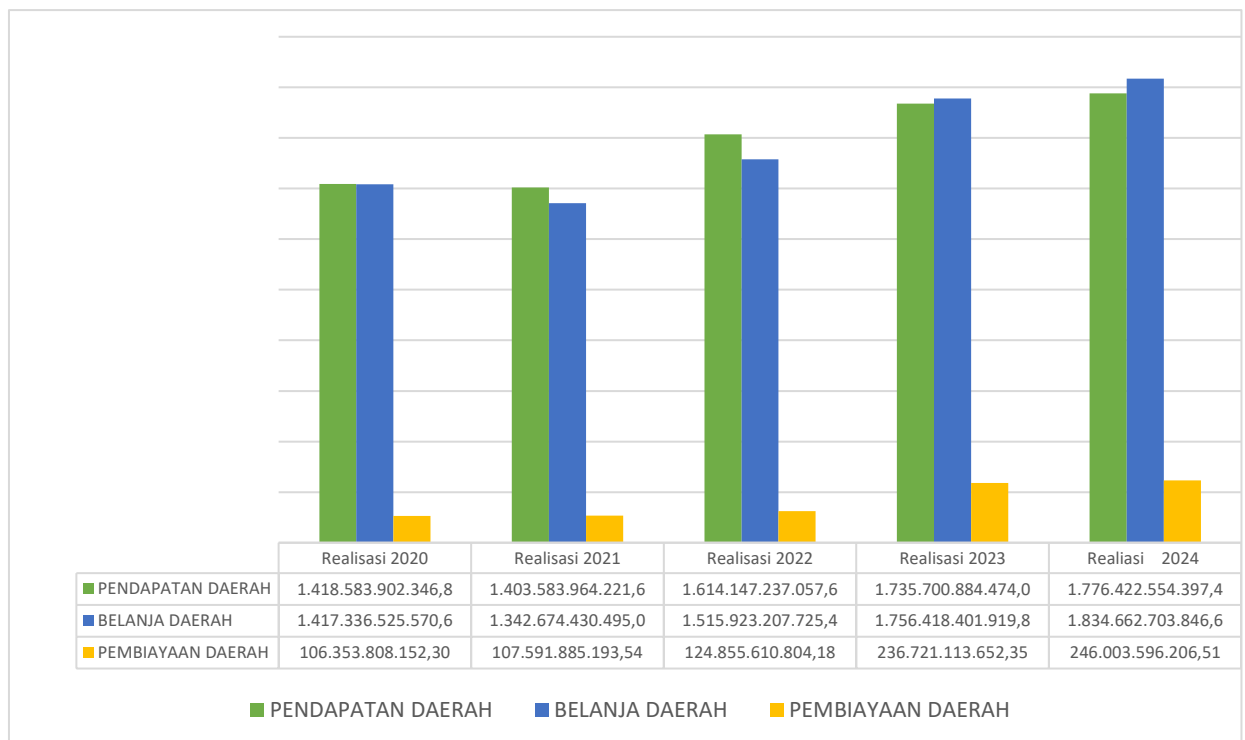
Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan pencapaian yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Asmat dalam pelaksanaan APBD selama 5 tahun sebelumnya. Kinerja keuangan yang akan dianalisis dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2025 – 2029 adalah realisasi APBD Kabupaten Asmat selama periode 2020 – 2024. Analisis terhadap realisasi APBD dilakukan dengan melihat trend atas realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama 5 tahun terakhir. Melalui data realisasi pendapatan daerah pemerintah daerah dapat mengukur tingkat kemandirian daerah setiap tahunnya dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi andalan pada Kabupaten Asmat, berdasarkan data realisasi belanja daerah dapat diukur jumlah uang yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pembangunan daerah dan berdasarkan realisasi pembiayaan daerah dapat dilihat sumber penerimaan pembiayaan untuk APBD dan pengeluaran pembiayaan yang dilakukan Kabupaten Asmat.

Selain data realisasi APBD pada analisis ini juga akan menampilkan Laporan Neraca Kabupaten Asmat tahun 2020 – 2024. Dalam neraca dapat dilihat posisi keuangan yaitu aset, kewajiban dan ekuitas Kabupaten Asmat Per 31 Desember selama 5 Tahun terakhir.



2.7.1.1. Kinerja APBD Masa Lalu

Trend pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2. 50 Trend Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2020 - 2024

Pada gambar diatas dapat dilihat baik realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020. Penyebab penurunan masih belum pulihnya perekonomian Kabupaten Asmat akibat pandemi COVID-19 yang mulai terjadi pada akhir 2019. Namun pada 2022 sampai dengan tahun 2024 realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan mengalami peningkatan. Data realisasi APBD tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2. 73 Realisasi APBD

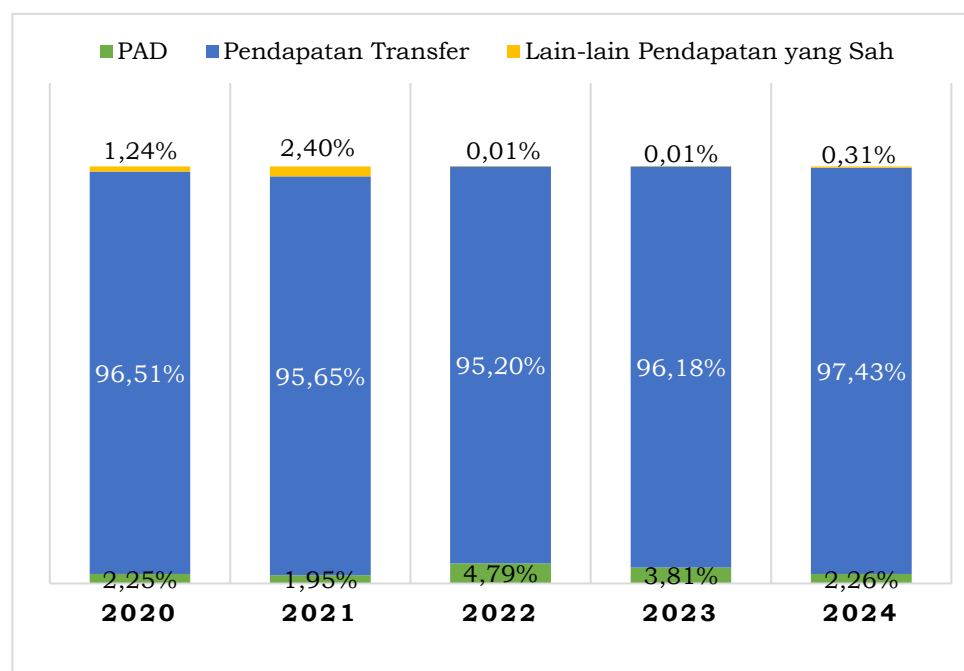
NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
1	PENDAPATAN	1.418.583.902.346,89	1.403.583.964.221,68	1.614.147.237.057,66	1.735.700.884.474,00	1.776.422.554.397,40
	A. Pendapatan Asli Daerah	31.881.516.543,17	27.303.775.089,68	77.391.106.587,66	66.083.925.877,00	40.070.193.577,40
	B. Pendapatan Transfer	1.369.086.428.803,72	1.342.592.519.626,00	1.536.591.927.722,00	1.669.460.153.597,00	1.730.764.459.914,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.615.957.000,00	33.687.669.506,00	164.202.748,00	156.805.000,00	5.587.900.906,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.418.583.902.346,89	1.403.583.964.221,68	1.614.147.237.057,66	1.735.700.884.474,00	1.776.422.554.397,40
2	BELANJA	1.417.336.525.570,65	1.342.674.430.495,04	1.515.923.207.725,49	1.756.418.401.919,84	1.834.662.703.846,61
	A. Belanja Operasi	826.330.016.396,78	829.867.674.623,04	929.323.395.506,01	1.091.754.838.795,13	1.159.098.555.296,88
	B. Belanja Modal	243.733.211.198,87	170.658.191.166,00	265.029.995.374,48	332.087.352.954,71	341.020.586.069,73
	C. Belanja Tak Terduga	10.014.099.849,00	5.304.262.403,00	3.040.965.345,00	3.905.864.702,00	4.473.382.480,00
	D. Belanja Transfer	337.259.198.126,00	336.844.302.303,00	318.528.851.500,00	328.670.345.468,00	330.070.180.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.417.336.525.570,65	1.342.674.430.495,04	1.515.923.207.725,49	1.756.418.401.919,84	1.834.662.703.846,61
	SURPLUS/DEFISIT	1.247.376.776,24	60.909.533.726,64	98.224.029.332,17	-20.717.517.445,84	-58.240.149.449,21
3	PEMBIAYAAN	106.353.808.152,30	107.591.885.193,54	212.138.557.836,18	296.721.113.652,35	246.003.596.206,51
	A. Penerimaan Pembiayaan	106.353.808.152,30	107.591.885.193,54	168.497.084.320,18	266.721.113.652,35	246.003.596.206,51
	B. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	43.641.473.516,00	30.000.000.000,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	106.353.808.152,30	107.591.885.193,54	212.138.557.836,18	296.721.113.652,35	246.003.596.206,51
	PEMBIAYAAN NETTO	106.353.808.152,30	107.591.885.193,54	124.855.610.804,18	236.721.113.652,35	246.003.596.206,51
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	107.601.184.928,54	168.501.418.920,18	223.079.640.136,35	216.003.596.206,51	187.763.446.757,30



Pada Tabel diatas dapat dilihat total pendapatan daerah pada periode 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,96%, sedangkan total belanja daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,45% dan pembiayaan juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 27,68%. Walaupun tahun 2020 sampai dengan 2021 APBD Kabupaten Asmat mengalami penurunan secara keseluruhan tapi peningkatan APBD pada 2022 sampai dengan 2024 dapat merubah menjadi peningkatan rata-rata selama 5 Tahun.

2.7.1.2. Kinerja Masa Lalu Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Asmat terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut adalah proporsi masing-masing pendapatan tersebut atas total pendapatan daerah :



Gambar 2. 51 Trend Proporsi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Total pendapatan daerah

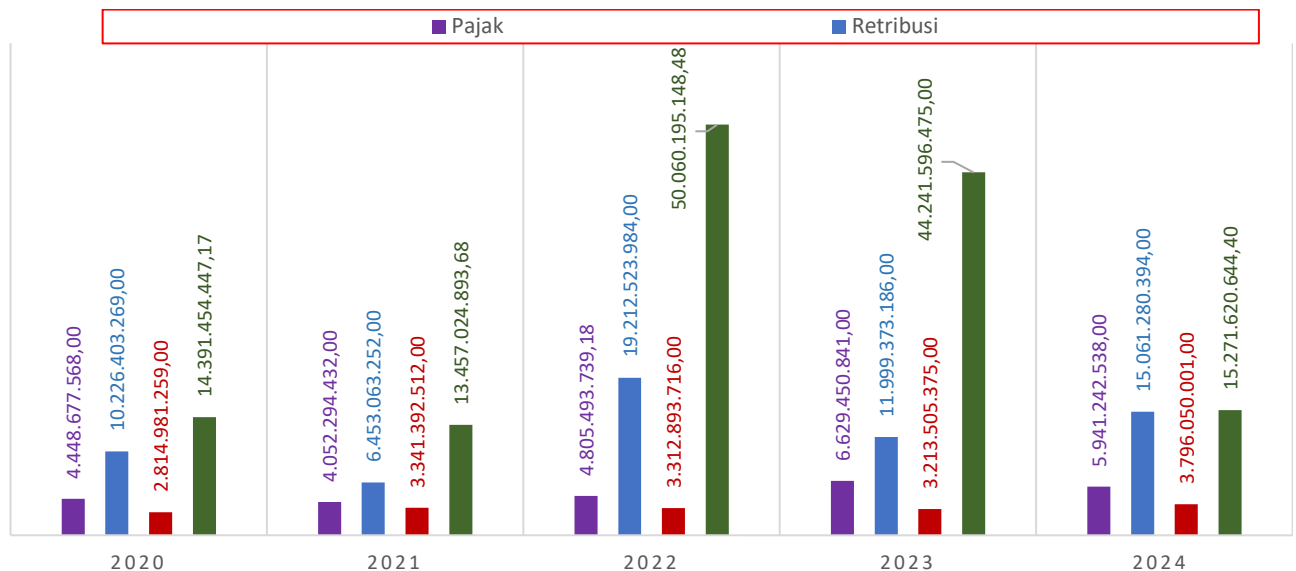
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa proporsi terbesar sumber pendapatan daerah adalah pendapatan transfer, data 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan pendapatan transfer memiliki proporsi diatas 95%. Proporsi pendapatan transfer turun dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dari 96,51% sampai 95,20%, namun pada tahun 2023 proporsi tersebut naik kembali menjadi 96,18% dan terakhir tahun 2024 menjadi 97,43%.. Dari gambar diatas juga dapat dilihat bahwa proporsi PAD terbesar itu terjadi pada tahun 2022 yaitu dengan proporsi sebesar 4,79%.



Berdasarkan penjelasan proporsi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Asmat masih sangat bergantung terhadap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

2.7.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Berikut ini adalah gambaran pertumbuhan dari komponen Pendapatan Asli Daerah :



Gambar 2. 52. Trend Realisasi PAD Tahun 2020 sampai dengan 2024

Gambar diatas terlihat bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asmat yang terbesar adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan berikutnya adalah Retribusi. Lain-lain PAD yang sah tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 menurun akibat dari COVID-19, namun tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan akibat terdapat penerimaan payment distribution dari PT Freeport Indonesia namun pada tahun 2024 terjadi penurunan yang signifikan pada Lain-lain PAD yang sah akibat tidak adanya pemasukan dari payment distribution dari PT Freeport Indonesia dan perubahan klasifikasi anggaran dari Dana Kapitasi JKN FTKP yang pada tahun 2024 dianggarkan pada pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di jenis Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

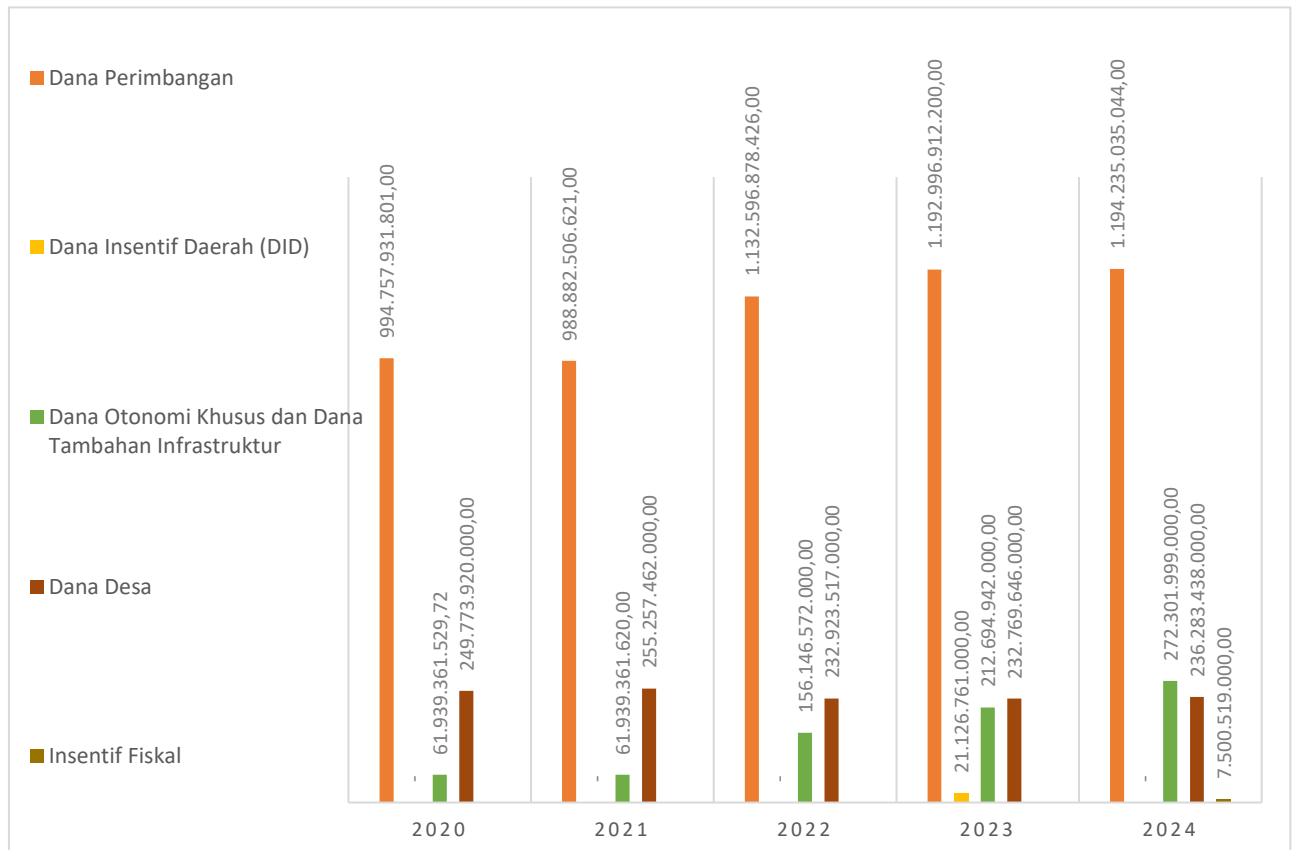
Sedangkan untuk retribusi daerah tahun 2022 sampai 2023 mengalami penurunan namun tahun 2024 juga terjadi peningkatan realisasi yang cukup akibat penerimaan dari retribusi jasa umum yaitu jasa pelayanan kesehatan pada RSUD.

Pada Kabupaten Asmat pendapatan pajak menduduki pendapatan terbesar nomor 3 setelah lain-lain PAD yang sah dan retribusi. Pendapatan pajak yang terbesar pada Kabupaten Asmat bukan dari Pajak Bumi dan Bangunan tetapi dari Pajak Restoran.



2.7.3. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah. Berdasarkan Gambar 2.52 dapat dilihat bahwa proporsi terbesar dari pendapatan transfer adalah pendapatan transfer pemerintah pusat dibandingkan dengan transfer dari pemerintah daerah lainnya. Berikut ini trend realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat.

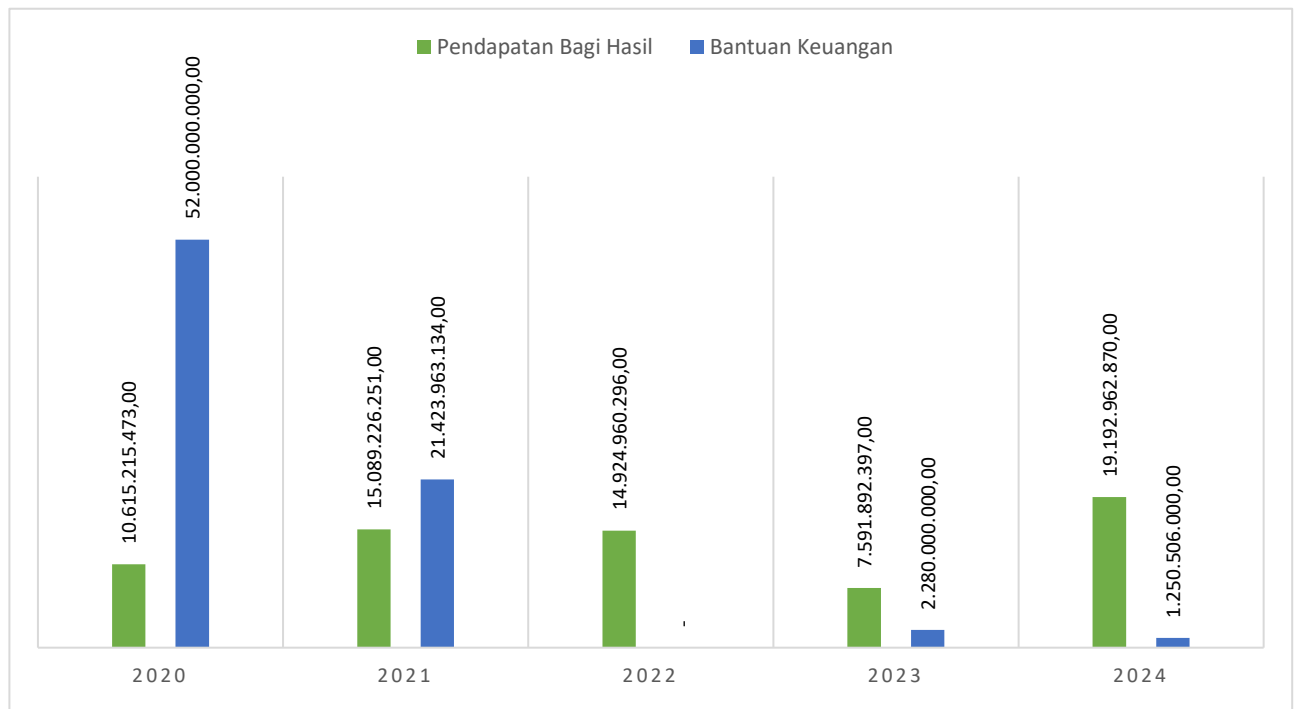


Gambar 2. 53. Trend Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2020 sampai dengan 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa pendapatan transfer terbesar dari pemerintah pusat adalah transfer dari dana perimbangan yang didalamnya terdapat pendapatan dana bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Setelah dana perimbangan pendapatan terbesar berikutnya adalah pendapatan dari dana desa.

Pendapatan dari dana perimbangan tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami penurunan. Sedangkan tahun 2022 sampai 2023 mengalami peningkatan. Sedangkan pendapatan dana desa tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan.

Pendapatan transfer dari pemerintah daerah lainnya terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Berikut ini trend realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya.



Gambar 2. 54 Trend Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah Tahun 2019 sampai dengan 2023

Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya terbesar pada tahun 2020 sampai 2021 berasal dari bantuan keuangan. Namun pada tahun 2022 tidak ada realisasi bantuan keuangan dan pada tahun 2023 terdapat realisasi dari bantuan keuangan tersebut. Bantuan keuangan yang diterima oleh Kabupaten Asmat seluruhnya merupakan bantuan dari Provinsi Papua, namun bantuan keuangan tahun 2023 merupakan bantuan dari Provinsi Papua Selatan karena telah dilaksanakan pemekaran. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada pendapatan bagi hasil dimana peningkatan signifikan tersebut meningkatnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.

2.7.4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya. Berdasarkan Tabel 2.73 dapat dilihat selama 2020 sampai dengan 2023 hanya terdapat 1 kali penerimaan pendapatan lainnya yang cukup besar yaitu pada tahun 2021 dan pendapatan tersebut merupakan hibah dana BOS yang dianggarkan pada pendapatan lainnya pada tahun 2021. Pendapatan dana BOS yang sebelumnya dicatat pada pendapatan hibah atau pendapatan lainnya, pada tahun 2022 pencatatannya dipindahkan ke jenis pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan pada bagian Dana Alokasi Khusus.

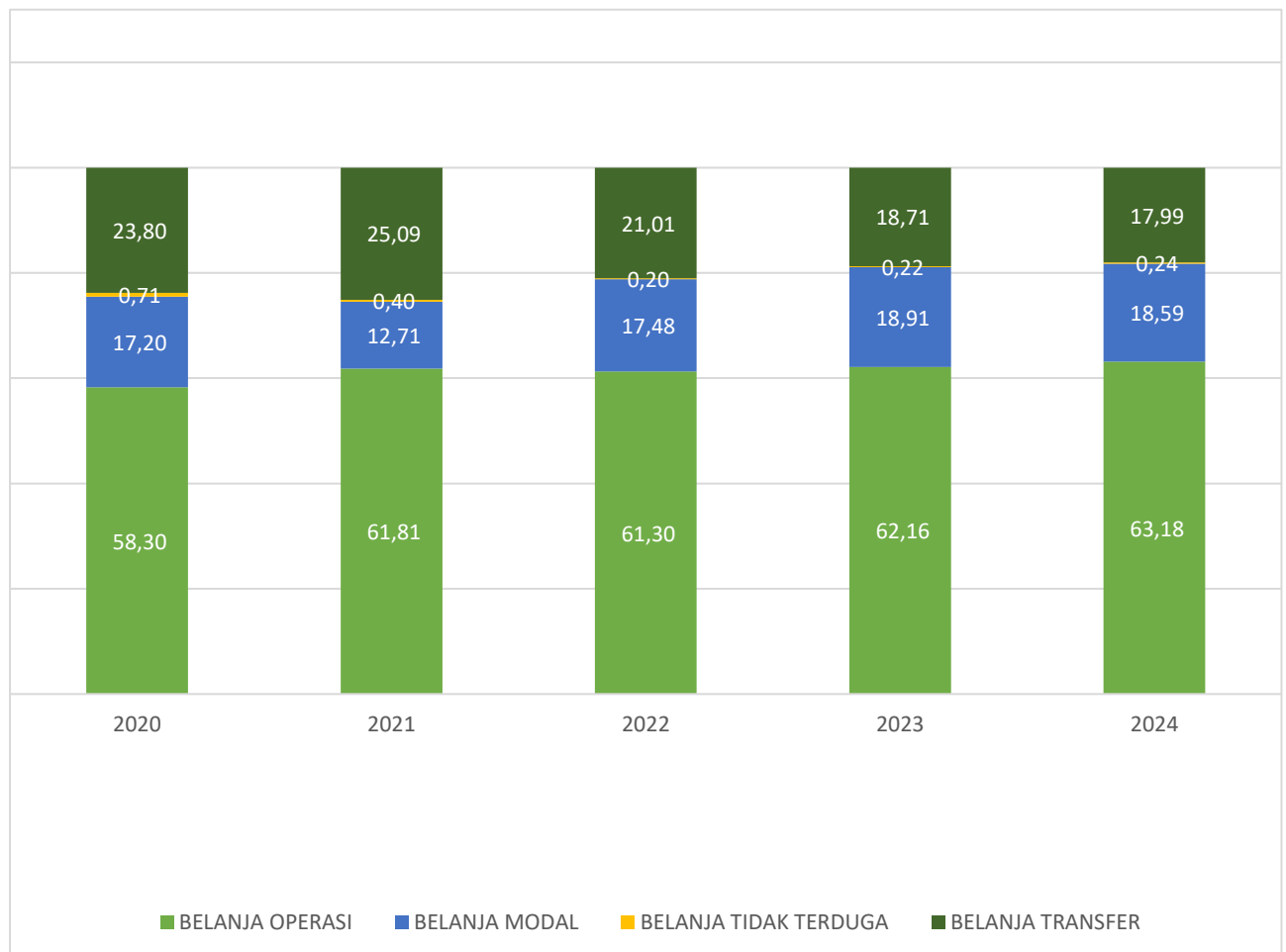
Pada tahun 2024 Pendapatan Lainnya terdapat juga pendapatan lainnya yang merupakan perubahan klasifikasi anggaran dari Dana JKN FKTP yang sebelumnya dianggarkan pada Lain-lain PAD yang sah menjadi Pendapatan lainnya pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah



2.7.5. Kinerja Masa Lalu Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Berikut ini adalah gambaran pertumbuhan proporsi dari komponen Belanja Daerah:



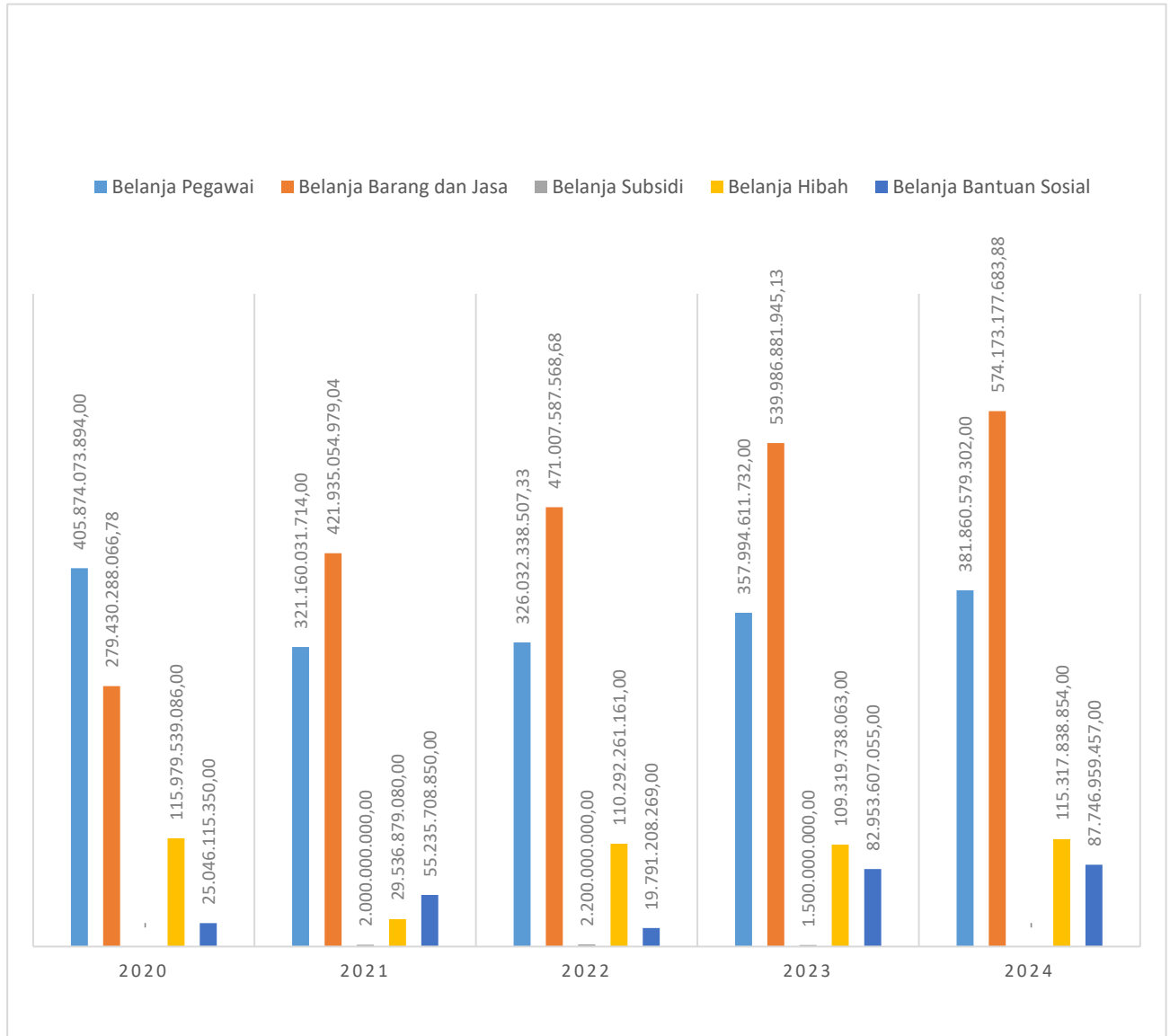
Gambar 2. 55 Trend Proporsi Belanja Daerah Tahun 2020 sampai dengan 2024

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa proporsi terbesar dari belanja daerah adalah belanja operasi, selama tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dimana proporsi belanja obelanja operasi pada tahun 2024 mencapai 63.18%. dilihat pada data tahun 2024 proporsi terbesar kedua adalah belanja modal dengan nilai 18.59% dan berikutnya belanja transfer dengan nilai 17,99%.



2.7.6. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Berikut ini adalah gambaran pertumbuhan dari komponen Belanja Operasi:



Gambar 2. 56 Trend Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 sampai dengan 2024

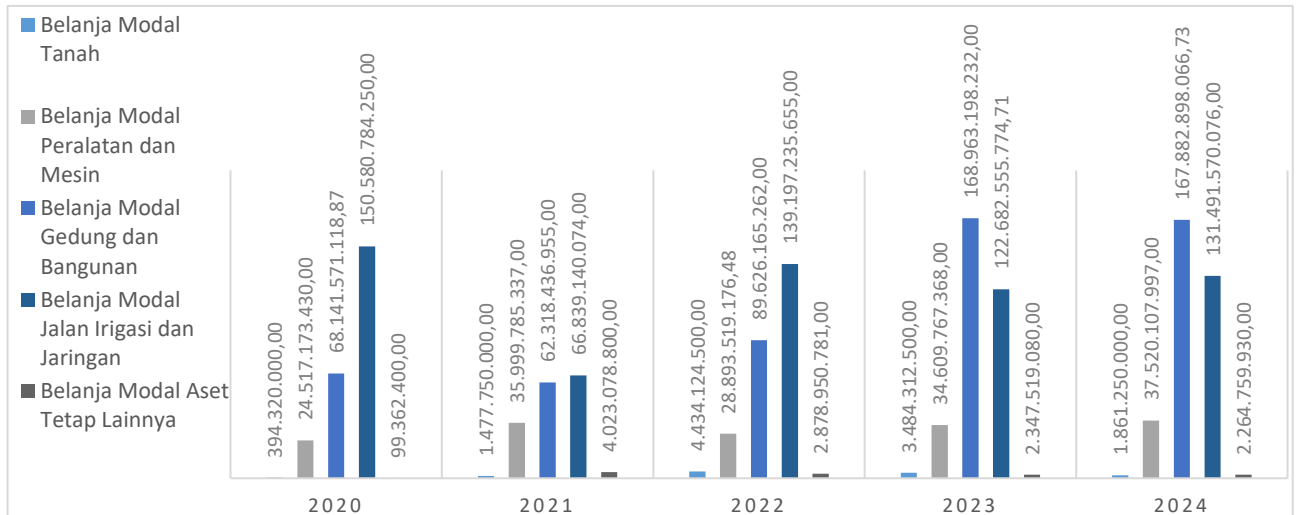
Dari gambar diatas dapat dilihat pada tahun 2020 realisasi belanja operasi terbesar adalah belanja pegawai dan setelahnya belanja barang dan jasa. Namun pada 2021 sampai dengan 2024 komposisi tersebut berubah menjadi belanja barang dan jasa yang terbesar baru belanja pegawai. d

Pada Tahun 2021 sampai 2024 sebagian besar belanja operasi meningkat kembali dengan belanja terbesar pada belanja barang dan jasa dan setelahnya secara berurutan belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.



2.7.7. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Berikut ini adalah gambaran pertumbuhan dari komponen Belanja Modal:

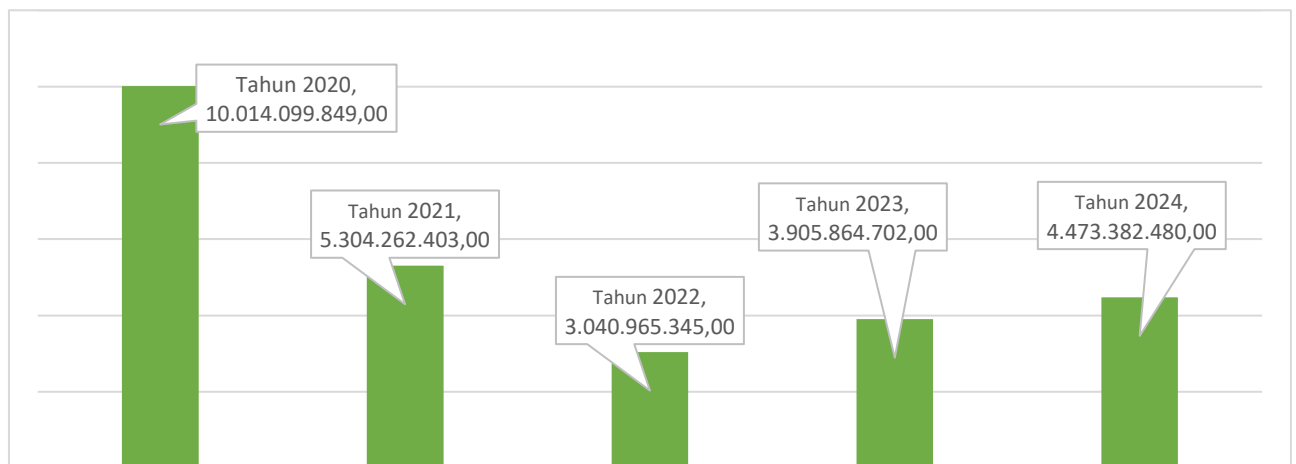


Gambar 2. 57 Trend Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 sampai dengan 2024

Berdasarkan gambar diatas realisasi belanja modal terbesar Kabupaten Asmat selama 5 tahun terakhir adalah belanja modal gedung dan bangunan dan belanja jalan irigasi dan jaringan. Belanja ini sesuai dengan salah satu target Kabupaten Asmat untuk membuka aksesibilitas antar wilayah pada Kabupaten Asmat untuk mendorong perekonomian masyarakat Kabupaten Asmat

2.7.8. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Berikut ini adalah gambaran pertumbuhan dari Belanja Tidak Terduga:



Gambar 2. 58 Trend Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 sampai dengan 2024

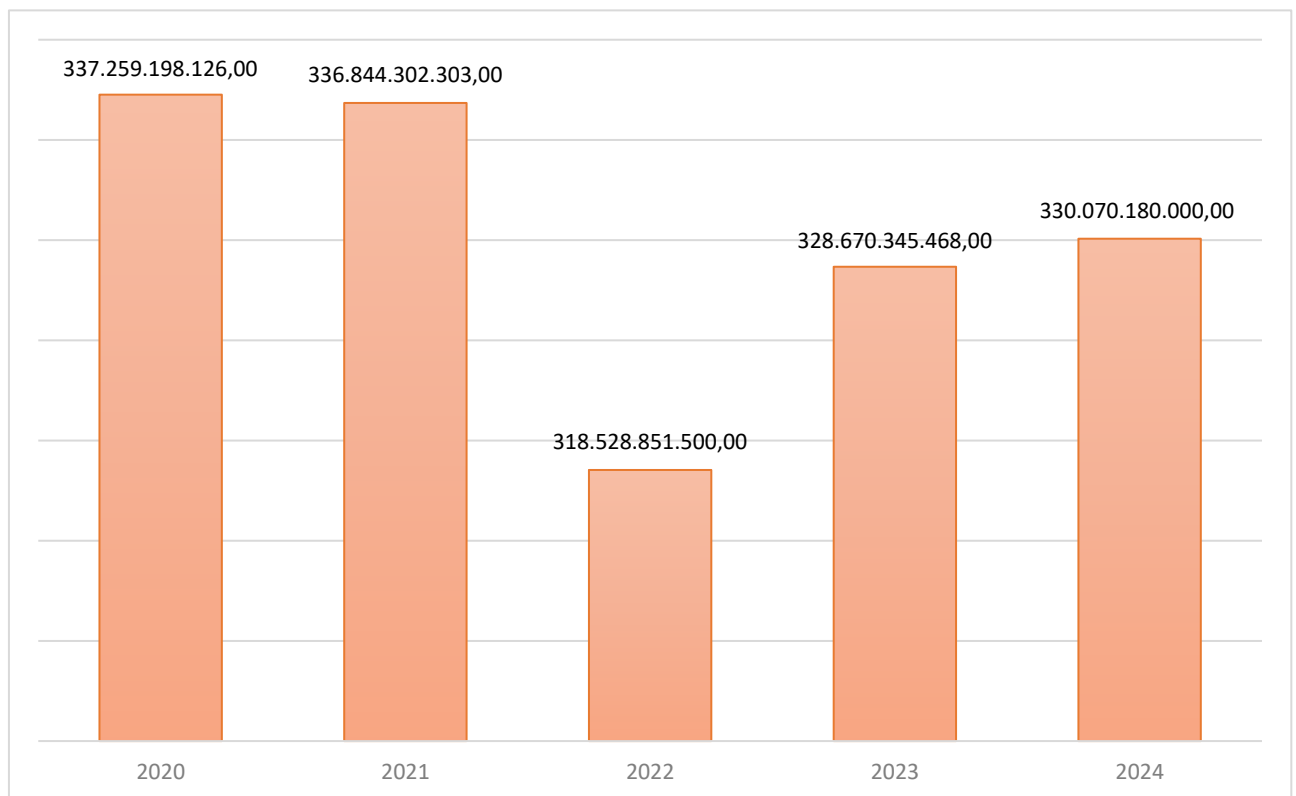


Realisasi Belanja tidak terduga di Kabupaten Asmat selama 2020 sampai dengan 2024 memiliki rata-rata sebesar 4,6 Milyar Rupiah dan pengeluaran terbesar terjadi pada 2020 yaitu mencapai lebih dari 10 Milyar Rupiah karena pada tahun tersebut saat terjadinya COVID-19.

Sebagian besar belanja tidak terduga yang sudah dikeluarkan selama lima tahun terakhir merupakan pengeluaran untuk penanganan bencana, kedukaan, dan rujukan orang sakit.

2.7.9. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Berikut ini adalah gambaran pertumbuhan dari Belanja Transfer:



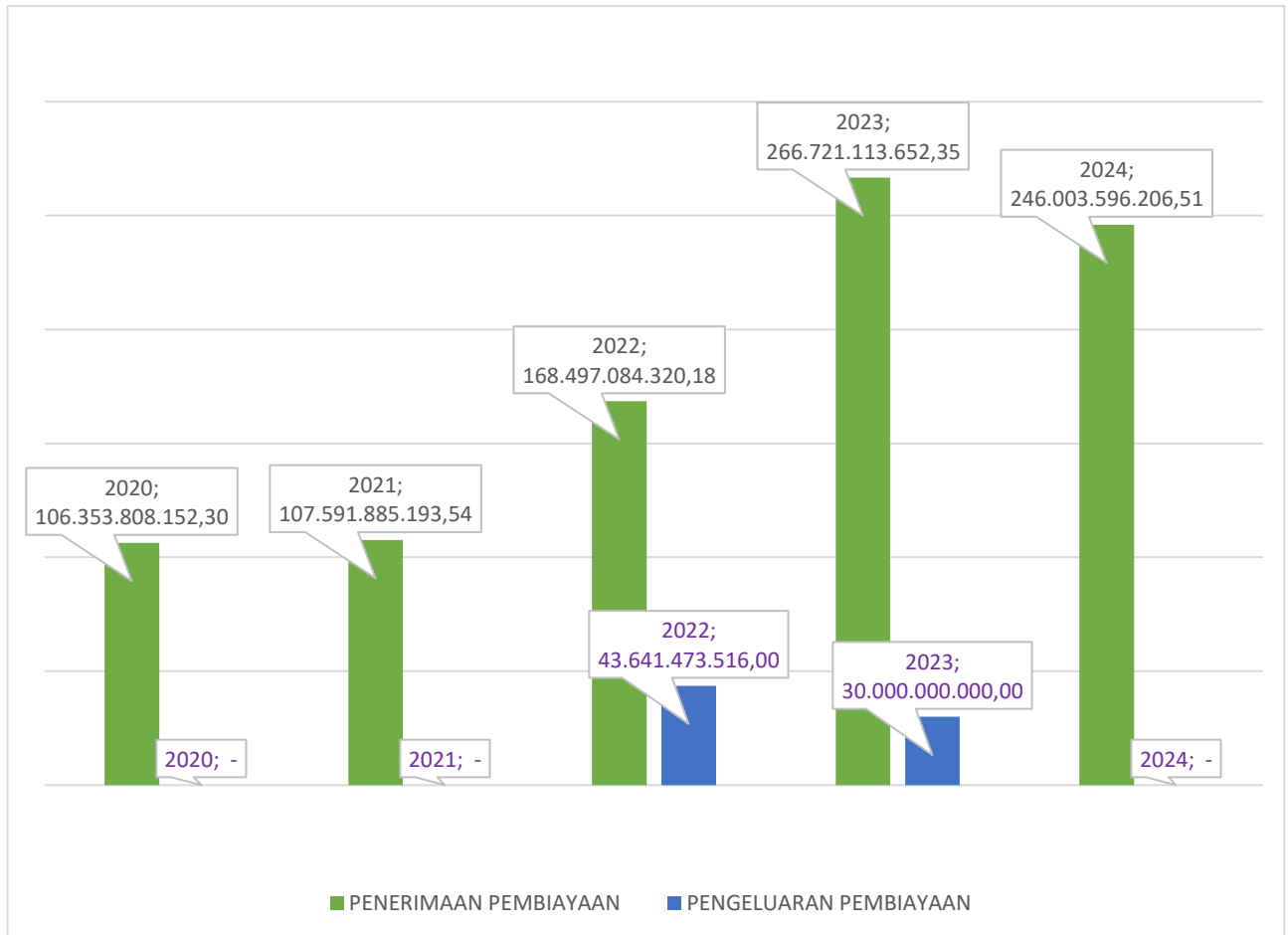
Gambar 2. 59 Trend Realisasi Belanja Transfer Tahun 2020 sampai dengan 2024

Pada gambar diatas dapat dilihat belanja transfer tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan. Namun meningkat kembali pada tahun 2023 sampai 2024 belanja transfer hanya terdiri belanja bantuan keuangan ke pemerintah desa.



2.7.10. Kinerja Masa Lalu Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Kabupaten Asmat terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berikut ini adalah gambaran pertumbuhan dari komponen Pembiayaan:



Gambar 2. 60 Trend Realisasi Pembiayaan Tahun 2020 sampai dengan 2024

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada Kabupaten Asmat terdiri dari Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya dan Penerimaan dari Pencairan Dana Cadangan. Penerimaan Pembiayaan selama 5 tahun terakhir terus meningkat sampai dengan tahun 2024. Bagian terbesar dari penerimaan pembiayaan adalah Penerimaan dari SILPA Tahun Sebelumnya.

Selain SILPA Tahun Sebelumnya penerimaan pembiayaan juga terdapat pencairan dana cadangan yang terjadi pada tahun 2023 dan 2024. Pencairan dana cadangan ini merupakan pencarian dana cadangan yang dibentuk pada tahun 2022 dan 2023 yang direncanakan untuk pembangunan sarana dan prasarana bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemerintahan, pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua, lingkungan dan terakhir untuk pemilihan kepala daerah Tahun 2024.



Pada sisi pengeluaran pembiayaan selama 5 tahun terakhir hanya berupa pembentukan dana cadangan. Pada pembentukan dana cadangan dilakukan pada tahun 2022 dan tahun 2023. Pada Gambar di atas dapat dilihat pembentukan dana cadangan 2022 telah dicairkan pada tahun 2023 dan 2024 sebagaimana dijelaskan pada paragraf penerimaan pembiayaan. Sedangkan pembentukan dana cadangan tahun 2023 diperuntukan untuk mendanai kebutuhan pembangunan Gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.

2.7.1. Kinerja Neraca Masa Lalu

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Kabupaten Asmat pada 31 Desember. Laporan ini sangat penting bagi pemerintah daerah, untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Unsur yang dicakup oleh Neraca Daerah terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

2.7.11. Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Asmat pada akhir suatu periode anggaran, yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Neraca Daerah menjadi instrumen penting dalam penyusunan RPJMD karena memberikan gambaran tentang kapasitas dan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.

Untuk mengetahui posisi keuangan daerah Kabupaten Asmat, berikut disajikan data perkembangan dan rata-rata pertumbuhan Neraca Kabupaten Asmat Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 :



Tabel 2. 74 Neraca Daerah

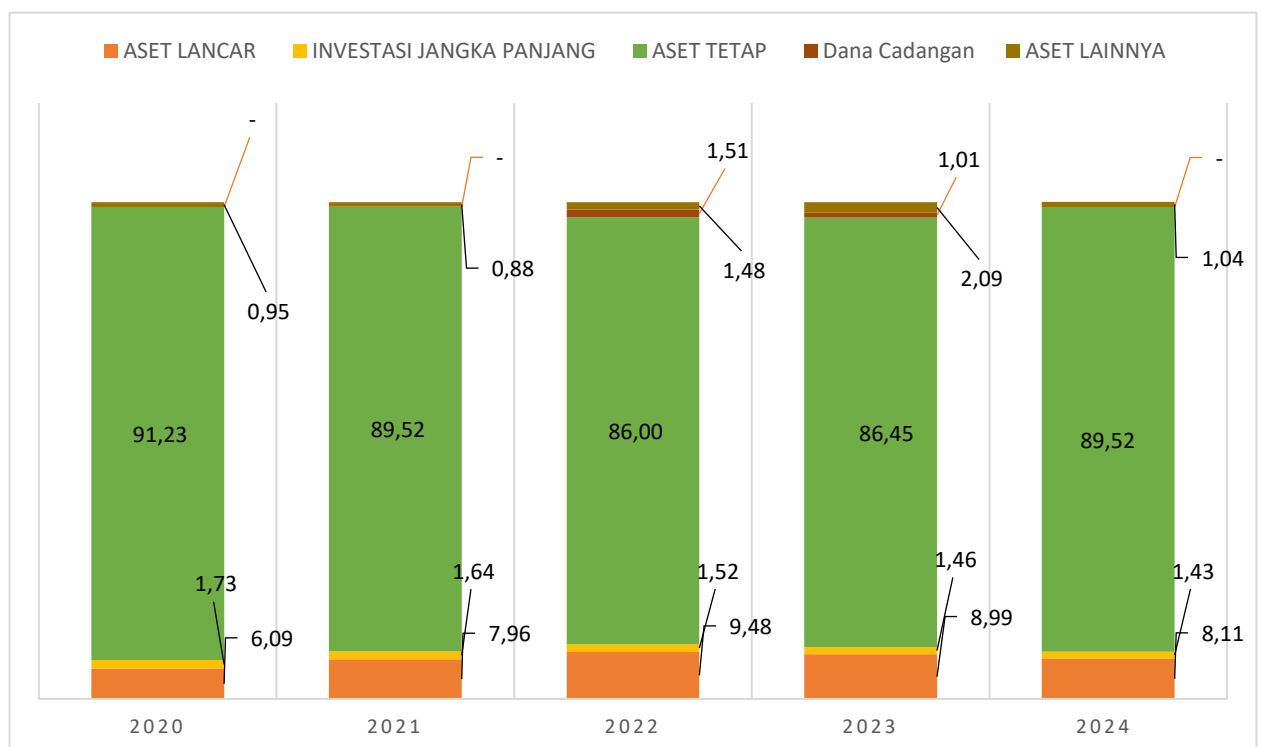
NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
1	ASET	2.549.253.721.734,36	2.682.983.041.855,47	2.848.536.431.322,08	2.981.043.647.624,50	3.074.736.804.448,54
	A. Aset Lancar	155.349.059.952,47	213.591.461.772,80	274.215.106.780,54	270.708.931.988,64	249.167.480.283,74
	B. Investasi Jangka Panjang	44.000.000.000,00	44.000.000.000,00	44.000.000.000,00	44.000.000.000,00	44.000.000.000,00
	C. Aset Tetap	2.325.707.631.018,57	2.401.687.448.758,90	2.487.472.228.942,16	2.603.359.237.285,25	2.749.744.087.365,90
	D. Aset Lainnya	24.197.030.763,32	23.704.131.323,77	42.849.095.599,38	62.975.478.350,61	31.825.236.798,90
	JUMLAH ASET	2.549.253.721.734,36	2.682.983.041.855,47	2.848.536.431.322,08	2.981.043.647.624,50	3.074.736.804.448,54
2	KEWAJIBAN	37.085.781.082,47	25.953.962.336,12	23.026.398.255,60	44.702.691.741,18	44.737.899.254,20
	A. Kewajiban Jangka Pendek	37.085.781.082,47	25.953.962.336,12	23.026.398.255,60	44.702.691.741,18	44.737.899.254,20
	B. Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0	0
	JUMLAH KEWAJIBAN	37.085.781.082,47	25.953.962.336,12	23.026.398.255,60	44.702.691.741,18	44.737.899.254,20
3	EKUITAS	2.512.167.940.651,89	2.657.029.079.519,35	2.869.280.789.813,48	2.966.631.977.199,32	3.029.998.905.794,34
	A. Ekuitas	2.512.167.940.651,89	2.657.029.079.519,35	2.869.280.789.813,48	2.966.631.977.199,32	3.029.998.905.794,34
	JUMLAH EKUITAS	2.512.167.940.651,89	2.657.029.079.519,35	2.869.280.789.813,48	2.966.631.977.199,32	3.029.998.905.794,34
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.549.253.721.734,36	2.682.983.041.855,47	2.892.307.188.069,08	3.011.334.668.940,50	3.074.736.805.048,54



2.7.11.1. Aset (Aktiva)

Aset dapat didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset pemerintah Kabupaten Asmat terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya. Pada Tabel Neraca Kabupaten Asmat 2020 sd 2024 terlihat bahwa selama jangka waktu 5 tahun aset Kabupaten Asmat secara rata-rata meningkat sebesar 4,79%. Secara proporsi aset yang paling besar nilainya adalah aset tetap sebagaimana bisa dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. 61 Trend Proporsi Aset Tahun 2020 sd 2024

Gambar diatas memperlihatkan bahwa aset tetap merupakan aset dengan nilai proporsi yang tertinggi yaitu mencapai diatas 86%. Namun bila dilihat dari tren selama 5 tahun, proporsi aset tetap berkurang dari 91,23% Tahun 2020 menjadi 89,53% pada akhir Tahun 2024. Penurunan proporsi ini dapat diakibatkan penyusutan atas nilai aset tetap.

Proporsi aset terbesar kedua adalah aset lancar, dapat dilihat pada Gambar 2.61 aset lancar Kabupaten Asmat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata peningkatan sebesar 13,96%. Peningkatan ini sebagian besar merupakan peningkatan pada Saldo Kas Umum Daerah dan Saldo Kas Lainnya.



2.7.11.2. Kewajiban (Pasiva)

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pada Kabupaten Asmat hanya terdiri atas kewajiban jangka pendek yang didalamnya terdapat Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Adapun proporsi kewajiban selama 5 tahun adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 62 Trend Proporsi Kewajiban Tahun 2020 sampai dengan 2024

Dari gambar diatas dapat dilihat proporsi terbesar dari kewajiban adalah utang beban yang merupakan dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Bila dilihat dari trend utang beban ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Sedangkan kewajiban terbesar kedua adalah utang jangka pendek lainnya, utang ini merupakan utang atas kelebihan dana perimbangan berupa dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Utang jangka pendek lainnya ini mengalami peningkatan dan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2023.

2.7.11.3. Ekuitas (Modal Daerah)

Ekuitas dapat didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas pada Kabupaten Asmat selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,80%.

2.7.11.4. Rasio Keuangan

Pertumbuhan komponen neraca daerah perlu dianalisis secara lebih mendalam melalui perhitungan tiga rasio, yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar yang merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, serta rasio *quick* yang merupakan perbandingan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban jangka pendek.



Analisis neraca daerah yang kedua adalah analisis rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Analisis rasio solvabilitas dilakukan dengan melihat rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal. Perhitungan rasio solvabilitas berbeda dengan rasio likuiditas, semakin kecil rasio solvabilitas maka kondisinya semakin baik atau solvable. Hasil perhitungan 2 rasio keuangan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 75 Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas 2019—2023

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2023
RASIO LIKUIDITAS					
Rasio Lancar	4,19	8,23	11,91	6,06	5,57
Rasio <i>Quick</i>	3,10	6,76	10,00	4,87	4,53
RASIO SOLVABILITAS					
Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Rasio Hutang terhadap Modal	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio likuiditas Kabupaten Asmat dari tahun 2020 sampai Tahun 2024 terus meningkat, nilai terendah dari rasio likuiditas terjadi pada tahun 2020 setelahnya terus meningkat namun pada tahun 2023 sampai 2024 terjadi penurunan likuiditas namun masih dalam batas yang memadai dalam rangka pemenuhan kewajiban jangka pendek.

Sedangkan dari sisi Rasio Solvabilitas, terlihat pada tabel diatas juga menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi hutang juga tinggi dengan angka rasio hutang terhadap total aset maupun utang terhadap ekuitas yang berada dibawah 0,05.

2.7.12. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, selama 5 tahun terakhir komposisi keuangan daerah Kabupaten Asmat dari sisi pendapatan daerah masih tergantung pada pendapatan transfer (rata-rata 5 tahun terakhir 96,19%), terutama yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Rata-rata 5 tahun terakhir dana transfer dari pusat sebesar 97,99% dari dana transfer. Lalu rata-rata 5 tahun terakhir dana transfer dari pusat yang tertinggi adalah dana perimbangan (73,6%). Tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat masih relatif tinggi dan sebaliknya kemandirian keuangan daerah masih relatif rendah (PAD rata-rata 5 tahun terakhir 3,01%) dan trend 3 tahun terakhir terus menurun. Pada tahun 2024, pertumbuhan yang positif dari komponen Pendapatan Daerah hanya berasal dari pendapatan transfer. Pajak daerah mengalami pertumbuhan negatif dan retribusi daerah mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2024. Dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur bertambah setelah berlakunya UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Namun, dengan perubahan peraturan perundang-



undangan seperti pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan pemberlakuan efisiensi anggaran di tahun 2025, menyebabkan perlu adanya strategi dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk tantangan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Karena itu, strategi peningkatan kemandirian keuangan daerah sangat diperlukan dengan cara :

1. Meningkatkan perekonomian daerah terutama untuk sektor-sektor ekonomi yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Kebijakan ini penting agar multiplier perekonomian daerah dapat meningkat dan uang beredar di daerah semakin besar. Dengan demikian, penerimaan PDRD akan semakin meningkat. Kebijakannya dapat berupa mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dan memberikan insentif fiskal.
2. Dengan berlakunya Perda PDRD Kabupaten Asmat Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan meningkatkan lokal taxing power. Dengan Perda PDRD yang baru ini akan menurunkan biaya administrasi dan memperluas basis pajak. Sehingga akan meningkatkan peran kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah.
3. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
4. Terus melakukan inovasi dan simplifikasi dalam pelayanan dan proses serta prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan digitalisasi.
5. Meningkatkan kepatuhan administrasi dalam penyerapan anggaran dana transfer termasuk dana otsus sehingga dapat bermanfaat untuk pembangunan di Asmat.
6. Perlu dikembangkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari hasil pemanfaatan aset daerah, KPBU, hibah, dana filantropi dan dana lainnya.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Asmat 2026-2030 adalah sebagai berikut :

1. Salah satu komponen pembentuk Pendapatan Daerah, yaitu PAD (pajak daerah dan retribusi daerah) dipengaruhi oleh tingkat perekonomian yang ditargetkan pada periode 2026-2030 di Kabupaten Asmat. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat.
2. Proyeksi Pendapatan transfer Pemerintah didasarkan pada asumsi pertumbuhan yang konservatif karena sifatnya yang sulit untuk diprediksi.
3. Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalamnya mencakup dana hibah baik dari Kementerian/Lembaga dan dana Kapitasi JKN pada FKTP. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana ini yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan pemerintah pusat terutama kementerian Lembaga.
4. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, maka penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan



Otonomi Khusus ditentukan besarnya yaitu setara dengan 2,25% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional dengan rincian :

- a. Dana otsus block grant setara dengan 1% plafon DAU Nasional
- b. Dana otsus specific grant setara dengan 1,25% plafon DAU Nasional.

Selain pentingnya pendapatan daerah untuk memenuhi belanja pembangunan daerah, juga pentingnya meningkatkan kualitas belanja daerah sehingga dengan efisiensi anggaran belanja, dapat memperluas kesempatan melaksanakan program pembangunan daerah lebih banyak. Sebagai komponen APBD, belanja daerah diharapkan mampu mendorong perkembangan ekonomi daerah. Belanja daerah dimaksudkan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan yang langsung memberikan manfaat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dalam pengelolaan belanja harus menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan.

Belanja daerah sesuai yang diamanatkan dalam perundang-undangan ditentukan untuk :

1. Alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%.
2. Alokasi anggaran kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah yang mengacu pada program Kesehatan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan.
3. Belanja pegawai maksimal 30% di luar tunjangan guru.
4. Belanja infrastruktur minimal 40% di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. penyesuaian porsi ini paling lama 5 tahun sejak UU Nomor 1 Tahun 2022 yaitu 2027.
5. Anggaran peningkatan kapasitas SDM sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah.
6. Alokasi anggaran penguatan APIP sebesar 0,3% sampai dengan 0,9% dari total belanja daerah.

Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja dialokasikan untuk program dan kegiatan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
3. Belanja dialokasikan untuk program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit ataupun memiliki multiplier effects dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Belanja dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan OPD sesuai tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran OPD dan sasaran daerah.
5. Penghematan dan rasionalisasi terhadap belanja personil pada belanja langsung secara selektif.



Dengan melihat struktur belanja 5 tahun ke belakang, diproyeksikan arah untuk mencapai target sesuai UU HKPD yang terukur telah dituangkan dalam proyeksi keuangan daerah di bawah ini. Surplus (Defisit) diasumsikan: 0, artinya besaran pendapatan sama dengan besaran belanja.



Tabel 2. 76 Proyeksi Kerangka Pendanaan

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1	PENDAPATAN	1.776.422.554.397,40	1.771.970.658.369,79	1.846.651.528.074,84	1.906.054.319.721,92	1.967.002.660.637,02	2.028.901.056.221,31
	A. Pendapatan Asli Daerah	40.070.193.577,40	34.281.167.214,00	35.995.225.574,70	37.794.986.853,44	39.684.736.196,11	41.668.973.005,91
	B. Pendapatan Transfer	1.730.764.459.914,00	1.731.478.557.577,79	1.804.134.822.243,24	1.861.411.778.598,74	1.920.127.992.457,68	1.979.682.654.633,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.587.900.906,00	6.210.933.578,00	6.521.480.256,90	6.847.554.269,75	7.189.931.983,23	7.549.428.582,39
	JUMLAH PENDAPATAN	1.776.422.554.397,40	1.771.970.658.369,79	1.846.651.528.074,84	1.906.054.319.721,92	1.967.002.660.637,02	2.028.901.056.221,31
2	BELANJA	1.834.662.703.846,61	1.771.970.658.369,79	1.846.651.528.074,84	1.906.054.319.721,92	1.967.002.660.637,02	2.028.901.056.221,31
	A. Belanja Operasi	1.159.098.555.296,88	1.110.954.224.512,00	1.152.584.272.524,16	1.187.283.701.393,71	1.226.647.886.463,39	1.267.980.280.786,56
	B. Belanja Modal	341.020.586.069,73	356.052.710.542,79	373.855.346.069,93	382.548.113.373,43	387.321.143.971,10	390.235.463.722,10
	C. Belanja Tak Terduga	4.473.382.480,00	4.000.000.000,00	4.200.000.000,00	4.410.000.000,00	4.630.500.000,00	4.862.025.000,00
	D. Belanja Transfer	330.070.180.000,00	300.963.723.315,00	316.011.909.480,75	331.812.504.954,79	348.403.130.202,53	365.823.286.712,65
	JUMLAH BELANJA	1.834.662.703.846,61	1.771.970.658.369,79	1.846.651.528.074,84	1.906.054.319.721,93	1.967.002.660.637,02	2.028.901.056.221,31
	SURPLUS/DEFISIT	-58.240.149.449,21	-	-	-	-	-
3	PEMBIAYAAN	246.003.596.206,51	-	-	-	-	-
	A. Penerimaan	246.003.596.206,51	-	-	-	-	-
	B. Pengeluaran	0	-	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	246.003.596.206,51	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	246.003.596.206,51	-	-	-	-	-



2.8. Permasalahan dan Isu Strategis

2.8.1. Permasalahan Pokok Pembangunan

Permasalahan pembangunan Pemerintah Kabupaten Asmat tahun yang saat ini terjadi, merupakan kondisi (realita) kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Penelaahannya dilakukan dengan menganalisa hasil evaluasi pembangunan dan pengembangan potensi daerah. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait data dan informasi untuk analisis permasalahan daerah. Analisis permasalahan daerah diawali dengan analisis data capaian pembangunan sampai dengan tahun 2021-2025 dan permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan RPJPD Kab. Asmat, 2025-2045 Tahap I. Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2025- 2029 ini perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Selanjutnya berbagai permasalahan yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dalam berbagai bidang kewenangan di Kabupaten Asmat dapat diidentifikasi pada sub bagian berikut ini:

A. Kerentanan Wilayah atas Potensi Bencana serta Pengelolaan Lingkungan Hidup Kurang Memperhatikan Aspek Keberlanjutan

Kabupaten Asmat umumnya berdataran rendah, kemiringan 0-8 persen, pesisir pantai berawa-rawa tergenang air, bagian utara dan timur agak tinggi. Ketinggian air pasang surut 5 – 7 meter, air pasang laut masuk sampai sejauh 50 – 60 kilometer dan beberapa tempat terintrusi air asin/air laut, serta memiliki ketinggian antara 0 – 100 meter di atas permukaan laut. Diperkirakan luas kawasan rawa-rawa mencapai hampir 70% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Asmat. Adapun Kelas tutupan terluas adalah Hutan Rawa Primer sebesar 1.354.985,58 ha (54,17%) dan Hutan Rawa Sekunder seluas 263.433,72 ha (10,53%). Pada topografi semacam ini pekerjaan untuk membangun prasarana fisik sangatlah sulit. Keadaan topografi Asmat yang demikian menyebabkan rumitnya membangun infrastruktur fisik dasar sehingga mengakibatkan aksesibilitas pelayanan pemerintah sulit menyentuh kepada masyarakat secara merata, terutama yang berada di daerah pedalaman. Kondisi ini juga membuat tingginya biaya transportasi (high cost) terutama untuk transportasi sungai dan udara terhadap jasa angkutan barang dan penumpang, sehingga menjadi hambatan untuk meningkatkan perekonomian secara merata pada setiap wilayah dan sektor. Wilayah Asmat juga sangat rentan dengan kebencanaan. Meskipun secara indeks resiko menunjukan



klasifikasinya berada 13 - 144. Artinya masuk pada klasifikasi sedang. Namun beberapa jenis bencana seperti banjir, gempa bumi, kebakaran hutan, gelombang ekstrim dan abarasi serta kekeringan sangat tinggi.

B. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk yang Tersebar Tidak Merata serta Angka Ketergantungan yang Tinggi

Jumlah penduduk 2024 mencapai 120.902 jiwa atau tertinggi kedua setelah merauke dengan laju pertumbuhan mencapai 4,05 % lebih tinggi dari tiga kabupaten lainnya di Provinsi Papua Selatan (Mappi, Boven dan Merauke). Distribusi penduduk di kabupaten Asmat, lebih banyak terpusat di beberapa distrik antara lain: tertinggi di Distrik Agats dengan jumlah penduduk 25.113 jiwa dan seterusnya distrik Atsy 7.374 jiwa dan distrik Safan 8.691 jiwa, kemudian distrik Sawaerma, dan distrik Fayit dengan penyebaran terendah terjadi di distrik Koroway Buluanop dengan 1.693 jiwa. Demikian pula angka ketergantungan penduduk antara usia produktif dan non produktif sebesar 56,58 yang berarti satu orang usia produktif menanggung 43 orang usia non produktif.

C. Belum Efektifnya Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Stabilitas Ekonomi Makro dan Tingginya Kerawanan Pangan serta Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan Masyarakat.

Saat ini hampir semua kebutuhan Penduduk Asmat, terutama pangan dan papan dominan di supply dari luar Asmat. Analisis KLHS RPJMD (2025-2029) melaporkan kapasitas daya dukung pangan melihat perbandingan antara jumlah ketersediaan pangan (total jumlah energi yang dihasilkan dari komoditas lokal) dibandingkan dengan kebutuhan energi bahan pangan yang diperoleh melalui perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG) penduduk Kabupaten Asmat tiap grid selama setahun. Nilai AKG bagi kebutuhan pangan adalah sebesar 2.150 kkal per kapita/hari. Data survei produksi tanaman perkebunan rakyat di kabupaten Asmat menurut jenis tanaman pada tahun 2021 menunjukkan total jumlah produksi sagu dalam bentuk tepung sagu di 23 distrik sebesar 10.926,50 ton pada total luas area panen sebesar 2.186 hektar dari 4.292 hektar yang tersedia. Jumlah tepung sagu sebesar 10.926,50 setara dengan 26.223.600.000 (kkal) energi yang dibutuhkan penduduk kabupaten Asmat di Tahun 2021. Apabila dihitung jumlah kebutuhan energi penduduk Kabupaten Asmat di tahun 2021, maka terlihat bahwa ketersediaan energi dari bahan pangan sagu yang ada belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dalam pemenuhan energi masyarakat Kab. Asmat. Daya dukung permukiman berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan formula diatas, terlihat bahwa rata-rata DDP > 1, namun dari sisa luas lahan yang tersedia di beberapa distrik sudah sangat sedikit.

D. Rendahnya Akses dan Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta Perlindungan Sosial Terutama bagi OAP dan Kelompok Rentan

Saat ini hampir semua kebutuhan Penduduk Asmat, terutama pangan dan papan dominan di supply dari luar Asmat. Analisa KLHS RPJMD (2025-2029) melaporkan kapasitas daya dukung pangan melihat perbandingan antara jumlah ketersediaan



pangan (total jumlah energi yang dihasilkan dari komoditas lokal) dibandingkan dengan Kebutuhan Energi bahan pangan yang diperoleh melalui perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG) penduduk Kabupaten Asmat tiap grid selama setahun. Nilai AKG bagi kebutuhan pangan adalah sebesar 2.150 kkal per kapita/hari. Data survey produksi tanaman perkebunan rakyat dikabupaten Asmat menurut jenis tanaman pada tahun 2021 menunjukkan total jumlah produksi sagu dalam bentuk tepung sagu di 23 distrik sebesar 10.926,50 ton pada total luas area panen sebesar 2.186 hektar dari 4.292 hektar yang tersedia. Jumlah tepung sagu sebesar 10.926,50 setara dengan 26.223.600.000 (kkal) energi yang dibutuhkan penduduk kabupaten Asmat di Tahun 2021. Apabila dihitung jumlah kebutuhan energi penduduk Kabupaten Asmat di tahun 2021, maka terlihat bahwa ketersediaan energi dari bahan pangan sagu yang ada belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dalam pemenuhan energi masyarakat Kab. Asmat. Daya dukung permukiman berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan formula diatas, terlihat bahwa rata-rata $DDP > 1$, namun dari sisa luas lahan yang tersedia di beberapa distrik sudah sangat sedikit.

E. Belum Optimalnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Konektivitas Daerah

Berdasarkan data tahun 2024, panjang jalan di seluruh wilayah Asmat mencapai 229.819 Km. Dari jalan sepanjang itu selain tentu masih jauh dari konektivitas yang ideal bila dibanding dengan luas wilayahnya, juga kondisinya pun tidak selalu baik. Dari fasilitas listrik, berdasarkan data dinas PUPR 2023, sebesar 78,30 persen rumah tangga di Kabupaten Asmat masih menggunakan pelita/sentir/obor sebagai sumber penerangan rumahnya. Ini berarti penyediaan fasilitas listrik masih jauh. Kendala lain dalam penyediaan fasilitas dasar juga disebabkan kemahalan harga barang di Kabupaten Asmat. IKK Kabupaten Asmat tahun 2024 sebesar Rp 144,67. Artinya dalam setiap harga barang masih diatas harga normal. Kondisi ini sangat membebani masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Asmat.

F. Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan untuk Semua dan Kualitas Pendidikan Belum Merata

Kualitas kesehatan di Asmat masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari angka pesakitan, jumlah tenaga medis. Proporsi masyarakat yang melahirkan ditangani dokter, proporsi puskesmas dan jumlah penduduk. Masih tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu, serta angka harapan hidup yang masih rendah. Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Asmat berada di posisi paling bawah dengan kategori rendah. Persoalannya pada : a). Adanya kesenjangan pendidikan, sistem pendidikan yang tidak merata menyebabkan perbedaan mutu pendidikan antar distrik/wilayah, menciptakan kesenjangan dalam kualitas SDM. Adanya perbedaan akses dan mutu pendidikan menciptakan ketidaksetaraan kualitas SDM antar distrik/wilayah. B). Adanya ketidaksesuaian keterampilan; dimana data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sejumlah besar lulusan mengalami kesulitan menemukan pekerjaan sesuai dengan bidang studi mereka.



G. Belum Optimalnya Pembangunan Berbasis Gender dan Perlindungan Terhadap Anak

Sampai periode 2019–2024, terdapat 7 perempuan dari total 25 anggota DPRD Kabupaten Asmat. Jumlah ini barangkali sedikit untuk ukuran ideal tetapi bagi Kabupaten Asmat merupakan jumlah yang besar. Mengapa?, ditengah tradisi paternalistik yang kental mulai berperannya perempuan dalam publik tentu menjadi kemustahilan. Fenomena yang terjadi di Asmat terkit bagian ini bisa diamati dari Pada pendidikan tingkat sekolah dasar (SD), secara umum tidak terjadi ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Asmat. Dari rasio APS penduduk usia 7-12 tahun antara perempuan dan laki sebesar 88.84 persen. Fasilitas pendidikan yang ada dapat diakses oleh anak laki-laki dan perempuan kesenjangan gender dalam hal pendidikan terjadi pada jenjang pendidikan menengah utamanya terlihat pada angka melek huruf pemuda (usia 15- 24 tahun) dengan gap cukup lebar. Kesimpulannya, perhatian gender dalam pembangunan belum optimal dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Asmat

H. Masih rendahnya Daya Saing Daerah dan Sumber Daya Manusia melalui Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi serta Transformasi Digital.

Indeks Inovasi daerah Kabupaten Asmat dalam penilaian IID 2023 oleh Kemendagri pada angka 1,20. Ini artinya kategori kurang sekali, Indeks Daya Saing daerah (mengutip BRIN), Kabupaten Asmat tercatat memiliki skor IDSD = 2,08, yang termasuk dalam kategori sangat rendah. Jauh dibawa angka nasional 3,43 (dari skal (0-5), dan Provinsi Papua Selatan sekitar 3,2–3,4. Ini artinya infrastruktur dan akses pasar terbatas, adpsi teknologi dan inovasi lokal perlu ditingkatkan, ekosistem bisnis harus dikuatkan. Dari produktifitas ekonomi, meskipun PDRB ADHB per kapita Kab. Asmat pada tahun 2024 mencatat Rp 28,2 juta/org/tahun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,54 persen. Namun penggeraknya banyak dari sektor fisik, seperti konstruksi. Sementara sektor basis seperti rumpun pertanian rendah. Sementara itu tranformasi digital melalui Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, belum tersedia. Bagian ini bisa dipotret dari Persentase Kampung dengan akses internet tahun 2024 baru macapai 42% dan Persentase perangkat daerah yang menerapkan aplikasi sistem informatika dalam pelayanan publik sekitar 83%.

I. Belum optimalnya Potensi Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru dalam pembangunan mengintegrasikan Ekonomi Domestik dan Global, untuk mengerjakan pembangunan Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Secara geografis Kabupaten Asmat pengembangan ekonomi baik dari ekonomi hijau maupun ekonomi biru sangat strategis. Ekonomi biru misalnya, wilayah Asmat diselaputi berbagai sungai dan berada di tepi laut Arafura. Tahun 2024 tercatat Produksi Perikanan Tangkap meancapai 800 ton/tahun sedangkan budi daya 34 ton/tahunhn, sebuah angka yang kecil bila dibandingkan dengan ekspektasi yang sebenarnya. Belum optimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asmat



dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan PDRB berbagai sektor potensial, terutama kontribusi sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor andalan utama. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya upaya peningkatan nilai produksi pada masing-masing sektor dan masih rendahnya daya ungkit penanaman modal, akibat masih sedikitnya realisasi nilai investasi di Kabupaten Asmat. Pada sisi lain, produktivitas tenaga kerja juga menjadi determinan yang perlu diperhatikan, karena semakin besar produktivitas tenaga kerja berdampak positif pada semakin besarnya nilai PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara peran desa dan kota sebagai pusat pertumbuhan masih terkendala dengan keterbatasan transportasi baik dari akses laut, darat maupun udara. Sampai saat ini baru Distrik dekat Ibu Kota Kabupaten yang bisa diakses dengan transportasi darat, selebihnya hampir semua dengan transportasi laut dan udara. Fakta-fakta aktual ini sangat mengganjal dalam mengintegrasikan pembangunan dari skala lokal ke tingkat regional maupun domestik.

J. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Otonomi Khusus

Masih rendahnya angka indikator penyelenggaraan pemerintahan, seperti SAKIP, Integritas Nasional, Pelayanan Berbasis Elektronik dipastikan akan berpengaruh pada Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pembangunan dan Pelaksanaan Otsus. Dari laporan Sekretariat Kabupaten Asmat tercatat nilai LAKIP pada tahun 2019 sebesar 43 dengan predikat C (belum memuaskan) sedangkan pada tahun 2024 beranjak pada skor 70-75 dengan predikat B. Indikasinya membaik dan konsisten sesuai dengan standar nasional. Sementara itu Indeks integritas nasional, Indeks Pelayanan Berbasis Elektronik belum tersedia. Meskipun demikian upaya kearah tersebut sedang dilakukan seperti : **Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023** tentang penggunaan tanda tangan elektronik dan **Peluncuran *e-signature* di lingkungan semua OPD**, dengan dukungan BSSN RI.

K. Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Optimal

Kabupaten Asmat tercatat sebagai salah satu Kabupaten yang selalu tepat waktu melakukan tahapan-tahapan perencanaan sampai dengan proses dan mekanisme. Demikian pula dalam penyelenggaraan proses APBD. Namun dari potret APBD, Pembiayaan pembangunan di Asmat didominasi sumber dari tranfer Pusat. PAD belum bisa diandalkan. Hal ini menjadi permasalahan di Asmat dan juga seluruh Kabupaten di Papua Selatan. Pengelolaan APBD Kabupaten Asmat tergolong terbaik diantara Kabupaten di Papua Selatan. Hal ini ditandai dengan telah 7 (tujuh) kali mendapatkan opini WTP secara berturut-turut mulai tahun 2019 hingga 2024. Meskipun demikian bila dibandingkan dengan kondisi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Asmat yang sedemikian masih tinggi, ini menandakan bahwa masih terdapat permasalahan kualitas dalam pengelolaan belanja maupun perencanaan di Kabupaten Asmat hari ini. Keterbatasan anggaran menyebabkan capaian-capaian di bidang urusan yang terkait dengan SPM tidak bisa dilakukan.



2.8.2. Permasalahan Pembangunan Daerah Menurut Urusan

2.8.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Urusan Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan layanan pendidikan di Kabupaten Asmat masih menghadapi berbagai masalah, baik itu pada akses, kualitas maupun tata kelola pendidikan. Hal tersebut dijabarkan secara singkat sebagai berikut.

Tabel 2. 77 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Modal Manusia/IPM yang masih rendah - Angka Literasi/Numerasi belum menjadi perhatian - Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama - Sekolah masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Daya saing pendidikan kurang optimal - Belum terpenuhinya SPM Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Prasarana Pendidikan belum merata - Tenaga pendidik sering meninggalkan tugas - Penduduk usia 15 tahun banyak yang belum bisa baca tulis - Terbatasnya pendidikan kejuruan dan Perguruan Tinggi (Vokasi) - Angka Partispasi Sekolah masih rendah - Masih rendahnya minat baca siswa - APK PAUD masih rendah

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan merupakan bagian krusial dalam memastikan produktivitas sumber daya manusia agar berkontribusi terhadap upaya pembangunan. maka dapat disampaikan permasalahan pokok dan akar masalah pembangunan kesehatan untuk masa mendatang di Kabupaten Asmat sebagai berikut.

Tabel 2. 78 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
Umur Harapan Hidup Masih Rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Derajat kesehatan masyarakat masih rendah - Belum terpenuhinya SPM Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - belum meratanya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan kesehatan pada masyarakat



Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
		<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat - Masih banyaknya kasus kelahiran yang dibantu oleh tenaga non medis - penanganan stunting masih rendah - tingginya kejadian malaria dan angka kesakitan - Belum optimalnya sediaan farmasi dan alat kesehatan - Masih terdapat disparitas guru antar kota dan pedalaman

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Asmat berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berkaitan dengan dua hal yaitu belum optimalnya akses dan kualitas infrastruktur dasar.

Tabel 2. 79 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
Rasio konektifitas yang masih rendah	Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana, serta kepatuhan terhadap penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Mahalnya biaya pembuatan jalan, akibat kondisi fisik wilayah dicerminkan dari angka IKK Asmat - Masih rendahnya kepatuhan IMB (belum diinisiasi)

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Akses Permukiman layak huni masih menjadi persoalan utama dalam urusan ini. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu belum optimalnya akses masyarakat dalam memiliki rumah layak huni serta minimnya ketersediaan utilitas permukiman. Berdasarkan berbagai kondisi tersebut dapat dipetakan persoalan dalam Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Asmat sebagai berikut.



Tabel 2. 80 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur (skor) - Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) - Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan 	<p>Belum meratanya kepemilikan rumah layak huni pada masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mulai tumbuh pemukiman padat dan kumuh di sekitar pasar atau lokasi perniagaan dan tepi perairan - presentasi hunian yang layak dan tidak layak serta kersediaan daya listrik belum optimal - Belum Optimalnya Penyelenggaraan PSU Perumahan

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat bagian dari urusan wajib yang terkait pelayanan dasar, sehingga menjadi syarat utama sekaligus tujuan dari pembangunan daerah. Pembangunan Kabupaten Asmat masih terdapat permasalahan di bidang ini, misalnya ditunjukkan dengan adanya gangguan pada kondusifitas daerah dan kohesivitas sosial masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dipetakan masalah pokok, masalah dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2. 81 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
<p>Tingkat ketentraman dan ketertiban masyarakat masih rendah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya derajat keamanan, ketertiban umum terindikasi dari tingkat kriminalitas yang masih tinggi - Belum optimalnya penyiapan Mitigasi Bencana bagi daerah-daerah yang memiliki kerawanan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia - Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda-Perda ketentraman dan ketertiban



Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
		<ul style="list-style-type: none"> - Adanya ancaman budaya dari luar yang menggerogoti ketentraman dan kenyamanan masyarakat - Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, terwujudnya akses dan distribusi kesejahteraan yang merata, serta terwujudnya kohesivitas sosial. Kabupaten Asmat masih menghadapi berbagai persoalan sosial. Berikut ini pemetaan masalah pokok bidang sosial serta akar-akar masalahnya.

Tabel 2. 82 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
masyarakat yang memiliki akses terhadap jaminan sosial dasar (Kesehatan dan Ketenagakerjaan) masih rendah	Masih kurangnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Ketergantungan masyarakat KAT pada bantuan pemerintah masih tinggi - Belum optimalnya penanganan terhadap para penyandang distabilitas, anak terlantar, Lansia - Belum optimalnya kelembagaan dan partisipasi penanganan masalah kesejahteraan sosial, (UPTD Panti, dll)

2.8.2.2. Urusan Wajib Tidak terkait Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi di sektor tenaga kerja adalah masih tingginya tingkat pengangguran terbuka. Selain itu tantangan bidang ketenagakerjaan saat ini adalah (i) bagaimana meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat (ii) bagaimana



meningkatkan standar kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; (iii) bagaimana meningkatkan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja; (iv) bagaimana menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha; (v) bagaimana meningkatkan kepatuhan pekerja dan pengusaha terhadap ketentuan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan. Berikut kondisi permasalahan tersebut oleh faktor-faktor tersebut.

Tabel 2. 83 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Efektifnya Perencanaan Tenaga Kerja - Belum Efektifnya Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih tingginya angka pengangguran terbuka - Rendahnya persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi; - Adanya potensi konflik lapangan kerja antara pendatang dan OAP

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dalam rangka meningkatkan derajat hidup masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Perhatian khusus yang diberikan kepada perempuan dan anak disebabkan oleh kecenderungan perempuan dan anak termarginalisasi dalam proses- proses pembangunan. Selain itu, berbagai persoalan menyebabkan perempuan dan anak mengalami kerentanan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Berikut ini merupakan pemetaan masalah hingga akar masalah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 2. 84 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran responsif gender - Rendahnya Kesejahteraan Keluarga (Angka) 	Masih belum munculnya inisiatif pembentukan organisasi dan lembaga yang berperan dalam bidang perlindungan Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya kekerasan terhadap perempuan - Ditengarai masih adanya beberapa Buta Aksara Perempuan yang tersebar di kampung – kampung - Belum optimalnya pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak



3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Ketahanan pangan merupakan prasyarat untuk kedaulatan pangan. Jika masyarakat di Kabupaten Asmat tidak memiliki kedaulatan dalam memproduksi dan menghasilkan kebutuhan pangan maka akan sulit untuk menciptakan ketahanan pangan. Sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Asmat sampai dengan saat ini masih tergolong rendah. Berdasarkan kondisi ketahanan pangan tersebut, dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut.

Tabel 2. 85 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
Belum Tercapainya Kemandirian Pangan Daerah Secara Optimal	Belum optimalnya diversifikasi produk dan ketahanan pangan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya ketersediaan data dan peta daerah rawan pangan - Belum adanya data dan memadainya ketersediaan sumber daya manusia khususnya tenaga penyuluh pertanian dalam meningkatkan ketahanan pangan - Belum Optimalnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

4) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi di bidang lingkungan hidup adalah banyaknya kerusakan lingkungan hidup perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti karena akan meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Asmat, maka dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2. 86 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
Kualitas lingkungan hidup masih rendah	- Tingginya pengrusakan lingkungan dengan pembukaan ladang	- Banyaknya tumpahan/limbah minyak yang bersumber dari



	<p>dengan cara pembakaran hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemantauan kualitas lingkungan 	<p>kapal/jhonson</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya ancaman Erosi, Abrasi pantai dan kebakaran hutan - Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah - Belum optimalnya sarpras penanganan sampah
--	---	--

5) **Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Urusan kependudukan dan pencatatan sipil memegang peran penting dalam mempertegas hak kewarganegaraan dan efektivitas pembangunan. Asmat berperan memfasilitasi peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta meningkatkan akurasi data kependudukan untuk mendukung efektivitas pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dipetakan permasalahan pembangunan di bidang kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Asmat sebagai berikut.

Tabel 2. 87 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
Belum optimalnya pelayanan publik administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kependudukan dan kebutuhan layanan pencatatan sipil - Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya ketersediaan data terpilah OAP - Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjalankan regulasi/aturan kependudukan dari pemerintah - Belum terlaksananya tertib administrasi kependudukan secara merata di kampung & kelurahan - Kepemilikan KTP, KK, Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya belum mencapai target yang diharapkan

6) **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa berperan penting sebagai solusi atas permasalahan kesejahteraan yang masih dialami masyarakat Papua Tengah. Pelaksanaan urusan ini sangat strategis dengan dukungan kebijakan undang-undang desa dan program pemberdayaan masyarakat kampung yang telah berjalan



cukup lama di Kabupaten Asmat sebagai bagian dari prioritas pelaksanaan otonomi khusus. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan di dalam urusan ini, misalnya dibuktikan dengan status kampung mandiri yang masih rendah di Papua Selatan . Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan kampung di Kabupaten Asmat sebagai berikut:

Tabel 2. 88 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
Desa membangun masih rendah	Belum optimalnya upaya pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat kampung	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya perangkat dan organisasi serta penyelenggaraan pemerintahan kampung - Belum memadainya pelaksanaan administrasi pelayanan pemerintahan kampung - Rendahnya kapasitas SDM Pemerintahan kampung (Kepala Kampung, perangkat kampung dan BAMUSKAM) dalam melaksanakan tugas dan peran dan fungsinya sesuai dengan UU Desa

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Permasalahan dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dihadapi oleh Kabupaten Asmat saat ini adalah belum optimalnya perencanaan terkait jumlah dan jarak kelahiran anggota keluarga, hal ini terjadi karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam keluarga berencana. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dipetakan masalah dan akar masalah pengendalian penduduk dan pelayanan KB sebagai berikut.

Tabel 2. 89 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
Kualitas Keluarga masih rendah	Belum optimalnya pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam Ber KB - Belum optimalnya ketersediaan alat kontrasepsi yang



Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
		disosialisasikan dan dilaksanakan bagi masyarakat
		- Belum memadainya jumlah dan kualitas Tenaga Pelayanan dan Penyuluhan KB

8) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Permasalahan dalam urusan perhubungan berkaitan dengan tidak optimalan konektivitas transportasi. Maka dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah urusan perhubungan di Kabupaten Asmat sebagai berikut:

Tabel 2. 90 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
Aksesibilitas yang belum merata,	Rendahnya Aksesibilitas dan mobilitas penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya sarana transportasi laut berupa pelabuhan rakyat, dermaga dan tambatan perahu - Belum memadainya moda transportasi darat dan udara untuk keluar masuk wilayah

9) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Permasalahan pembangunan pada bidang urusan komunikasi dan informatika adalah akses komunikasi dan telekomunikasi yang belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Asmat serta belum optimalnya kualitas kelembagaan dalam rangka peningkatan keterbukaan informasi publik. Maka dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut.

Tabel 2. 91 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
Kepuasan terhadap pelayanan akses digital masih rendah	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal (<i>Smart Governance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya pembangunan BTS berdampak pada jangkauan internet - Penyediaan fiber optic belum maksimal



Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
		berdampak pada pelayanan publik belum seluruhnya berbasis elektronik - Masih rendahnya cakupan pelayanan telekomunikasi seluler dan internet - Belum memadainya sarana dan prasarana infrastruktur komunikasi dan informatika yang lain

10) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi di sektor koperasi dan UKM adalah rendahnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian daerah. Permasalahan yang mengemuka selama ini terkait pengembangan perkoperasian di Kabupaten Asmat sebagai berikut.

Tabel 2. 92 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
Rendahnya kontribusi UMKM dalam PDRB	Terbatasnya akses UMKM dan Koperasi terhadap sumber daya produktif yang meliputi tiga aspek penting, yaitu modal kerja, informasi dan pasar	- Relatif rendahnya jiwa wirausaha di kalangan penduduk - Peran koperasi dalam pengembangan usaha rakyat masih terbatas. - Masih belum berkembangnya usaha-usaha kecil yang memanfaatkan potensi unggulan daerah

11) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi di sektor penanaman modal adalah belum optimalnya kinerja investasi dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Permasalahan ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

Tabel 2. 93 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
Investasi masih kurang	Daya saing daerah masih	- Belum adanya grand



Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
	rendah	<p>design pengembangan investasi daerah yang berbasis pada pengembangan potensi ekonomi daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum memadainya Infrastruktur daerah sehingga belum menarik minat investasi

12) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Kabupaten Asmat memiliki potensi pemuda dan keolahragaan yang cukup besar. Jika potensi tersebut dikelola dengan baik maka pemuda dan olahraga dapat menjadi salah satu pengungkit daya saing Kabupaten Asmat.

Tabel 2. 94 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
Pasrtispasi pemuda dalam pembangunan masih rendah Parisipasi olahraga masih minim	Belum memadainya prestasi dan budaya olahraga di kalangan pemuda	<ul style="list-style-type: none"> - Belum memadainya sarana dan prasarana pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga - Adanya kecenderungan budaya luar yang mempengaruhi moral para pemuda - Belum Optimalnya Penyelenggaraan Kejaraan Olahraga Tingkat Daerah

13) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan statistik bagian dari urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Statistik sebagai urusan wajib memegang peran penting di dalam pembangunan daerah, terutama terkait penyediaan basis data. Permasalahan di bidang statistik sebagai berikut:

Tabel 2. 95 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Statistik

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
Data statistik sektoral dan	Belum optimalnya	- Belum optimalnya



Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
arsipan belum tersedia baik	dokumentasi capaian pembangunan daerah	ketersediaan data data statistik pembangunan daerah - Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia pendataan dan statistik daerah - Belum optimalnya penerapan tata kelola pembangunan berbasis bukti - Belum optimalnya ketersediaan data SIPD

14) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Persandian merupakan bagian dari urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan persandian terkait keamanan informasi daerah. Permasalahan pembangunan daerah yang terkait urusan persandian sebagai berikut.

Tabel 2. 96 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Persandian

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
- Belum optimalnya penyelenggara n persandian untuk pengamanan informasi daerah	- Belum optimalnya koordinasi hubungan sandi antar perangkat daerah - Belum optimalnya manajemen keamanan	- Belum optimalnya pelaksanaan standar operasional prosedur persandian - Belum optimalnya kapasitas sumber daya persandian - Belum optimalnya Keamanan Informasi Berbasis Elektronik

15) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Sebagai daerah dengan keberagaman suku bangsa dan budaya yang tinggi, Kabupaten Asmat memiliki potensi yang besar namun, kondisi tersebut sekaligus menghadapkan Kabupaten Asmat dengan berbagai tantangan dalam pelestarian budaya asli Papua Selatan. Berikut ini pemetaan masalah pokok dan akar-akar masalah urusan kebudayaan.



Tabel 2. 97 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
Indeks Kebudayaan belum tersedia	Penyusunan grand design dan Infrastruktur kebudayaan masih terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Intensitas event budaya yang diselenggarakan, masih rendah - Sinergi pemerintah, perguruan tinggi, komunitas pelaku budaya, belum optimal; - Infrastruktur Kebudayaan masih terbatas - Melunturnya identitas dan nilai - nilai budaya masyarakat yang semakin kuat terjadi dalam globalisasi dan memasuki era milenial

16) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Perpustakaan merupakan kebutuhan sekaligus prasyarat krusial dalam meningkatkan literasi masyarakat. Meskipun demikian, penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kabupaten Asmat masih menghadapi berbagai persoalan di bawah ini.

Tabel 2. 98 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
- Perhatian kepada literasi masih rendah	- Belum tertatanya arsip daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam mendokumentasikan berbagai kekayaan arsip daerah - Terbatasnya tenaga kearsipan yang bersertifikasi profesional - Pengembangan tenaga kearsipan yang belum memadai - Rendahnya minat masyarakat terhadap tenaga profesional kearsipan



2.8.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi di sektor perikanan adalah rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah. Permasalahan ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

Tabel 2. 99 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
<ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi sector perikanan dan kelautan terhadap PDRB rendah - Angka NPN masih rendah 	Belum optimalnya pengelolaan produksi perikanan dan kelautan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketergantungan nelayan terhadap bantuan-bantuan kepada pemerintah masih tinggi - lemahnya kemampuan masyarakat nelayan dalam mengusahakan bidang perikanan - Teknologi usaha pasca tangkap relatif tertinggal - Peran dan keterbatasan tenaga Penyuluh Perikanan

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Dengan beragamnya potensi wisata di Kabupaten Asmat, seharusnya dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi Asmat, namun dari data terlihat bahwa Jumlah tamu/wisatawan WNA/WNI ke Kabupaten Asmat masih terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah urusan pariwisata sebagai berikut.

Tabel 2. 100 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih rendah	Infrastruktur penunjang pariwisata sampai saat ini belum memadai, berdampak pada kunjungan wisatawan fluktuatif	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya media promosi pariwisata - Belum optimalnya Pengembangan destinasi dan objek pariwisata ikutan dari Festival Asmat - Belum tersedianya fasilitas penunjang pariwisata



Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
		- Sumber daya manusia dan aparatur pelaku wisata yang terbatas

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sector yang sangat penting. Salah satu komponen dalam membentuk PDRB adalah sektor pertanian. Oleh karena itu dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah pertanian sebagai berikut.

Tabel 2. 101 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
<ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi Sektor (rumpun) Pertanian dalam PDRB Masih rendah - Angka NPT masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum memdainya kapasitas SDM Petani dan peternak 	<ul style="list-style-type: none"> - Skala Usaha pertanian, peternakan dan perkebunan masyarakat yang masih subsisten - Belum memadainya kuantitas dan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, peternakan dan perkebunan - Belum berkembangnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam bidang pertanian, peternakan dan perkebunan

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Sektor perdagangan di kabupaten Asmat belum menunjukkan peningkatan yang baik. Rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah menjadi salah satu masalah di Kabupaten Asmat. Berdasarkan kondisi sektor perdagangan tersebut maka dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut.

Tabel 2. 102 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
<ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi Perdagangan dalam PDRB masih Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan terutama di wilayah distrik dan kampung-kampung 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pelaku dagang yang diperankan oleh pelaku lokal - Rendahnya keterampilan pelaku dagang dari



Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
		bahan lokal yang bernilai jual ke pasaran regional atau ekspor - Panjangnya rantai distribusi barang yang berpengaruh pada harga barang yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain - Belum optimalnya upaya pengawasan perdagangan dan peningkatan iklim usaha perdagangan

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Sektor Perindustrian merupakan salah satu komponen PDRB. Rendahnya kontribusi sektor perindustrian disebabkan karena keterbatasan ketersediaan dan kualitas sarana pendukung distribusi barang industri yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asmat. Berdasarkan kondisi sektor perindustrian tersebut maka dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut.

Tabel 2. 103 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
- Kontribusi sektor Industri dalam PDRB masih rendah	- Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana Industri terutama di wilayah distrik dan kampung-kampung	- Belum optimalnya upaya Revitalisasi pasar tradisional - Pertumbuhan sub sektor industri melambat - Belum ada usaha perindustrian yang dikembangkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat - Belum optimalnya ketersediaan dan pengelolaan data terkini sektor industri



2.8.2.4. Urusan Pendukung Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat daerah dan sekretariat DPRD dan MRP serta beberapa perangkat daerah lainnya. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan berupaya memberi keyakinan bahwa seluruh sektor pemerintah menjalankan agenda pembangunan secara terpadu dan terkordinasi. Berdasarkan hal tersebut dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut.

Tabel 2. 104 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
- Pelayanan Publik belum maksimal	- Belum memadainya kelembagaan organisasi pemerintahan daerah yang miskin struktur tapi kaya fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya Implementasi SAKIP dan ketersediaan data sektor - Belum optimalnya capaian kinerja pembangunan - Penegakan aturan hukum daerah untuk kewibawaan daerah dan mengatur serta mensejahterakan rakyat - Belum optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi dan penganggaran DPRD yang mendorong terciptanya tatanan pemerintahan yang baik

2) Sekretariat DPRD

Urusan kesekretariatan terkait pelaksanaan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga DPRD dan kepala daerah. Persoalan pembangunan daerah terkait urusan kesekretariatan:

Tabel 2. 105 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Sekretariat DPRD

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
---------------	---------	--------------



- Pelaksanaan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal	- Pelaksanaan fungsi DPRD belum terlaksana secara optimal	- Belum optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi dan penganggaran DPRD yang mendorong terciptanya tatanan pemerintahan yang baik - Belum optimalnya fasilitasi proses legislasi daerah perdasus/perdasi guna menjawab persoalan daerah dan kebutuhan pembangunan
---	---	--

2.8.2.5. Urusan Penunjang Pemerintahan

1) Perencanaan Daerah

Urusan perencanaan daerah terkait dengan kinerja perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya optimal. Berikut permasalahan pembangunan daerah terkait urusan Perencanaan:

Tabel 2. 106 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan

Maslah Pokok	Masalah	Akar masalah
- Kinerja Perencanaan belum optimal	- Jadwal perencanaan dan penganggaran tidak dipedomani	- Belum tertatanya seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik antar sektoral maupun perwilayahan pembangunan - Belum memadainya ketersediaan data-data pembangunan daerah - Belum optimalnya implementasi SIPD untuk perencanaan

2) Penelitian dan pengembangan

Urusan perencanaan terkait perencanaan daerah dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan, perencanaan wilayah dan tata ruang, serta berbagai perencanaan sektoral berbasis penelitian dan pengembangan. Permasalahan terkait urusan perencanaan, penelitian, dan pengembangan sebagai berikut:

Tabel 2. 107 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penelitian, dan Pengembangan

Maslah Pokok	Masalah	Akar masalah
- Belum optimalnya	- Penelitian dan Pemafaatan	- Masih terbatasnya aparatur dalam



pemanfaatan penelitian dan pengembangan inovasi daerah.	hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah belum optimal dilakukan	<p>menyusun penelitian dan pengembangan dalam bidang sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan hasil litbang guna mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya diterapkan - Hilirisasi hasil litbang dan inovasi belum optimal untuk mendukung daya saing daerah
---	--	---

3) Keuangan Daerah

Urusan keuangan terkait kinerja pendapatan daerah, alokasi belanja, efektivitas penggunaannya bagi kebutuhan pembangunan, serta pelaporan keuangan. Berikut permasalahan pembangunan daerah terkait urusan keuangan.

Tabel 2. 108 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keuangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
- Kinerja Penganggaran belum optimal	- Capaian Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP, MRI, dan IEPK masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen pengelolaan asset masih perlu ditingkatkan - Masih adanya pelanggaran dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah - Belum Optimalnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah - Belum terbangunnya unit usaha BUMD dalam pengelolaan potensi unggulan daerah

4) Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Pembangunan daerah terkait urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan merupakan upaya pelaksanaan siklus manajemen kepegawaian. Manajemen kepegawaian secara garis besar terkait peningkatan profesionalitas aparatur, peningkatan kualitas administrasi kepegawaian, serta penempatan aparatur sipil negara berbasis pada sistem merit. Pelaksanaan urusan ini di Kabupaten Asmat masih



mengalami beberapa permasalahan.

Tabel 2. 109 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
- Belum optimalnya kualitas manajemen kepegawaian.	- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan	- Belum optimalnya implementasi manajemen ASN - Kompetensi ASN belum sesuai dengan bidang pekerjaan - Belum berkembangnya sistem reward dan punishment dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah - Belum berkembangnya sistem digitalisasi ASN

2.8.2.6. Urusan Pengawasan Pemerintahan

Urusan pengawasan terkait integritas aparatur dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Permasalahan pembangunan terkait urusan pengawasan, yaitu:

Tabel 2. 110 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Inspektorat Daerah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar masalah
- Belum optimalnya pengawasan internal OPD dan implementasi Zona Integritas	- Belum optimalnya tindak lanjut temuan temuan BPK	- Belum optimalnya kapabilitas APIP dan aparatur auditor - Belum terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran Pemerintah daerah dan OPD - Belum memadainya penanganan aspirasi masyarakat atas Pengaduan terhadap proses pembangunan



2.8.2.7. Urusan Kewilayahan

1) Kecamatan/Distrik

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan. Daerah kabupaten/kota membentuk Distrik dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kampung/ kelurahan. Berdasarkan hal tersebut dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagai berikut.

Tabel 2. 111 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Distrik

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
- Belum optimalnya pengembangan pelayanan tingkat Distrik secara prima dan profesional	- Belum optimalnya kapasitas aparatur distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	- Belum optimalnya Fungsi pembinaan dan pengawasan Distrik terhadap pelaksanaan pembangunan Kampung - Belum optimalnya kualitas kelembagaan distrik - Rendahnya kualitas perencanaan di tingkat distrik hingga kampung - Masih terbelakangnya kampung-kampung terluar

2.8.2.8. Urusan Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asmat membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan dalam melaksanakan Pengembangan Politik, Pembinaan Kesatuan Bangsa, Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik , Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi Kesekretariatan, Bidang Ketahanan Bangsa, Politik Dalam negeri dan Organisasi kemasyarakatan, serta Kewaspadaan Daerah.

Tabel 2. 112 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Distrik

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
- Belum Optimalnya Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	- Belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat	- Masih rendahnya kualitas pendidikan politik masyarakat - Masih rendahnya kesadaran bela Negara



Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		- Masih rendahnya koordinasi forum pembauran kebangsaan

2.8.3. Isu Strategis Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa depan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan; gambaran umum kondisi daerah; isu internasional; isu nasional dan isu regional.

2.8.4. Isu Strategis Internasional

2.8.4.1. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Seiring dengan berakhirnya MDGs, yaitu 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio+20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs (*sustainable development goals*) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional. Setelah lebih dari satu tahun perundingan konsultatif yang inklusif dan intensif, Kelompok Kerja Terbuka Majelis Umum untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengajukan 17 tujuan spesifik dengan 169 target yang saling berkaitan. Negara-negara Anggota PBB telah menyepakati bahwa agenda yang disusun oleh Kelompok Kerja Terbuka akan menjadi basis utama untuk proses antar-pemerintah pasca-2015.

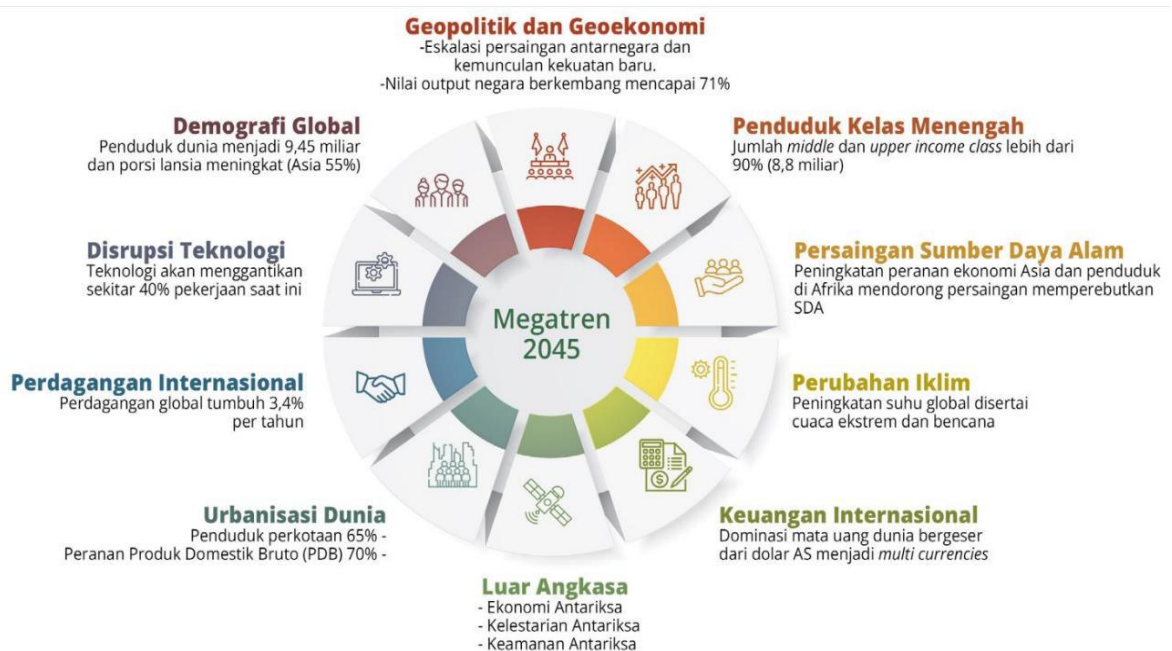
1. Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di manapun;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan memajukan pertanian berkelanjutan
3. Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia
4. Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang



- berkelanjutan bagi semua
7. Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua
 8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua
 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi
 10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara Negara-negara
 11. Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang keberlanjutan
 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya
 14. Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudera, laut dan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan
 15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
 16. Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2.8.4.2. Megatren Dunia

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang





sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disruptsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi (i) perkembangan demografi global, (ii) geopolitik dan geoekonomi, (iii) disruptsi teknologi, (iv) peningkatan urbanisasi dunia, (v) peningkatan peran perdagangan internasional, (vi) perubahan keuangan internasional, (vii) peningkatan penduduk kelas menengah (middle class), (viii) peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, (ix) perubahan iklim, dan (x) pemanfaatan luar angkasa (space economy). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 63 Megatren Global 2045

Sumber: RPJPN 2025-2045 (Bappenas)

Megatrend global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disruptsi. Dari 10 (sepuluh) megatrend global diperkirakan 9 (sembilan) tantangan yang akan dihadapi Asmat menuju peradaban Unggul 2045, yaitu:

A) Perkembangan Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global.

B) Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik Kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Selanjutnya, sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang. Dengan kebijakan yang tepat,



negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Perekonomian global pada tahun 2050 pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015.

C) Disrupsi Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Disrupsi teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Disrupsi teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Disrupsi teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Disrupsi teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi.

D) Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di Kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari.

E) Perdagangan Internasional

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Kolaborasi produksi bersama internasional (global production networks/GPN) dan rantai pasok global (global value chain/GVC) semakin menguat dan terdiversifikasi. Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang.

F) Keuangan Internasional

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*).

G) Penduduk Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8



miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia.

H) Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang.

I) Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - The Triple Planetary Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia.

J) Pemanfaatan Luar Angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang.

2.8.4.3. *Green Economy dan Blue Economy*

Pembangunan ekonomi global saat ini sudah mulai bergeser ke konsep *green economy*, yaitu ekonomi ekologis dan *blue economy*, yakni ekonomi biru. Pengertian *green economy* dan *blue economy* merujuk pada ekonomi yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekologi sehingga praktiknya sangat memperhitungkan pengurangan resiko terhadap kelestarian lingkungan. Ekonomi ekologis tidak berarti ekonomi yang berbasis sektor lingkungan atau agraris melainkan ekonomi yang tidak mengesampingkan resiko kerusakan lingkungan dan ekologi. Misalnya perekonomian berbasis industri dengan meminimalkan penggunaan bahan bakar minyak dan gas, dan mereduksi polusi. Prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam *green economy* dan *blue economy* tersebut menjadi pedoman perubahan arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada keberlanjutan ekologi. Misalnya, perekonomian yang berbasis industri harus meminimalkan dampak lingkungan. Bahkan pembangunan berbasis ekonomi agraris pun harus direncanakan dengan pertimbangan dampak ekologis yang minimalis. Hal penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi hijau tersebut adalah dalam level perencanaan pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan minimalisir dampak lingkungannya.

2.8.4.4. Isu Nasional

A. Kebijakan Aksacita dan Progran Prioritas Presiden

Kebijakan Aksacita merupakan poner dari program Pasangan Presiden terpilih



Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabumuraka. Kebijakan Aksacita ini menurunkan 17 (tujuh belas) program prioritas. Adapun kebijakan aksacita dimaksud, yaitu:

1. Memperkokoh ideology pancasila, demokrasi dan HAM
2. Memantapan sistem pertahanan keamanan Negara melakukan swasembada pangan, energy, air, eknomi kreatif, ekonomihijau dan biru
3. Meningkatkan lapangan kerja dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat SD sains, tenologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peren perempuan. Pemuda, dan penyandang distabilitas
5. Melanjutkan hilirasasi dan industrialisasi
6. Membangun desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta pencegahan dan pemerantasan korupsi dan narkoba
8. Menyelaraskan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar ummat beragama untuk mencapaimasyarakat yang adil dan

Sedangkan 17 (Tujuh Belas) Program prioritas, yaitu:

1. Swasembada Pangan, Energi dan Air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan Negara
3. Reformasi politik, Hukum dan Birokrasi
4. Pencegahan dan pemeberantasan korupsi
5. Pemberantaan kemiskinan
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
8. Penguatan pendidikan, sains, tenologi dan digitalisas
9. Penguatan pertahanan dan keamanan Negara dan hubungn internasional
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan anak serta penyandang disablitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin kersediaan pupuk benih pestisida langsung ke petani
13. Menjamin rumah murah da sanitasi untuk mesyarakt desa
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi penguatan UMKM dan IKN
15. Melanjutkan hilirasasi dan industrialiasai berbasiskna SDA dan maritime untuk membuka lapangan kerja seluas-luasna mewujudkan kadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antar ummat beragaa, kebebasan dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga

B. Program Quick Win yang didalamnya terdapat Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis kini tengah dilaksanakan. Program ini merupakan bagian dari qick win yang harus dilaksanakan. Program ini diharapkan dalam 100 hari



sudah terimplementasi, yakni:

- 1) Program Makan Siang Bergizi Gratis (Rp 71 T);
- 2) Perikasaan kesehatan gratis untuk tensi, gula darah, foto rontgen, dan penyakit katastropik (Rp 3,2 T);
- 3) Pembangunan Rumah Sakit Lengkap berkualitas dengan meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah dari tpe D menjadi tipe C dan prasarana serta alat kesehatan (Rp 1,8 T);
- 4) Renovasi 22 ribu sekolah (Rp 20 T) ;
- 5) Membangun sekolah unggulan terintegritas (Rp 4 T);dan
- 6) Program lumbungan pangan nasional.daerah dan desa (Rp 15 T).

Selain Makan Bergizi Gratis dalam paket Qisk Win 100 hari ini juga terdapat program sekolah rakyat dan Koperasi Merah Putih.

C. Papua Selatan sebagai Lokasi Program Strategi Nasional

Penunjukan Papua Selatan sebagai lokasi pangan nasional telah dimulai dari beberapa Presiden. Di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono paket ini dikenal dengan MIFEE, yakni **Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)** atau **Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke (PPETM)** merupakan proyek untuk penggunaan area besar untuk industri pertanian kelapa sawit dan tanaman pangan di Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia. Pada era Presiden Joko Widodo kebijakan ini dilanjutkan dengan fokus menjadikan Merauke dan sekitarnya sebagai pada penyediaan pangan nasional. Tidak hanya Kabupaten Mappi juga ditetapkan sebagai lokasi nasional pengembangan tanaman sagu.

Di era Presiden Prabowo Papua Selatan sejadikan seabagai Pusat Startegi Kebijakan Nasional dengan lokasi kurang lebih 1.200 juta Ha, sebagai lokasi pengembangan padi dan tebu nasional. Selain kebijakan-kebajikan tersebut, Papua Seatan juga telah lama menjadi lokasi perkebunan oleh para investor dalam penanaman kelapa sawit.

2.8.4.5. Isu Strategis Kabupaten Lainnya Yang Berbatasan

Secara geografis wilayah Kabupaten Asmat dikelilingi oleh 5 (lima) kabupaten lainnya yang berdekatan, yaitu Kabupaten Mappi , Nduga, Yahukimo, Mimika dan Boven Digoel. Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan di Kabupaten – kabupaten tersebut, ditemukan adanya kesamaan substansi misi pembangunan sebagai berikut. Berdasarkan pengamatan, teridentifikasi bahwa ada 3 (tiga) aspek/bidang pembangunan yang perlu mendapat perhatian dalam perumusan RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2030, terkait dengan misi yang dilaksanakan oleh beberapa kabupaten berbatasan. Ketiga bidang yang dimaksud



adalah: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) infrastruktur, (4) ekonomi kerakyatan, dan (5) good and clean governance. Setiap daerah kabupaten yang berbatasan dengan Asmat, semuanya memiliki prinsip-prinsip pembangunan ekonomi yang sama, yaitu sistem ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi lokal dan berkelanjutan. Adanya kesamaan ini karena daerah-daerah tersebut mempunyai keunggulan komparatif yang tidak berbeda jauh satu sama lainnya dimana seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia adalah milik rakyat, Oleh sebab itu pengelolaannya harus dari rakyat dan untuk rakyat. Adanya ketimpangan pembangunan di wilayah Asmat masih sangat dirasakan sekali. Oleh karena itu dalam upaya membuka keterisolasian yang dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah pada kantong-kantong kemiskinan, peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi, khususnya transportasi darat menjadi misi bersama dari kelima daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Asmat tersebut. Sudah tentu hal ini patut diperhatikan oleh Kabupaten Asmat dalam merumuskan RPJMD tahun 2025-2029.

2.8.5. Isu-Isu Strategi Pembangunan Asmat

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, dan berbagai isu strategis yang telah dijelaskan sebelumnya, serta didukung dengan hasil kajian teknokratik, berikut ini disampaikan tantangan, peluang dan harapan untuk Asmat di Tahun 2029 yang dibagi menurut aspek-aspek pembangunan, berupa tantangan dan peluang.

2.8.5.1. Perekonomian, Kependudukan Dan Lingkungan

Adapun tantangan dalam pengembangan perekonomian, kependudukan dan lingkungan di Kabupaten Asmat diperlukan adanya pengembangan ekonomi daerah. Dengan meningkatkan potensi ekonomi daerah, memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal, dan menciptakan lapangan kerja dapat mengurangi tingkat pengangguran. Selanjutnya, melakukan diversifikasi ekonomi. Ketergantungan pada sektor ekonomi tunggal, seperti konstruksi, dapat membuat kabupaten rentan terhadap fluktuasi inflasi. Diversifikasi ekonomi dapat membantu mengurangi risiko ini. Perlu dilakukan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Jika pertumbuhan penduduk terlalu cepat, dapat menempatkan tekanan pada sumber daya dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. mitigasi penduduk dapat mempengaruhi distribusi tenaga kerja, layanan kesehatan, dan pendidikan serta ada tantangan terkait dengan mobilitas penduduk dan penguasaan lahan. Bonus demografi dapat menyebabkan mobilitas penduduk yang tinggi, termasuk migrasi internal dan eksternal. Ini dapat memerlukan manajemen migrasi yang efektif. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif memerlukan investasi besar dalam pendidikan dan pelatihan agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi pada ekonomi.

Meningkatnya angkatan kerja bisa menjadi aset besar jika terdapat cukup peluang pekerjaan. Namun, jika ekonomi tidak mampu menyerap semua angkatan kerja baru, dapat menyebabkan pengangguran yang tinggi. Dengan peningkatan jumlah penduduk, diperlukan infrastruktur yang memadai, termasuk fasilitas kesehatan,



transportasi, dan perumahan. Bonus demografi akan diikuti oleh penuaan penduduk ketika generasi tersebut memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, perlu perencanaan yang baik untuk sistem pensiun dan kesejahteraan agar dapat mengakomodasi populasi yang lebih tua. Kabupaten Asmat terletak di Provinsi Papua Selatan yang kaya akan sagu, menghadapi tekanan besar dari aktivitas deforestasi yang dapat disebabkan oleh pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan komoditi investasi lainnya. Ini dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang belum memadai terutama di daerah sulit dijangkau. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, termasuk pelatihan keterampilan, agar masyarakat memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja. Memperkuat sistem kesehatan, termasuk aksesibilitas layanan kesehatan dasar, pencegahan penyakit, dan peningkatan kondisi sanitasi. Hal-hal tersebut menjadi salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan dapat menjadi masalah sosial yang signifikan. Juga tantangan pengelolaan dan pelestarian warisan budaya lokal, yang memiliki keragaman etnis, bahasa, dan adat istiadat, seperti di kabupaten Asmat. Tantangan selanjutnya terkait penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi. Penyediaan pendidikan dan pelatihan untuk membantu masyarakat mengadopsi teknologi baru. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan membangun kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.

Sedangkan peluangnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang memadai. Potensi ekonomi yang terkait dengan pertanian, perikanan dan kelautan. Pengembangan pertanian berkelanjutan dan diversifikasi produk pertanian menjadi peluang. Kabupaten Asmat juga memiliki daya tarik wisata alam atau budaya, pengembangan sektor pariwisata bisa menjadi peluang ekonomi. Peluang dalam pengembangan industri dan manufaktur lokal dapat meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan seperti pengolahan sumber daya alam setempat atau produksi barang dan jasa lainnya. Faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, struktur demografis, dan kebutuhan pasar lokal menjadi peluang pekerjaan di Kabupaten Asmat. Bonus Demografi dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi seperti peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan peningkatan tingkat tabungan dan investasi. Dengan jumlah besar orang usia produktif, ada potensi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, karena lebih banyak orang dapat berkontribusi pada kegiatan ekonomi. Bonus demografi dapat mendorong pertumbuhan konsumsi karena lebih banyak orang akan memiliki pendapatan yang relatif tinggi dan dapat menghabiskan lebih banyak. Dengan lebih banyak orang usia produktif, ada potensi peningkatan tingkat tabungan. Jika tabungan ini diarahkan pada investasi produktif, ini dapat memberikan dorongan tambahan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Bonus demografi dapat menyertakan banyak orang muda yang cenderung lebih inovatif dan kreatif. Ini dapat memberikan dorongan untuk perkembangan teknologi dan inovasi di berbagai sektor.

Kabupaten Asmat memiliki potensi untuk konservasi alam dan pelestarian



ekosistem yang unik. Upaya pelestarian hutan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi peluang. Peningkatan kesadaran akan isu sampah dan pengelolaan sampah dari plastik yang efektif dapat menciptakan peluang untuk usaha daur ulang. Pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, air atau hidroelektrik bahkan pasang surut menjadi peluang untuk menciptakan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Sejumlah SD, SMP dan SMA merupakan komitmen serius pemerintah daerah kabupaten Asmat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya angka Rata-Rata Lama Sekolah meningkat dari 4,71 tahun pada tahun 2017 menjadi 5,82 tahun pada tahun 2024. Kemudian untuk Harapan Lama Sekolah juga menunjukkan peningkatan dari 8,12 tahun pada tahun 2017 menjadi 9,71 tahun pada tahun 2024. Kabupaten Asmat memiliki beberapa puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan dasar seperti pelayanan medis, imunisasi, dan perawatan kesehatan masyarakat. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Asmat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan namun berjalan lambat dan masih dibawah angka maksimum. Pada tahun 2017 AHH sebesar 56,32 dan meningkat pada tahun 2024 sebesar 68,05 artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Asmat akan bertahan hidup sampai dengan usia 58,77 tahun. Selanjutnya, tingginya minat dan bakat masyarakat dalam mengembangkan seni dan budaya lokal untuk memperkuat identitas dan warisan budaya di Kabupaten Asmat.

2.8.5.2. Infrastruktur Dasar, Perhubungan, Teknologi Komunikasi Dan Informasi

Tantangan dalam bidang infrastruktur perhubungan, dan pengembangan TIK diawali dari keterbatasan akses air bersih dan sanitasi, listrik, terutama di daerah kampung. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Infrastruktur yang terbatas atau tidak memadai, juga menjadi hambatan untuk pengembangan ekonomi dan akses ke layanan dasar. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan terkait keterbatasan sarana transportasi terutama di daerah terpencil, kondisi jalan alam yang penuh lumpur serta kurangnya konektivitas antarwilayah. Keterbatasan jaringan telekomunikasi, khususnya di daerah terpencil. Serta tantangan aksesibilitas dan kecepatan internet. Kurangnya literasi digital dan aksesibilitas terhadap teknologi informasi.

Sedangkan peluangnya antara lain berdasarkan data tahun 2024, panjang jalan di seluruh wilayah Asmat mencapai 229.819 Km. Berdasarkan pengelolaannya, seluruhnya merupakan jalan Kabupaten. Berdasarkan jenis permukaannya 27,45 persen atau sepanjang 63.095 Km dari seluruh jalan di wilayah Asmat merupakan jalan dalam kondisi baik, 0,42 persen atau 0,955 Km dengan kondisi sedang, 0,10 persen atau 0,288 Km dengan kondisi rusak. Hal ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah kabupaten Asmat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan infrastruktur yang berkualitas. Tentunya peluang kedepan pemerintah



kabupaten dalam membuka akses bagi daerah yang terisolasi dengan pengembangan jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memfasilitasi transportasi barang dan orang serta memberikan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, listrik, air bersih dan sanitasi bagi masyarakat masih sangat dimungkinkan dengan adanya ketersediaan anggaran dan SDM yang berkompeten. Kabupaten Asmat juga memiliki peluang dalam peningkatan akses listrik dan pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan akses internet dan layanan telekomunikasi untuk mendukung konektivitas digital dan perkembangan ekonomi berbasis teknologi. Selanjutnya peluang dalam bidang perhubungan, dimana kabupaten Asmat memiliki sungai yang dapat dilalui kapal. Hal ini tentunya menjadi peluang dalam meningkatkan distribusi barang dalam meningkatkan pembangunan di kabupaten Asmat dan untuk mendistribusikan kebutuhan masyarakat. Sehingga pemerintah kabupaten Asmat perlu melakukan pengembangan pelabuhan atau dermaga sungai, termasuk tambatan perahu serta peningkatan aksesibilitas melalui jalur sungai. Toleransi yang tinggi di kabupaten Asmat menjadi salah satu peluang dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kesadaran masyarakat kabupaten Asmat dalam hidup berdampingan dengan suku maupun agama lain serta adanya Polres memberikan jaminan ketertiban dan ketertiban serta keamanan di kabupaten Asmat. Dengan adanya dana desa dan alokasi dana desa tentunya menjadi peluang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. Hal ini tentunya perlu didukung dengan pengelolaan yang baik sehingga dapat mencapai target yang di harapkan. Peluang dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mencari peluang untuk diversifikasi sumber pendapatan daerah, seperti pengembangan sektor pariwisata, investasi, atau proyek-proyek strategis lainnya. Mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah tanpa memberatkan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi keuangan daerah (SIKD), dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan anggaran, pemungutan pajak, dan pelaporan keuangan. Implementasi e-procurement dan e-budgeting dapat mengurangi potensi kecurangan dan meningkatkan transparansi.

2.8.5.3. Tata Kelola

Tantangan dalam tata kelola pemerintahan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan dan program pembangunan. Beberapa tantangan tata kelola di Kabupaten Asmat antara lain ketegangan antar kelompok etnis atau sosial dapat menjadi sumber konflik. Persoalan pemukiman dan kepemilikan tanah dapat menimbulkan konflik antara masyarakat dan dapat memicu masalah keamanan.

Persaingan atau konflik terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, seperti hutan atau tambang. Ketidakpuasan terhadap pemerintah lokal atau nasional bisa menjadi sumber ketidakstabilan. Isu-isu politik dan tuntutan masyarakat dapat memainkan peran penting. Ketidaksetaraan ekonomi dan kemiskinan dapat



menciptakan kondisi yang mendukung konflik. Tantangan keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis untuk melaksanakan program pembangunan desa. Tantangan dalam meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat desa. Program pemberdayaan ekonomi lokal dan diversifikasi mata pencaharian dapat diperlukan. Tantangan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di desa-desa. Faktor-faktor seperti ketegangan sosial atau perbedaan budaya di dalam masyarakat dapat mempengaruhi tata kelola pembangunan desa. Keterbatasan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama karena keterbatasan sumber daya ekonomi. Saat ini ketergantungan pada sumber pendanaan transfer dari keuangan pusat masih tinggi. Tantangan dalam melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait anggaran. Keterlibatan ini untuk memastikan program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Menanggulangi korupsi dengan menerapkan sistem tata kelola yang baik dan transparan serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Implementasi otonomi daerah menjadi tantangan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan alokasi anggaran sehingga Pemerintah kabupaten Asmat harus menerapkan prinsip otonomi daerah dengan baik dan efisien, termasuk pengelolaan anggaran, optimalisasi PAD, sumber daya manusia, dan kebijakan lokal.

Kongkritisasi dari penentuan isu strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Asmat 2025-2029 karena akan menjadi dasar perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program daerah. Hasil penelaahan terhadap berbagai aspek menghasilkan rumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029, sebagai berikut ini:

1. belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi & implelementasi otsus;
2. masih rendahnya akses & mutu pemenuhan kebutuhan dasar;
3. belum optimalnya pendayagunaan potensi sda secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi inklusif, serta mendorong berkembangnya ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal;
4. pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang belum memadai dan merata seperti sarana moda transportasi dan perumahan;
5. tingginya potensi bencana yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya mitigasi & adaptasi yang komprehensif;
6. adanya penurunan kualitas lingkungan hidup serta belum optimalnya upaya konservasi & tata kelola tata ruang;
7. masih rendahnya pemenuhan dasar dan partisipasi masyarakat serta komunitas adat dalam pembangunan;
8. kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan yang masih rendah;
9. pertumbuhan penduduk belum terkendali dan orang bekerja semakin banyak
10. kondisi fisik geografis wilayah yang berlumpur dan penyebaran demografi penduduk yang sporadik sampai wilayah-wilayah terpencil;
11. ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi serta efisiensi dan efektifitas sumber-sumber pad dan APBD; dan



12. kerjasama daerah baik secara vertikal dengan pemerintah pusat dan provinsi maupun secara horizontal dengan kabupaten sekitarnya serta kerjasama dengan stakeholder pembangunan lainnya.

2.8.6. Kesimpulan Isu Strategis Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi daerah, permasalahan utama, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Asmat mencerminkan tantangan dan peluang yang perlu dijawab secara terpadu dalam lima tahun mendatang. Pemerintah Kabupaten Asmat perlu menyeimbangkan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan wilayah, ketahanan sosial ekonomi, serta pelestarian lingkungan hidup.

Isu strategis yang dihadapi mencakup peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan adaptif terhadap transformasi digital, serta penguatan ketahanan lingkungan dan penerapan ekonomi hijau dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana.



Tabel 2. 113 Isu Strategis

POTENSI	PERMASALAHAN	ISU KLHS	GLOBAL	ISU LINGKUNGAN DINAMIS NASIONAL	REGIONAL	ISU DAERAH
1. GEO STRATEGIK 2. BIOTIK DAN ABIOTIK 3. JASA LINGKUNGAN	1. Perkonomin, Kependudukan dan Lingkungan 2. Sosial Budaya 3. Tata Kelola	1. Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS-RPJMD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 2. Dokumen RTRW Provinsi Papua Selatan 3. Dokumen Perencanaan dengan wilayah perbatasan lainnya	1. Milenium Development Goals 2. Megatrend Dunia 2045 (Perkembangan demografi global (Geopolitik dan geoekonomi; Disrupsi teknologi; Peningkatan urbanisasi dunia; Peningkatan penduduk kelas menengah (<i>middle class</i>); Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, Perubahan iklim; dan Pemanfaatan luar angkasa (<i>space economy</i>). 3. Blue /Green economic 4. MEA (Masyarakat Ekonomi Asran)	1. Isu Strategik Dokumen RPJMN/NWACITA 2. Isu Strategik Dokumen (RIPPP) Tahun 2022-2041 3. Isu Strategi Papua Selatan sebagai Proyek Strategi Nasional	1. Isu Strategi Kajian RPJMD Provinsi Papua Selatan 2. Isu Strategi Dokumen RPJMD Provinsi Papua Selatan 3. Isu Strategi Dokumen RAPP Tanah Papua 2021-2041	1. Isu Strategis RPJMD ASMAT Tahun 2025-2045 2. Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana (KLHS-RPJMD) Kab. Asmat 2025-2029 3. Isu Kewilayahan dalam RTRW Kab. Asmat Menyimpulkan : a. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan & Implementasi OTSUS; b. Masih Rendahnya Akses & Mutu Pemenuhan Kebutuhan Dasar, c. Belum Optimalnya Pendayagunaan Potensi SDA d. Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Yang Belum Memadai Dan Merata e. Tingginya Potensi Bencana f. Adanya Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup g. Masih Rendahnya Pemenuhan Dasar Dan Partisipasi Masyarakat Dan Komunitas Adat h. Kualitas Hidup Dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Yang masih rendah i. Pertumbuhan Penduduk belum Terkendali j. Kondisi fisik geografis wilayah yang berlumpur dan penyebaran geografis penduduk yang sporadik k. Ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi serta efisiensi dan efektivitas sumber-sumber PAD dan APBD. l. Kerjasama daerah baik secara vertikal dengan pemerintah pusat dan provinsi maupun secara horizontal dengan kabupaten sekitarnya serta kerjasama dengan stakeholder pembangunan lainnya.



2.9. Telaah Dokumen Perencanaan terkait

2.9.1. Penelaahan terhadap Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau, sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam kerangka pikir pembangunan nasional, membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025- 2045. Visi dan Misi abadi Negara yaitu Negara Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur menjadi acuan utama dalam setiap pembangunan yang kemudian diterjemahkan ke dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yaitu “Kesatuan Republik Indonesia, Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Untuk mencapai Visi Indonesia ditetapkan 8 Misi pembangunan, 5 Sasaran, dan 17 Tujuan pembangunan yang kesemuanya diukur dengan akan tercapainya 45 indikator utama pembangunan. Adapun dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 ditetapkan misi nasional sebagai berikut:

- 1) **Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
- 2) **Mewujudkan transformasi ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
- 3) **Mewujudkan transformasi tata kelola** untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
- 4) **Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan** Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia ditingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
- 5) **Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
- 6) **Pembangunan Kewilayahan** diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan



keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing Wilayah.

- 7) **Dukungan Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan** menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi
- 8) **Kesinambungan Pembangunan Untuk Mengawal Pencapaian Indonesia Emas** yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Selanjutnya, dalam mencapai visi dan misi Nasional terdapat 5 (lima) Sasaran pokok RPJPN 2025-2045 yaitu:

- 1) **Pendapatan Perkapita Setara Negara Maju.** Pendapatan perkapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US\$ 23.000 - 30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (decent job) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.
- 2) **Kemiskinan Menuju Nol Persen (menurun) dan Ketimpangan Berkurang.** Sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,290-0,320. Sementara itu, ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB kawasan timur Indonesia menjadi 28,5 persen. **Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat.** Sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan Global Power Indeks (GPI) di peringkat 15 besar dunia.
- 3) **Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.** Meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,73 persen pada tahun 2045.
- 4) **Intensitas Emisi dan Rumah Kaca (GRK) Menurun. (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup).** Dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia



berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang ditunjukkan oleh menurunnya Intensitas Emisi (GRK) menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca ditahun 2010, dan menuju *Net Zero Emission* pada tahun 2060.

Selanjutnya, isu jangka panjang nasional yang dapat dijadikan referensi dalam merumuskan isu strategis diantaranya adalah dokumen RPJP Nasional dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. Review terhadap RPJPN bertujuan untuk mengetahui arah pembangunan nasional dan sasaran pembangunan pada setiap tahapan lima tahunan. Pemahaman terhadap arah dan sasaran pembangunan jangka panjang memandu RPJPD Kab. Asmat Tahun 2025-2045 agar selaras dengan tujuan pembangunan pusat dan daerah (provinsi).

2.9.2. Penelaahan terhadap RPJMN Periode 2025-2029

Penelaahan RPJMN 2025-2029, diawali dari pernyataan visinya yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Hal ini dimaksudkan bahwa pembangunan memerlukan kerjasama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar pondasi yang kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan sebelumnya, sehingga bisa membawa bangsa indonesai setara dengan bangsa lainya tahun 2045, sesuai cita- cita Indonsia Emas 2045. Untuk mencapai hal tersebut, maka diupayakan rumusan misi yang dikenal dalam Asta Cita, yaitu:

1. Memperkoooh ideology pancasila, demokrasi dan HAM
2. Memantapan sistem pertahanan keamanan Negara melakukan swasembada pangan, energy, air, eknomi kreatif, ekonomihijau dan biru
3. Meningkatkan lapangan kerja dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat SD sains, tenologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peren perempuan. Pemuda, dan penyandang distabilitas
5. Melanjutkan hilirasasi dan industralisasi
6. Membangun desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta pencegahan dan pemerantasan korupsi dan narkoba
8. Menyelaraskan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar ummat beragama untuk mencapaimasyarakat yang adil.

Dari visi dan misi tersebut, diturunkan sasaran utama pembangunan nasional, yaitu:

1. Pendapatan perkapita setara Negara maju
 - GNP perkapita 7.400-8.240 USD
 - Kontribusi PDB Maritim 9,1 %
 - Kontribusi PDB Manufaktur 21,9%



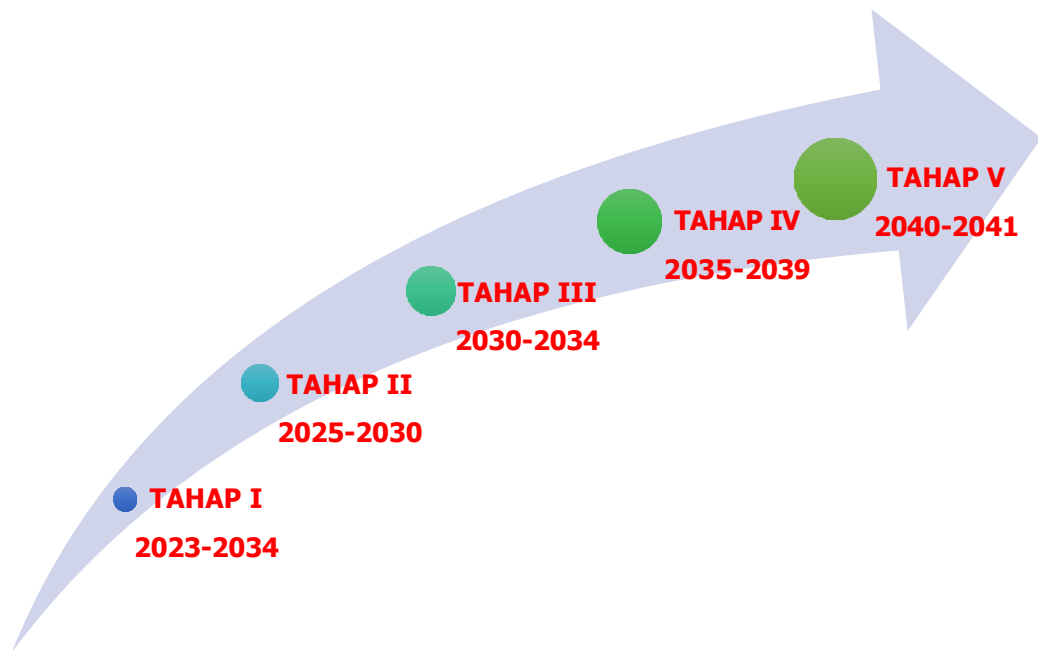
2. Kemiskinan Menuru dan Ketimpangan berkurang
 - 4.5-5,0 (kemiskinan ektrim 0% ditahun ked)
 - - Rasio gini, 0,372-0,375
 - Kontribus PDRB KTI 23,3%
3. Kepemimpinan dan pengaruh didusi internasional meningkat
 - Global power indeks berada dirangking 29 dunia
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
 - Indeks Modal menusi mencapai 0,59
5. Indek GRK menuju net zero emission
 - Indek Kulitas lingkungan hidup menjadi 77,20%
 - Penurunan intensitas emisi GRK menjadi 62,37%.

2.9.3. Penelaahan Terhadap RIPPP dan RAPPP Dalam Kerangka Otonomi Khusus

Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan otonomi khusus skema baru di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dipayungi dengan 3 (tiga) regulasi utama, yaitu:

- ◆ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- ◆ Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
- ◆ Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Regulasi baru penyelenggaraan otonomi khusus Papua mengubah aturan main yang sudah ada dan membutuhkan kapasitas baru bagi pemangku kepentingan di setiap level pemerintahan (Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua), mulai dari merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.



Gambar 2. 64 Tahapan Percepatan Pembangunan Papua

Sumber: Perpres RIPPP tahun 2022-2041

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, diperlukan sebuah Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041. Dokumen RIPPP ini menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan kesejahteraan di Wilayah Papua. Selain itu, RIPPP ini juga menjadi dasar pengelolaan Otonomi Khusus guna optimalisasi pembangunan dan mensejajarkan Wilayah Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan penetapan RIPPP yang tepat sasaran dan disinergikan dengan tujuan dan cita-cita pembangunan di dalam UUD 1945.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), RPJP 2025-2045, Visi Indonesia 2045 dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

RIPPP akan menjadi gambaran ukuran dan indikator capaian pembangunan dari lintasan perjalanan (trajectory) maupun tahapan program (milestone) pembangunan nasional dalam rangka Otonomi Khusus tahun 2022 hingga 2041 yang selanjutnya akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan pembangunan di Papua pasca berakhirnya periode Otonomi khusus di Wilayah Papua tahun 2041. Secara teknokratik RIPPP dijabarkan dalam tahapan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan RPJMN, sebagai berikut: Berdasarkan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang, dan amanat yang tercantum dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2021



tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, visi pembangunan Papua 2041 adalah:

"Terwujudnya Papua yang Mandiri, Adil, & Sejahtera"

Papua yang mandiri adalah Papua yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dengan wilayah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatannya sendiri.

Papua yang adil dicerminkan dari kondisi masyarakat Papua yang memiliki hak yang sama, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan dengan memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan serta menjamin pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat, melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia; serta mendapatkan perlindungan di depan hukum.

Papua yang sejahtera adalah penduduk Papua yang mempunyai taraf kehidupan dan penghidupan yang baik, dalam bidang pelayanan sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Sedangkan upaya perwujudan visi pembangunan Papua tersebut ditempuh melalui 3 misi pembangunan Papua 2041 sebagai berikut:

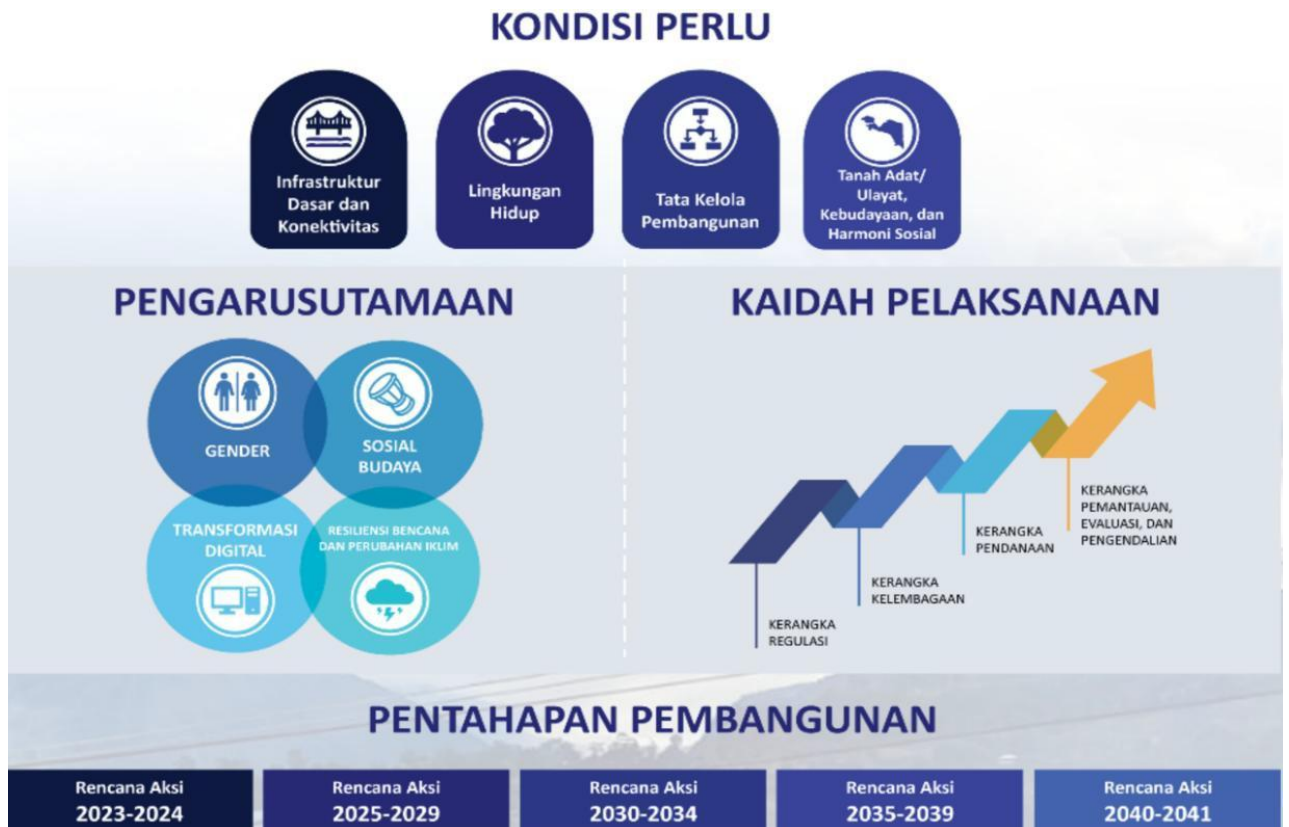
1. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk;
2. Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk;
3. Meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk.



Gambar 2. 65 Visi Misi Dan Sasaran Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041

Sumber: Perpres RIPPP tahun 2022-2041

Selain itu, demi Terwujudnya Papua yang Mandiri, Adil, & Sejahtera, maka ditetapkan 3 sasaran pembangunan RIPPP diantaranya 1) tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk; 2) tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk; dan 3) tercapainya kemampuan bekerja, berusaha dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk. Dalam rangka mencapai kehidupan yang sehat, berwawasan luas, cerdas, berkemampuan dalam bekerja, berusaha, dan berinovasi bagi seluruh penduduk, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, maka dibutuhkan kondisi perlu yang merupakan prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran pembangunan yaitu: a) Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; b) Lingkungan Hidup; c) Tata Kelola Pembangunan; d) anah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial. Dalam RIPPP 2022-2041 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan diantaranya Pengarusutamaan Gender, sosial budaya, transformasi digital, dan resiliensi bencana dan perubahan iklim.



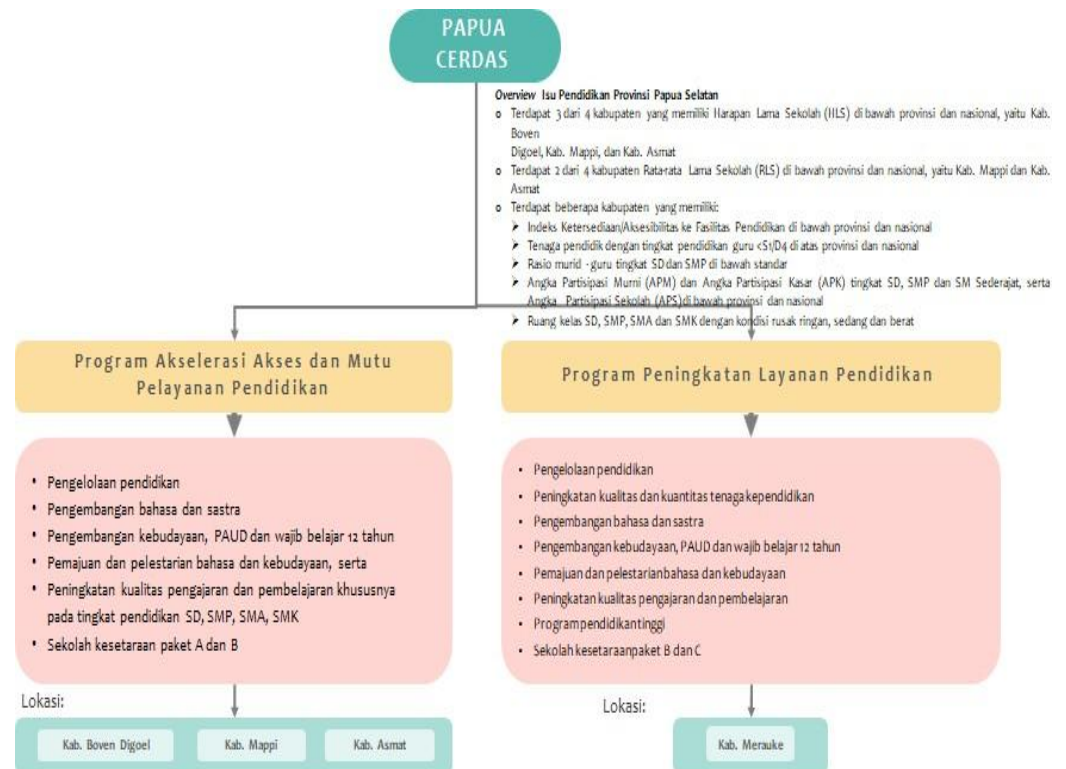
Gambar 2. 66 Kondisi Perlu Dalam Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041

Sumber: Perpres RPPPP tahun 2022-2041

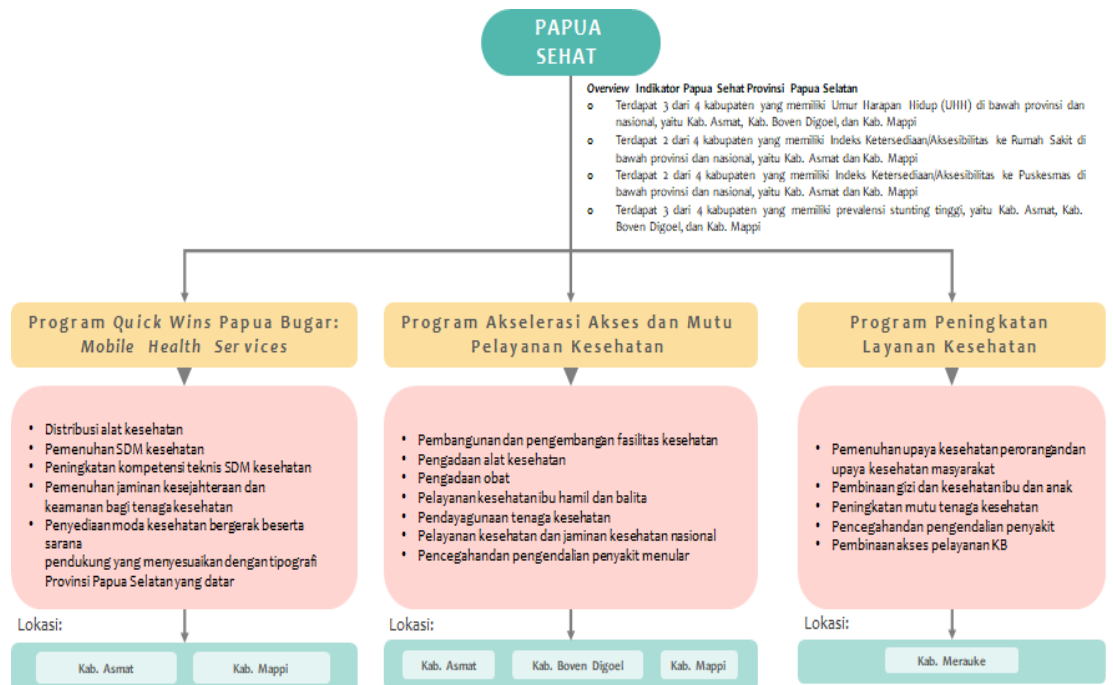
Dalam arahan RPPPP dan RPPPP Bapperda Provinsi Papua Selatan juga melakukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi program Otonomi Khusus di tingkat kabupaten, sesuai yang telah dirumuskan dalam kebijakan kewilayahan pada RPJMD Provinsi Papua Selatan, yaitu:



1. Implementasi program percepatan pembangunan Papua Cerdas di Provinsi Papua Selatan, yaitu:

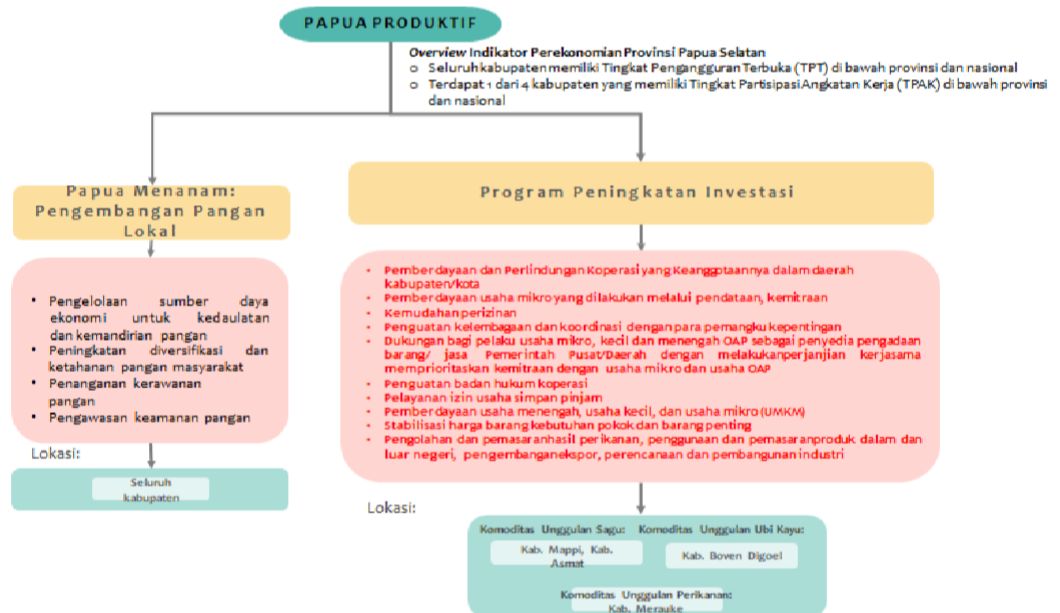


2. Implementasi program percepatan pembangunan Papua Sehat di Provinsi Papua Selatan, yaitu:





3. Implementasi program percepatan pembangunan Papua Produktif di Provinsi Papua Selatan, yakni:



2.9.4. Penelaahan RPJPD Provinsi Papua Selatan 2025-2045 (Tahapan I Tahun 2025-2029)

Penelaahan RPJPD Provinsi Papua Selatan sangat diperluakan dalam rangka memetakan isu strategis Kabupaten Asmat menjadi akurat dan tepat. Provinsi Papua Selatan merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dilahirkan melalui UU No 14 Tahun 2021. Tujuannya adalah memperpendek rentang kendali pemerintahan yang selama diselenggarakan di Provinsi Papua. Tujuan lainnya adalah meningkatkan kesejahteraan, pendapatan, dan daya saing daerah. Oleh karena itu penelaahan RPJPD nya tidak bisa dilepaskan dari kajian dokumen RPJPD yang tengah diselesaikan bersama dengan RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045. Penelaahan dimaksud meliputi Transformasi-transformasi yang bakal berlangsung dalam pembangunan Papua Selatan kedepan, antara lain:

- Mewujudkan Transformasi sosial, ekonomi serta tata kelola Papua Selatan melalui peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan OAP dan Non-OAP serta pelayanan publik yang afirmatif dan inklusif.
- Transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup, kualitas kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan OAP dan Non-OAP.
- Transformasi ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan sumber daya alam, potensi unggulan daerah/lokal.
- Transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif dan inklusi di Papua Selatan. b) Landasan Transformasi: Transformasi ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, produktif, makmur berbasis kearifan budaya Ha-anim.
- Mengembangkan keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural (eco-culture) secara berkelanjutan serta meningkatkan kondusivitas wilayah, dan stabilitas ekonomi makro di Papua Selatan.
- Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan Ha-anim di



Papua Selatan c) Implementasi Transformasi: Melalui peningkatan kapasitas pemerintahan dan mewujudkan pembangunan sarana prasarana, konektivitas, pemerataan pembangunan, keadilan untuk masyarakat serta kesinambungan pembangunan

- Mempercepat pemerataan pembangunan, keadilan untuk semua serta mengentaskan kemiskinan di Papua Selatan khususnya kemiskinan OAP
- Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana, ketahanan energi, air, pangan serta konektivitas antar daerah, wilayah dan daerah tertinggal, terluar, terdepan yang berkualitas dan ramah lingkungan.
- Kesinambungan pembangunan Papua Selatan.

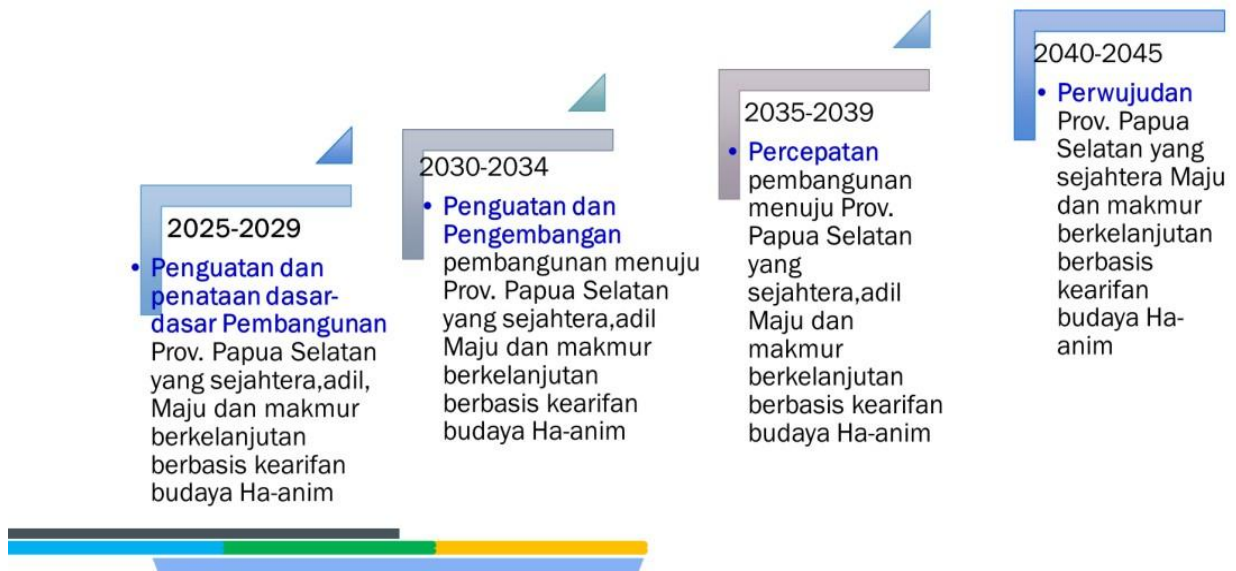
Penelaahan lebih detail terutama ditujukan pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Selatan 2025-2045 dikelompokkan menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu tahap I, II, III dan IV. Arah kebijakan pembangunan disusun dalam tahapan pembangunan dan prioritas setiap tahapan. Prioritas ini mencerminkan urgensi permasalahan pembangunan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus atau tema pembangunan dalam setiap tahapan memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Selatan. Tema tersebut untuk memudahkan pemahaman bahwa satu tahapan ke tahapan berikutnya saling terkait dan menjadi satu kesatuan yang utuh selama masa 20 tahun.

Arah kebijakan pembangunan disusun untuk sektor-sektor paling prioritas yang harus diperhatikan dan saling terkait dalam periode 20 (dua puluh) tahun. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas sehingga RPJPD memiliki keselarasan dengan pentahapan dalam RPJPN. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RPJMD. Tema pembangunan yang diterjemahkan ke dalam arah kebijakan pembangunan lima tahunan (dan sasaran pokoknya) ini yang menjadi acuan calon Gubernur dan wakil Gubernur dalam merumuskan visi dan misi. Termasuk pula menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD setiap 5 (lima) tahun.

Dengan demikian, siapapun kepala pemerintahan Provinsi Papua Selatan, kebijakan pembangunan selama periode kepemimpinannya akan tetap mengarah pada visi dan misi pembangunan jangka panjang yang telah dituangkan dalam RPJPD ini. Sasaran pokok pembangunan harus dituangkan dalam dokumen RPJMD periode terkait. Agenda atau tema pembangunan tiap periode pembangunan di Provinsi Papua Selatan selama 20 tahun kedepan dapat dilihat pada gambar berikut ini: Arah kebijakan Provinsi Papua Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 didiskripsikan sebagai berikut:



TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPD 2025-2045 PAPUA SELATAN



Gambar 2. 67 Tahapan Pembangunan Dalam RPJPD Papua Selatan 2025-2045

Sumber: RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045

2.9.5. Penelahaan terhadap RPJMN Provisi Papua Selatan

Sepeti halnya peneaahan dikumen lain, kajiannya diawali dari pernyataan visi gubenur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan yaitu Terwujudya masyarakat Papua Selatan yang bermartabat, Aman, Damai, Sejahtera, dan Pemerintahan yang aspiratif. Sedangkan misinya yaitu:

- (1) Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial terutama bagi OAP dan kelompok rentan yang mudah akses, berkualitas dan berkeadilan.
- (2) Memberdayakan ekonomi yang inklusif berbasis potensi unggulan yang berdampak pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama OAP.
- (3) Memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola OTSUS yang efektif (tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran), bersih, partisipatif, dan afirmatif.
- (4) Melestarikan dan mendayagunakan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati berbasis wilayah adat secara berkelanjutan.
- (5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kohesi dan harmoni sosial lintas etnis, agama, dan golongan berbasis kearifan Anim Ha.
- (6) Meningkatkan sarana prasarana dan konektivitas antar wilayah terutama daerah 3T, pusat pertumbuhan berbasis tata ruang yang inklusif.

Dari visi dan misi tersebut diturunkan dalam 7 (tujuh) prioritas utama, yaitu:

- (1) Pengadaan Rumah Sakit Provinsi
- (2) Kartu Jaminan Sehat OAP Papua Selatan bagi penduduk miskin



- (3) Perlinsos Anak usia sekolah
- (4) Penyediaan tenaga kerja terlatih bagi OAP dalam mendukung PSN
- (5) Papua Selatan Satu Data
- (6) Pusat Kebudayaan Anim Ha
- (7) Transportasi terpadu dan terintegrasi

2.9.6. Penelaahan RPJPD Daerah Kabupaten Asmat 2025-2045

Isu strategi pembangunan Asmat dalam Tahun 2025-2029 tidak bisa lepas dari hasil elaborasi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045. Dalam dokumen dimaksud disebutkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Asmat untuk periode Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Asmat Sebagai “Center Of Excellence (CoE) Peradaban Pelestarian Budaya Indonesia Timur” CoE P2BIT

Center of Excellent Peradaban merupakan Konsep yang menggambarkan tentang Tujuan Pembangunan Kabupaten Asmat melalui pembangunan daerah yang Unggul, maju dan sejahtera sesuai karakteristik daerah kabupaten Asmat dengan memanfaatkan sumber-sumber potensi daerah. Dalam hal ini Konsep CoE P2BIT diintegrasikan Konsep Papua Sehat, Cerdas, dimana terdapat 3 unsur yang menjadi pelaku pembangunan di Kabupaten Asmat yaitu Manusia (OAP) sebagai subjek pembangunan (*people centered development*) yang mencerminkan aset daerah dimana terdapat 3 unsur yang terlibat yaitu: Manusia, adalah sebuah unsur pertama, sedangkan pusat utamanya adalah **akal, berpikir dan intuisi**. Ketiga unsur ini akan diintegrasikan guna pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dimana Masyarakat Asmat yang unggul dan Maju menjadi kata kunci dalam hal ini. **“Lestari”** dimana Pembangunan Daerah difokuskan pada Infrastruktur yang handal berbasis karakter budaya lokal dan Pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan **mempertahankan arsitektur tradisional dan tradisi lokal** untuk menjaga dan melestarikan budaya dan adat istiadat dalam pengaruh pembangunan, daya saing daerah menjadi kata kunci dalam hal ini. Sedangkan **“Budaya Indonesia Timur”** merupakan pembangunan ekonomi melalui pengembangan wisata budaya berkarakteristik lokal wilayah Timur Papua, **Asmat Produktif** menjadi kata kunci dalam hal ini. **Konsep rumusan Visi ini** dibangun sebagai usaha bersama pemerintah kabupaten dan masyarakatnya untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan, penilaian dan langkah pada pelaksanaan pembangunan. Pencapaian visi jangka panjang Kabupaten Asmat yang Unggul, Maju, berdaya saing dan Sejahtera membutuhkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara sinergis.

Untuk mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Asmat, maka dirumuskan Misi pembangunan Kabupaten Asmat, sebagai berikut:

1. Mewujudkan **Transformasi sosial** melalui peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas



2. Mewujudkan **transformasi ekonomi** perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, berdaya
3. Mewujudkan **infrastruktur** yang handal melalui pemerataan, pengembangan wilayah dan konektivitas
4. Mewujudkan perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, berdaya saing dan berkelanjutan
5. Mewujudkan **transformasi tata Kelola** melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan professional dan keamanan Wilayah
6. Mewujudkan **ketahanan sosial budaya dan ekologi** berbasis kearifan Lokal People Center Development (OAP) Mempercepat pemerataan pembangunan, keadilan untuk semua serta pengentasan kemiskinan
7. Mewujudkan **kesinambungan Pembangunan dan Kerjasama** wilayah antar daerah, nasional dan internasional.

2.9.7. Penelaahan RTRW Kabupaten Asmat

Penelaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi bagian penting dalam konteks perencanaan dan pengembangan wilayah sebab, RTRW merupakan dokumen perencanaan yang mengatur tata ruang suatu wilayah dalam skala kabupaten/kota atau bahkan provinsi yang mencakup aspek-aspek seperti penggunaan lahan, zona-zona khusus, transportasi, pemukiman, dan lain-lain. Penelaahan dokumen ini memastikan bahwa pembangunan dapat berlangsung sesuai dengan rencana jangka panjang yang terumuskan dalam Tujuan, Kebijakan, dan Strategi-Strategi Penataan Ruang yang telah ditetapkan. Tujuan Penataan ruang wilayah Kabupaten Asmat adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan kebudayaan masyarakat zona ekologi lahan basah dataran rendah berbasis sektor pariwisata budaya dan alam sebagai sektor ekonomi unggulan, didukung oleh sektor kehutanan, perikanan dan kelautan. Dalam mendukung tercapainya Tujuan Penataan ruang wilayah tersebut, telah terumuskan berbagai kebijakan dan strategi penataan ruang yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 114 Telaah RTRW Kabupaten Asmat Tahun 2021-2041

Tujuan	Arah Kebijakan	Strategi
	a. Pengembangan pariwisata budaya dan alam sebagai sektor ekonomi unggulan, didukung oleh sektor kehutanan serta perikanan dan kelautan sebagai sektor ekonomi pendukung;	- Pengembangan pariwisata budaya dan alam sebagai sector ekonomi unggulan, didukung oleh sector - kehutanan serta perikanan dan kelautan
	b. Pengelolaan ekosistem lahan basah dataran rendah dan hutan sagu secara berkelanjutan;	- Pengelolaan ekosistem lahan basah dataran rendah dan hutan sagu secara berkelanjutan
		- Pengembangan manajemen resiko bencana
		- Pemanfaatan peran pusat-pusat kegiatan wilayah sesuai dengan struktur dan hirarkinya



Tujuan	Arah Kebijakan	Strategi
	<p>c. Pengembangan manajemen resiko bencana;</p> <p>d. Pemantapan peran pusat-pusat kegiatan wilayah sesuai dengan struktur dan hierarkinya dengan tanpa mengakibatkan alih fungsi lahan utama pertanian dan kawasan lindung;</p> <p>e. Pengembangan sistem transportasi pendukung ekonomi dan pelayanan umum dengan tanpa mengakibatkan alih fungsi lahan utama pertanian dan kawasan lindung;</p> <p>f. Pengembangan sistem prasarana telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dan merata;</p> <p>g. Mempertahankan kawasan lindung dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;</p> <p>h. Pengembangan dan peningkatan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan;</p> <p>i. Pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan sosial budaya, dan daya dukung lingkungan hidup; dan</p> <p>j. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pengembangan sistem transportasi pendukung ekonomi dan pelayanan umum - pengembangan sistem prasarana telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dan merata - pemantapan dan pengendalian fungsi kawasan lindung - pengembangan dan peningkatan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan - pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan sosial budaya, dan daya dukung lingkungan hidup - Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Asmat Tahun 2021-2041.



2.9.8. Penelaahan KLHS RPJMD Kabupaten Asmat 2025-2029

Adapun hasil penelaahan KLHS RPJMD Kab. Asmat dalam rangka memberikan ikhtisar kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dalam muatan RPJMD Kabupaten Asmat Taun 2025-2029, adalah:

- A. Hasil identifikasi dan analisa pencapaian indikator TPB Kabupaten Asmat periode tahun 2018 – 2022, menunjukkan bahwa dari total 220 indikator yang merupakan kewenangan Kabupaten berdasarkan PERPRES 111 Tahun 2022, teridentifikasi hanya 102 indikator yang sesuai dengan kewenangan daerah. Dari 102 indikator tersebut, terdapat 19 Indikator (18,63%) yang masuk dalam kategori sudah dilaksanakan dan telah mencapai target; 33 Indikator (32,35%) yang telah dilaksanakan namun belum mencapai target, 16 Indikator (15,69%) yang belum dilaksanakan, dan 34 Indikator (33,33%) yang tidak ada data.
- B. Hasil FGD para pemangku kepentingan diperoleh isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan pilar sosial, ekonomi, pilar lingkungan serta pilar hukum dan tata kelola, maka terdapat 9 isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Asmat, antara lain. 1. Standar pelayanan minimal bidang pendidikan dan Kesehatan; 2. Tingkat pengangguran terbatas khususnya orang asli Asmat; 3. Ketersediaan rumah layak huni, air bersih dan sanitasi layak; 4. Tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah; 5. Pengembangan produksi komoditas unggulan daerah; 6. Perlindungan dan pelestarian budaya dan kearifan lokal; 7. Ketersediaan dan kemampuan lahan untuk pengembangan wilayah serta material dasar untuk pembangunan infrastruktur (indeks Kemahalan Konstruksi); 8. Kerusakan lingkungan (Deforestasi, Degradasi, pencemaran air permukaan, sampah domestik dan limbah B3; dan 9. Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakan hukum (hukum positif maupun berbasis hukum adat).
- C. Hasil analisa Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, menunjukkan bahwa terdapat 4 isu D3TLH yang sangat terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Asmat, antara lain: 1. Luas kawasan konservasi dan hutan lindung mencapai 56,25% dari total luas Kabupaten. Keterbatasan luas kawasan permukiman pada wilayah ibukota kabupaten (Kota Agats). Luas APL sebesar 1,12% dari total luas Distrik Agats; 2. Karakteristik bentang alam dan tipe vegetasi yang kurang mampu menyediakan air bersih layak minum dan mendukung pembangunan infrastruktur penunjang pelayanan dasar; 3. Potensi bahaya cuaca ekstrem hampir merata di semua wilayahnya distriknya, kecuali di sebagian wilayah utara distrik pulau tiga dan distrik korowai buluanup; dan Pemanfaatan kayu sebagai bahan utama pembangunan infrastruktur dapat mengakibatkan semakin tingginya deforestasi hutan.
- D. Terdapat 8 (delapan) Isu Kebijakan baik Nasional dan Daerah yang sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Asmat, antara lain: 1. Bidang Ekonomi yaitu: 1). Pengembangan Ekonomi yang belum inklusif di antaranya pengembangan potensi unggulan wilayah dan UMKM; dan 2). Rendahnya kemandirian fiskal yang menghambat pertumbuhan



ekonomi; 2. Bidang Sosial yaitu: 1). Kondisi Kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah ditunjukkan oleh tingginya presentase penduduk miskin dan ketertinggalan daerah; dan 2). Rendahnya perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang berdampak pada belum optimalnya penataan tanah adat/ulayat; 3. Bidang Sarana Prasarana yaitu: 1). Aksesibilitas dan konektivitas intra dan antar wilayah yang masih rendah; dan 2). Pembangunan infrastruktur dasar belum optimal sehingga mempengaruhi peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pembangunan ekonomi; 4. Bidang Energi yaitu: Potensi Energi Hidro, energi surya dan energi angin belum dikembangkan dengan optimal dalam menopang transisi energi; 5. Bidang Komunikasi yaitu: Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan digital masih rendah dan belum merata; 6. Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah yaitu: Penyelenggaraan otonomi khusus dan penyelenggaraan pemerintah pada daerah otonomi baru; 7. Bidang Stabilitas Pertahanan dan Keamanan yaitu: Kondisi keamanan dan ketertiban umum yang menyebabkan belum optimalnya cakupan wilayah pelayanan dasar terutama Kesehatan dan pendidikan; dan 8. Bidang Ekologi yaitu: Papua dihadapkan pada kondisi risiko bencana tinggi, rendahnya kemandirian pangan, serta belum optimalnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.

- E. Isu PB Strategis Prioritas Kabupaten Asmat, sebagai berikut: 1. Lapangan pekerjaan yang saat ini tersedia masih sangat kurang untuk usia produktif yang besar jumlahnya dan akses memperoleh lapangan pekerjaan juga terbatas, terutama bagi OAP suku Asmat. 2. Rumah yang layak huni dan sumber pangan bagi penduduk lokal masih sangat kurang memadai. 3. Akses layanan serta kualitas pendidikan dan kesehatan masih sangat kurang, sulit dijangkau dan belum merata. 4. Air bersih dan sanitasi belum tersedia secara layak dan memadai hampir di seluruh wilayah Asmat. 5. Konektivitas antar wilayah hanya mengandalkan sungai yang belum dilengkapi infrastruktur transportasi yang memadai dan distribusi bahan bakar yang terbatas. 6. Perlindungan dan pelestarian kearifan lokal belum mendapat perhatian dan perlu dilindungi sebagai aset masyarakat asli suku Asmat.



BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

3.1. Visi

Sebelum merumuskan Visi dan Misi Kabupaten Asmat terlebih dahulu diperkenalkan Slogan atau Motto Kabupaten Asmat dalam Periode RPJMD 2025-2029 yaitu : **ASMAT CERAH**. Cerah selain menjadi moto juga merupakan singkatan dari Visi Pasangan Kepala daerah Terpilih: **CERAH: CERdas-sehAt dan sejahteraH** Singkatnya Moto CERAH dimaksudkan di tahun 2029 Kabupaten Asmat bakal bertransformasi menjadi daerah yang Sehat dan Cerdas Masyarakatnya hidup Sejahtera yang didukung dengan keunggulan komparatif dan kompetitif dari potensi lokal yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat yang tinggi, serta masyarakat yang berdikari, yaitu kemampuan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan memadai.

Selanjutnya visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Asmat. Pernyataan Visi Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Asmat sampai dengan tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi.

Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029, adalah :

"Menuju Asmat yang sehat, Cerdas dan Sejahtera"

Pernyataan Visi Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 memiliki makna sebagai berikut :

Asmat Sehat : mencerminkan masyarakat yang memiliki kondisi fisik, mental, dan sosial yang optimal, memungkinkan seseorang untuk hidup produktif dan berkualitas sehingga mampu mewujudkan kehidupan maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatannya sendiri, sesuai karakteristik masyarakat asmat.

Asmat Cerdas : dicerminkan dari kondisi masyarakat Asmat Papua yang memiliki kemampuan dalam rangka mendapatkan serta menerapkan, pengetahuan, informasi, serta keterampilan, melalui 3 unsur yaitu akal, berpikir dan intuisi yang tidak terlepas dari unsur alam dan buatan manusia dengan memanfaatkan sumber-sumber potensi daerah.

Asmat Sejahtera : mencerminkan Asmat yang mempunyai taraf kehidupan dan



penghidupan yang baik, dalam bidang pelayanan sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang inovatif dan produktif. Misi Memperhatikan visi dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029, dilakukan dengan upaya melalui 6 Misi pembangunan sebagai berikut : Meningkatkan standard an kualitas pelayanan kesehatanMemperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikanMendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatanMeningkatkan pembangunan infrastrukturMembangun birokrasi yang bersih, responsip, transparan dan akuntabelMendorong pertumbuhan investasi dalam memperluas lapangan kerja.

3.2. Misi

Memperhatikan visi dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029, dilakukan dengan upaya melalui 6 Misi pembangunan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan standar dan kualitas pelayanan kesehatan
- 2) Memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan
- 3) Mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur
- 5) Membangun birokrasi yang bersih, responsip, transparan dan akuntabel
- 6) Mendorong pertumbuhan investasi dalam memperluas lapangan kerja

Adapun pengertian dari misi tersebut, yaitu :

Meningkatkan standar dan kualitas pelayanan kesehatan : merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa masyarakat Asmat menerima pelayanan medis yang aman, efektif, tepat waktu, efisien, dan adil. Peningkatannya memerlukan kolaborasi antara tenaga medis, manajemen, pemerintah, dan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan sistem pelayanan yang tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga memberikan rasa aman, nyaman, dan menghargai hak pasien.

Memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan : merupakan dua aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu daerah. Memperluas akses berarti memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan terutama OAP. Meningkatkan kualitas berarti menjadikan pendidikan lebih relevan, efektif, dan bermutu tinggi agar mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif, dan siap menghadapi tantangan zaman.

Mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan : yakni upaya memperkuat perekonomian yang berbasis pada kekuatan rakyat, terutama pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), koperasi, serta komunitas lokal. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.



Meningkatkan pembangunan infrastruktur : merupakan salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan infrastruktur yang kuat, daerah akan lebih kompetitif, masyarakat lebih sejahtera, dan pembangunan akan lebih adil.

Membangun birokrasi yang bersih, responsif, transparan dan akuntabel : Merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan dipercaya oleh masyarakat. Penataan birokrasi merupakan fondasi dari pemerintahan yang modern dan dipercaya rakyat. Dengan reformasi birokrasi yang menyeluruh, pelayanan publik akan lebih baik, anggaran negara lebih tepat sasaran, dan masyarakat lebih sejahtera.

Mendorong pertumbuhan investasi dan memperluas lapangan kerja : Dua hal yang saling berkaitan erat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendorong investasi dan memperluas lapangan kerja adalah dua strategi yang sangat penting dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang kondusif, menyediakan infrastruktur yang memadai, serta memastikan SDM yang terampil dan siap kerja.

Tabel 3. 1 Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029

VISI	POKOK-POKOK VISI	MISI
Menuju Asmat yang sehat, Cerdas dan Sejahtera	Asmat Sehat	1. Meningkatkan Kualitas Dan Standar Pelayanan Kesehatan
	Asmat Yang Cerdas	2. Meningkatkan Kualitas Dan Standar Pelayanan Pendidikan
	Asmat Yang Sejahtera	3. Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 4. Mendorong Pertumbuhan Investasi Dan Memperluas Lapangan Kerja 5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur 6. Membangun Birokrasi Yang Bersih, Responsif, Transparan Dan Akuntabel

3.3. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari Visi dan



Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 tahun.

Adapun Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, sebagai berikut:



Tabel 3. 2 Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Asmat 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
MENUJU ASMAT YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA. - Meningkatkan standar dan kualitas pelayanan Kesehatan - Memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan - Mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan - Meningkatkan pembangunan infrastruktur - Membangun birokrasi yang bersih, responsif, transparan dan akuntabel - Mendorong pertumbuhan investasi dan memperluas lapangan kerja	Terwujudnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	129	124	119	114	109	104	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	24,5	22,4	19,6	17,7	1,9	11,3	
			Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	129	124	119	114	109	104	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	24,5	22,4	19,6	17,7	14,9	11,03	
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	93	93,8	94,6	95,4	96,2	97	
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	95	95,8	96,6	97,4	98,2	99	
			Cakupan kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malariaa ((%))	80,22	79.226	78.232	77.238	76.244	75,25	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional ((%))	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	
	Terwujudnya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas	Pemenuhan Layanan dan jaminan Pendidikan yang berkualitas, merata untuk OAP dan Non OAP	Indeks Modal Manusia (IPM) (Indeks)	58,59	59,5	60,42	61,34	62,25	62,52	
			Literasi Membaca (Kab/kota) ((%))	9.00-11.05	12.44-14.49	15.89-17.93	19.33-21.37	22.78-24.81	26.22-28.25	
			Numerasi (kab/kota) ((%))	0.00-10.22	5.24-13.83	10.49-17.43	15.73-21.04	20.98-24.64	26.23-29.89	
			Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun ((%))	6,88	6,93	6,98	7,03	7,08	7,13	
			Harapan Lama Sekolah ((%))	6,88	6,93	6,98	7,03	7,08	7,13	
			Indeks Modal Manusia (IPM) (Indeks)	58,59	59,5	60,42	61,34	62,25	62,52	
			Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan ((%))	20	20	25	25	30	30	
			Peningkatan Prestasi Olahraga ((%))	30	30	35	35	35	35	
	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan Lokal People Center Development (OAP)	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju (budaya dan ekologi berbasis kearifan Lokal People Center Development (OAP)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))	0	13,1	26,2	39,3	52,4	65,5	
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	0	16,44	32,88	49,32	65,76	82,2	
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))	0	13,1	26,2	39,3	52,4	65,5	
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	0	16,44	32,88	49,32	65,76	65,76	
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD ((%))	0	10,12	20,24	30,36	40,48	50,6	
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD ((%))	0	10,12	20,24	30,36	40,48	50,6	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, berdaya saing			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,02	1,92	1,82	1,72	1,62	1,52	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (%)	45,68	44,04	42,41	40,78	39,15	38,15	
			Indeks Peradaban Pelestraian Budaya (OAP) (%)	0	4,78	9,56	14,33	19,11	23,89	
		Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, Berdaya)	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	1,08	1	0,92	0,85	0,77	0,66	
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	
			Jumlah Wisatawan Berbintang/orang (%)	0,22	0,23	0,24	0,25	0,27	0,29	
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) (%)	0	11,32	22,64	33,96	45,28	56,6	
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD (%)	0	10,12	20,24	30,36	40,48	50,6	
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%) (%)	0	0,24	0,48	0,72	0,96	1,2	
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB- (%)	0	4,41	8,82	13,23	17,64	22,05	
			Return on Aset (ROA) BUMD- (%)	0	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,02	1,92	1,82	1,72	1,62	1,52	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	77,11	78,37	79,63	80,89	82,15	83,15	
			Iptek dan Inovasi (% PDRB Pertanian) (%)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (%)	45,68	44,04	42,41	40,78	39,15	38,15	
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-74,29	-71,56	-68,83	-66,1	-63,37	-60,37	
			Proporsi Kontribusi PDRB terhadap Nasional (%) (%)	0,0157	0,0160	0,0162	0,0164	0,0166	0,0170	
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	58,47	57,82	57,16	56,51	55,85	55,2	
		Transformasi Digital	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks)	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4	
		Kepemimpinan, kearifan lokal (CoE) P2BIT (Perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, berdaya)	Indeks Peradaban Pelestraian Budaya (OAP) (%)	0	4,78	9,56	14,33	19,11	23,89	
	Mempercepat pemerataan		Persentase Desa Mandiri (%)	1	1	1	1	1	1	



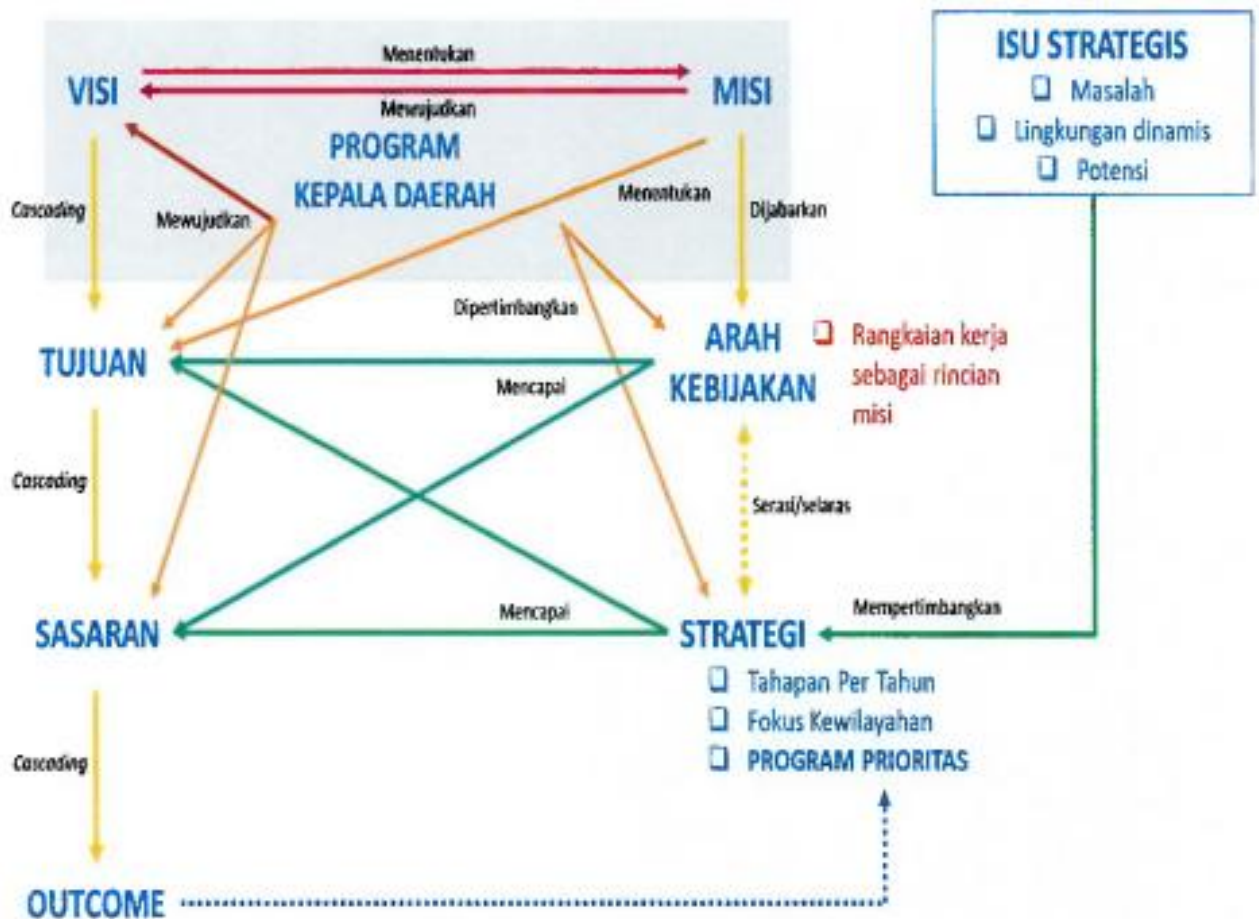
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pembangunan, keadilan untuk semua serta pengentasan kemiskinan	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Desa Mandiri (%)	1	1	1	1	1	1	
	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Persentase Penduduk Miskin (%)	24,67	24,52	24,37	24,22	24,07	23,8	
			Persentase Penduduk Miskin (%)	24,67	24,52	24,37	24,22	24,07	23,8	
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%))	17	17,4	17,8	18,2	18,6	19	
	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi biru	Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi biru	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Angka)	75-80	76.20-81	77.40-82	78.60-83	79.80-84	81-85	
			Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Angka)	75-80	76.20-81	77.40-82	78.60-83	79.80-84	79.80-84	
			Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	25,2	25,98	26,77	27,55	28,34	28,34	
			Indeks Ekonomi Biru (%)	24,6	26,82	27,25	28,88	30,23	30,23	
	Terwujudnya infrastruktur yang handal melalui pemerataan, pengembangan wilayah dan konektivitas		Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)) (%)	29,1	29,53	29,96	30,39	30,82	31,25	
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	0	4	8	12	16	20	
			Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantapp (%)	22	22,6	23,2	23,8	24,4	25	
			Persentase Pelabuhan dalam kondisi mantapp (%)	16	20	24	28	35	36	
			Persentase Bandara dalam kondisi mantapp (%)	0	10,07	20,13	30,2	40,26	50,33	
			Cakupan wilayah (kampung) yang memiliki akses sinyal internet (%)	0	10,44	20,88	31,32	41,76	52,2	
			Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)	125,15	122,78	120,41	118,04	115,67	113,3	
		Berketahanan Energi, Air, Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)) (%)	29,1	29,53	29,96	30,39	30,82	31,25	
			Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)) (%)	0	17	34	51	68	85	
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)) (%)	-.353,367	-.355,867	-.358,367	-.360,867	-.363,367	-.366,067	
			Kapasitas Air Baku ((%))	0	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	0	4	8	12	16	20	
			Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantapp (%)	22	22,6	23,2	23,8	24,4	25	
			Cakupan wilayah (kampung) yang dapat diakses jaringan dan layanan transportasi darat/laut/udara (%)	0	5,45	10,9	16,34	21,79	27,24	
			Persentase Bandara dalam kondisi mantapp (%)	0	10,07	20,13	30,2	40,26	50,33	



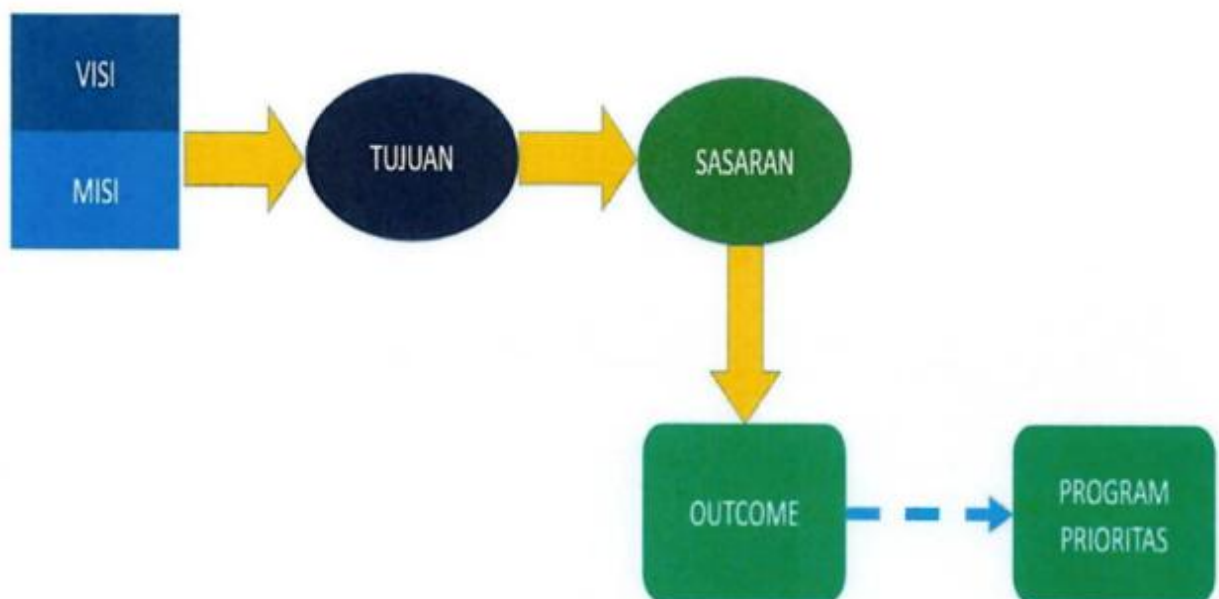
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Cakupan wilayah (kampung) dengan akses jaringan telepon/ selulerr (%)	47,2	47,8	48,41	49,01	49,62	50,22	
			Cakupan wilayah (kampung) yang memiliki akses sinyal internet (%)	0	10,44	20,88	31,32	41,76	52,2	
			Persentase Pelabuhan dalam kondisi mantapp (%)	16	20	24	28	35	36	
		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)	125,15	122,78	120,41	118,04	115,67	113,3	
			Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) (%)	65,16	69,09	72,91	76,8	80,67	84,55	
	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	1,14	1,16	1,18	1,20	1,22	1,22	
			Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Poin)	0	0	0,10	0,15	0,20	0,25	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	79,62	79,62	79,77	79,93	80,09	80,09	
			Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	0	5	10	15	20	25	
	Terwujudnya transformasi tata Kelola melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan profesional		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	1,14	1,16	1,18	1,20	1,22	1,24	
			Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	47,52	48,02	48,51	49,01	49,5	50	
			Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	25,4	27,43	29,46	31,49	33,52	35,55	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	1,22	1,32	1,43	1,53	1,64	1,74	
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	0,77	1,54	2,31	3,08	3,08	
			Indeks Integritas Nasional (Persentase)	58,7	58,21	57,72	57,23	56,74	56,74	
			Indeks persepsi korupsi (Indeks)	52	55	58	61	64	67	
		Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	25,4	27,43	29,46	31,49	33,52	35,55	
			Indeks Integritas Nasional (Persentase)	58,7	58,21	57,72	57,23	56,74	56,74	
			Indeks persepsi korupsi (Indeks)	52	55	58	61	64	67	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	1,22	1,32	1,43	1,53	1,64	1,74	
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	0,77	1,54	2,31	3,08	3,85	
	Mewujudkan transformasi tata Kelola melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan profesional dan kemanan		Tingkat keamanan wilayah (%)	55,2	56,21	57,22	58,23	59,24	59,24	
			Indeks demokrasi Indonesia (Indeks)	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	
			Kondusivitas wilayah yang							
			Tingkat keamanan wilayah (%)	55,2	56,21	57,22	58,23	59,24	59,24	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	wilayah (Terwujudnya kemandirian wilayah)	berbasis pada harmonisasi keragaman masyarakat	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ((%))	0	13,56	27,12	40,68	54,24	54,24	
			Indeks demokrasi Indonesia (Indeks)	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	
	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga* ((%))	5	5	7	9	10	10	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga* ((%))	5	5	7	9	10	10	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro		Tingkat Inflasi Pendalaman/Inter mediasi Sektor Keuangan (%)	2	2	2	2	2	2	
			Indeks Investasi Daerah (Ekonomi Kreatif) (Angka)	0	4,5	9	13,5	18	22,5	
		Stabilitas Ekonomi Makro	Aset Dana Pensiun/PDRB ((%))	0,04	0,44	0,48	0,52	0,56	0,60	
			Inklusi Keuangan ((%))	0	16,09	32,18	48,27	64,36	80,45	
			Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan ((%))	0	9,25	18,5	27,75	37	46,25	
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))	0	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	
			Tingkat Inflasi Pendalaman/Inter mediasi Sektor Keuangan (%)	2	2	2	2	2	2	
			Total Dana Pihak Ketiga/PDRB ((%))	11,65	12,82	13,99	15,16	16,33	17,5	
			Total Kredit/PDRB ((%))	0	3,24	6,48	9,72	12,96	16,2	
			Indeks Investasi Daerah (Ekonomi Kreatif) (Angka)	0	4,5	9	13,5	18	22,5	
			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) (%)	1,08	1	0,92	0,85	0,77	0,66	



Gambar 3. 1 Konsep RPJMD
Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025



Gambar 3. 2 Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD
Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025



3.4. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.4.1. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029

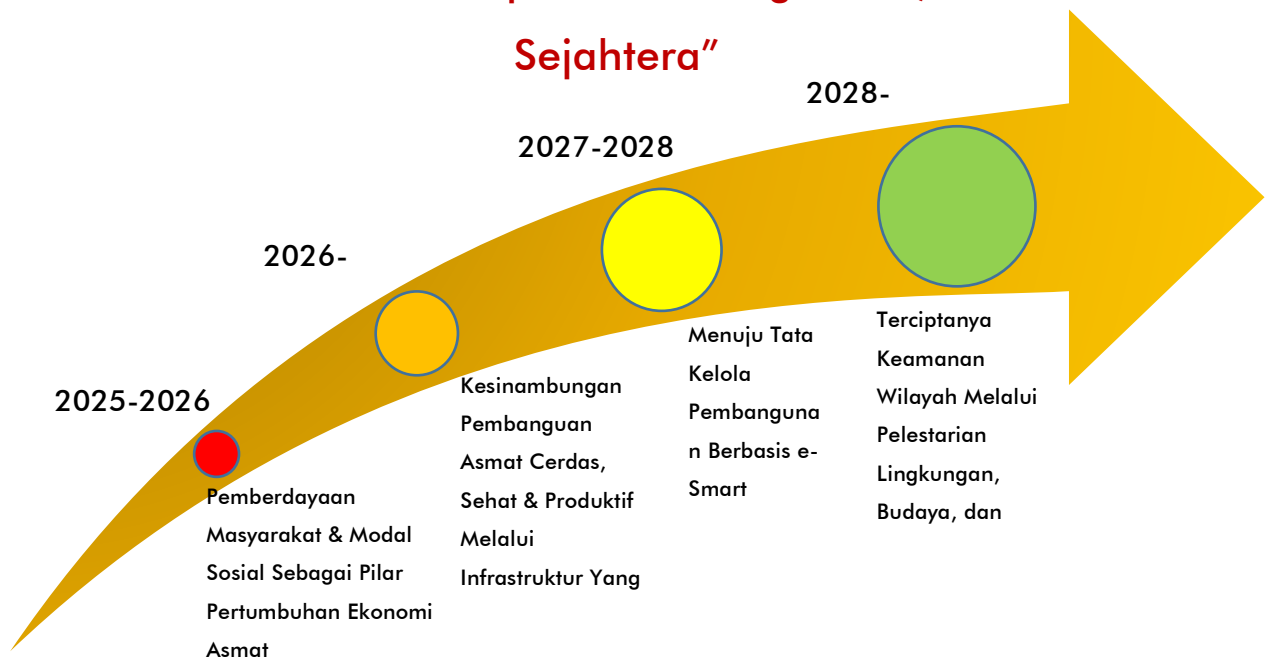
RPJMD Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Tahun 2025- 2029 memuat strategi, arah kebijakan sesuai tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten, dimana strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Asmat melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien pada tahun 2025-2029. Strategi pembangunan skenario yang di gunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dalam menciptakan nilai tambah dan cara pencapaian sasaran pembangunan bagi para stakeholders pembangunan daerah di Kabupaten Asmat, dimana strategi dan arah kebijakan di rumuskan dengan mempedomani Tahapan I dalam RPJPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2045, sesuai arahan Kepemimpinan, kearifan lokal yakni : Perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, maju dan berdaya saing **"Asmat Sebagai "Center Of Excellence (CoE) Peradaban Pestaarian Budaya Indonesia Timur" CoE P2BIT** yang di operasionalisasikan melalui pelaksanaan Visi- Misi Bupati Tahun 2025- 2029, dimana strategi dan arahan pembangunan Kabupaten Asmat dapat dilihat pada Tahapan I pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, yang memuat strategi, arah kebijakan dan Tema Pembangunan sesuai kondisi kontekstual.

Strategi pembangunan skenario yang di gunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat dalam menciptakan nilai tambah dan cara pencapaian sasaran pembangunan bagi para stakeholders pembangunan daerah di Kabupaten Asmat, dimana strategi dan arah kebijakan di rumuskan dengan mempedomani Tahap I dalam RPJPD Kabupaten Asmat (Tahun 2025-2045), sesuai arahan Kepemimpinan, kearifan lokal yakni : Perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, maju dan berdaya saing, yang di operasionalisasikan melalui pelaksanaan Visi- Misi Bupati Tahun 2025-2029, dimana strategi dan arahan pembangunan Kabupaten Asmat dapat dilihat pada Tahap I pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, yang memuat strategi, arah kebijakan dan Tema Pembangunan sesuai kondisi kontekstual.

Adapun Tahapan Pembangunan, Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Asmat 2025-2029 sebagai berikut :



Visi 2025-2029 "Menuju Asmat Yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera"



Gambar 3. 3 Visi 2025-2029 "Menuju Asmat yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera"

3.4.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Asmat 2026-2030

Prioritas Pembangunan Kabupaten Asmat tahun 2026–2030 diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Seluruh prioritas ini dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik geografis, sosial budaya, serta tantangan lingkungan Kabupaten Asmat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkelanjutan.



Berikut adalah Tahapan Prioritas Pembangunan 2026-2030:

A. Prioritas Pembangunan Tahun 2026 :

1. Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan
3. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
4. Penguatan Infrastruktur Dasar
5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif

B. Prioritas Pembangunan Tahun 2027 :

1. Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan
3. Peningkatan Produktivitas Daerah dan Infrastruktur Dasar
4. Penguatan Ekonomi lokal melalui UMKM dan Koperasi
5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif

C. Prioritas Pembangunan Tahun 2028 :

1. Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Pendidikan
2. Penguatan Daya Saing SDM Berkelanjutan
3. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
4. Peningkatan Skil dan Partisipasi Masyarakat dalam sector ekonomi
5. Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah

D. Prioritas Pembangunan Tahun 2029 :

1. Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Pendidikan
2. Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan
3. Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah (Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Budaya)
4. Penguatan kerjasama pemerintahan antar wilayah
5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

E. Prioritas Pembangunan Tahun 2030 :

1. Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Pendidikan
2. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
3. Penguatan Infrastruktur Dasar dan konektivitas wilayah
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- 6.



Tabel 3. 3 Penahapan Pembangunan RPJMD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1) Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	1) Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	1) Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Pendidikan	1) Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Pendidikan	1) Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Pendidikan
2) Peningkatan Kualitas Pendidikan	2) Peningkatan Kualitas Pendidikan	2) Penguatan Daya Saing SDM Berkelanjutan	2) Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	2) Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
3) Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	3) Peningkatan Produktivitas Daerah dan Infrastruktur Dasar	3) Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	3) Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah (Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Budaya)	3) Penguatan Infrastruktur Dasar dan konektivitas wilayah
4) Penguatan Infrastruktur Dasar	4) Penguatan Ekonomi lokal melalui UMKM dan Koperasi	4) Peningkatan Skil dan Partisipasi Masyarakat dalam sector ekonomi	4) Penguatan kerjasama pemerintahan antar wilayah	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
5) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif	5) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif	5) Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	5) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	5) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

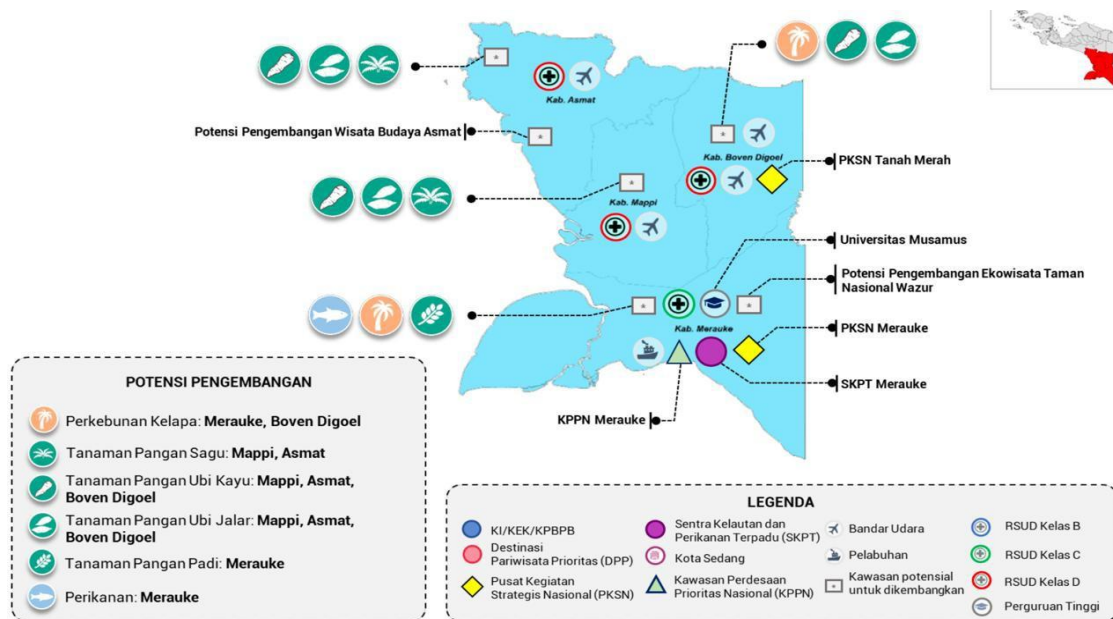
COV



3.4.3. Arah Kebijakan Kewilayahan

1) Arah Pengembangan Wilayah Asmat

Sesuai dengan arahan dalam RIPP 2021-2042, posisi Kabupaten Asmat dalam pengembangan wilayah adat Anim Ha merupakan salah satu kawasan strategis nasional sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN). Selain itu, kebijakan pengembangan wilayah adat Anim Ha terutama kabupaten Asmat difokuskan pada pengembangan komoditas sagu, kelautan dan perikanan serta jasa lingkungan dan pariwisata budaya.



Gambar 3. 4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Adat Anim Ha
Sumber: RIPP 2022-2041 (2023)

Selanjutnya, arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Anim Ha diantaranya: Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan Yang Terstandar, Serta Pengembangan Wilayah Adat Anim Ha Sebagai **Sentra Tanaman Pangan, Perkebunan, Kelautan Dan Perikanan, Serta Ekowisata Berkelanjutan Dan Berorientasi Global**. Adapun arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

- (1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
- (2) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- (3) Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*);
- (4) Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;



- (5) Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
- (6) Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung; Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda; Mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan hasil pertanian tanaman pangan;
- (7) Mengembangkan pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokat (PKL); dan Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan: a) Mengembangkan sentra tanaman pangan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha; b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi perkebunan serta kelautan dan perikanan; c) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global; dan d) Mendorong pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan negara.

Selain kondisi diatas, arah pengembangan wilayah di Kabupaten Asmat, di gambarkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi bagian penting dalam konteks perencanaan dan pengembangan wilayah sebab, RTRW merupakan dokumen perencanaan yang mengatur tata ruang suatu wilayah dalam skala kabupaten/kota atau bahkan provinsi yang mencakup aspek-aspek seperti penggunaan lahan, zona-zona khusus, transportasi, pemukiman, dan lain- lain. Penelaahan dokumen ini memastikan bahwa pembangunan dapat berlangsung sesuai dengan rencana jangka panjang yang terumuskan dalam Tujuan, Kebijakan, dan Strategi-Strategi Penataan Ruang yang telah ditetapkan.

Tujuan Penataan ruang **wilayah Kabupaten Asmat** adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan **sebagai pusat pengembangan kebudayaan masyarakat zona ekologi lahan basah dataran rendah berbasis sektor pariwisata budaya dan alam sebagai sektor ekonomi unggulan, didukung oleh sektor kehutanan, perikanan dan kelautan**. Dalam mendukung tercapainya Tujuan Penataan ruang wilayah tersebut, telah terumuskan berbagai kebijakan dan strategi penataan ruang yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Telaah RTRW Kabupaten Asmat Tahun 2021-2041

Tujuan	Arah Kebijakan	Strategi
	a. Pengembangan pariwisata budaya dan alam sebagai sektor ekonomi unggulan, didukung oleh sektor kehutanan serta perikanan dan kelautan sebagai sektor ekonomi pendukung;	Pengembangan pariwisata budaya dan alam sebagai sector ekonomi unggulan, didukung oleh sector kehutanan serta perikanan dan kelautan
	b. Pengelolaan ekosistem lahan basah dataran rendah dan hutan sagu secara berkelanjutan;	Pengelolaan ekosistem lahan basah dataran rendah dan hutan sagu secara berkelanjutan
	c. Pengembangan	a. Pengembangan manajemen resiko bencana



Tujuan	Arah Kebijakan	Strategi
	<p>manajemen resiko bencana;</p> <p>d. Pemantapan peran pusat-pusat kegiatan wilayah sesuai dengan struktur dan hierarkinya dengan tanpa mengakibatkan alih fungsi lahan utama pertanian dan kawasan lindung;</p> <p>e. Pengembangan sistem transportasi pendukung ekonomi dan pelayanan umum dengan tanpa mengakibatkan alih fungsi lahan utama pertanian dan kawasan lindung;</p> <p>f. Pengembangan sistem prasarana telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dan merata;</p> <p>g. Mempertahankan kawasan lindung dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;</p> <p>h. Pengembangan dan peningkatan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan;</p> <p>i. Pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan sosial budaya, dan daya dukung lingkungan hidup; dan</p> <p>j. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.</p>	<p>b. Pemantapan peran pusat-pusat kegiatan wilayah sesuai dengan struktur dan hirarkinya</p> <p>c. pengembangan sistem transportasi pendukung ekonomi dan pelayanan umum</p> <p>d. pengembangan sistem prasarana telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dan merata</p> <p>e. pemantapan dan pengendalian fungsi kawasan lindung</p> <p>f. pengembangan dan peningkatan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan</p> <p>g. pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan sosial budaya, dan daya dukung lingkungan hidup</p> <p>h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara</p>

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Asmat Tahun 2021-2024

2) Integrasi Program Pasangan Kepala Daerah Terpilih Dalam RPJMD

Dalam RPJMD kabupaten Asmat tahun 2025-2029, terdapat program prioritas Pasangan Bupati terpilih. Program-program ini disampaikan sebagai janji kampanye yang mesti dilaksanakan dalam periode kepemimpinan mereka. Dalam Inmendagri No 2 Tahun 2025 terkait penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, dianjurkan agar kebijakan atau program-program tersebut diintegrasikan dengan Kebijakan Aksa Cita



sebagai program Pasangan Presiden Terpilih, lalu disinkronkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dengan perturan turunannya dan dicantumkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, ditampilkan dalam tabel berikut.



Tabel 3. 5 Integrasi Program Pasangan Kepala Daerah Terpilih dengan Astacita serta Permendagri 90 Tahun 2019

NO	PRIORITAS BUPATI	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	PROGRAM ASTACITA
1	1. Perluasan dan pemerataan pelayanan kesehatan dengan membangun poliklinik kesehatan di setiap kampung. 2. Pembangunan Puskesmas Rawat Inap di 10 (sepuluh) ibu kota distrik	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat (BJS dan penyediaan obat)
3	1. Pembinaan Generasi Muda Asmat melalui wadah OKP-OKP dan KNPI. 2. Dukungan dana pembinaan OKP melalui KNPI dalam setiap tahun anggaran	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pelestarian seni budaya peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga
3	1. Mengadakan festival seni setiap tahun. 2. Memelihara dan membina Kebudayaan Asmat dengan Jew sebagai pusat kebudayaan 3. Mempromosikan Budaya Asmat di dalam negeri dan luar negeri 4. Memberikan bantuan dan dukungan dana pembinaan kebudayaan kepada LMAA, FAR dan Wayir di setiap kampung dalam setiap tahun anggaran.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian seni budaya peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga
4	Penempatan tenaga medis dan tenaga paramedis di Puskesmas, Pustu dan Polindes.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat (BJS dan penyediaan obat)
5	1. Pemerataan kesempatan belajar dengan membangun sekolah di setiap kampung. 2. Pembangunan Sekolah Unggulan di ibukota kabupaten (SMP dan SMA). 3. Pembangunan Sarana PAUD di setiap Ibukota Distrik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penguatan pendidikan, sains, teknologi dan digitalisasi
6	1. Pembangunan Taman Bacaan dan Perpustakaan di setiap ibukota distrik	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Penguatan pendidikan, sains, teknologi dan digitalisasi
7	1. Bantuan modal usaha kepada UKM 2. Bantuan modal usaha kepada koperasi masyarakat, koperasi tani dan koperasi nelayan	PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Melanjutan pemerataan ekonomi penguatan UMKM dan IKN
8	Peningkatan kualitas pendidikan dengan upaya peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Penguatan pendidikan, sains, teknologi dan digitalisasi
9	Pembangunan jalan komposit beton di ibukota kabupaten	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
10	Pembangunan tanggul laut penahan abrasi di Agats, Atsy dan Akat	PROGRA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Menjamin pelestarian lingkungan hidup
11	1. Pembangunan sawah di beberapa distrik. 2. Pengadaan bibit tanaman pangan. 3. Pengembangan peternakan rakyat	PROGRAM PENGAWASAN KETAHAN PANGAN	Swasembada Pangan, Energi dan Air
12	1. Peningkatan bantuan alat produksi bagi petani. 2. Pemberian bantuan bibit ternak bagi peternak 3. Pembangunan sawah di beberapadistrik.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Swasembada Pangan, Energi dan Air
13	Rekrutmen tenaga penyuluh pertanian.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Menjamin kersediaan pupuk benih pestisida langsung ke petani
14	1. Peningkatan bantuan alat tangkap bagi nelayan pesisir. 2. Pengadaan alat tangkap bagi nelayan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberantasan kemiskinan



NO	PRIORITAS BUPATI	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	PROGRAM ASTACITA
15	Pengembangan budidaya perikanan.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Melanjutkan hilirasasi dan industrialiasai berbasis SDA dan maritime untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya mewujudkan kadilan ekonomi
16	1. pengadaan Longboat Fiber dan Engine sebanyak 1000 - 1500 unit selama 5 (lima) tahun, diperuntukan bagi masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir 2. Pemberdayaan nelayan.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Melanjutkan hilirasasi dan industrialiasai berbasis SDA dan maritime untuk membuka laangan kerja seluas-luasna mewujudkan kadilan ekonomi
	1. Pembangunan dermaga apung di 12 (dua belas) ibukota distrik (Akat, Sawa Erma, Komor, Agats, Yiow, Kamur, Cemoro, Binam, Yaosakor, Atsy, Pirimapun, Basim) 2. Peningkatan kapasitas Pelabuhan Agats. 3. Pembangunan Pelabuhan Sawa Erma	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Melanjutkan hilirasasi dan industrialiasai berbasis SDA dan maritime untuk membuka laangan kerja seluas-luasna mewujudkan kadilan ekonomi
	Peningkatan kapasitas Lapangan Terbang Kamur dan Lapangan terbang Suru-Suru	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	
	1. Pembangunan 1000-1500 unit rumah masyarakat 2. Pembangunan fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) di kampung-kampung 3. Pembangunan fasilitas Penampungan Air Hujan (PAH)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk mesyarakat desa
	1. Pembentukan 3 (tiga) distrik pemekaran. 2. Selatan dan Asmat Tengah). 3. Pemekaran Kampung. Pembentukan kelurahan di Agats, Atsy dan Sawa	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	Usulan pembentukan 2 (dua) kabupaten pemekaran (Asmat		
	1. Fokus pada pembinaan cabang olahraga : bola volley, sepak bola, tenis meja, bilyar, catur, futsal, atletik, renang, dayung, karate dan taekwondo sebagai cabang olah raga unggulan di Kabupaten Asmat. 2. Memastikan dana pembinaan atlet melalui KONI Daerah dalam setiap tahun anggaran 3. Pembinaan atlet daerah melalui wadah cabang olahraga dan KONI Daerah.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pelestarian seni budaya peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga
	1. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin. 2. Bantuan rujukan perawatan kesehatan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat (BJS dan penyediaan obat)
	Pembentukan dan pembinaan koperasi tani dan koperasi nelayan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Melanjutan pemerataan ekonomi penguatan UMKM dan IKN



Tabel 3. 6 Penyelarasan Program Dan Kegiatan Prioritas RPJMD Periode 2025 – 2029

NO	RPJMN TAHUN 2025 - 2029 KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	RPJMD PROVINSI TAHUN 2025 - 2029 KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	RPJMD KAB. ASMAT TAHUN 2025 - 2029 KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
(01)	(02)	(03)	(03)
1.	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	penyediaan rumah layak huni, peningkatan SPAM, SPAL, sistem drainase, dan pengelolaan sampah berbasis 3R	fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU, peningkatan SPAM, SPAL, dan sistem pengelolaan persampahan, perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital, pembangunan jalan akses simpul ekonomi, pengembangan sarana angkutan perintis darat dan udara
2.	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan	penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah
3.	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan	Penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta peningkatan akses internet dan listrik. Penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta peningkatan akses internet dan listrik
4.	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua	Penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran
5.	Pencegahan dan penurunan stunting	Pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting terjadi serta pemberian tata laksana, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari buffer stock, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin)	Penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB
6.	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	Peningkatan produktivitas perdesaan dan diversifikasi ekonomi lokal	Optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, penyediaan bibit unggul, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), pengolahan pasca panen komoditas, masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya, peningkatan akses pembiayaan modal, serta pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar,
7.	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan	Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan berbasis komoditas unggulan terutama di PKSN	Optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, penyediaan bibit unggul, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), pengolahan pasca panen komoditas, masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya, peningkatan akses pembiayaan modal, serta pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar,
8.	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Penguatan kawasan potensial swasembada pangan	Penguatan kawasan potensial swasembada pangan padi dan pangan akuatik/bluefood



NO	RPJMN TAHUN 2025 - 2029	RPJMD PROVINSI TAHUN 2025 - 2029	RPJMD KAB. ASMAT TAHUN 2025 - 2029
	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
		padi dan pangan akuatik/bluefood berbasis perikanan tangkap	berbasis perikanan tangkap
9.	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Peningkatan jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian pra panen, sistem drainase yang dibangun di kawasan transmigrasi, area penyaluran benih padi, serta penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju KSPP	Peningkatan jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian pra panen, sistem drainase yang dibangun di kawasan transmigrasi, area penyaluran benih padi, serta penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju KSPP
10.	Penurunan kematian ibu dan anak	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan
11.	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan Orang Asli Papua	Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan Orang Asli Papua



Selanjutnya Program Pasangan Kepala Daerah Terpilih diintegrasikan pula dalam RPJMD Kabupaten Asmat Periode 2025-2029, disinergikan dengan Indikator Sasaran dalam RPJPD Kabupaten Asmat Tahap I Periode 2025-2029, ditabelkan sebagai berikut:



Tabel 3. 7 Integrasi Program Pasangan kepala Daerah Terpilih dalam RPJMD Asmat Periode 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Visi	Menuju Asmat yang Cerdas Sehat dan Sejahtera (CERAH)				
Misi (1)	Meningkatkan Kualitas dan Standar pelayanan Kesehatan				
Terwujudnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas (OAP dan Non-OAP)	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas (OAP dan Non-OAP)	Meningkatnya Umur Harapan Hidup	Umur Harapan Hidup	1. Penempatan tenaga medis dan tenaga paramedis di Puskesmas, Pustu dan Polindes. 2. Bantuan rujukan perawatan kesehatan.	Urusan Wajib Terkait pelayanan Dasar
		Meningkatnya jumlah puskesmas yang diakreditasi	Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	1. Perluasan dan pemerataan pelayanan kesehatan dengan membangun poliklinik. kesehatan di setiap kampung. 2. Pembangunan Puskesmas Rawat Inap di 10 (sepuluh) ibukota distrik.	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar
		Meningkatnya jangkauan pelayanan kepesertaan jaminan kesehatan	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Bantuan rujuk dan perawatan kesehatan.	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar
Misi (2)	Meningkatkan kualitas dan standar pelayanan pendidikan				
		Meningkatnya APK PAUD, Literasi dan Numerasi	1. Angka APK PAUD 2. Angka literasi 3. Angka Numerasi	1. Pembangunan Sarana PAUD di setiap Ibu kota Distrik. 2. Pembangunan Taman Bacaan dan Perpustakaan di setiap ibukota distrik. 3. Pemerataan kesempatan belajar dengan membangun sekolah di setiap kampung. 4. Pembangunan SMP dan SMA berpola Asrama di setiap ibukota distrik. 5. Pembangunan Sekolah Unggulan di ibukota kabupaten (SMP dan SMA).	Urusan Wajib Terkait pelayanan Dasar
		Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	1. Bantuan studi bagi Mahasiswa dan PNS Tugas Belajar.	Urusan Wajib Terkait pelayanan dasar



Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Visi	Menuju Asmat yang Cerdas Sehat dan Sejahtera (CERAH)				
				2. Beasiswa bagi Siswa / Mahasiswa berprestasi.	
Misi (3)	Mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan				
Mewujudkan transformasi ekonomi perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, dan berdaya saing	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, berdaya)	Meningkatkan kontribusi sektor-sektor penunjang ekonomi dalam PDRB	4. Rasio PDRB terhadap industri (%) 5. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 6. Proporsi Kontribusi PDRB terhadap Provinsi/nasional 7. Tingkat Inflasi 8. Indeks Investasi daerah (ekonomi kreatif) 9. Rasio Kewirausahaan	1. Pembangunan sawah di beberapa distrik. 2. Pembangunan dan perluasan lahan perkebunan. 3. Rekrutmen tenaga penyuluh pertanian. 4. Pengadaan bibit tanaman pangan. 5. Pengembangan peternakan rakyat. 6. Pengadaan alat-alat pertanian. 7. Pemberdayaan nelayan. 8. Pengadaan alat tangkap bagi nelayan. 9. Pengembangan budidaya perikanan.	Urusan Pilihan
			1. Penurunan Tingkat kemiskinan (%) 2. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD (%) 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1. Pembentukan dan pembinaan koperasi tani dan koperasi nelayan. 2. Peningkatan bantuan alat tangkap bagi nelayan pesisir. 3. Peningkatan bantuan alat produksi bagi petani. 4. Pemberian bantuan bibit Pembinaan Generasi Muda Asmat melalui wadah OKP-OKP dan KNPI. 5. Lembaga-lembaga Adat / Wayir Lembaga-lembaga Keagamaan dan hibah ternak bagi peternak. 6. Pengadaan Longboat Fiber dan Engine sebanyak 1000 - 1500 unit selama 5 (lima) tahun, diperuntukan bagi masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir.	Urusan Pilihan



Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Visi	Menuju Asmat yang Cerdas Sehat dan Sejahtera (CERAH)				
				7. LMA Asmat / FAR, LMA Sawi, LMA Boupram, LMA Awyu, LMA Citak dan LMA Athokaim 8. Bantuan modal usaha kepada UKM Bantuan modal usaha kepada koperasi masyarakat, koperasi tani dan koperasi nelayan.	
Misi (4)	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur				
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar Menyeluruh	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya akses pelayanan transportasi kepada masyarakat	1. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap 2. Cakupan wilayah (kampung) yang dapat diakses jaringan dan layanan transportasi darat/laut/udara 3. Persentase Pelabuhan dalam kondisi mantap 4. Persentase Bandara dalam kondisi mantap 5. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* 6. Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan 7. Persentase Desa Mandiri	1. Pembangunan jembatan beton di 8 (delapan) ibukota distrik. 2. Pembangunan jalan komposit beton di ibu kota kabupaten. 3. Pembangunan tanggul laut penahan abrasi di Agats, Atsy dan Akat. 4. Pembangunan dermaga apung di 12 (dua belas) ibukota distrik (Akat, Sawa Erma, Komor, Agats, Yiow, Kamur, Cemoro, Binam, Yaosakor, Atsy, Pirimapun, Basim). 5. Peningkatan kapasitas Lapangan Terbang Kamur dan Lapangan terbang Suru- Suru. 6. Peningkatan kapasitas Pelabuhan Agats. 7. Pembangunan PLTD di 5(lima) ibu kota distrik. 8. Pembangunan Pelabuhan Sawa Erma. 9. Penyusunan rencana umum tata ruang ibukota kabupaten dan penyusunan rencana tata ruang ibukota distrik.	Urusan Wajib



Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Visi	Menuju Asmat yang Cerdas Sehat dan Sejahtera (CERAH)				
				10. Penyusunan rencana detail tata ruang ibukota kabupaten dan rencana detail tata ruang ibukota distrik.	
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar Menyeluruh	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, listrik, sanitasi dan air bersih serta telekomunikasi	Tersedianya rumah masyarakat yang layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan 1000-1500 unit rumah masyarakat. 2. Pembangunan fasilitas Penampungan Air Hujan (PAH). 3. Pembangunan fasilitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) di kampung-kampung. 	Urusan Wajib terkait pelayanan dasar
Misi (5)	Membangun birokrasi yang bersih, responsif, transparan dan akuntabel				
Mewujudkan transformasi tata kelola melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan profesional	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif		<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3. Indeks pelayanan publik 4. Indeks integritas nasional 5. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan organisasi perangkat daerah di pemerintahan kabupaten 2. Peningkatan kapasitas aparatur sipil melalui program tugas belajar, diklat dan bimtek. 3. Pengangkatan pejabat dalam jabatan struktural, 75% melalui rekrutmen terbuka (lelang jabatan) dan 25% pengangkatan pejabat merupakan <i>affirmative action</i> bagi aparatur sipil Asli Asmat 4. Penyediaan sarana prasarana sistem informasi pelayanan publik. 5. Meningkatkan pengawasan internal dilingkup pemerintah daerah. 	
Misi (6)	Mendorong pertumbuhan investasi dan memperluas lapangan kerja				
Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan yang Maju (budaya dan ekologi berbasis	Meningkatnya suasana kehidupan yang harmonis dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kebudayaan	1. Indeks Peradaban Pelestraian Budaya (OAP)	1. Memelihara dan membina Kebudayaan Asmat dengan Jew sebagai pusat kebudayaan.	Urusan Wajib Tdak Terkait dengan Pelayanan dasar



Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Visi	Menuju Asmat yang Cerdas Sehat dan Sejahtera (CERAH)				
Lokal People Center Development (OAP)	kearifan Lokal People Center Development (OAP))		2. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	<ul style="list-style-type: none"> 2. Mempromosikan Budaya Asmat di dalam negeri dan luar negeri. 3. Melakukan pendampingan dan menata struktur adat sebagai bagian dari upaya pengembangan Kebudayaan Asmat. 4. Membentuk sanggar seni di setiap distrik. 5. Memastikan dukungan APBD dalam pembinaan kesenian daerah. 6. Mengadakan festival seni setiap tahun. 7. Pembinaan Generasi Muda Asmat melalui wadah OKP-OKP dan KNPI. 8. Dukungan dana pembinaan OKP melalui KNPI dalam setiap tahun anggaran. 9. Pembinaan atlet daerah melalui wadah cabang olahraga dan KONI Daerah. 10. Pembangunan sawah di beberapa distrik. 11. Memastikan dana pembinaan atlet melalui KONI Daerah dalam setiap tahun anggaran. dengan fokus pada pembinaan cabang olahraga : bola volley, sepak bola, tenis meja, biliar, catur, futsal, atletik, renang, dayung, karate dan taekwondo sebagai cabang olah raga unggulan di Kabupaten Asmat. 	



3.4.4. Program Prioritas Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029

Program prioritas Kabupaten Asmat merupakan program yang diupayakan langsung bermanfaat pada kepentingan publik dan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar.



Tabel 3. 8 Program Prioritas Kabupaten Asmat 2025-2029

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	INDIKATOR (05)	PROGRAM PRIORITAS (06)	KETERANGAN (07)
20252029 - MENUJU ASMAT YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA. Meningkatkan standar dan kualitas pelayanan Kesehatan Memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan - Mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan Meningkatkan pembangunan infrastruktur Membangun birokrasi yang bersih, responsif, transparan dan akuntabel - Mendorong pertumbuhan investasi dan memperluas lapangan kerja	Terwujudnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita((%))		
				Angka Kematian Ibu (AKI)((per 100.000 kelahiran hidup))		
				Cakupan kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malariaa (%)		
				Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)		
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) (%)		
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) (%)		
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) (%)		
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatmentsuccess rate) (%) (%) (%)		
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatmentsuccess rate) (%) (%) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan (Kinerja)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kulaitas dan Distribus Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	i Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya Kulaitas dan Distribus Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	i Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan (Kinerja)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Terwujudnya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas	Pemenuhan Layanan dan jaminan Pendidikan yang berkualitas, merata untuk OAP dan Non OAP		Indeks Modal Manusia (IPM)(Indeks)		
				Numerasi (kab/kota) (%)		
				Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun (%)		
				Harapan Lama Sekolah (%)		
				Indeks Modal Manusia (IPM) (Indeks)		
				Literasi Membaca (Kab/kota) (%)		
				Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		
				Peningkatan Prestasi Olahraga (%)		
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda (16-30 tahun) yang Mengikuti Kegiatan Organisasi Dalam 3 Bulan Terakhir (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Pengembangan Kurikulum yang Muatan Lokal (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekurang kurangnya D-IV / S1 (Angka)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Persentase Guru yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD) (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Melanjutkan SD Ke SMP (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Kemampuan Numerasi Sekolah Mengah Pertama (SMP) (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Kemampuan Literasi Sekolah Mengah Atas (SMA) (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (SD) (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Melanjutkan SMP Ke SMA/SMK (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Kemampuan Numerasi Sekolah Mengah Atas (SMA) (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Sekolah (5-6) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16 - 18 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Kemampuan Literasi Sekolah Mengah Pertama (SMP) (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Indeks Partisipasi Olahraga (Angka)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan Lokal People Center Development (OAP)			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))		
				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))		
		Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju (budaya dan ekologi berbasis kearifan Lokal People Center Development (OAP))		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))		
				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))		
		Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
	Mewujudkan transformasi ekonomi perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, berdaya saing			Tingkat Pengangguran zerbukaa(%)		
				Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD (%)		
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) ((%))		
				Indeks Peradaban Pelestraian Budaya (OAP) ((%))		
		Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, Berdaya)		Iptek dan Inovasi (% PDRB Pertanian) (%)		
				Rasio Kewirausahaan Daerah (%) (%)		
				Proporsi Kontribusi PDRB terhadap Nasional (%) (%)		
				Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)		
				Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB- (%)		
				Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		
				Return on Aset (ROA) BUMD- (%)		
				Jumlah Wisatawan Berbintang orang) (%)		
				Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD (%)		



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
				Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)		
				Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) (%)		
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (%)		
			Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya (Angka)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Berkebangsaan (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku (%)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya kelancaran distribusi barang dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				(Persentase)		
			Meningkatnya Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya mutu niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Meningkatnya pelaku usaha berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Dalam Negeri (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Prioritas Yang Meningkatkan Produktifitasnya (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Kabupaten Yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
		Transformasi Digital		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks)		
			Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Pemerintah Daerah	dan Terintegrasi (%)	DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
	Kepemimpinan, kearifan lokal (CoE) P2BIT (Perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, berdaya)			Indeks Peradaban Pelestraian Budaya (OAP)) (%)		
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Berkebangsaan (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku (%)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Terlestarikan Cagar Budaya (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
	Mempercepat pemerataan pembangunan, keadilan untuk semua serta pengentasan kemiskinan	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Persentase Desa Mandiri(%)		
				Persentase Desa Mandiri (%)		
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan	Persentase Desa Mandiri (%) (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang (%)	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi Yang Dilaksanakan (%)	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya Pemberdayaan Dan Kapasitas Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	Persentase Desa Mandiri (%) (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Persentase Jumlah Pemberdayaan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat	2.13.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Masyarakat Papua	Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	DAN KAMPUNG PAPUA	
			Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
			Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif			Persentase Penduduk Miskin(%)		
		Perlindungan Sosial yang Adaptif		Persentase Penduduk Miskin (%)		
				Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%))		
			Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Kompetensi Teknis (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi (Lembaga)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Sertifikasi (Orang)	SOSIAL	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi biru			Indeks Ekonomi Hijau Daerah(Angka)		
				Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Angka)		
		Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi biru		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)		
				Indeks Ekonomi Biru (%)		
				Indeks Ekonomi Biru (%)		
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase kelembagaan petani yang dibentuk (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Usaha Perikanan yang Diawasi (Angka)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan Yang Dibina (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Sarana Prasarana Perikanan Tangkap yang Disediakan (%)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Persentase Kelompok Perikanan Tangkap yang Dibina (%)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yang Disediakan (%)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Persentase Kelompok Perikanan Budidaya yang Dibina (%)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
	Terwujudnya infrastruktur yang handal melalui pemerataan, pengembangan wilayah dan konektivitas			Persentase Pelabuhan dalam kondisi mantapp(%)		
				Persentase Bandara dalam kondisi mantapp(%)		
				Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)(%)		
				Cakupan wilayah (kampung) yang memiliki akses sinyal internet(%)		
				Akses Rumah Tangga Perkotaan		



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				terhadap Air Siap Minum Perpipaan((%))		
				Indeks Risiko Bencana (IRB)(Indeks)		
				Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantapp(%)		
		Berketahanan Energi, Air, Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan		Cakupan wilayah (kampung) yang dapat diakses jaringan dan layanan transportasi darat/laut/udaraa (%)		
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))		
				Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar) (%)		
				Persentase Bandara dalam kondisi mantapp (%)		
				Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantapp (%)		
				Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)) (%)		
				Persentase Pelabuhan dalam kondisi mantapp (%)		
				Cakupan wilayah (kampung) dengan akses jaringan telepon/ selulerr (%)		
				Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)) (%)		
				Cakupan wilayah (kampung) yang memiliki akses sinyal internet (%)		
				Kapasitas Air Baku ((%))		
			Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut (Unit)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
			Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya PEngendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Persentase Pengendalian KKOP (Persentase)	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	
			Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Sarana dan Utilitas Umum (%)	PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi (Ha)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Terpenuhi Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)		
				Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)) (%)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase penanganan pra bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
	Terwujudnya transformasi tata Kelola melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan profesional			Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%)		
				Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)		
				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
				Indeks Integritas Nasional (Persentase)		
				Indeks persepsi korupsi (Indeks)		
		Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
				Indeks persepsi korupsi (Indeks)		
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)		
				Indeks Integritas Nasional (Persentase)		
				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya (Angka)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
		Meningkatkan Ketersediaan, Kualitas dan Aksesibilitas Data Statistik Sektoral yang Akurat dan Relevan	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan (%)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
		Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Agats	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
		Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Akat	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
		Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Aswi	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Atsj	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Awyu	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Ayip	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Betchbamu	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Der Koumor	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Fayit	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Jetsy	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Joerat	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Joutu	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Kolf Braza	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Kopay	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Koroway Buluanop	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Pantai Kasuari	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Pulau Tiga	Indeks pelayanan publikk (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Safan	Indeks pelayanan publikk (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Sawaerma	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Sirets	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Sor Ep	Indeks pelayanan publikk (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Suator	Indeks pelayanan publikk (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Suru-suru	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik tomor birif	Indeks pelayanan publikk (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan	Indeks pelayanan publikk (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Publik di Distrik Unir Sirau		PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Presentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan Di Distrik Akat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan di distrik awyu	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan Distrik di Joerat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas ASN	Perentase Terlaksana Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Persentase Pegawai dengan SKP bernilai baik (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas dan Pengembangan Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Efektifitas Kerjasama Daerah (Dokumen)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Angka)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Indeks Reformasi Birokrasi (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. ((%))	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akte yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akte Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akte Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akte Perceraian yang	2.12.03 PROGRAM	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan (%)	PENCATATAN SIPI	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KIA (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Agats	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Aswi	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Ayip	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Betchbamu	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kualitas	Persentase Fasilitas	7.01.03 PROGRAM	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Der Koumor	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Distrik Atsj	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Distrik Joutu	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Fayit	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Jetsy	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Kolf braza	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Kopay	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Koroway Buluanop	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Pantai Kasuari	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Pulau Tiga	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Masyarakat Hukum Adat (%)		
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Safan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Sawa Erma	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Sirets	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Sor Ep	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Suator	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Suru-suru	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Tomor Birif	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Unir Sirau	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Distrik Agats	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Akat	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitas Tata Kelola	7.01.06 PROGRAM	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Desa (%)	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Aswi	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Distrik Atsj	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya. (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Awyu	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik ayip	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Betchbamu	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Der komur	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa. (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Distrik Jetsy	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya. (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa. (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Joerat	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Distrik Joutu	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya. (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Kolf Braza	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Distrik	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Koroway Buluanop	Kapasitasnya (%)	PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Distrik Pantai Kasuari	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya. (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa. (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Pulau Tiga	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Safan	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Sawa Erma	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Distrik Siret	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Pemerintahan Desa di Distrik Sor Ep	Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa. (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Distrik Suator	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya. (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa. (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Suru-Suru	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Distrik Tomor Birif	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Unir Sirau	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya Kualitas	Persentase Indikator Renstra PD	5.01.03 PROGRAM	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	yang konsisten dengan Indikator RPJMD (%)	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Rpjmd Dengan Renstra Perangkat Daerah (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Kompetensi Teknis (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya Pemanfaatan Kualitas Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang Lain yang Tersusun (%)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas (Nilai)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
				Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Akat	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Betchbamu	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Der Kokumor	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Distrik Atsj	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik distrik Awyu	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Distrik Joerat		KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Joutu	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Safan	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Suator	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Tomor Birif	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Unir Sirau	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Distrik Pulau Tiga	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Dalam Negeri (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintahan (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			MENINGKATNYA PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan PILKADA (Angka)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Presentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Prioritas Yang Meningkatkan Produktifitasnya (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran Atau pun Proses dan Kewenangan	Indeks persepsi korupsi (Indeks)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
			Terlaksananya Dukungan	Persentase Dukungan	4.02.02 PROGRAM	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR (%)	DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah((%))		
		Lingkungan Hidup Berkualitas		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))		
				Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Poin)		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)		
				Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)		
				Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))		
			Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Direistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
			Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati (Indeks)	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	
			Meningkatnya Kualitas Kelestarian Hutan Adat	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Baik Secara Ekonomi untuk Menjaga	3.28.08 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Kelestarian Hutan (Angka)		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
			Meningkatnya Tata Kelola Tanah Ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase)	2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	
			Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah (%)	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
			Menurunnya Pencemaran dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Terwujudnya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
	Mewujudkan transformasi tata Kelola melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan profesional dan kemandirian			Indeks demokrasi Indonesia (Indeks)		
				Tingkat keamanan wilayah (%)		
		Kondusivitas wilayah yang berbasis pada harmonisasi		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area		



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
	wilayah (Terwujudnya kemandirian wilayah)	keragaman masyarakat		Tempat Tinggalnya ((%))		
				Indeks demokrasi Indonesia (Indeks)		
				Tingkat keamanan wilayah (%)		
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Agats	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Akat	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Aswi	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Ayip	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Ketertiban Umum di distrik Betchbamu		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Der Kokumor	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Distrik Atsj	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik distrik Awyu	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Distrik Joerat	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Fayit	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Jetsy	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Joutu	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Kolf Braza	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Kopay	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Koroway Buluanop	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Pantai Kasuari	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Safan	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Sawaerma	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Sirets	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Sor Ep	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Suator		KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Suru-suru	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Tomor Birif	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Unir Sirau	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Distrik Pulau Tiga	Indeks Rasa Aman (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran		KONFLIK SOSIAL	
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (Nilai)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)((%)		
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)(Indeks)		
		Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)((%)		
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Kesenjangan Gender (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesenjangan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan perempuan dan Anak	Indeks Kesenjangan Gender (%)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesenjangan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (PUDPAGA) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan dan Pelatihan (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan	Angka Prevalensi Kb Modern (Angka)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Eksploitasi Penelantaran Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Presentase Koeban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara Komprehensif	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro			Tingkat Inflasi Pendalaman/Inter mediasi Sektor Keuangan(%)		
				Indeks Investasi Daerah (Ekonomi Kreatif))(Angka)		
		Stabilitas Ekonomi Makro		Indeks Investasi Daerah (Ekonomi Kreatif) (Angka)		
				Tingkat Inflasi Pendalaman/Inter mediasi Sektor Keuangan (%)		
				Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) (%)		
				Total Kredit/PDRB ((%))		
				Total Dana Pihak Ketiga/PDRB ((%))		
				Inklusi Keuangan ((%))		
				Aset Dana Pensiun/PDRB ((%))		
				Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan ((%))		
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))		



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan Ekspor (Angka)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Presentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Kapasitas UMKM Yang Tangguh Dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari InformasI Ke Formal (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks persepsi korupsi (Indeks)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Opini BPK terhadap LKPD Asmat (Nilai)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi Yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (%)	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akte yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akte Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akte Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akte Perceraian yang	2.12.03 PROGRAM	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan (%)	PENCATATAN SIPI	
			Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan dan distribusi barang yang efisien	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya Legalitas Koperasi	Persentase Koperasi Yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (%)	2.17.09 PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya Pemanfaatan Kualitas Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang Lain yang Tersusun (%)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi (%)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Produktifitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Opini BPK terhadap LKPD Asmat (Nilai)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	



Tabel 3. 9 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Asmat 2025-2029

No.	Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
Visi: Menuju Asmat yang sehat, Cerdas dan Sejahtera			
1	Misi 1: Meningkatkan standar dan kualitas pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. 2) Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun rujukan sesuai standar dan terakreditasi melalui peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan mengutamakan OAP serta telemedicine, dan mobile health services (pelayanan kesehatan bergerak) yang disinergikan dengan moda transportasi lainnya untuk daerah yang sulit dijangkau. 3) Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun rujukan sesuai standar dan terakreditasi melalui peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan mengutamakan OAP serta telemedicine, dan mobile health services (pelayanan kesehatan bergerak) yang disinergikan dengan moda transportasi lainnya untuk daerah yang sulit dijangkau. 4) Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kelompok agama dalam penyediaan layanan kesehatan di wilayah sulit akses. 5) Percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendidikan, pendayagunaan, peningkatan tenaga medis dan tenaga kesehatan lokal dengan mengutamakan OAP, serta pengembangan insentif khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah sulit akses dan perbatasan. 6) Pendampingan daerah dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 7) Pemenuhan sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan merata di semua wilayah, termasuk jaringan internet, listrik dan sarana prasarana penanganan limbah medis. 8) Peningkatan pelayanan pada Akseptor KB. 9) Peningkatan Kapasitas SDM Petugas KB. 10) Percepatan penurunan stunting terutama melalui peningkatan perilaku dan lingkungan sehat serta pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal. 11) Peningkatan lingkungan sehat dan fogging. 	
2	Misi 2: Memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan pendidikan di semua jenjang melalui sekolah alam dan sekolah berpola asrama. 2) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 3) Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan yang sesuai dengan komoditas unggulan sesuai karakteristik daerah. 4) Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka. 5) Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi tenaga pendidik dengan mengutamakan OAP. 6) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi wilayah di bidang industri, pertanian, dan perkebunan, serta perikanan 7) Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (life skills) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya). 	
3	Misi 3: Mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian (tanaman pangan), perkebunan dan perikanan, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan pasar di kawasan pedesaan & perkotaan. 	



No.	Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
Visi: Menuju Asmat yang sehat, Cerdas dan Sejahtera			
		<ol style="list-style-type: none"> 2) Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kegiatan pemasaran komoditas unggulan. 3) Peningkatan rantai nilai antar kabupaten, provinsi, nasional dan global melalui skema-skema kerja sama antar kabupaten, Provinsi, Nasional, dan internasional. 4) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. 5) Peningkatan keterkaitan IKM, UMKM, dan BUMKam pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. 6) Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif. 7) Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas. 8) Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. 9) Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. 10) Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi resiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim. 11) Penguatan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas. 12) Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T. 	
4	Misi 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan infrastruktur pusat kegiatan Ekonomi yang tangguh bencana (Penguatan instrumen AMDAL Pengembangan objek ekowisata dan jasa lingkungan). 2) Pembangunan jalan dan jembatan baru yang menjadi akses ekonomi wilayah. 3) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur air bersih dan Penyediaan Sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat tidak mampu. 4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. 5) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong untuk mengatasi abrasi pantai. 6) Penyediaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian. 7) Peningkatan normalisasi sungai. 8) Bantuan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat. 9) Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan hidup. 10) Peningkatan Pembangunan Tower seluler sampai ke kampung kampung. 	



No.	Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
Visi: Menuju Asmat yang sehat, Cerdas dan Sejahtera			
5	Misi 5: Membangun birokrasi yang bersih, responsif, transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penataan struktur kelembagaan pemerintah Asmat sesuai struktur dan fungsi berbasis pemenuhan kinerja untuk pencapaian tujuan pembangunan Asmat. 2) Peningkatan komunikasi dan kerjasama lembaga eksekutif dan legislatif khususnya dalam penganggaran dan pengawasan. 3) Peningkatan sistem akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 4) Implementasi SPIP. 5) Pengawasan internal secara reguler dan khusus. 6) Tindak lanjut hasil pemeriksaan. 7) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah. 8) Meningkatkan kualitas pelayanan penatausahaan keuangan daerah yang lebih profesional. 9) Bintel dan pelatihan bagi aparat pengawasan. 10) Peningkatan optimalisasi pengelolaan PAD. 11) Penggalan sumber pendapatan daerah. 12) Penataan regulasi pendapatan daerah. 13) meningkatkan kualitas data pembangunan daerah sektoral dan spasial untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. 14) Peningkatan kerjasama pembangunan. 15) Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah berbasis sektoral dan spasial. 16) Pendidikan dan Pelatihan Struktural, prajabatan dan tufoksi. 17) Peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN Asmat melalui peningkatan jenjang pendidikan formal. 18) Peningkatan aktivitas forum forum keamanan dan kenyamanan masyarakat. 19) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan. 20) Peningkatan kesiapan aparat dalam menangani berbagai kasus pelanggaran keteriban umum. 21) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan PILKADA. 22) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil. 	
6	Misi 6: Mendorong pertumbuhan investasi dan memperluas lapangan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penguatan forum-forum komunikasi guna menampung Aspirasi dan komunikasi DPRD, masyarakat dan pemerintah. 2) Peningkatan kinerja komunikasi dan informasi. 3) Penguatan kelembagaan daerah terhadap kebencanaan. 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebencanaan. 5) Peningkatan kerjasama antar stakeholder tentang kebencanaan. 6) Menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, berbudaya serta selaras dengan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dan pelestarian alam. 7) Pengendalian Inflasi. 8) Pengelolaan Anggaran Daerah (Pemerintah perlu menjaga keseimbangan anggaran daerah, menghindari defisit yang berlebihan, dan mengelola utang secara efektif). 9) Penyusunan kebijakan pajak yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan. 10) Peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja. 11) Peningkatan penyerapan tenaga kerja. 12) Peningkatan fasilitasi hubungan industrial. 13) Penyediaan solar cell di distrik dan Kampung. 	



No.	Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
Visi: Menuju Asmat yang sehat, Cerdas dan Sejahtera			
		<p>14) Percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian (tanaman pangan), perkebunan dan perikanan, kelautan penguatan sentra-sentra produksi di kawasan distrik serta sentra pengolahannya.</p> <p>15) Pengembangan ekonomi kreatif.</p> <p>16) Pengembangan, IKM,UMKM dan BUMKam.</p> <p>17) Pembangunan dan pengembangan Koperasi.</p> <p>18) Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan pariwisata, melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dan pengembangan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan.</p> <p>19) Pembangunan etalase pusat kegiatan ekonomi dan budaya.</p> <p>20) Penguatan Koordinasi ijin Penanaman Modal, sehingga investor sesuai dengan fungsi dan peruntukan ruang.</p> <p>21) Membangun aplikasi yang menginformasikan dengan sistem pelayanan perizinan, peluang investasi dan tata ruang wilayah.</p> <p>22) Pembangunan etalase pusat kegiatan ekonomi dan budaya.</p> <p>23) Pengembangan kampung wisata berbasis budaya.</p> <p>24) Peningkatan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif sesuai dengan karakteristik lokal.</p> <p>25) Menciptakan Lingkungan Hidup Berkualitas.</p> <p>26) Peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan pemerintahan kampung.</p> <p>27) Pengembangan objek daya tarik wisata alam dan budaya.</p> <p>28) Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik).</p>	



Tabel 3. 10 Sandingan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Astacita, 17 Program Prioritas Nasional

VISI / MISI (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	URUSAN / BIDANG URUSAN (04)	PROGRAM (05)	KEGIATAN (06)	SUBKEGIATAN (07)	PERANGKAT DAERAH (08)	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN (09)
20252029 - MENUJU ASMAT YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA.								
Meningkatkan standar dan kualitas pelayanan Kesehatan								
	Terwujudnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas						
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
				DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota			penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan								
	Terwujudnya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan inovatif yang berkualitas	Pemenuhan Layanan dan jaminan Pendidikan yang berkualitas, merata untuk OAP dan Non OAP						
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
								penyandang disabilitas.
Mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan								
	Mewujudkan transformasi ekonomi perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, berdaya saing	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, Berdaya)						
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3.26.2.22.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan	3.26.2.22.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
						Kabupaten/Kota		mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.2.22.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.2.22.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.2.22.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.30.3.31.0.00.12.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	3.30.3.31.0.00.12.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
	Mewujudkan transformasi ekonomi perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, berdaya	Transformasi Digital						



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
	saing							
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunika Publik	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas iKomunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunika Publik	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas iKomunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
			INFORMATIKA		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	atau Kota Cerdas		korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
	Mewujudkan transformasi ekonomi perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, berdaya saing	Kepemimpinan, kearifan lokal (CoE) P2BIT (Perekonomian yang unggul, berbasis pelestarian Budaya wisata sesuai Karakteristik Lokal, berdaya)						
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	3.26.2.22.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	3.26.2.22.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	3.26.2.22.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	3.26.2.22.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3.26.2.22.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3.26.2.22.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
								mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.2.22.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.2.22.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.2.22.0.00.03.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
	Mempercepat pemerataan pembangunan, keadilan untuk semua serta pengentasan kemiskinan	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi						
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif						
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
					Kabupaten/Kota	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi biru	Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi biru						
			3.25 - URUSAN	3.25.03 - PROGRAM	3.25.03.2.02 -	3.25.03.2.02.0001 -	3.25.0.00.0.00.01.0000 -	Memantapkan sistem pertahanan



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
			PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	2.09.3.27.0.00.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
Meningkatkan pembangunan infrastruktur								
	Terwujudnya infrastruktur yang handal melalui pemerataan, pengembangan wilayah dan konektivitas	Berketahanan Energi, Air, Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan						
			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.09.3.27.0.00.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0008 - Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2.09.3.27.0.00.02.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan	2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
					Sungai dan Danau			
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.13.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
	Terwujudnya infrastruktur yang handal melalui pemerataan, pengembangan wilayah dan konektivitas	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim						
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Membangun birokrasi yang bersih, responsif, transparan dan akuntabel								
	Terwujudnya transformasi tata Kelola melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan profesional	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif						
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
					Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pekerja		
			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi dan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
				PENGAMANAN INFORMASI	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Informatika	swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	3.30.3.31.0.00.12.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
				LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik	korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
	Mewujudkan transformasi tata Kelola melalui penyelenggaraan pemerintahan an yang berintegritas dan profesional dan kemandirian wilayah (Terwujudnya kemandirian wilayah)	Kondusivitas wilayah yang berbasis pada harmonisasi keragaman masyarakat						
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
						Pengawasan		
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif						
			2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-	2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
					KB			
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Mendorong pertumbuhan investasi dan memperluas lapangan kerja								
	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro						
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	2.07.2.17.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
				PENANAMAN MODAL	Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terpadu Satu Pintu	meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan secara eksplisit akan diimplementasikan ke dalam program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengakomodir semua urusan pemerintahan. Selanjutnya dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kabupaten Asmat menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, prioritas pelayanan dasar dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan kebutuhan mandatory lainnya yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program perangkat daerah dan pendanaan program disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja perangkat daerah berdasarkan target kinerja yang harus diwujudkan dengan mempertimbangkan capaian kinerja serta pengeluaran perangkat daerah beberapa tahun sebelumnya. Penentuan pagu indikatif untuk belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah 5 (lima) tahun ke depan tentunya harus menyesuaikan dengan kapasitas riil keuangan Pemerintah daerah baik untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer dan mengikuti kaidah sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun rincian rencana program perangkat daerah yang disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan indikatif tahun baseline 2025 dan target kinerja 2026-2030 pada Tabel sebagai berikut :



Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					310.599.990.604,000		329.060.258.927,000		332.598.043.796,000		348.538.474.225,000		358.131.146.156,000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					154.068.303.880,000		169.696.875.421,000		179.180.297.186,000		195.375.763.200,000		190.908.976.260,000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Dinas Pendidikan	Persentase Indeks Persepsi Korupsi (%)	70,24	70,42	70,87	154.068.303.880,000	71,27	169.696.875.421,000	71,37	179.180.297.186,000	71,76	195.375.763.200,000	71,76	190.908.976.260,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					154.036.919.124,000		156.952.217.500,000		151.013.047.460,000		150.867.271.048,000		164.981.022.579,000	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Melanjutkan SD Ke SMP (%)	87,69	88,12	88,71	154.036.919.124,000	89,29	156.952.217.500,000	89,85	151.013.047.460,000	90,05	150.867.271.048,000	90,36	164.981.022.579,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Melanjutkan SMP Ke SMA/SMK (%)	84,58	85,23	85,68		86,31		86,64		87,28		88,26		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) (%)	17,09	19,95	2.282		25,68		28,55		31,41		34,27		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16 - 18 (%)	55,96	56,55	57,14		57,73		58,33		58,92		59,51		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 (%)	73,29	74,28	75,26		76,24		77,22		78,20		79,18		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (%)	21,76	25,45	29,14		32,83		36,52		40,20		43,89		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Kemampuan Literasi Sekolah	43,79	46,29	48,79		51,29		53,79		56,29		58,79		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
	Dasar (SD) (Angka)																	
	Kemampuan Literasi Sekolah Mengah Atas (SMA) (Angka)	54,18	54,78	55,38				55,98				56,58			57,18		57,78	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Kemampuan Literasi Sekolah Mengah Pertama (SMP) (Angka)	55,04	56,14	57,24				58,34				59,44			60,54		61,64	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (SD) (Angka)	43,43	46,33	49,23				52,13				55,03			57,93		60,83	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Kemampuan Numerasi Sekolah Mengah Atas (SMA) (Angka)	4.890	5.050	5.210				5.370				5.530			5.690		5.850	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
	Kemampuan Numerasi Sekolah Mengah Pertama (SMP) (Angka)	53,53	55,03	56,53				58,03				59,53			61,03		62,53	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					760.767.600,000		848.156.006,000		912.244.000,000		773.098.000,000		788.470.210,000					
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Pengembangan Kurikulum yang Muatan Lokal (%)	42,21	42,76	43,16	760.767.600,000	43,32	848.156.006,000	53,75	912.244.000,000	54,26	773.098.000,000	54,65	788.470.210,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					1.734.000.000,000		1.563.010.000,000		1.492.455.150,000		1.522.341.977,000		1.452.677.107,000					
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga	Kualifikasi dan Tenaga	46,03	55,27	55,84	1.734.000.000,000	56,21	1.563.010.000,000	56,62	1.492.455.150,000	56,93	1.522.341.977,000	57,23	1.452.677.107,000	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pendidikan	Kependidikan Sekurang kurangnya D-IV / S1 (Angka)													
	Persentase Guru yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	65,26	65,70	66,34		66,85		67,25		67,74		68,20		1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					307.349.930.380,000		317.863.963.557,500		333.661.986.816,880		344.627.130.311,820		356.995.701.531,000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					108.464.471.830,000		110.680.471.830,000		117.782.972.830,000		119.602.772.830,000		122.467.272.830,000	
Meningkatnya layanan administrasi penunjang urusan dinas Kesehatan	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	74.283.754.580,000	100	76.499.754.580,000	100	83.602.255.580,000	100	85.422.055.580,000	100	88.286.555.580,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya layanan administrasi penunjang urusan RSUD	Nilai Hasil LKJP (SAKIP) (Angka)	78,93	78,93	79,00	34.180.717.250,000	79,20	34.180.717.250,000	79,40	34.180.717.250,000	79,60	34.180.717.250,000	79,80	34.180.717.250,000	1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					196.374.033.550,000		204.579.931.727,500		213.171.932.761,880		222.168.978.913,820		231.524.423.749,000	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan (Kinerja)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	46.080.100.000,000	Sangat Baik	46.771.301.500,000	Sangat Baik	47.472.871.023,000	Sangat Baik	48.184.964.088,000	Sangat Baik	48.907.738.549,000	1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D
	Presentase rumah sakit pemerintah	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	terakreditasi paripurna (%)													Daerah Kelas D
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	129	129	124	150.293.933.550,000	119	157.808.630.227,500	114	165.699.061.738,880	109	173.984.014.825,820	104	182.616.685.200,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) (%)	28,3	24,5	22,4		19,6		17,7		14,9		11,03		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatmentsuccess rate) (%) (%)	95	95	95,8		96,6		97,4		98,2		99		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) (%)	80,22	80,22	79,226		78,232		77,238		76,244		75,25		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.278.620.000,000		1.286.270.000,000		1.294.034.750,000		1.313.795.971,000		1.321.795.411,000	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	100	100	100	510.000.000,000	100	517.650.000,000	100	525.414.750,000	100	533.295.971,000	100	541.295.411,000	1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Prersentase peningkatan tenaga	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	100	100	100	768.620.000,000	100	768.620.000,000	100	768.620.000,000	100	780.500.000,000	100	780.500.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
kesehatan pada Dinas Kesehatan														
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					126.000.000,000		161.765.000,000		162.541.475,000		180.329.597,000		197.129.541,000	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan (Kinerja)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	51.000.000,000	Sangat Baik	51.765.000,000	Sangat Baik	52.541.475,000	Sangat Baik	53.329.597,000	Sangat Baik	54.129.541,000	1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	100	100	100	75.000.000,000	100	110.000.000,000	100	110.000.000,000	100	127.000.000,000	100	143.000.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.106.805.000,000		1.155.525.000,000		1.250.505.000,000		1.361.253.000,000		1.485.080.000,000	
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	1.106.805.000,000	100	1.155.525.000,000	100	1.250.505.000,000	100	1.361.253.000,000	100	1.485.080.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					111.354.081.699,000		121.531.666.538,800		126.947.383.065,040		132.617.103.867,340		137.557.907.377,260	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					17.349.337.993,000		19.179.271.792,000		21.092.198.971,000		23.096.418.868,000		24.201.060.755,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkatnya layanan administrasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	17.349.337.993,000	100	19.179.271.792,000	100	21.092.198.971,000	100	23.096.418.868,000	100	24.201.060.755,000	1.03.1.04.0.00.01.000 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					3.697.995.000,000		3.753.464.925,000		3.809.766.899,000		3.866.913.402,000		3.924.917.103,000		
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi (Ha)	100	100	100	3.697.995.000,000	100	3.753.464.925,000	100	3.809.766.899,000	100	3.866.913.402,000	100	3.924.917.103,000	1.03.1.04.0.00.01.000 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100	1.03.1.04.0.00.01.000 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		100	1.03.1.04.0.00.01.000 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					8.053.440.000,000		8.174.241.600,000		8.296.855.224,000		8.421.308.052,000		8.547.627.673,000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	100	100	100	8.053.440.000,000	100	8.174.241.600,000	100	8.296.855.224,000	100	8.421.308.052,000	100	8.547.627.673,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					3.863.462.200,000		3.921.414.133,000		3.980.235.345,000		4.039.938.875,000		4.100.537.958,000	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	100	100	100	3.863.462.200,000	100	3.921.414.133,000	100	3.980.235.345,000	100	4.039.938.875,000	100	4.100.537.958,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					10.726.061.910,000		15.726.061.910,000		15.726.061.910,000		15.726.061.910,000		15.726.061.910,000	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	100	100	100	10.726.061.910,000	100	15.726.061.910,000	100	15.726.061.910,000	100	15.726.061.910,000	100	15.726.061.910,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					5.871.825.620,000		5.959.903.004,000		6.049.301.549,000		6.140.041.073,000		6.232.141.689,000	
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam	100	100	100	5.871.825.620,000	100	5.959.903.004,000	100	6.049.301.549,000	100	6.140.041.073,000	100	6.232.141.689,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kondisi Baik (Persentase)													Kawasan Permukiman
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					1.835.650.000,000		1.863.184.750,000		1.891.132.521,000		1.919.499.509,000		1.948.292.002,000	
Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	100	100	100	1.835.650.000,000	100	1.863.184.750,000	100	1.891.132.521,000	100	1.919.499.509,000	100	1.948.292.002,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					59.956.308.976,000		62.954.124.424,800		66.101.830.646,040		69.406.922.178,340		72.877.268.287,260	
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	100	100	100	59.956.308.976,000	100	62.954.124.424,800	100	66.101.830.646,040	100	69.406.922.178,340	100	72.877.268.287,260	1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					21.726.061.910,000		21.905.094.575,000		22.086.812.731,000		22.271.256.658,000		22.458.467.245,000	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					6.790.550.886,000		6.790.550.886,000		6.790.550.886,000		6.790.550.886,000		6.790.550.886,000	
Terpenuhiya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	6.790.550.886,000	100	6.790.550.886,000	100	6.790.550.886,000	100	6.790.550.886,000	100	6.790.550.886,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah	100	100	100		100		100		100		1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)													
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					565.500.000,000		565.500.000,000		565.500.000,000		565.500.000,000		565.500.000,000	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%)	100	100	100	565.500.000,000	100	565.500.000,000	100	565.500.000,000	100	565.500.000,000	100	565.500.000,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					11.370.011.024,000		11.549.043.689,000		11.730.761.845,000		11.915.205.772,000		12.102.416.359,000	
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Perumahan yang layak huni (%)	100	100	100	11.370.011.024,000	100	11.549.043.689,000	100	11.730.761.845,000	100	11.915.205.772,000	100	12.102.416.359,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					3.000.000.000,000		3.000.000.000,000		3.000.000.000,000		3.000.000.000,000		3.000.000.000,000	
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	100	100	100	3.000.000.000,000	100	3.000.000.000,000	100	3.000.000.000,000	100	3.000.000.000,000	100	3.000.000.000,000	1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN					11.825.633.684,000		11.993.603.579,000		12.099.361.550,000		12.320.155.607,000		12.491.951.121,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.567.121.356,000		7.671.213.566,000		7.712.135.687,000		7.867.121.356,000		7.972.121.356,000	
Meningkatnya layanan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintahh (Nilai)	79,50	80	82	7.567.121.356,000	85	7.671.213.566,000	87	7.712.135.687,000	88	7.867.121.356,000	90	7.972.121.356,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.838.512.328,000		1.866.090.013,000		1.894.081.363,000		1.922.492.584,000		1.951.329.972,000	
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100	100	1.838.512.328,000	100	1.866.090.013,000	100	1.894.081.363,000	100	1.922.492.584,000	100	1.951.329.972,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.585.000.000,000		1.608.775.000,000		1.632.906.625,000		1.657.400.224,000		1.682.261.228,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	0	0	100	1.585.000.000,000	100	1.608.775.000,000	100	1.632.906.625,000	100	1.657.400.224,000	100	1.682.261.228,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase	0	0	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	penanganan pra bencana (%)													Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	0	0	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					835.000.000,000		847.525.000,000		860.237.875,000		873.141.443,000		886.238.565,000	
Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (Nilai)	0	0	100	835.000.000,000	100	847.525.000,000	100	860.237.875,000	100	873.141.443,000	100	886.238.565,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	0	0	100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja		
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					15.375.000.000,000		15.434.800.000,000		15.936.000.000,000		16.323.800.000,000		15.922.000.000,000	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.501.000.000,000		5.358.800.000,000		5.633.000.000,000		5.664.800.000,000		5.410.000.000,000	
Meningkatnya layanan Administrasi Penunjang Urusan Dinas Sosial	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.501.000.000,000	100	5.358.800.000,000	100	5.633.000.000,000	100	5.664.800.000,000	100	5.410.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					4.881.000.000,000		4.888.000.000,000		5.055.000.000,000		5.256.000.000,000		5.205.000.000,000	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	0	0	5	4.881.000.000,000	7	4.888.000.000,000	8	5.055.000.000,000	9	5.256.000.000,000	10	5.205.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi (Lembaga)	2	2	2		2		2		2		2		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	-	-	50		55		60		70		80		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2.390.000.000,000		2.557.000.000,000		2.604.000.000,000		2.648.000.000,000		2.647.000.000,000	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100	2.390.000.000,000	100	2.557.000.000,000	100	2.604.000.000,000	100	2.648.000.000,000	100	2.647.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
	kebutuhan dasarnya (Persentase)																	
	Persentase (%) lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100				100				100				100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100				100				100				100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					2.005.000.000,000		2.061.000.000,000		2.073.000.000,000		2.085.000.000,000		2.060.000.000,000					
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi (Orang)	-	30	30	2.005.000.000,000	30	2.061.000.000,000	30	2.073.000.000,000	30	2.085.000.000,000	30	2.060.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	100	100	100				100				100			100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	
	Persentase Penerima Manfaat	100	100	100				100				100			100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)													
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					598.000.000,000		570.000.000,000		571.000.000,000		670.000.000,000		600.000.000,000	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	598.000.000,000	100	570.000.000,000	100	571.000.000,000	100	670.000.000,000	100	600.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial		
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%)	100	100	100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial		
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					10.809.909.000,000		10.827.309.000,000		10.844.883.000,000		10.862.632.740,000		10.880.559.978,000	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					8.969.909.000,000		8.969.909.000,000		8.969.909.000,000		8.969.909.000,000		8.969.909.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasii (%)	25,4	25,4	27,43	8.969.909.000,000	29,46	8.969.909.000,000	31,49	8.969.909.000,000	33,52	8.969.909.000,000	35,55	8.969.909.000,000	2.07.2.17.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000	
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Kabupaten Yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja (%)	0	0	1,1	100.000.000,000	1,2	100.000.000,000	1,3	100.000.000,000	1,3	100.000.000,000	1,4	100.000.000,000	2.07.2.17.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					750.000.000,000		757.500.000,000		765.075.000,000		772.725.750,000		780.453.008,000	
Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Prioritas Yang Meningkatkan Produktifitasnya (%)	0	0	5,1	750.000.000,000	5,5	757.500.000,000	5,9	765.075.000,000	6,3	772.725.750,000	6,7	780.453.008,000	2.07.2.17.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					685.000.000,000		691.850.000,000		698.768.500,000		705.756.185,000		712.813.747,000	
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Dalam Negeri (%)	0	0	5,1	685.000.000,000	5,3	691.850.000,000	5,5	698.768.500,000	5,7	705.756.185,000	5,9	712.813.747,000	2.07.2.17.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					305.000.000,000		308.050.000,000		311.130.500,000		314.241.805,000		317.384.223,000	
Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	0	0	1.000	305.000.000,000	1.100	308.050.000,000	1.200	311.130.500,000	1.300	314.241.805,000	1.400	317.384.223,000	2.07.2.17.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	(Angka)													
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					9.330.075.000,000		9.374.325.000,000		9.414.013.750,000		9.449.147.832,000		9.485.233.923,000	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.930.075.000,000		6.930.075.000,000		6.930.075.000,000		6.930.075.000,000		6.930.075.000,000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah (Angka)	100	100	100	6.930.075.000,000	100	6.930.075.000,000	100	6.930.075.000,000	100	6.930.075.000,000	100	6.930.075.000,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					440.000.000,000		446.600.000,000		453.299.000,000		460.098.485,000		466.999.962,000	
Meningkatnya Kualitas dan Evektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Kesetaraan Gender (%)	0,1	0,1	0,1	440.000.000,000	0,1	446.600.000,000	0,1	453.299.000,000	0,1	460.098.485,000	0,1	466.999.962,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					220.000.000,000		223.300.000,000		226.649.500,000		230.049.243,000		233.499.981,000	
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Presentase Koefisien Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan	50	50	50	220.000.000,000	50	223.300.000,000	60	226.649.500,000	60	230.049.243,000	70	233.499.981,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Komprehensif (%)													
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					730.000.000,000		740.950.000,000		752.064.250,000		763.345.214,000		774.795.392,000	
Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (PUDPAGA) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	5	5	5	730.000.000,000	7	740.950.000,000	9	752.064.250,000	10	763.345.214,000	10	774.795.392,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					150.000.000,000		155.000.000,000		160.000.000,000		160.000.000,000		160.500.000,000	
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan perempuan dan Anak	Indeks Kesetaraan Gender (%)	0,1	0,1	0,1	150.000.000,000	0,1	155.000.000,000	0,1	160.000.000,000	0,1	160.000.000,000	0,1	160.500.000,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					300.000.000,000		310.000.000,000		315.000.000,000		320.000.000,000		325.000.000,000	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara Komprehensif	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	50	50	50	300.000.000,000	50	310.000.000,000	60	315.000.000,000	60	320.000.000,000	70	325.000.000,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					560.000.000,000		568.400.000,000		576.926.000,000		585.579.890,000		594.363.588,000	
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Eksploitasi	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	50	50	50	560.000.000,000	50	568.400.000,000	60	576.926.000,000	60	585.579.890,000	70	594.363.588,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penelantaran Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak														Keluarga Berencana
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					4.675.336.160,000		4.415.250.000,000		4.481.478.750,000		4.548.700.931,000		4.616.931.446,000	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					1.325.336.160,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000	
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase cadangan pangan (%)	50	55	60	1.325.336.160,000	65	1.000.000.000,000	70	1.000.000.000,000	75	1.000.000.000,000	80	1.000.000.000,000	2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					2.600.000.000,000		2.639.000.000,000		2.678.585.000,000		2.718.763.775,000		2.759.545.232,000	
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	67,8	73,2	78,6	2.600.000.000,000	83,9	2.639.000.000,000	89,3	2.678.585.000,000	94,6	2.718.763.775,000	100	2.759.545.232,000	2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000		400.000.000,000	
Meningkatnya Penanganan Daerah Rentan Rawan Rawan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	40	35	32	400.000.000,000	29	400.000.000,000	26	400.000.000,000	22	400.000.000,000	18	400.000.000,000	2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					350.000.000,000		376.250.000,000		402.893.750,000		429.937.156,000		457.386.214,000	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	90	90	90	350.000.000,000	90	376.250.000,000	95	402.893.750,000	95	429.937.156,000	95	457.386.214,000	2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					2.945.500.000,000		3.189.682.500,000		3.034.527.738,000		3.080.045.654,000		3.326.246.339,000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					350.000.000,000		355.250.000,000		360.578.750,000		365.987.431,000		371.477.243,000	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	100	100	100	350.000.000,000	100	355.250.000,000	100	360.578.750,000	100	365.987.431,000	100	371.477.243,000	2.11.3.28.2.10.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					1.500.000.000,000		1.522.500.000,000		1.545.337.500,000		1.568.517.563,000		1.592.045.326,000	
Menignkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100	100	100	1.500.000.000,000	100	1.522.500.000,000	100	1.545.337.500,000	100	1.568.517.563,000	100	1.592.045.326,000	2.11.3.28.2.10.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	(Persentase)													
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					0,000		200.000.000,000		0,000		0,000		200.000.000,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Direistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	100	100	100	0,000	100	200.000.000,000	100	0,000	100	0,000	100	200.000.000,000	2.11.3.28.2.10.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					645.500.000,000		655.182.500,000		665.010.238,000		674.985.391,000		685.110.172,000	
Meningkatnya Tata Kelola Tanah Ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase)	100	100	100	645.500.000,000	100	655.182.500,000	100	665.010.238,000	100	674.985.391,000	100	685.110.172,000	2.11.3.28.2.10.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					450.000.000,000		456.750.000,000		463.601.250,000		470.555.269,000		477.613.598,000	
Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah (%)	100	100	100	450.000.000,000	100	456.750.000,000	100	463.601.250,000	100	470.555.269,000	100	477.613.598,000	2.11.3.28.2.10.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					13.846.415.000,000		13.887.615.000,000		13.980.183.000,000		14.124.139.521,000		14.219.505.387,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
LINGKUNGAN HIDUP														
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.616.415.000,000		7.616.415.000,000		7.616.415.000,000		7.616.415.000,000		7.616.415.000,000	
Meningkatnya layanan Administrasi Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	7.616.415.000,000	100	7.616.415.000,000	100	7.616.415.000,000	100	7.616.415.000,000	100	7.616.415.000,000	2.11.3.28.2.10.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					1.800.000.000,000		1.827.000.000,000		1.854.405.000,000		1.882.221.075,000		1.910.454.391,000	
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	1.800.000.000,000	100	1.827.000.000,000	100	1.854.405.000,000	100	1.882.221.075,000	100	1.910.454.391,000	2.11.3.28.2.10.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					600.000.000,000		609.000.000,000		618.135.000,000		627.407.025,000		636.818.130,000	
Menurunnya Pencemaran dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	100	100	100	600.000.000,000	100	609.000.000,000	100	618.135.000,000	100	627.407.025,000	100	636.818.130,000	2.11.3.28.2.10.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	100	100	100		100		100		100		100		2.11.3.28.2.10.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					500.000.000,000		507.500.000,000		515.112.500,000		522.839.188,000		530.681.775,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH (Persentase)	100	100	100	500.000.000,000	100	507.500.000,000	100	515.112.500,000	100	522.839.188,000	100	530.681.775,000	2.11.3.28.2.10.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					280.000.000,000		284.200.000,000		288.463.000,000		292.789.945,000		297.181.794,000	
Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	100	100	100	280.000.000,000	100	284.200.000,000	100	288.463.000,000	100	292.789.945,000	100	297.181.794,000	2.11.3.28.2.10.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					150.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000	
Terwujudnya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	150.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	2.11.3.28.2.10.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.11.11 - PROGRAM					2.900.000.000,000		2.943.500.000,000		2.987.652.500,000		3.032.467.288,000		3.077.954.297,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGLOLAAN PERSAMPAHAN														
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	100	100	100	2.900.000.000,000	100	2.943.500.000,000	100	2.987.652.500,000	100	3.032.467.288,000	100	3.077.954.297,000	2.11.3.28.2.10.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					9.397.740.000,000		9.397.740.000,000		9.397.740.000,000		9.397.740.000,000		9.397.740.000,000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.570.000.000,000		5.570.000.000,000		5.570.000.000,000		5.570.000.000,000		5.570.000.000,000	
Meningkatnya layanan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	100	100	100	5.570.000.000,000	100	5.570.000.000,000	100	5.570.000.000,000	100	5.570.000.000,000	100	5.570.000.000,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan KIA (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					2.045.740.000,000		2.045.740.000,000		2.045.740.000,000		2.045.740.000,000		2.045.740.000,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	100	100	100	2.045.740.000,000	100	2.045.740.000,000	100	2.045.740.000,000	100	2.045.740.000,000	100	2.045.740.000,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan KIA	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	(%)													dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000		1.000.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akte yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100	1.000.000.000,000	100	1.000.000.000,000	100	1.000.000.000,000	100	1.000.000.000,000	100	1.000.000.000,000	2.12.0.00.0.00.01.000 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akte Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.000 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akte Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.000 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akte Perceraian yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.000 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					582.000.000,000		582.000.000,000		582.000.000,000		582.000.000,000		582.000.000,000	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (%)	100	100	100	582.000.000,000	100	582.000.000,000	100	582.000.000,000	100	582.000.000,000	100	582.000.000,000	2.12.0.00.0.00.01.000 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGLOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN														
Meningkatnya Pemanfaatan Kualitas Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang Lain yang Tersusun (%)	100	100	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	2.12.0.00.0.00.01.000 0 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					12.513.831.715,00 0		12.563.831.715,00 0		12.563.831.715,00 0		15.563.831.715,00 0		15.563.831.715,00 0	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.513.831.715,000		6.513.831.715,000		6.513.831.715,000		6.513.831.715,000		6.513.831.715,000	
Meningkatnya layanan administrasi Penunjang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Nilai Hasil LKJP (SAKIP) (Angka)	70	75	75	6.513.831.715,000	80	6.513.831.715,000	80	6.513.831.715,000	80	6.513.831.715,000	85	6.513.831.715,000	2.13.0.00.0.00.01.000 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000	
Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	100	100	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA					300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
SAMA DESA														
Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	100	100	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3.350.000.000,000		3.400.000.000,000		3.400.000.000,000		6.400.000.000,000		6.400.000.000,000	
Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	Persentase Desa Mandiri (%) (%)	-	-	10	3.350.000.000,000	15	3.400.000.000,000	15	3.400.000.000,000	15	6.400.000.000,000	15	6.400.000.000,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.250.000.000,000		1.250.000.000,000		1.250.000.000,000		1.250.000.000,000		1.250.000.000,000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan	Persentase Desa Mandiri (%) (%)	5	5	5	1.250.000.000,000	5	1.250.000.000,000	5	1.250.000.000,000	5	1.250.000.000,000	5	1.250.000.000,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
2.13.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA					800.000.000,000		800.000.000,000		800.000.000,000		800.000.000,000		800.000.000,000	
Persentase Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Papua	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Desa	100	100	100	800.000.000,000	100	800.000.000,000	100	800.000.000,000	100	800.000.000,000	100	800.000.000,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)													
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					6.910.000.000,000		7.022.398.172,000		7.136.482.317,000		7.252.277.724,000		7.369.810.063,000	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.560.000.000,000		1.583.400.000,000		1.607.151.000,000		1.631.258.265,000		1.655.727.139,000	
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total (Angka)	8	8	9	1.560.000.000,000	9	1.583.400.000,000	9	1.607.151.000,000	10	1.631.258.265,000	10	1.655.727.139,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					3.550.000.000,000		3.603.250.000,000		3.657.298.750,000		3.712.158.231,000		3.767.840.605,000	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevelensi Kb Modern (Angka)	50	50	50	3.550.000.000,000	51	3.603.250.000,000	55	3.657.298.750,000	55	3.712.158.231,000	60	3.767.840.605,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.800.000.000,000		1.835.748.172,000		1.872.032.567,000		1.908.861.228,000		1.946.242.319,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta	Persentase Partisipasi Perempuan dalam	55	55	55	1.800.000.000,000	55	1.835.748.172,000	57	1.872.032.567,000	58	1.908.861.228,000	60	1.946.242.319,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan,



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
masyarakat dalam mewujudkan keluarga Sejahtera (KS)	Pendidikan dan Pelatihan (%)													Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					30.620.000.000,00		38.231.400.000,00		38.851.971.000,00		39.481.850.565,00		40.121.178.324,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.010.000.000,00		11.010.000.000,00		10.960.000.000,00		10.960.000.000,00		10.960.000.000,00	
Meningkatnya layanan administrasi Penunjang Urusan Dinas Perhubungan	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Nilai)	74,50	76,20	78,50	11.010.000.000,00	79,15	11.010.000.000,00	80,27	10.960.000.000,00	82,30	10.960.000.000,00	82,75	10.960.000.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					8.750.000.000,00		11.008.750.000,00		11.271.381.250,00		11.537.951.969,00		11.808.521.248,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	100	100	100	8.750.000.000,00	100	11.008.750.000,00	100	11.271.381.250,00	100	11.537.951.969,00	100	11.808.521.248,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					7.310.000.000,00		12.599.650.000,00		12.893.644.750,00		13.192.049.421,00		13.494.930.163,00	
Meningkatnya	Konektivitas Laut	100	100	100	7.310.000.000,00	100	12.599.650.000,00	100	12.893.644.750,00	100	13.192.049.421,00	100	13.494.930.163,00	2.15.0.00.0.00.01.0000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kualitas Layanan Transportasi Laut	(Unit)													- Dinas Perhubungan
2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN					3.550.000.000,000		3.613.000.000,000		3.726.945.000,000		3.791.849.175,000		3.857.726.913,000	
Meningkatnya PEngendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Persentase Pengendalian KKOP (Persentase)	100	100	100	3.550.000.000,000	100	3.613.000.000,000	100	3.726.945.000,000	100	3.791.849.175,000	100	3.857.726.913,000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					17.810.284.284,000		17.842.564.284,000		17.875.328.484,000		17.908.584.147,000		17.942.338.644,000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.658.284.284,000		5.658.284.284,000		5.658.284.284,000		5.658.284.284,000		5.658.284.284,000	
Tersedianya Fasilitas dan Pelayanan Penunjang Administrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Terpuhinya Pelayanan Administrasi dan Tata Kelola Pemerintahan (%)	91,67	100	100	5.658.284.284,000	100	5.658.284.284,000	100	5.658.284.284,000	100	5.658.284.284,000	100	5.658.284.284,000	2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					9.705.000.000,000		9.730.575.000,000		9.756.533.625,000		9.782.881.629,000		9.809.624.853,000	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	100	100	100	9.705.000.000,000	100	9.730.575.000,000	100	9.756.533.625,000	100	9.782.881.629,000	100	9.809.624.853,000	2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	(%)													
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.447.000.000,000		2.453.705.000,000		2.460.510.575,000		2.467.418.234,000		2.474.429.507,000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Apalikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100	2.447.000.000,000	100	2.453.705.000,000	100	2.460.510.575,000	100	2.467.418.234,000	100	2.474.429.507,000	2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					3.025.000.000,000		3.055.250.000,000		3.085.802.500,000		3.116.660.525,000		3.147.827.132,000	
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					65.000.000,000		65.650.000,000		66.306.500,000		66.969.565,000		67.639.261,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi Yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (%)	0	0	1,3	65.000.000,000	1,5	65.650.000,000	1,7	66.306.500,000	1,9	66.969.565,000	1,9	67.639.261,000	2.07.2.17.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					65.000.000,000		65.650.000,000		66.306.500,000		66.969.565,000		67.639.261,000	
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi (%)	0	0	1,1	65.000.000,000	1,2	65.650.000,000	1,3	66.306.500,000	1,4	66.969.565,000	1,4	67.639.261,000	2.07.2.17.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Keci Menengal
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN					50.000.000,000		50.500.000,000		51.005.000,000		51.515.050,000		52.030.201,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KESEHATAN KSP/USP KOPERASI														
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	0	0	1,1	50.000.000,000	1,2	50.500.000,000	1,3	51.005.000,000	1,4	51.515.050,000	1,4	52.030.201,000	2.07.2.17.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					200.000.000,000		202.000.000,000		204.020.000,000		206.060.200,000		208.120.802,000	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	0	0	2,2	200.000.000,000	2,4	202.000.000,000	2,6	204.020.000,000	2,8	206.060.200,000	3	208.120.802,000	2.07.2.17.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					500.000.000,000		505.000.000,000		510.050.000,000		515.150.500,000		520.302.005,000	
Meningkatnya Produktifitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100	500.000.000,000	100	505.000.000,000	100	510.050.000,000	100	515.150.500,000	100	520.302.005,000	2.07.2.17.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					1.295.000.000,000		1.307.950.000,000		1.321.029.500,000		1.334.239.795,000		1.347.582.193,000	
Meningkatnya Kapasitas UMKM Yang Tangguh Dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari InformasI Ke Formal (%)	0	0	11,3	1.295.000.000,000	12,1	1.307.950.000,000	12,9	1.321.029.500,000	13,2	1.334.239.795,000	14	1.347.582.193,000	2.07.2.17.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN					700.000.000,000		707.000.000,000		714.070.000,000		721.210.700,000		728.422.807,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
UMKM														
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan Ekspor (Angka)	0	0	2,3	700.000.000,000	2,4	707.000.000,000	2,5	714.070.000,000	2,6	721.210.700,000	2,7	728.422.807,000	2.07.2.17.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.17.09 - PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI					150.000.000,000		151.500.000,000		153.015.000,000		154.545.150,000		156.090.602,000	
Meningkatnya Legalitas Koperasi	Persentase Koperasi Yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (%)	0	0	0,5	150.000.000,000	0,6	151.500.000,000	0,7	153.015.000,000	0,8	154.545.150,000	0,9	156.090.602,000	2.07.2.17.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					12.087.516.768,000		12.081.657.674,000		12.121.429.478,000		12.162.627.596,000		12.192.473.306,000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.356.373.904,000		5.332.878.103,000		5.343.549.904,000		5.362.913.824,000		5.367.636.504,000	
Meningkatnya layanan Administrasi Penunjang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	50,27	53,10	55,00	5.356.373.904,000	57,21	5.332.878.103,000	58,18	5.343.549.904,000	58,31	5.362.913.824,000	59,08	5.367.636.504,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					958.409.940,000		961.365.690,000		966.678.300,000		968.844.500,000		974.005.290,000	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	8,24	9,33	10,17	958.409.940,000	11,70	961.365.690,000	11,97	966.678.300,000	12,38	968.844.500,000	12,88	974.005.290,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					900.000.000,000		901.500.000,000		903.022.500,000		904.567.838,000		906.136.348,000	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Presentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	10,08	11,73	12,20	900.000.000,000	13,00	901.500.000,000	13,49	903.022.500,000	14,18	904.567.838,000	15,31	906.136.348,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					2.950.116.960,000		2.959.958.647,000		2.978.834.216,000		2.993.516.700,000		3.008.418.664,000	
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Presentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	29,17	30,53	31,71	2.950.116.960,000	32,80	2.959.958.647,000	33,35	2.978.834.216,000	40,05	2.993.516.700,000	43,76	3.008.418.664,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					972.615.964,000		973.705.234,000		974.810.808,000		975.932.978,000		977.071.967,000	
Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha (%)	30,49	35,10	36,73	972.615.964,000	40,08	973.705.234,000	43,22	974.810.808,000	45,69	975.932.978,000	50,11	977.071.967,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					950.000.000,000		952.250.000,000		954.533.750,000		956.851.756,000		959.204.533,000	
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman	5,60	6,37	8,21	950.000.000,000	9,10	952.250.000,000	9,28	954.533.750,000	10,09	956.851.756,000	10,50	959.204.533,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Modal (%)													
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					15.795.069.706,000		15.825.069.706,000		15.925.069.706,000		5.995.069.706,000		6.045.069.706,000	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.645.069.706,000		3.645.069.706,000		3.645.069.706,000		3.645.069.706,000		3.645.069.706,000	
Meningkatnya layanan Administrasi Penunjang Dinas Pemuda dan Olahraga	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.645.069.706,000	100	3.645.069.706,000	100	3.645.069.706,000	100	3.645.069.706,000	100	3.645.069.706,000	2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.100.000.000,000		1.130.000.000,000		1.180.000.000,000		1.250.000.000,000		1.250.000.000,000	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda (16-30 tahun) yang Mengikuti Kegiatan Organisasi Dalam 3 Bulan Terakhir (%)	20	20	21	1.100.000.000,000	22	1.130.000.000,000	22	1.180.000.000,000	24	1.250.000.000,000	24	1.250.000.000,000	2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					10.900.000.000,000		10.900.000.000,000		10.950.000.000,000		950.000.000,000		1.000.000.000,000	
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Indeks Partisipasi Olahraga (Angka)	25	25	25	10.900.000.000,000	26	10.900.000.000,000	26	10.950.000.000,000	28	950.000.000,000	28	1.000.000.000,000	2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (%)	10	10	12		12		12		15		15		2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	15	15	15	150.000.000,000	18	150.000.000,000	18	150.000.000,000	20	150.000.000,000	20	150.000.000,000	2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					211.800.000,000		214.977.000,000		218.201.655,000		221.474.680,000		224.796.800,000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					211.800.000,000		214.977.000,000		218.201.655,000		221.474.680,000		224.796.800,000	
Meningkatkan Ketersediaan, Kualitas dan Aksesibilitas Data Statistik Sektoral yang Akurat dan Relevan	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan (%)	50,98	54,90	58,82	211.800.000,000	66,67	214.977.000,000	74,51	218.201.655,000	78,43	221.474.680,000	82,35	224.796.800,000	2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					331.000.000,000		335.965.000,000		341.004.475,000		346.119.542,000		351.311.335,000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					331.000.000,000		335.965.000,000		341.004.475,000		346.119.542,000		351.311.335,000	
Meningkatnya Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintahan (%)	61,54	65,38	69,23	331.000.000,000	69,23	335.965.000,000	73,08	341.004.475,000	76,92	346.119.542,000	76,92	351.311.335,000	2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					12.043.342.421,000		12.217.031.541,000		12.391.825.998,000		12.567.742.372,000		12.744.797.491,000	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.130.734.421,000		7.230.734.421,000		7.330.734.421,000		7.430.734.421,000		7.530.734.421,000	
Tersedianya Fasilitas dan Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Persetanse Terpenuhinya Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah (%)	91,81	100	100	7.130.734.421,000	100	7.230.734.421,000	100	7.330.734.421,000	100	7.430.734.421,000	100	7.530.734.421,000	3.26.2.22.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					2.343.000.000,000		2.378.145.000,000		2.413.817.175,000		2.450.024.433,000		2.486.774.799,000	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Terlestarikan Cagar Budaya (%)	0,00	0,00	100	2.343.000.000,000	100	2.378.145.000,000	100	2.413.817.175,000	100	2.450.024.433,000	100	2.486.774.799,000	3.26.2.22.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					2.569.608.000,000		2.608.152.120,000		2.647.274.402,000		2.686.983.518,000		2.727.288.271,000	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan Kesenian Tradisional	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota (%)	0,17	0,20	0,23	2.569.608.000,000	0,24	2.608.152.120,000	0,26	2.647.274.402,000	0,28	2.686.983.518,000	0,30	2.727.288.271,000	3.26.2.22.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4.828.512.328,000		4.938.512.328,000		5.088.512.328,000		5.188.512.328,000		5.238.512.328,000	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.838.512.328,000		3.838.512.328,000		3.838.512.328,000		3.838.512.328,000		3.838.512.328,000	
Meningkatnya Layanan Administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					3.838.512.328,000		3.838.512.328,000		3.838.512.328,000		3.838.512.328,000		3.838.512.328,000	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					990.000.000,000		1.100.000.000,000		1.250.000.000,000		1.350.000.000,000		1.400.000.000,000	
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persentase Literasi (%)	25	34	43	990.000.000,000	50	1.100.000.000,000	55	1.250.000.000,000	65	1.350.000.000,000	69	1.400.000.000,000	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	36,76	48,85	50,12		52,32		55		58		60		2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					1.000.000.000,000		1.200.000.000,000		1.525.000.000,000		1.775.000.000,000		2.000.000.000,000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					750.000.000,000		900.000.000,000		1.150.000.000,000		1.350.000.000,000		1.550.000.000,000	
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)	25	34	43	750.000.000,000	50	900.000.000,000	55	1.150.000.000,000	65	1.350.000.000,000	69	1.550.000.000,000	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Persentase SDM	12	25	28		30		36		42		50		2.24.2.23.0.00.01.0000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya (Persentase)													Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					250.000.000,000		300.000.000,000		375.000.000,000		425.000.000,000		450.000.000,000	
Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	10	12	15	250.000.000,000	17	300.000.000,000	20	375.000.000,000	23	425.000.000,000	25	450.000.000,000	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					28.641.794.165,000		28.905.300.729,000		29.172.759.892,000		29.444.230.943,000		29.719.774.060,000	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.074.689.863,000		11.074.689.863,000		11.074.689.863,000		11.074.689.863,000		11.074.689.863,000	
Meningkatnya layanan administrasi Penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	11.074.689.863,000	100	11.074.689.863,000	100	11.074.689.863,000	100	11.074.689.863,000	100	11.074.689.863,000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					10.007.663.764,000		10.157.778.720,000		10.310.145.401,000		10.464.797.582,000		10.621.769.546,000	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Kelompok Perikanan Tangkap yang Dibina? (%)	96,27	96,87	97,34	10.007.663.764,000	97,86	10.157.778.720,000	98,14	10.310.145.401,000	98,55	10.464.797.582,000	99,10	10.621.769.546,000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Sarana Prasarana Perikanan Tangkap yang Disediakan (%)	95,00	95,50	96,00		96,50		97,00		97,50		98,00		3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					4.776.933.761,000		4.848.587.767,000		4.921.316.584,000		4.995.136.333,000		5.070.063.378,000	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Kelompok Perikanan Budidaya yang Dibina (%)	96,27	96,87	97,34	4.776.933.761,000	97,86	4.848.587.767,000	98,14	4.921.316.584,000	98,55	4.995.136.333,000	99,10	5.070.063.378,000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
	Persentase Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yang Disediakan (%)	95,00	95,50	96,00				96,50				97,00		
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					370.000.000,000		375.550.000,000		381.183.250,000		386.900.999,000		392.704.514,000	
Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Usaha Perikanan yang Diawasi (Angka)	9	10	11	370.000.000,000	13	375.550.000,000	14	381.183.250,000	15	386.900.999,000	16	392.704.514,000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					2.412.506.777,000		2.448.694.379,000		2.485.424.794,000		2.522.706.166,000		2.560.546.759,000	
Meningkatnya Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	49,68	50,20	50,80	2.412.506.777,000	51,45	2.448.694.379,000	52,25	2.485.424.794,000	53,20	2.522.706.166,000	54,35	2.560.546.759,000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN					4.278.202.906,000		4.342.375.950,000		4.407.511.589,000		4.473.624.262,000		4.540.728.627,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BIDANG PARIWISATA														
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.799.999.784,000		1.826.999.781,000		1.854.404.777,000		1.882.220.849,000		1.910.454.162,000	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Berkebangsaan (%)	0,21	0,22	0,23	1.799.999.784,000	0,24	1.826.999.781,000	0,25	1.854.404.777,000	0,27	1.882.220.849,000	0,29	1.910.454.162,000	3.26.2.22.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					2.318.493.122,000		2.353.270.519,000		2.388.569.577,000		2.424.398.120,000		2.460.764.092,000	
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku (%)	0,33	0,34	0,35	2.318.493.122,000	0,36	2.353.270.519,000	0,37	2.388.569.577,000	0,38	2.424.398.120,000	0,39	2.460.764.092,000	3.26.2.22.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					159.710.000,000		162.105.650,000		164.537.235,000		167.005.293,000		169.510.373,000	
Meningkatnya Kapasistas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD (%)	1,07	1,09	1,11	159.710.000,000	1,15	162.105.650,000	1,21	164.537.235,000	1,28	167.005.293,000	1,35	169.510.373,000	3.26.2.22.0.00.03.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					29.007.194.545,000		29.626.105.705,000		29.885.684.455,000		30.228.793.885,000		30.488.122.832,000	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.140.410.371,600		12.177.530.705,000		12.177.530.705,000		12.177.530.705,000		12.177.530.705,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya layanan administrasi Penunjang Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Angka)	74,40	77,00	80,25	11.140.410.371,600	82,50	12.177.530.705,000	85,00	12.177.530.705,000	87,50	12.177.530.705,000	90,10	12.177.530.705,000	2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.461.784.173,400		1.836.250.000,000		1.923.793.750,000		2.012.650.656,000		2.102.840.416,000	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	0,01	0,02	0,04	2.461.784.173,400	0,06	1.836.250.000,000	0,08	1.923.793.750,000	0,10	2.012.650.656,000	0,12	2.102.840.416,000	2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					9.255.000.000,000		9.370.075.000,000		9.448.476.250,000		9.607.690.517,000		9.680.365.875,000	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	0,20	0,25	0,40	9.255.000.000,000	0,60	9.370.075.000,000	0,80	9.448.476.250,000	1,00	9.607.690.517,000	1,20	9.680.365.875,000	2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	2,50	3,50	4,75		6,12		7,90		9,00		10,20		2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.900.000.000,000		1.928.500.000,000		1.957.427.500,000		1.986.788.913,000		2.016.590.746,000	
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan	Persentase Unit Usaha Hewan Yang Dibina (%)	100	100	100	1.900.000.000,000	100	1.928.500.000,000	100	1.957.427.500,000	100	1.986.788.913,000	100	2.016.590.746,000	2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Masyarakat Veteriner														
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					4.250.000.000,000		4.313.750.000,000		4.378.456.250,000		4.444.133.094,000		4.510.795.090,000	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase kelembagaan petani yang dibentuk (%)	50	60	65	4.250.000.000,000	70	4.313.750.000,000	80	4.378.456.250,000	90	4.444.133.094,000	100	4.510.795.090,000	2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					1.728.000.000,000		1.753.920.000,000		1.780.228.800,000		1.806.932.233,000		1.834.036.216,000	
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					1.500.000.000,000		1.522.500.000,000		1.545.337.500,000		1.568.517.563,000		1.592.045.326,000	
Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati (Indeks)	100	100	100	1.500.000.000,000	100	1.522.500.000,000	100	1.545.337.500,000	100	1.568.517.563,000	100	1.592.045.326,000	2.11.3.28.2.10.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
3.28.08 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT					228.000.000,000		231.420.000,000		234.891.300,000		238.414.670,000		241.990.890,000	
Meningkatnya Kualitas Kelestarian Hutan Adat	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan	1	1	1	228.000.000,000	1	231.420.000,000	1	234.891.300,000	1	238.414.670,000	1	241.990.890,000	2.11.3.28.2.10.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Baik Secara Ekonomi untuk Menjaga Kelestarian Hutan (Angka)													
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					19.132.761.418,000		15.078.269.869,000		15.126.784.954,000		15.137.319.762,000		15.163.790.562,000	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.048.874.000,000		8.937.874.000,000		8.937.874.000,000		8.937.874.000,000		8.937.874.000,000	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (%)	25,4	25,4	27,43	13.048.874.000,000	29,46	8.937.874.000,000	31,49	8.937.874.000,000	33,52	8.937.874.000,000	35,55	8.937.874.000,000	3.30.3.31.0.00.12.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					2.525.000.000,000		2.545.508.451,000		2.570.263.536,000		2.571.771.536,000		2.571.771.536,000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	0	0	89,5	2.525.000.000,000	90,5	2.545.508.451,000	91,5	2.570.263.536,000	92,5	2.571.771.536,000	92,5	2.571.771.536,000	3.30.3.31.0.00.12.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					1.938.887.418,000		1.968.887.418,000		1.968.887.418,000		1.969.682.226,000		1.969.682.226,000	
Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan dan distribusi barang	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	0	0	2,2	1.938.887.418,000	2,3	1.968.887.418,000	2,4	1.968.887.418,000	2,5	1.969.682.226,000	2,6	1.969.682.226,000	3.30.3.31.0.00.12.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
yang efisien														
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					800.000.000,000		804.000.000,000		812.040.000,000		814.060.000,000		819.110.200,000	
Meningkatnya kelancaran distribusi barang dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	0	0	5,1	800.000.000,000	5,2	804.000.000,000	5,3	812.040.000,000	5,4	814.060.000,000	5,4	819.110.200,000	3.30.3.31.0.00.12.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					500.000.000,000		502.000.000,000		511.520.000,000		511.520.000,000		511.520.000,000	
Meningkatnya pelaku usaha berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	0	0	5.000.000.000	500.000.000,000	5.000.000.000	502.000.000,000	5.000.000.000	511.520.000,000	5.000.000.000	511.520.000,000	5.000.000.000	511.520.000,000	3.30.3.31.0.00.12.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					120.000.000,000		120.000.000,000		121.200.000,000		122.412.000,000		128.532.600,000	
Meningkatnya mutu niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	0	0	1,2	120.000.000,000	1,3	120.000.000,000	1,4	121.200.000,000	1,5	122.412.000,000	1,5	128.532.600,000	3.30.3.31.0.00.12.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					200.000.000,000		200.000.000,000		205.000.000,000		210.000.000,000		225.300.000,000	
Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	0	0	1,1	200.000.000,000	1,2	200.000.000,000	1,3	205.000.000,000	1,4	210.000.000,000	1,4	225.300.000,000	3.30.3.31.0.00.12.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	(Persentase)													
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					4.525.000.000,000		4.525.000.000,000		4.533.140.991,000		4.578.472.401,000		4.614.141.465,000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					4.300.000.000,000		4.300.000.000,000		4.308.000.000,000		4.351.080.000,000		4.386.749.064,000	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	100	100	100	4.300.000.000,000	100	4.300.000.000,000	100	4.308.000.000,000	100	4.351.080.000,000	100	4.386.749.064,000	3.30.3.31.0.00.12.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		151.500.000,000		151.500.000,000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	0	0	0,1	150.000.000,000	0,1	150.000.000,000	0,1	150.000.000,000	0,1	151.500.000,000	0,1	151.500.000,000	3.30.3.31.0.00.12.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					75.000.000,000		75.000.000,000		75.140.991,000		75.892.401,000		75.892.401,000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	0	0	1	75.000.000,000	1	75.000.000,000	1	75.140.991,000	1	75.892.401,000	1	75.892.401,000	3.30.3.31.0.00.12.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					1.777.000.000,000		1.781.770.000,000		1.786.587.700,000		1.791.453.577,000		1.796.368.113,000	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN					1.087.000.000,000		1.087.870.000,000		1.088.748.700,000		1.089.636.187,000		1.090.532.549,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KAWASAN TRANSMIGRASI														
Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi Yang Dilaksanakan (%)	0	0	0,1	1.087.000.000,000	0,2	1.087.870.000,000	0,3	1.088.748.700,000	0,4	1.089.636.187,000	0,5	1.090.532.549,000	2.07.2.17.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					390.000.000,000		393.900.000,000		397.839.000,000		401.817.390,000		405.835.564,000	
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang (%)	0	0	0,1	390.000.000,000	0,2	393.900.000,000	0,3	397.839.000,000	0,4	401.817.390,000	0,4	405.835.564,000	2.07.2.17.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000	
Meningkatnya Pemberdayaan Dan Kapasitas Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	0	0	0,1	300.000.000,000	0,2	300.000.000,000	0,3	300.000.000,000	0,4	300.000.000,000	0,5	300.000.000,000	2.07.2.17.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					160.048.749.343,000		176.620.000.000,000		190.124.000.000,000		200.085.000.000,000		210.077.000.000,000	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					101.628.749.343,000		112.530.000.000,000		115.089.000.000,000		125.642.000.000,000		133.136.000.000,000	
Meningkatnya layanan administrasi Penunjang Sekretariat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja	64,02	70,52	71,39	101.628.749.343,000	73,49	112.530.000.000,000	74,36	115.089.000.000,000	74,89	125.642.000.000,000	75,39	133.136.000.000,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pemerintahh (Nilai)													
	Nilai Hasil LKJP (SAKIP) (Angka)	72,30	72,78	73,19		73,49		74,36		74,89		75,05		
	Persentase Indeks Persepsi Korupsi (%)	50,91	51,98	52		67		77		87		90,25		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					52.720.000.000,000		58.590.000.000,000		68.780.000.000,000		67.902.000.000,000		70.166.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas dan Pengembangan Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Efektifitas Kerjasama Daerah (Dokumen)	6	6	7	52.720.000.000,000	8	58.590.000.000,000	8	68.780.000.000,000	9	67.902.000.000,000	9	70.166.000.000,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Indeks Reformasi Birokrasii (%)	25,4	25,4	27,43		29,46		31,49		33,52		35,55		4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Angka)	1.500	500	750		930		1.205		1.300		1.500		4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					5.700.000.000,000		5.500.000.000,000		6.255.000.000,000		6.541.000.000,000		6.775.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE) (Indeks)	1,03	1,22	1,32	5.700.000.000,000	1,43	5.500.000.000,000	1,53	6.255.000.000,000	1,64	6.541.000.000,000	1,74	6.775.000.000,000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. ((%))	50	52	56		60		65		70		75		4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	56	60	62		65		69		71		75		4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					85.420.685.253,000		86.725.268.875,000		88.259.462.908,000		89.865.669.852,000		91.492.054.900,000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					37.197.760.253,000		37.779.000.000,000		38.579.000.000,000		39.440.000.000,000		40.310.000.000,000	
Meningkatnya layanan administrasi Penunjang Urusan Sekretariat DPRK	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	37.197.760.253,000	100	37.779.000.000,000	100	38.579.000.000,000	100	39.440.000.000,000	100	40.310.000.000,000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRK
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN					48.222.925.000,000		48.946.268.875,000		49.680.462.908,000		50.425.669.852,000		51.182.054.900,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD														
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR (%)	100	100	100	48.222.925.000,000	100	48.946.268.875,000	100	49.680.462.908,000	100	50.425.669.852,000	100	51.182.054.900,000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRK
5.01 - PERENCANAAN					15.515.538.479,000		15.790.265.391,000		15.551.608.657,000		15.795.932.422,000		15.646.241.938,000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.997.594.000,000		8.342.544.000,000		8.060.544.000,000		8.269.644.000,000		8.086.684.000,000	
Meningkatnya layanan administrasi Penunjang Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	7.997.594.000,000	100	8.342.544.000,000	100	8.060.544.000,000	100	8.269.644.000,000	100	8.086.684.000,000	5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					5.400.817.000,000		5.298.837.000,000		5.309.947.000,000		5.312.454.000,000		5.312.516.000,000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Rpjmd Dengan Renstra Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.400.817.000,000	100	5.298.837.000,000	100	5.309.947.000,000	100	5.312.454.000,000	100	5.312.516.000,000	5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN					2.117.127.479,000		2.148.884.391,000		2.181.117.657,000		2.213.834.422,000		2.247.041.938,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Indikator Renstra PD yang konsisten dengan Indikator RPJMD (%)	100	100	100	2.117.127.479,000	100	2.148.884.391,000	100	2.181.117.657,000	100	2.213.834.422,000	100	2.247.041.938,000	5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah
5.02 - KEUANGAN					340.389.987.922,100		357.372.805.282,200		375.203.846.460,620		393.925.499.720,640		413.582.272.167,530	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.743.834.008,450		21.781.025.708,870		22.870.076.994,320		24.013.580.844,030		25.214.259.886,230	
Meningkatnya layanan administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Tertib Administrasi OPD (%)	100	100	100	20.743.834.008,450	100	21.781.025.708,870	100	22.870.076.994,320	100	24.013.580.844,030	100	25.214.259.886,230	5.02.0.00.0.00.10.0000 Badan Pengelolaa Keuangan dan Ase Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					318.178.872.513,650		334.087.816.139,330		350.792.206.946,300		368.331.817.293,610		386.748.408.158,300	
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD Asmat (Nilai)	WTP	WTP	WTP	318.178.872.513,650	WTP	334.087.816.139,330	WTP	350.792.206.946,300	WTP	368.331.817.293,610	WTP	386.748.408.158,300	5.02.0.00.0.00.10.0000 Badan Pengelolaa Keuangan dan Ase Daerah
	Indeks persepsi korupsii (Indeks)	52	52	55		58		61		64		67		5.02.0.00.0.00.10.0000 Badan Pengelolaa Keuangan dan Ase Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK					609.400.325,000		624.635.333,000		640.251.216,000		656.257.496,000		672.663.934,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAERAH														
Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Opini BPK terhadap LKPD Asmat (Nilai)	WTP	WTP	WTP	609.400.325,000	WTP	624.635.333,000	WTP	640.251.216,000	WTP	656.257.496,000	WTP	672.663.934,000	5.02.0.00.0.00.10.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					857.881.075,000		879.328.101,000		901.311.304,000		923.844.087,000		946.940.189,000	
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah (Persentase)	5	5	5	857.881.075,000	5	879.328.101,000	5	901.311.304,000	5	923.844.087,000	5	946.940.189,000	5.02.0.00.0.00.10.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					9.521.080.382,000		9.997.134.401,000		10.496.991.121,000		11.021.840.677,000		11.572.932.711,000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.268.142.133,000		6.581.549.240,000		6.910.626.702,000		7.256.158.037,000		7.618.965.939,000	
Meningkatnya layanan administrasi Penunjang Pemerintahan	Persetanse Terpenuhi Pelayanannya dan Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	6.268.142.133,000	100	6.581.549.240,000	100	6.910.626.702,000	100	7.256.158.037,000	100	7.618.965.939,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					3.252.938.249,000		3.415.585.161,000		3.586.364.419,000		3.765.682.640,000		3.953.966.772,000	
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas ASN	Perentase Terlaksana Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	100	100	100	3.252.938.249,000	100	3.415.585.161,000	100	3.586.364.419,000	100	3.765.682.640,000	100	3.953.966.772,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kepegawaian ASN (%)													
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur
	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	100	100	100		100		100		100		5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur		
	Persentase Pegawai dengan SKP bernilai baik (%)	100	100	100		100		100		100		5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur		
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					4.113.858.000,000		4.319.550.900,000		4.535.528.445,000		4.762.304.867,000		5.000.420.110,000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					4.113.858.000,000		4.319.550.900,000		4.535.528.445,000		4.762.304.867,000		5.000.420.110,000	
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Kompetensi Teknis (%)	100	100	100	4.113.858.000,000	100	4.319.550.900,000	100	4.535.528.445,000	100	4.762.304.867,000	100	5.000.420.110,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur
	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%)	100	100	100		100		100		100		5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.494.512.328,000		1.383.512.328,000		1.830.012.328,000		1.869.012.328,000		1.414.512.328,000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					656.000.000,000		545.000.000,000		991.500.000,000		1.030.500.000,000		576.000.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAERAH														
Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Penyelesaian Permasalahan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	-	7,7	8,1	656.000.000,000	8,3	545.000.000,000	8,5	991.500.000,000	8,7	1.030.500.000,000	8,9	576.000.000,000	5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					838.512.328,000		838.512.328,000		838.512.328,000		838.512.328,000		838.512.328,000	
Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	-	35	35,2	838.512.328,000	35,4	838.512.328,000	35,6	838.512.328,000	35,8	838.512.328,000	36	838.512.328,000	5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					12.851.789.422,540		12.851.789.422,540		12.851.789.422,540		12.851.789.422,540		12.851.789.422,540	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.183.174.006,540		6.183.174.006,540		6.183.174.006,540		6.183.174.006,540		6.183.174.006,540	
Meningkatnya layanan administrasi penunjang Urusan Inspektorat	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	6.183.174.006,540	100	6.183.174.006,540	100	6.183.174.006,540	100	6.183.174.006,540	100	6.183.174.006,540	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Kabupaten
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					5.485.396.416,000		5.485.396.416,000		5.485.396.416,000		5.485.396.416,000		5.485.396.416,000	
Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik	Indeks persepsi korupsi (Indeks)	52	52	55	5.485.396.416,000	58	5.485.396.416,000	61	5.485.396.416,000	64	5.485.396.416,000	67	5.485.396.416,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Kabupaten



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
yang Bersifat Anggaran Ataupun Proses dan Kewenangan														
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.183.219.000,000		1.183.219.000,000		1.183.219.000,000		1.183.219.000,000		1.183.219.000,000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (%)	55	55	57	1.183.219.000,000	59	1.183.219.000,000	61	1.183.219.000,000	63	1.183.219.000,000	65	1.183.219.000,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Kabupaten
7.01 - KECAMATAN					94.720.274.246,480		88.671.710.834,000		86.301.331.121,000		86.924.252.107,000		87.879.399.682,260	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					84.564.874.490,480		78.238.180.828,020		75.604.801.114,950		75.972.722.101,080		76.687.869.676,270	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Der Koumor	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik (%)	50,48	50,48	53,53	2.779.738.109,000	56,59	2.806.738.107,000	59,64	2.831.738.107,000	62,7	2.856.738.107,000	65,75	2.881.738.109,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Distrik Derkomur
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Joutu	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik (%)	50,48	50,48	53,53	3.303.134.966,370	56,59	3.730.700.967,000	59,64	3.951.800.967,000	62,7	4.038.700.967,000	65,75	4.263.800.965,550	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Distrik Joutu
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Pulau Tiga	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik (%)	50,48	50,48	53,53	3.403.546.982,000	56,59	3.358.886.382,000	59,64	2.671.656.382,000	62,7	2.612.310.982,000	65,75	2.677.110.982,000	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Distrik Pulau Tiga
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Safan	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik (%)	50,48	50,48	53,53	2.777.738.105,740	56,59	2.802.738.107,000	59,64	2.827.738.107,000	62,7	2.852.738.107,000	65,75	4.277.738.107,000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Distrik Safan
Meningkatnya	Presentase	50,48	50,48	53,53	3.509.254.297,000	56,59	2.365.557.297,000	59,64	2.390.557.297,000	62,7	2.415.557.297,000	65,75	2.440.557.297,000	7.01.0.00.0.00.18.0000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Siret	Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik (%)													- Distrik Siret
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Sor Ep	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik (%)	50,48	50,48	53,53	3.607.774.005,000	56,59	3.728.724.005,000	59,64	2.981.138.005,000	62,7	2.601.638.005,000	65,75	2.722.138.005,000	7.01.0.00.0.00.25.0000 - Distrik Sor Ep
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Tomor Birif	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik (%)	50,48	50,48	53,53	3.526.861.744,000	56,59	2.815.286.344,000	59,64	2.854.886.344,000	62,7	2.758.486.344,000	65,75	2.802.086.344,000	7.01.0.00.0.00.24.0000 - Distrik Tomor Birif
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Suator	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik (%)	50,48	50,48	53,53	3.707.147.107,000	56,59	3.649.884.435,000	59,64	3.889.484.435,000	62,7	3.993.884.435,000	65,75	4.237.484.435,000	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Distrik Suator
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Sawa Erma	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik (%)	50,48	50,48	53,53	3.484.822.045,720	56,59	3.984.822.045,720	59,64	3.987.146.606,620	62,7	3.606.755.005,720	65,75	3.606.755.005,720	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Distrik Sawa Erma
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Akat	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik (%)	50,48	50,48	53,53	2.777.738.107,000	56,59	2.802.738.107,000	59,64	2.827.738.107,000	62,7	4.661.183.104,000	65,75	2.877.738.107,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Distrik Akat
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Awyu	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik (%)	50,48	50,48	53,53	2.777.738.107,000	56,59	2.802.738.107,000	59,64	2.827.738.107,000	62,7	2.852.738.107,000	65,75	2.877.738.107,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Distrik Awyu
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Betchbamu	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik (%)	50,48	50,48	53,53	3.271.210.581,210	56,59	3.259.340.831,180	59,64	3.228.340.831,030	62,7	3.177.340.832,060	65,75	3.126.340.831,700	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Distrik Betchbamu
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Joerat	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik (%)	50,48	50,48	53,53	2.777.738.107,000	56,59	2.802.738.107,000	59,64	2.827.738.107,000	62,7	2.852.738.107,000	65,75	2.877.738.107,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Distrik Joerat
Meningkatnya Penunjang Urusan	Presentase Penunjang Urusan	50,48	50,48	53,53	4.176.043.498,000	56,59	2.581.232.098,000	59,64	2.605.232.098,000	62,7	2.493.232.098,000	65,75	2.521.232.098,000	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Distrik Korowaya



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemerintahan Distrik Koroway Buluanop	Perangkat Daerah Pada Distrik (%)													Buluanop
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Agats	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik (%)	50,48	50,48	53,53	3.339.879.537,000	56,59	3.499.170.537,000	59,64	3.543.443.029,860	62,7	3.583.443.029,860	65,75	3.623.443.029,860	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Distrik Agats
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Aswi	Presentase Pemenuhan layanan Administrasi pada Sektariat Distrik (%)	100	100	100	3.850.566.268,570	100	3.981.001.668,570	100	2.459.423.268,570	100	2.551.373.268,570	100	2.441.423.268,570	7.01.0.00.0.00.22.0000 - Distrik Aswi
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Atsj	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik (%)	50,48	50,48	53,53	2.749.114.835,000	56,59	2.768.114.835,000	59,64	4.008.138.898,000	62,7	2.806.114.835,000	65,75	2.825.114.835,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Distrik Atsj
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Ayip	Presentase Pemenuhan layanan Administrasi pada Sektariat Distrik (%)	100	100	100	5.039.229.833,000	100	2.138.942.613,000	100	2.116.729.833,000	100	2.188.529.833,000	100	2.262.729.833,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Distrik Ayip
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Fayit	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik (%)	50,48	50,48	53,53	3.296.187.836,000	56,59	2.664.103.236,000	59,64	2.942.557.336,000	62,7	2.910.474.836,000	65,75	2.988.854.836,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Distrik Fayit
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Jetsy	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik (%)	50,48	50,48	53,53	3.168.165.236,000	56,59	1.652.577.115,000	59,64	2.652.577.115,000	62,7	2.752.577.115,000	65,75	2.852.577.115,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Distrik Jetsy
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Kolf Braza	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik (%)	50,48	50,48	53,53	2.653.148.038,340	56,59	5.204.648.038,340	59,64	2.504.648.038,340	62,7	2.504.648.038,340	65,75	2.504.648.038,340	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Distrik Kolf Braza
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah	50,48	50,48	53,53	3.750.838.611,000	56,59	2.206.706.111,000	59,64	2.357.891.562,000	62,7	2.435.061.114,000	65,75	2.531.090.486,000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Distrik Copen



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kopay	Pada Distrik (%)													
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Pantai Kasuari	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik (%)	50,48	50,48	53,53	3.989.872.511,580	56,59	3.619.872.512,260	59,64	3.290.872.511,580	62,7	3.290.872.511,580	65,75	3.290.872.511,580	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Distrik Pantai Kasuari
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Suru-Suru	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik (%)	50,48	50,48	53,53	3.569.647.914,950	56,59	3.708.181.114,950	59,64	3.697.847.914,950	62,7	3.822.847.914,950	65,75	3.799.181.114,950	7.01.0.00.0.00.20.0000 - Distrik Suru-Suru
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Distrik Unir Sirau	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik (%)	50,48	50,48	53,53	3.277.738.107,000	56,59	3.302.738.107,000	59,64	3.327.738.107,000	62,7	3.352.738.107,000	65,75	3.377.738.107,000	7.01.0.00.0.00.23.0000 - Distrik Unir Sirau
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.050.350.750,000		1.092.350.750,000		1.132.350.750,000		1.172.350.750,000		1.212.350.750,000	
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Agats	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	0	0,77	10.000.000,000	1,54	20.000.000,000	2,31	30.000.000,000	3,08	40.000.000,000	3,85	50.000.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Distrik Agats
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Joutu	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	0	0,77	70.000.000,000	1,54	72.000.000,000	2,31	74.000.000,000	3,08	76.000.000,000	3,85	78.000.000,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Distrik Joutu
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Koroway Bulanop	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	0	0,77	45.000.000,000	1,54	47.000.000,000	2,31	49.000.000,000	3,08	51.000.000,000	3,85	53.000.000,000	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Distrik Koroway Bulanop
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di	Indeks pelayanan publikk (Indeks)	100	100	100	45.000.000,000	100	49.000.000,000	100	51.000.000,000	100	53.000.000,000	100	55.000.000,000	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Distrik Pulau Tiga



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Distrik Pulau Tiga														
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Sor Ep	Indeks pelayanan publikk (Indeks)	0	0	0,77	45.000.000,000	1,54	47.000.000,000	2,31	49.000.000,000	3,08	51.000.000,000	3,85	53.000.000,000	7.01.0.00.0.00.25.0000 - Distrik Sor Ep
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik tomor birif	Indeks pelayanan publikk (Indeks)	100	100	100	45.000.000,000	100	47.000.000,000	100	49.000.000,000	100	51.000.000,000	100	53.000.000,000	7.01.0.00.0.00.24.0000 - Distrik Tomor Birif
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Atsj	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	0	0,77	45.000.000,000	1,54	47.000.000,000	2,31	49.000.000,000	3,08	51.000.000,000	3,85	53.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Distrik Atsj
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Akat	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	0	0,77	45.000.000,000	1,54	47.000.000,000	2,31	49.000.000,000	3,08	51.000.000,000	3,85	53.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Distrik Akat
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Awyu	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	0	0,77	45.000.000,000	1,54	47.000.000,000	2,31	49.000.000,000	3,08	51.000.000,000	3,85	53.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Distrik Awyu
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Betchbamu	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	0	0,77	45.000.000,000	1,54	47.000.000,000	2,31	49.000.000,000	3,08	51.000.000,000	3,85	53.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Distrik Betchbamu
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Joerat	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	0	0,77	45.000.000,000	1,54	47.000.000,000	2,31	49.000.000,000	3,08	51.000.000,000	3,85	53.000.000,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Distrik Joerat
Meningkatnya	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	0	0,77	36.035.075,000	1,54	36.235.075,000	2,31	36.435.075,000	3,08	36.635.075,000	3,85	36.835.075,000	7.01.0.00.0.00.22.0000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Aswi	Publik. (Indeks)													- Distrik Aswi
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Ayip	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	0	0,77	36.035.075,000	1,54	36.235.075,000	2,31	36.435.075,000	3,08	36.635.075,000	3,85	36.835.075,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Distrik Ayip
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Fayit	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	100	100	100	36.035.075,000	100	36.235.075,000	100	36.435.075,000	100	36.635.075,000	100	36.835.075,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Distrik Fayit
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Kolf Braza	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	100	100	100	36.035.075,000	100	36.235.075,000	100	36.435.075,000	100	36.635.075,000	100	36.835.075,000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Distrik Kolf Braza
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Jetsy	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	0	0,77	36.035.075,000	1,54	36.235.075,000	2,31	36.435.075,000	3,08	36.635.075,000	3,85	36.835.075,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Distrik Jetsy
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Kopay	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	0	0,77	36.035.075,000	1,54	36.235.075,000	2,31	36.435.075,000	3,08	36.635.075,000	3,85	36.835.075,000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Distrik Kopay
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Pantai Kasuari	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	0	0,77	36.035.075,000	1,54	36.235.075,000	2,31	36.435.075,000	3,08	36.635.075,000	3,85	36.835.075,000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Distrik Pantai Kasuari
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	0	0,77	36.035.075,000	1,54	36.235.075,000	2,31	36.435.075,000	3,08	36.635.075,000	3,85	36.835.075,000	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Distrik Sawa Erma



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelayanan Publik di Distrik Sawaerma														
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Sirets	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	100	100	100	36.035.075,000	100	36.235.075,000	100	36.435.075,000	100	36.635.075,000	100	36.835.075,000	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Distrik Siret
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Suru-suru	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	0	0,77	36.035.075,000	1,54	36.235.075,000	2,31	36.435.075,000	3,08	36.635.075,000	3,85	36.835.075,000	7.01.0.00.0.00.20.0000 - Distrik Suru-Suru
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Der Koumor	Indeks pelayanan publikk (Indeks)	100	100	100	45.000.000,000	100	47.000.000,000	100	49.000.000,000	100	51.000.000,000	100	53.000.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Distrik Derkomur
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Safan	Indeks pelayanan publikk (Indeks)	100	100	100	45.000.000,000	100	47.000.000,000	100	49.000.000,000	100	51.000.000,000	100	53.000.000,000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Distrik Safan
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Suator	Indeks pelayanan publikk (Indeks)	100	100	100	70.000.000,000	100	72.000.000,000	100	74.000.000,000	100	76.000.000,000	100	78.000.000,000	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Distrik Suator
Meningkatnya Efektifitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Distrik Unir Sirau	Indeks pelayanan publikk (Indeks)	100	100	100	45.000.000,000	100	47.000.000,000	100	49.000.000,000	100	51.000.000,000	100	53.000.000,000	7.01.0.00.0.00.23.0000 - Distrik Unir Sirau
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.615.207.250,030		2.752.337.499,980		2.876.337.500,020		2.992.337.499,970		3.093.337.500,010	
Meningkatnya kualitas	Persentase	100	100	100	70.000.000,000	100	75.000.000,000	100	80.000.000,000	100	95.000.000,000	100	100.000.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Der Koumor	Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)													- Distrik Derkomur
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Distrik Derkomur
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Distrik Atsj	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	100	100	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Distrik Atsj
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0000 - Distrik Atsj
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Distrik Joutu	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	100	100	100	550.000.000,000	100	555.000.000,000	100	560.000.000,000	100	565.000.000,000	100	570.000.000,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Distrik Joutu
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.11.0000 - Distrik Joutu



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)													
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Koroway Buluanop	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	100	100	100	415.000.000,000	100	415.000.000,000	100	415.000.000,000	100	415.000.000,000	100	415.000.000,000	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Distrik Koroway Buluanop
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100				100				100		
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Pulau Tiga	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100	50.000.000,000	100	55.000.000,000	100	60.000.000,000	100	65.000.000,000	100	70.000.000,000	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Distrik Pulau Tiga
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	100	100	100				100				100		
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Safan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat	100	100	100	75.000.000,000	100	87.000.000,000	100	95.000.000,000	100	125.000.000,000	100	150.000.000,000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Distrik Safan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Hukum Adat (%)													
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.16.0000 - Distrik Safan
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Sor Ep	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100	70.000.000,000	100	90.000.000,000	100	120.000.000,000	100	130.000.000,000	100	140.000.000,000	7.01.0.00.0.00.25.0000 - Distrik Sor Ep
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.25.0000 - Distrik Sor Ep
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Tomor Birif	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100	450.000.000,000	100	455.000.000,000	100	460.000.000,000	100	465.000.000,000	100	470.000.000,000	7.01.0.00.0.00.24.0000 - Distrik Tomor Birif
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.24.0000 - Distrik Tomor Birif
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan	100	100	100	32.337.500,000	100	32.337.500,000	100	32.337.500,000	100	32.337.500,000	100	32.337.500,000	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Distrik Sawa Erme



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Sawa Erma	Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)													
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.17.0000 - Distrik Sawa Erma
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Unir Sirau	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	100	100	100	20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.23.0000 - Distrik Unir Sirau
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.23.0000 - Distrik Unir Sirau
Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan Di Distrik Akat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	100	100	100	20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Distrik Akat
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0000 - Distrik Akat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Desa (LKD) (%)													
Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan di distrik awyu	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Desa Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	100	100	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Distrik Awyu
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Distrik Awyu
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Betchbamu	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Desa Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	100	100	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Distrik Betchbamu
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100				100				100		
Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan Distrik di Joerat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Desa Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	100	100	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Distrik Joerat
	Persentase	100	100	100				100				100		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)													- Distrik Joerat
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Aswi	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	100	100	100	24.666.666,670	100	29.222.222,220	100	33.777.777,780	100	38.333.333,330	100	42.888.888,890	7.01.0.00.0.00.22.0000 - Distrik Aswi
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.22.0000 - Distrik Aswi
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Ayip	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	100	100	100	24.666.666,670	100	29.222.222,220	100	33.777.777,780	100	38.333.333,330	100	42.888.888,890	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Distrik Ayip
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Distrik Ayip
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan	100	100	100	24.666.666,670	100	29.222.222,220	100	33.777.777,780	100	38.333.333,330	100	42.888.888,890	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Distrik Fayit



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				2026		2027		2028		2029		2030					
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
Fayit	Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)																
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Distrik Fayit			
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Jetsy	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat dan Desa	100	100	100	24.666.666,670	100	29.222.222,220	100	33.777.777,780	100	38.333.333,330	100	42.888.888,890	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Distrik Jetsy			
	Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)					100				100				100		100	
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100				100				100			100		100
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Kolf braza	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat dan Desa	100	100	100	24.666.666,670	100	29.222.222,220	100	33.777.777,780	100	38.333.333,330	100	42.888.888,890	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Distrik Kolf Braza			
	Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)					100				100				100		100	
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100				100				100			100		100
Meningkatnya	Persentase	100	100	100	24.666.666,670	100	29.222.222,220	100	33.777.777,780	100	38.333.333,330	100	42.888.888,890	7.01.0.00.0.00.13.0000			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Kopay	Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)													- Distrik Kopay
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.13.0000 - Distrik Kopay
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Pantai Kasuari	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	100	100	100	24.666.666,670	100	29.222.222,220	100	33.777.777,780	100	38.333.333,330	100	42.888.888,890	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Distrik Pantai Kasuari
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100		100		100		100		100		100
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Sirets	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	100	100	100	24.666.666,670	100	29.222.222,220	100	33.777.777,780	100	38.333.333,330	100	42.888.888,890	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Distrik Siret
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan	100	100	100		100		100		100		100		100



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)													
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Suru-suru	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (%)	100	100	100	24.666.666,670	100	29.222.222,220	100	33.777.777,780	100	38.333.333,330	100	42.888.888,890	7.01.0.00.0.00.20.0000 - Distrik Suru-Suru
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.20.0000 - Distrik Suru-Suru
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Agats	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (%)	100	100	100	10.869.750,000	100	50.000.000,000	100	70.000.000,000	100	70.000.000,000	100	70.000.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Distrik Agats
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0000 - Distrik Agats
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Distrik Suator	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100	550.000.000,000	100	555.000.000,000	100	560.000.000,000	100	565.000.000,000	100	570.000.000,000	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Distrik Suator
	Persentase	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.19.0000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)													- Distrik Suator
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					731.999.999,970		825.000.000,000		918.000.000,030		1.010.999.999,950		1.103.999.999,980	
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Der Kokumor	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	40.000.000,000	100	44.000.000,000	100	48.000.000,000	100	52.000.000,000	100	56.000.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Distrik Derkomur
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100				100				100		
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Joutu	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	40.000.000,000	100	44.000.000,000	100	48.000.000,000	100	52.000.000,000	100	56.000.000,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Distrik Joutu
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.11.0000 0 - Distrik Joutu
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Koroway Buluanop	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	100	30.000.000,000	7.01.0.00.0.00.21.0000 0 - Distrik Koroway Buluanop
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100				100				100		
Meningkatnya Penanganan Gangguan	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	30.000.000,000	100	34.000.000,000	100	38.000.000,000	100	42.000.000,000	100	46.000.000,000	7.01.0.00.0.00.25.0000 0 - Distrik Sor Ep
	Persentase	100	100	100				100				100		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Sor Ep	Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)													0 - Distrik Sor Ep
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di strik Tomor Birif	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	40.000.000,000	100	44.000.000,000	100	48.000.000,000	100	52.000.000,000	100	56.000.000,000	7.01.0.00.0.00.24.000 0 - Distrik Tomor Birif
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.24.000 0 - Distrik Tomor Birif
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Distrik Pulau Tiga	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	40.000.000,000	100	44.000.000,000	100	48.000.000,000	100	52.000.000,000	100	56.000.000,000	7.01.0.00.0.00.15.000 0 - Distrik Pulau Tiga
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	0	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.15.000 0 - Distrik Pulau Tiga
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Distrik Atsj	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	30.000.000,000	100	34.000.000,000	100	38.000.000,000	100	42.000.000,000	100	46.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.000 0 - Distrik Atsj
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.000 0 - Distrik Atsj
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Akat	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	20.000.000,000	100	24.000.000,000	100	28.000.000,000	100	32.000.000,000	100	36.000.000,000	7.01.0.00.0.00.03.000 0 - Distrik Akat
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.000 0 - Distrik Akat
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik distrik Awyu	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	20.000.000,000	100	24.000.000,000	100	28.000.000,000	100	32.000.000,000	100	36.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - Distrik Awyu
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.000 0 - Distrik Awyu
Meningkatnya Penanganan Gangguan	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	20.000.000,000	100	24.000.000,000	100	28.000.000,000	100	32.000.000,000	100	36.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.000 0 - Distrik Betcbamu
	Persentase	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Betchbamu	Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)													0 - Distrik Betchbamu
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Distrik Joerat	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	20.000.000,000	100	24.000.000,000	100	28.000.000,000	100	32.000.000,000	100	36.000.000,000	7.01.0.00.0.00.10.000 0 - Distrik Joerat
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.10.000 0 - Distrik Joerat
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Agats	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	29.272.727,270	100	33.000.000,000	100	36.727.272,730	100	40.454.545,450	100	44.181.818,180	7.01.0.00.0.00.01.000 0 - Distrik Agats
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.000 0 - Distrik Agats
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Aswi	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	29.272.727,270	100	33.000.000,000	100	36.727.272,730	100	40.454.545,450	100	44.181.818,180	7.01.0.00.0.00.22.000 0 - Distrik Aswi
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.22.000 0 - Distrik Aswi
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Ayip	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	29.272.727,270	100	33.000.000,000	100	36.727.272,730	100	40.454.545,450	100	44.181.818,180	7.01.0.00.0.00.05.000 0 - Distrik Ayip
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.000 0 - Distrik Ayip
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Fayit	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	29.272.727,270	100	33.000.000,000	100	36.727.272,730	100	40.454.545,450	100	44.181.818,180	7.01.0.00.0.00.08.000 0 - Distrik Fayit
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.08.000 0 - Distrik Fayit
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Jetsj	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	29.272.727,270	100	33.000.000,000	100	36.727.272,730	100	40.454.545,450	100	44.181.818,180	7.01.0.00.0.00.09.000 0 - Distrik Jetsj
	Persentase	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.09.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Jetsy	Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)													0 - Distrik Jetsy
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Kolf Braza	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	29.272.727,270	100	33.000.000,000	100	36.727.272,730	100	40.454.545,450	100	44.181.818,180	7.01.0.00.0.00.12.000 0 - Distrik Kolf Braza
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.12.000 0 - Distrik Kolf Braza
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Kopay	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	29.272.727,270	100	33.000.000,000	100	36.727.272,730	100	40.454.545,450	100	44.181.818,180	7.01.0.00.0.00.13.000 0 - Distrik Kopay
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.13.000 0 - Distrik Kopay
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Pantai Kasuari	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	29.272.727,270	100	33.000.000,000	100	36.727.272,730	100	40.454.545,450	100	44.181.818,180	7.01.0.00.0.00.14.000 0 - Distrik Pantai Kasuari
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.14.000 0 - Distrik Pantai Kasuari
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Sawaerma	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	29.272.727,270	100	33.000.000,000	100	36.727.272,730	100	40.454.545,450	100	44.181.818,180	7.01.0.00.0.00.17.000 0 - Distrik Sawa Erma
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.17.000 0 - Distrik Sawa Erma
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Sirets	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	29.272.727,270	100	33.000.000,000	100	36.727.272,730	100	40.454.545,450	100	44.181.818,180	7.01.0.00.0.00.18.000 0 - Distrik Siret
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.18.000 0 - Distrik Siret
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Suru-Suru	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	29.272.727,270	100	33.000.000,000	100	36.727.272,730	100	40.454.545,450	100	44.181.818,180	7.01.0.00.0.00.20.000 0 - Distrik Suru-Suru
	Persentase	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.20.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Suru-suru	Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)													0 - Distrik Suru-Suru
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Safan	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	20.000.000,000	100	24.000.000,000	100	28.000.000,000	100	32.000.000,000	100	36.000.000,000	7.01.0.00.0.00.16.0000 0 - Distrik Safan
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.16.0000 0 - Distrik Safan
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Suator	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	40.000.000,000	100	44.000.000,000	100	48.000.000,000	100	52.000.000,000	100	56.000.000,000	7.01.0.00.0.00.19.0000 0 - Distrik Suator
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.19.0000 0 - Distrik Suator
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di distrik Unir Sirau	Indeks Rasa Aman (Angka)	100	100	100	20.000.000,000	100	24.000.000,000	100	28.000.000,000	100	32.000.000,000	100	36.000.000,000	7.01.0.00.0.00.23.0000 0 - Distrik Unir Sirau
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.23.0000 - Distrik Unir Sirau
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					5.757.841.756,000		5.763.841.756,000		5.769.841.756,000		5.775.841.756,000		5.781.841.756,000	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Der komur	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Distrik Derkomur
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa. (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Distrik Derkomur
Meningkatnya Kualitas	Persentase	100	100	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	7.01.0.00.0.00.11.0000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Distrik Joutu	Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya. (%)													- Distrik Joutu
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	100	100	100				100				100		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Distrik Koroway Buluanop	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	228.035.000,000	100	230.035.000,000	100	232.035.000,000	100	234.035.000,000	100	236.035.000,000	7.01.0.00.0.00.21.0000 - Distrik Koroway Buluanop
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	100	100	100				100				100		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Pulau Tiga	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Distrik Pulau Tiga
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	100	100	100				100				100		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Safan	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Distrik Safan
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	100	100	100				100				100		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Distrik Sor Ep	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	400.073.906,000	100	400.073.906,000	100	400.073.906,000	100	400.073.906,000	100	400.073.906,000	7.01.0.00.0.00.25.0000 - Distrik Sor Ep
	Persentase	100	100	100				100				100		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Fasilitas Tata Kelola Desa. (%)													- Distrik Sor Ep
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Distrik Tomor Birif	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	205.668.875,000	100	207.668.875,000	100	209.668.875,000	100	211.668.875,000	100	213.668.875,000	7.01.0.00.0.00.24.0000 - Distrik Tomor Birif
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	100	100	100				100				100		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Distrik Agats	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Distrik Agats
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	100	100	100				100				100		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Distrik Atsj	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya. (%)	100	100	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Distrik Atsj
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	100	100	100				100				100		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Distrik Siret	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	7.01.0.00.0.00.18.0000 - Distrik Siret
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	100	100	100				100				100		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD	100	100	100	352.780.000,000	100	354.780.000,000	100	356.780.000,000	100	358.780.000,000	100	360.780.000,000	7.01.0.00.0.00.19.0000 - Distrik Suator



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemerintahan Desa di Distrik Suator	yang Ditingkatkan Kapasitasnya. (%)													
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa. (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.19.0000 - Distrik Suator
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Aswi	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	208.078.500,000	100	208.078.500,000	100	208.078.500,000	100	208.078.500,000	100	208.078.500,000	7.01.0.00.0.00.22.0000 - Distrik Aswi
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.22.0000 - Distrik Aswi
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik ayip	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	100.360.000,000	100	100.360.000,000	100	100.360.000,000	100	100.360.000,000	100	100.360.000,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Distrik Ayip
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Distrik Ayip
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Suru-Suru	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	335.605.000,000	100	335.605.000,000	100	335.605.000,000	100	335.605.000,000	100	335.605.000,000	7.01.0.00.0.00.20.0000 - Distrik Suru-Suru
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.20.0000 - Distrik Suru-Suru
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Sawa Erma	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	100	100	100	257.430.000,000	100	257.430.000,000	100	257.430.000,000	100	257.430.000,000	100	257.430.000,000	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Distrik Sawa Erma
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD	100	100	100	115.428.750,000	100	115.428.750,000	100	115.428.750,000	100	115.428.750,000	100	115.428.750,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Distrik Akat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemerintahan Desa Di Distrik Akat	yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)													
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0000 - Distrik Akat
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Unir Sirau	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	115.428.750,000	100	115.428.750,000	100	115.428.750,000	100	115.428.750,000	100	115.428.750,000	7.01.0.00.0.00.23.0000 - Distrik Unir Sirau
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.23.0000 - Distrik Unir Sirau
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Awyu	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	115.428.750,000	100	115.428.750,000	100	115.428.750,000	100	115.428.750,000	100	115.428.750,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Distrik Awyu
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Distrik Awyu
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Betchbamu	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	115.428.750,000	100	115.428.750,000	100	115.428.750,000	100	115.428.750,000	100	115.428.750,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Distrik Betchbamu
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0000 - Distrik Betchbamu
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Joerat	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	115.428.750,000	100	115.428.750,000	100	115.428.750,000	100	115.428.750,000	100	115.428.750,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Distrik Joerat
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.10.0000 - Distrik Joerat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Distrik Fayit	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya. (%)	100	100	100	273.058.485,000	100	273.058.485,000	100	273.058.485,000	100	273.058.485,000	100	273.058.485,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Distrik Fayit
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa. (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Distrik Fayit
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Distrik Jetsy	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya. (%)	100	100	100	406.340.740,000	100	406.340.740,000	100	406.340.740,000	100	406.340.740,000	100	406.340.740,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Distrik Jetsy
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa. (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.09.0000 - Distrik Jetsy
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Distrik Kolf Braza	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya. (%)	100	100	100	294.295.000,000	100	294.295.000,000	100	294.295.000,000	100	294.295.000,000	100	294.295.000,000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Distrik Kolf Braza
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa. (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.12.0000 - Distrik Kolf Braza
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Distrik Kopay	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya. (%)	100	100	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Distrik Kopay
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa. (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.13.0000 - Distrik Kopay
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Distrik Pantai Kasuari	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya. (%)	100	100	100	118.972.500,000	100	118.972.500,000	100	118.972.500,000	100	118.972.500,000	100	118.972.500,000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Distrik Pantai Kasuari



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa. (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.14.0000 - Distrik Pantai Kasuari
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					12.392.199.300,000		12.496.782.290,000		12.600.177.024,000		12.700.453.930,000		12.802.133.739,000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.340.000.000,000		6.353.800.000,000		6.365.050.000,000		6.371.800.000,000		6.378.550.000,000	
Meningkatnya layanan administrasi penunjang Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Nilai)	79	80,20	81	6.340.000.000,000	82,50	6.353.800.000,000	83,75	6.365.050.000,000	85	6.371.800.000,000	87,50	6.378.550.000,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.415.000.000,000		1.436.225.000,000		1.457.768.375,000		1.479.634.901,000		1.501.829.424,000	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	60	65	70	1.415.000.000,000	75	1.436.225.000,000	80	1.457.768.375,000	85	1.479.634.901,000	90	1.501.829.424,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN					3.062.199.300,000		3.108.132.290,000		3.154.754.274,000		3.202.075.588,000		3.250.106.722,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
MENINGKATNYA PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan PILKADA? (Angka)	90,51	90,51	90,51	3.062.199.300,000	90,53	3.108.132.290,000	90,55	3.154.754.274,000	90,58	3.202.075.588,000	90,66	3.250.106.722,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					205.000.000,000		208.075.000,000		211.196.125,000		214.364.067,000		217.579.528,000	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas (Nilai)	79	79,30	79,50	205.000.000,000	80,00	208.075.000,000	80,50	211.196.125,000	81,00	214.364.067,000	81,50	217.579.528,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	11,06	11,07	11,09		11,10		11,15		11,17		11,20		8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					470.000.000,000		477.050.000,000		484.205.750,000		491.468.836,000		498.840.869,000	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	70	70,25	70,50	470.000.000,000	80,25	477.050.000,000	80,50	484.205.750,000	80,75	491.468.836,000	80,10	498.840.869,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)													
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					900.000.000,000		913.500.000,000		927.202.500,000		941.110.538,000		955.227.196,000	
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	70	75	77	900.000.000,000	80	913.500.000,000	85	927.202.500,000	87	941.110.538,000	90	955.227.196,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.771.970.658.369,120		1.846.651.528.074,040		1.906.054.319.721,080		1.967.002.660.636,340		2.028.901.056.220,590	



4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Asmat 2025-2029

Penetapan indikator penyelenggaraan pembangunan daerah bertujuan dalam upaya memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Asmat tahun 2025 – 2029. Keberhasilan pencapaian visi dan misi ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah dihasilkan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah setelah program prioritas ditetapkan dan dilaksanakan. Adapun Indikator Kinerja Pembangunan di Kabupaten Asmat, sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Indikator Makro Pembangunan

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Modal Manusia (IPM)	58,59	59,5	60,42	61,34	62,25	62,52
Persentase Penduduk Miskin	24,67	24,67	24,52	24,37	24,22	24,07
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,05	2,02	1,92	1,82	1,72	1,62
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,80	5,70	5,60	5,50	5,50	5,50
PDRB per kapita ADHB (Rp. Juta)	31,29	33	34,71	36,42	38,13	39,13
Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,23

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	13,1	26,2	39,3	52,4	65,5
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	27,43	29,46	31,49	33,52	35,55
3.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	%	10,12	20,24	30,36	40,48	50,6
4.	Tingkat keamanan wilayah	%	56,21	57,22	58,23	59,24	59,24
5.	Persentase Penduduk Miskin	%	24,67	24,52	24,37	24,22	24,07
6.	Indeks Modal Manusia (IPM)	Indeks	59,5	60,42	61,34	62,25	62,52
7.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Angka	76.20-81	77.40-82	78.60-83	79.80-84	81-85
8.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	5	7	9	10	10
9.	Persentase Desa Mandiri	%	1	1	1	1	1
10.	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh))	%	29,53	29,96	30,39	30,82	31,25
11.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	1,16	1,18	1,20	1,22	1,22
12.	Tingkat Inflasi Pendalaman/Inter mediasi Sektor Keuangan	%	2	2	2	2	2
13.	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	124	119	114	109	104
14.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	1,32	1,43	1,53	1,64	1,74



16.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	16,44	32,88	49,32	65,76	82,2
17.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	4	8	12	16	20
18.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,92	1,82	1,72	1,62	1,52
19.	Indeks Investasi Daerah (Ekonomi Kreatif)	Angka	4,5	9	13,5	18	22,5
20.	Indeks demokrasi Indonesia	Indeks	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
21.	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantapp	%	22,6	23,2	23,8	24,4	25
22.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	44,04	42,41	40,78	39,15	38,15
23.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	0,77	1,54	2,31	3,08	3,08
24.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	22,4	19,6	17,7	1,9	11,3
25.	Persentase Pelabuhan dalam kondisi mantapp	%	20	24	28	35	36
26.	Indeks Integritas Nasional	Persentase	58,21	57,72	57,23	56,74	56,74
27.	Indeks persepsi korupsi	Indeks	55	58	61	64	67
28.	Persentase Bandara dalam kondisi mantapp	%	10,07	20,13	30,2	40,26	50,33
29.	Cakupan wilayah (kampung) yang memiliki akses sinyal internet	%	10,44	20,88	31,32	41,76	52,2
30.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	122,78	120,41	118,04	115,67	113,3
31.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	53,53	56,59	59,64	62,70	65,75



Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Daerah Dan Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
INDIKATOR KINERJA DAERAH									
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	0	0	0	0,10	0,15	0,20	0,25
2	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	125,15	125,15	122,78	120,41	118,04	115,67	113,3
3	Indeks Keanekaragaman Hayati	Angka	0	0	0	0,10	0,15	0,20	0,25
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Literasi Membaca (Kab/kota)	%	9,00	9.00-11.05	12.44-14.49	15.89-17.93	19.33-21.37	22.78-24.81	26.22-28.25
2	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	5	5	5	7	9	10	10
3	Persentase Penduduk Miskin	%	24,67	24,67	24,52	24,37	24,22	24,07	23,8
4	Persentase Desa Mandiri	%	1	1	1	1	1	1	1
5	Tingkat keamanan wilayah	%	55,2	55,2	56,21	57,22	58,23	59,24	59,24
6	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	129	129	124	119	114	109	104
7	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	(%)	0	0	13,56	27,12	40,68	54,24	54,24
8	Numerasi (kab/kota)	%	0,00	0.00-10.22	5.24-13.83	10.49-17.43	15.73-21.04	20.98-24.64	26.23-29.89
9	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	0	0	16,44	32,88	49,32	65,76	65,76
10	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	17	17	17,4	17,8	18,2	18,6	19
12	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment))	%	37,04	-353,367	-355,867	-358,367	-360,867	-363,367	-366,067
13	Indeks demokrasi Indonesia	Indeks	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
14	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun	%	6,88	6,88	6,93	6,98	7,03	7,08	7,13
15	Indeks Ekonomi Biru	%	24,6	24,6	26,82	27,25	28,88	30,23	30,23
16	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%))	%	28,3	24,5	22,4	19,6	17,7	14,9	11,03
17	Harapan Lama Sekolah	%	6,88	6,88	6,93	6,98	7,03	7,08	7,13
18	Cakupan penemuan dan pengobatan	%	93	93	93,8	94,6	95,4	96,2	97



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)								
19	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatmentsuccess rate) (%)	%	95	95	95,8	96,6	97,4	98,2	99
20	Indeks Modal Manusia (IPM)	Indeks	57,63	58,59	59,5	60,42	61,34	62,25	62,52
21	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	20	20	20	25	25	30	30
22	Cakupan kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malariaa	%	80,22	80,22	79.226	78.232	77.238	76.244	75,25
23	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	30	30	30	35	35	35	35
24	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
25	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,05	2,02	1,92	1,82	1,72	1,62	1,52
26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	77,83	77,11	78,37	79,63	80,89	82,15	83,15
27	Persentase Pelabuhan dalam kondisi mantapp	%	16	16	20	24	28	35	36
28	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	58,47	58,47	57,82	57,16	56,51	55,85	55,2
29	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Pada Distrik	%	50,48	50,48	53,53	56,59	59,64	62,7	65,75
30	Tingkat Kemiskinan	(%)	0	25,54	24,52	23,5	22,48	21,46	21,48
31	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	50,48	50,48	53,53	56,59	59,64	62,70	65,75
32	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap Melalui Pelatihan Dan Penempatan	Angka	100	100	100	100	100	100	100
33	Persentase Koperasi Aktif Dan Berkinerja Sehat	%	1,6	1,6	2,5	3,4	4,3	5,2	5,2
34	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Usaha Dan Naik Kelas	Angka	100	100	120	140	160	180	180
35	Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi	Angka	0	0	0	0	0	0	0
36	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	Persentase	-	-	10	15	15	15	15
37	Persentase BUM Desa Maju	Persentase	-	-	10	15	15	15	15
38	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	-	-	10	15	15	15	15



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
39	Persentase Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan	%	0	0	0	0	0	0	0
40	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	Desa	-	-	10	15	15	15	15
41	Persentase Keluarga Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	55	55	55	55	57	58	60
42	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa (LKD)	%	100	100	100	100	100	100	100
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	(%)	0	0	9,25	18,5	27,75	37	46,25
2	Indeks Peradaban Pelestraian Budaya (OAP)	%	0	0	4,78	9,56	14,33	19,11	23,89
3	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Angka	75	75-80	76.20-81	77.40-82	78.60-83	79.80-84	79.80-84
4	Tingkat Inflasi Pendalaman/Inter mediasi Sektor Keuangan	%	2	2	2	2	2	2	2
5	Inklusi Keuangan	(%)	0	0	16,09	32,18	48,27	64,36	80,45
6	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh))	%	29,1	29,1	29,53	29,96	30,39	30,82	31,25
7	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	0	0	13,1	26,2	39,3	52,4	65,5
8	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0	0	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20
9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	2	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4
10	Total Kredit/PDRB	(%)	0	0	3,24	6,48	972	12,96	16,2
11	Aset Dana Pensiun/PDRB	(%)	0,04	0,04	0,44	0,48	0,52	0,56	0,60
12	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	1,08	1,08	1	0,92	0,85	0,77	0,66
13	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	(%)	11,65	11,65	12,82	13,99	15,16	16,33	17,5
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	79,46	79,62	79,62	79,77	79,93	80,09	80,09
15	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29
16	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan))	%	65,16	65,16	69,09	72,91	76,8	80,67	84,55
17	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar))	%	0	0	17	34	51	68	85
18	Jumlah Wisatawan Berbintang) orang)	%	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,27	0,29



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	%	0	0	11,32	22,64	33,96	45,28	56,6
20	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	%	0	0	10,12	20,24	30,36	40,48	50,6
21	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	%	0	0	0,24	0,48	0,72	0,96	1,2
22	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB-	%	0	0	4,41	8,82	13,23	17,64	22,05
23	Indeks Investasi Daerah (Ekonomi Kreatif))	Angka	0	0	4,5	9	13,5	18	22,5
24	Return on Aset (ROA) BUMD-	%	0	0	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70
25	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	%	1,14	1,08	1	0,92	0,85	0,77	0,66
26	Cakupan wilayah (kampung) dengan akses jaringan telepon/ selulerr	%	47,2	47,2	47,8	48,41	49,01	49,62	50,22
27	Cakupan wilayah (kampung) yang memiliki akses sinyal internet	%	0	0	10,44	20,88	31,32	41,76	52,2
28	Iptek dan Inovasi (% PDRB Pertanian)	%	0	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3
29	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB))	%	47,04	45,68	44,04	42,41	40,78	39,15	38,15
30	Proporsi Kontribusi PDRB terhadap Nasional (%)	%	0,0155	0,0157	0,0160	0,0162	0,0164	0,0166	0,0170
31	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-77,53	-74,29	-71,56	-68,83	-66,1	-63,37	-60,37
32	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE)	Indeks	1,03	1,22	1,32	1,43	1,53	1,64	1,74
33	Promosi Potensi Daerah dan Kemudahan Berinvestasi dalam Pengendalian Penanaman Modal	Indeks	0	18,20	19,00	21,09	21,58	22,17	23,50
34	Persentase Tingkat Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100
35	Cakupan kepesertaan jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	%	0	0	5,11	10,22	15,33	20,44	20,44
36	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	0	3	5,25	7,11	7,76	8,08	10,51
37	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditiadakanlanjuti	Persentase	0	5,82	6,08	7,11	7,90	8,16	8,89
38	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	10	10	15,09	16,75	17,21	18,00	18,20
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	25,4	25,4	27,43	29,46	31,49	33,52	35,55



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Indeks Integritas Nasional	Persentase	58,7	58,7	58,21	57,72	57,23	56,74	56,74
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	1,03	1,22	1,32	1,43	1,53	1,64	1,74
4	Indeks persepsi korupsi	Indeks	52	52	55	58	61	64	67
5	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	25,2	25,2	25,98	26,77	27,55	28,34	28,34
6	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	0	0	0,77	1,54	2,31	3,08	3,85
7	Kapasitas Air Baku	(%)	0	0	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75
8	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	21,17	0	5	10	15	20	25
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	0	1,14	1,16	1,18	1,20	1,22	1,24
10	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	0	0	4	8	12	16	20
11	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantapp	%	22	22	22,6	23,2	23,8	24,4	25
12	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	47,52	47,52	48,02	48,51	49,01	49,5	50
13	Cakupan wilayah (kampung) yang dapat diakses jaringan dan layanan transportasi darat/laut/udara	%	0	0	5,45	10,9	16,34	21,79	27,24
14	Persentase Bandara dalam kondisi mantapp	%	0	0	10,07	20,13	30,2	40,26	50,33
15	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintahan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya	Persentase	12	25	28	30	36	42	50
17	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
18	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Kinerja	70	B	B	B	B	BB	BB
19	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Tertib Administrasi OPD	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
21	Persentase Data Penanaman Modal	%	11,37	11,90	15,05	15,40	16,20	17,39	17,50



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dan Perizinan yang akurat dan terverifikasi								
22	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100
23	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	%	63,22	70,52	71,39	72,66	73,52	74,89	75,05
24	Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang Melalui Bandara	%	92,50	93,75	94,68	95,57	96,25	97,70	98,12
25	Indeks pelayanan publikk	Indeks	0	0	0,77	1,54	2,31	3,08	3,85
26	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%	47,52	47,52	48,02	48,51	49,01	49,5	50
27	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampahh	%	0	0	2	4	6	8	10
28	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan PILKADA	Angka	90,51	90,51	90,51	90,53	90,55	90,58	90,66
29	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	15,07	18,23	23,71	25,10	26,08	27,22	30,18
30	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	7,18	8,00	8,29	9,16	9,71	10,05	11
31	Persentase Bandara dalam kondisi mantap	%	n/a	50,3	50,3	55,2	55,2	65,5	65,5
32	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	10,21	11,06	13,00	14,29	15,12	16,00	16,10
33	Cakupan wilayah (kampung) yang dapat diakses jaringan dan layanan transportasi darat/laut/udara	%	n/a	27,2	40,5	55,1	62,1	62,1	62,1
34	Persentase Layanan Transportasi Darat, Laut dan Udara	%	8,20	9,50	10,00	10,17	11,10	11,75	12,30
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	Kemampuan Numerasi Sekolah Mengah Atas (SMA)	Angka	34,82	49,63	50,26	50,61	50,85	51,27	51,64
2	Persentase Guru yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	%	65,26	65,70	66,34	66,85	67,25	67,74	68,20
3	Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (SD)	Angka	44,25	53,50	53,86	54,06	54,43	54,82	55,15
4	Kemampuan Literasi Sekolah Mengah	Angka	46,68	58,88	56,06	56,38	56,76	56,93	5.713



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pertama (SMP)								
5	Kemampuan Literasi Sekolah Mengah Atas (SMA)	Angka	32,96	49,41	49,75	49,93	50,18	50,36	50,74
6	Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (SD)	Angka	46,21	52,64	53,84	54,28	54,62	54,85	55,26
7	Kemampuan Numerasi Sekolah Mengah Pertama (SMP)	Angka	47,18	58,04	58,65	59,18	59,82	60,25	60,45
8	Angka Partispasi Murni SD/MI/Paket A	%	82,09	83,69	84,28	84,87	85,32	85,76	85,95
9	Angka Partispasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C	%	48,21	48,72	49,32	50,46	51,62	51,92	52,17
10	Meningkatnya Partisipasi anak usia sekolah	%	5.329	5.274	5.317	53,32	54,56	55,85	56,14
11	Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekurang kurangnya D-IV / S1	Angka	46,03	55,27	55,84	56,21	56,62	56,93	57,23
12	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/PAKET B	%	54,05	54,85	55,12	55,86	56,52	56,85	57,18
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	-	50,48	53,53	56,59	59,64	62,07	65,75
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	27,87	9,80	14,70	15,50	18,50	20,00	21,50
2	Rasio Bangunan Bersertifikat Layak Fungsi	Angka	76,00	10,50	12,50	13,50	17,50	21,50	24,50
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	14,68	14,50	15,50	15,80	17,20	17,50	19,50
4	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	92,33	10,50	12,50	15,50	17,50	21,50	22,50
5	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	14,10	14,50	15,00	15,50	17,00	17,30	20,00
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	21,17	0	5	10	15	20	25
7	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Persentase	18,05	12,50	13,50	15,00	17,50	18,00	19,50
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Persentase	40,75	15,73	15,82	16,62	16,72	17,44	17,67



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	(%)	10,25	15,62	16,54	16,55	17,03	17,11	17,15
3	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase	14,65	16,38	16,52	16,61	16,63	16,67	17,19
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	0	0	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	0	30	30	35	35	36	40
4	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	0	0	100	100	100	100	100
5	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	79,50	80	82	85	87	88	90
6	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	0	0	100	100	100	100	100
7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	0	0	100	100	100	100	100
8	Persentase penanganan pra bencana	%	0	0	100	100	100	100	100
9	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	0	0	100	100	100	100	100
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
1	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Angka	0	0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Indeks	50	50	50	60	60	70	80
2	Rasio Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	50	50	50	50	60	60	70
3	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	50	50	50	50	60	60	70
4	Presentase Koeban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	50	50	50	50	60	60	70
5	Presentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	50	50	50	50	60	60	70
6	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	50	50	50	50	60	60	70
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
1	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	67,8	73,2	78,6	83,9	89,3	94,6	100
2	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90	90	90	90	95	95	95
3	Persentase cadangan pangan	%	50	55	60	65	70	75	80
4	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	40	35	32	29	26	22	18
AJ	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase Desa Mandiri (%)	%	-	-	10	15	15	15	15
2	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
AK	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Presentase Pembinaan Keluarga Berencana	%	50	50	50	51	57	58	60
2	Persentase Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi	%	50	50	50	51	55	55	60
3	Anaka Kelahiran Total	Anaka	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.4



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Angka Prevelensi Kb Modern	Angka	50	50	50	51	55	55	60
5	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun	Angka	8	8	9	9	9	10	10
6	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan dan Pelatihan	%	55	55	55	55	57	58	60
AL	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
1	Persentase Distrik atau Kampung yang Dapat Diakses Layanan Transportasi Laut	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Konektivitas Darat	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
4	Konektivitas Laut	Unit	100	100	100	100	100	100	100
AM	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan / atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	100	100	100	100	100	100	100
AN	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
1	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
AO	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
1	Persentase Capaian Kepuasan masyarakat dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	%	0	31,50	32,16	32,80	33,35	40,05	40,50
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	10,08	11,73	12,20	13,00	13,49	14,18	15,31
AP	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Persentase Pemuda yang Aktif Dalam Berorganisasi	%	20	20	20	25	25	30	30
2	Persentase Prestasi Olahraga	%	30	30	30	35	35	35	35
3	Persentase yang Ikut Serta Kepramukaan	%	20	20	20	25	25	30	30
AQ	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	%	1	2	2,6	3	3,2	3,5	3,7



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
AR	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Masa Pemerintahan Daerah	%	0,00	13,07	13,62	14,16	14,71	15,25	15,80
AS	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
1	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	0,00	0,00	100	100	100	100	100
2	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi dibidang Kebudayaan	%	0	0	15	36	40,35	65,30	77,07
3	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	0	0	16,66	24,46	49,66	53,15	60
AT	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	36,76	48,85	50,12	52,32	55	58	60
2	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	%	50,91	51,98	52	52,32	52,50	53,59	54,26
3	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	10	10,27	11,09	12,30	13,17	13,90	14,20
AU	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	8,10	9,68	10,11	10,78	11,24	12,07	12,50
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	10	12	15	17	20	23	25
AV	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	15.673,02	14.051,43	14.332,46	14.619,11	14.765,30	14.912,96	15.057,98
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	130,80	131,05	128,20	131,25	131,98	133,02	134,06
3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	49,68	50,20	50,80	51,45	52,25	53,20	54,35
4	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Kelompok Perikanan Budidaya yang Dibina	%	96,27	96,87	97,34	97,86	98,14	98,55	99,10
6	Persentase Kelompok Perikanan Tangkap yang Dibina	%	96,27	96,87	97,34	97,86	98,14	98,55	99,10
7	Jumlah Usaha Perikanan yang Diawasi	Angka	9	10	11	13	14	15	16
8	Persentase Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yang Disediakan	%	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Persentase Sarana Prasarana Perikanan Tangkap yang Disediakan	%	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00
AW	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
1	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39
2	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	0	0	32,05	53,06	60,15	63,15	70,10
3	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang)	%	2,12	2,50	3,67	5,13	7,54	9,00	10,19
AX	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
1	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Angka	74,40	77,00	80,25	82,50	85,00	87,50	90,10
2	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	0,01	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12
3	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	0,20	0,25	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20
4	Persentase kelembagaan petani yang dibentuk	%	50	60	65	70	80	90	100
5	Persentase Unit Usaha Hewan Yang Dibina	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	2,50	3,50	4,75	6,12	7,90	9,00	10,20
AY	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
1	Persentase Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	0	0	0	0	0	0	0
2	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	0	0	89,5	90,5	91,5	92,5	92,5
AZ	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
1	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	0	0	1	1	1	1	1
BA	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
1	Persentase Program Transmigrasi Yang Dilaksanakan	%	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
BB	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH								
1	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	64,02	70,52	71,39	72,66	73,52	74,89	75,39
2	Nilai Hasil LKJP (SAKIP)	Angka	72,30	72,78	73,19	73,49	74,36	74,89	75,05
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,03	1,22	1,32	1,43	1,53	1,64	1,74



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Indeks Reformasi Birokrasi	%	25,4	25,4	27,43	29,46	31,49	33,52	35,55
BC	5.01 - PERENCANAAN								
1	Persentase Capaian Pembangunan Manusia dan Perekonomian	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Capaian Indikator Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
BD	5.03 - KEPEGAWAIAN								
1	Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	42	50	56	60	71	72	73
BE	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase Hasil kajian kelitbangan yang diimplementasikan dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	-	35	35,2	35,4	35,6	35,8	36
3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	-	7,7	8,1	8,3	8,5	8,7	8,9
BF	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH								
1	Indeks integritas nasional	Indeks	58,7	58,7	58,21	57,72	57,23	56,74	56,74
BG	7.01 - KECAMATAN								
1	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan								
7	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
14	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
16	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
17	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
18	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
19	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pemerintahan								
21	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
22	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
23	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
24	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
25	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
26	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
27	Meningkatnya mutu kualitas pelayanan Distrik dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100
28	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
29	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
30	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
31	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
32	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
33	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
34	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
35	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
36	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
37	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
38	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
39	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
40	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
41	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
42	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
43	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
44	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
45	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
46	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
47	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
48	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
49	Optimalisasi pembinaan dan	%	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	pengawasan Distrik								
50	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
51	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
52	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
53	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
54	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
55	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
56	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
57	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
58	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
59	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
60	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
61	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
62	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
63	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan	%	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Distrik								
64	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
65	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
66	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
67	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
68	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
69	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
70	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
71	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
72	Meningkatnya partisipasi Lembaga dan masyarakat dalam proses MUSREMBANG Kampung	%	100	100	100	100	100	100	100
73	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
74	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
75	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
76	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
77	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
78	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
79	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
80	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
81	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
82	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
83	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
84	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
85	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
86	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
87	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
88	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
89	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
90	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
91	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
92	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
93	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
94	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
95	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
96	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
97	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
98	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
99	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
100	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
101	Nilai LAKIP	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
102	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
103	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
104	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
105	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
106	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
107	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
108	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
109	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
110	Meningkatnya kenyamanan	%	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Lingkungan								
111	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
112	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
113	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
114	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
115	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
116	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
117	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
118	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
119	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
120	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
121	Meningkatnya kenyamanan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
122	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
123	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Distrik	%	100	100	100	100	100	100	100
124	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya.	%	100	100	100	100	100	100	100
125	Indeks pelayanan publik	Indeks	100	100	100	100	100	100	100
BH	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	70	75	77	80	85	87	90
2	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	60	65	70	75	80	85	90
3	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	79	80,20	81	82,50	83,75	85	87,50



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	70	70,25	70,50	80,25	80,50	80,75	80,10
5	Indeks Kinerja Ormas	Nilai	79	79,30	79,50	80,00	80,50	81,00	81,50
6	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	11,06	11,07	11,09	11,10	11,15	11,17	11,20



BAB V

P E N U T U P

5.1. Hasil Reviu APIP Terhadap RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam pelaksanaan reviu, serangkaian aktivitas untuk menguji proses penyusunan penyajian bab - bab dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

Berdasarkan hasil reviu maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan RPJMD 2025-2029 Kabupaten Asmat telah didukung dengan dokumen lainnya yang memadai.
- b. Misi dalam RPJMD 2025-2029 telah selaras dengan misi/sasaran pokok pada Perda RPJPD 2025-2045 Kabupaten Asmat.
- c. Penilaian keterhubungan dan kesesuaian Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah telah dimuat Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah dan telah menunjang Sasaran pada RPJMD 2025-2029 Kabupaten Asmat.
- d. Penilaian konsistensi antar Bab III dan Bab IV dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Asmat telah sepenuhnya konsisten dan selaras dengan sasaran pada RPJMD 2025-2029 Kabupaten Asmat.
- e. Program Prioritas Jangka Menengah Nasional pada RPJMN 2025-2029 telah sepenuhnya sesuai dengan Program Prioritas RPJMD 2025-2029 Kabupaten Asmat.
- f. Pengujian atas keselarasan antara arah kebijakan umum daerah dokumen RPJMD 2025-2029 Kabupaten Asmat dengan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 telah selaras sesuai agenda pembangunan nasional pada RPJMN 2025-2029.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan pelaksanaan peraturan dan program-program pembangunan daerah guna menciptakan kondisi tata kelola pemerintahan yang baik dan berkesinambungan.

1. Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban menyebarluaskan RPJMD Kabupaten Asmat guna mendapat masukan dalam forum musrenbang dan forum- forum pembangunan lainnya yang melibatkan seluruh stake holder;
2. RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 memuat antara lain masalah-masalah pembangunan dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih guna dibahas dalam forum perencanaan;



3. Dokumen RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Renstra OPD Tahun 2025-2029, dimana Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah melalui proses pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil RPJMD sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

5.3. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan dalam proses perencanaan pembangunan maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

- 1) Bupati dan Wakil Bupati melalui Sekertaris Daerah, berkewajiban mengeluarkan Surat Edaran Perihal Penyusunan Renstra OPD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029;
- 2) Seluruh Perangkat Daerah/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten ASmat menyusun Renstra-PD Tahun 2025-2029 sesuai ketentuan jadwal yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan orientasi penyusunan Renstra OPD Tahun 2025-2029 yang simultan dengan RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029;
- 3) Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra-PD yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2025- 2029; dan
- 4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Asmat berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat.

5.4. Penutup

RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kaidah pelaksanaannya yang harus dilaksanakan secara konsisten yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

